



PEMERINTAH
KABUPATEN BARRU

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025



BUPATI BARRU
Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si



WAKIL BUPATI BARRU
Dr. Ir. Abustan Andi Bintang, M.Si



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga segala tugas-tugas yang diembankan kepada kami dapat berjalan dengan lancar dan dilaksanakan dengan baik hingga saat ini. Dengan berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2025, kami selaku Bupati melakukan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2025.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 ini disusun dalam rangka memenuhi kewajiban Bupati Barru sebagaimana amanat dari Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang mewajibkan Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini diharapkan dapat memberikan gambaran keadaan dan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Barru tahun 2025. Selain itu, laporan ini merupakan wujud



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Barru dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Dalam penyusunan LPPD Tahun Anggaran 2025 ini tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun senantiasa kami harapkan untuk perbaikan atau penyempurnaan laporan. Akhirnya, kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.

Barru, 11 Maret 2026

BUPATI BARRU,



INA KARTIKA SARI



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	X
BAB I PENDAHULUAN	1

1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum	1
a. Dasar Hukum	2
b. Kondisi Geografis Daerah	4
c. Jumlah Penduduk	5
d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	5
e. Jumlah Perangkat Daerah, Unikt Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah	6
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	9
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	23
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	23
b. Visi dan Misi Kepala Daerah	29
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	36
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	45
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	48
1.1.3.1 Dasar Hukum	49
1.1.3.2 Kebijakan Umum	51

BAB II PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	79



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

2.1 Capaian Kinerja Makro	79
2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia	79
2.1.2 Angka Kemiskinan	84
2.1.3 Angka Pengangguran	85
2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi	86
2.1.5 Pendapatan Per Kapita	87
2.1.6 Ketimpangan Pendapatan/Indeks Gini	88
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan	
Pemerintahan.....	90
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil	92
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang	
Urusan Pemerintahan	98
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	104

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS

PEMBANTUAN	348
3.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	349
3.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan.....	349
3.3 Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan.....	350
3.3.1 Target Kinerja	350
3.3.2 Realisasi	351
3.4 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh	
Daerah Kabupaten/Kota Tugas Pembantuan dari Daerah	
Provinsi yang Ditugaskan Kepada Daerah kabupaten/	
Kota	353
3.5 Permasalahan dan Kendala	353
3.6 Sasaran dan Tidak Lanjut	354



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

BAB IV PENCAPAIAN SPM	356
4.1 Bidang urusan Pendidikan	356
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan	356
4.1.2 Target Capaian SPM Oleh Daerah Urusan Pendidikan	356
4.1.3 Hasil Capaian Urusan Pendidikan	359
4.1.4 Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan	359
4.1.5 Dukungan Personil Urusan Pendidikan	360
4.1.6 Kendala Permasalahan dan Solusi Urusan Pendidikan	361
4.2 Bidang Urusan Kesehatan	363
4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan	363
4.2.2 Target Capaian SPM Oleh Daerah Urusan Kesehatan	363
4.2.3 Hasil Capaian Urusan Kesehatan	374
4.2.4 Anggaran Urusan Kesehatan	379
4.2.5 Dukungan Personal Urusan Kesehatan	379
4.2.6 Kendala Permasalahan dan Solusi Urusan Kesehatan	380
4.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum	380
4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum	380
4.3.2 Target Capaian SPM Oleh Daerah Urusan Pekerjaan Umum	381
4.3.3 Hasil Capaian Urusan Pekerjaan Umum	381
4.3.4 Alokasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum.....	382



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

4.3.5 Dukungan Personil Urusan Pekerjaan Umum	382
4.3.6 Kendala Permasalahn dan Solusi Urusan Pekerjaan Umum	383
4.4 Bidang Urusan Perumahan Rakyat Dan Pemukiman	384
4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat Dan Pemukiman	384
4.4.2 Target Capaian SPM Oleh Daerah Urusan Perumahan Rakyat Dan Pemukiman	384
4.4.3 Hasil Capaian Urusan Perumahan Rakyat Dan Pemukiman	385
4.4.4 Anggaran Urusan Perumahan Rakyat Dan Pemukiman.....	386
4.4.5 Dukungan Personil Urusan Perumahan Rakyat Dan Pemukiman	386
4.4.6 Kendala Permasalahan dan Solusi Urusan Perumahan Rakyat Dan Pemukiman	387
4.5 Bidang Urusan Trantibumlinmas	388
4.5.1 Urusan Satpol PP dan Damkar	388
4.5.1.1 Jenis Pelayanan Dasar Urusan Satpol PP dan Damkar	388
4.5.1.2 Target Capaian SPM Oleh Daerah Urusan Satpol PP dan Damkar.....	388
4.5.1.3 Hasil Capaian Urusan Satpol PP dan Damkar	389
4.5.1.4 Anggaran Urusan Satpol PP dan Damkar	392



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

4.5.1.5 Dukungan Personil Urusan Satpol PP dan Damkar	392
4.5.1.6 Kendala Permasalahan dan Solusi Urusan Satpol PP dan Damkar	393
4.5.2 Urusan BPBD	394
4.5.2.1 Jenis Pelayanan Dasar Urusan BPBD	394
4.5.2.2 Target Capaian SPM Oleh Daerah Urusan BPBD	394
4.5.2.3 Hasil Capaian Urusan BPBD	395
4.5.2.4 Anggaran Urusan BPBD	396
4.5.2.5 Dukungan Personil Urusan BPBD	396
4.5.2.6 Kendala Permasalahan dan Solusi Urusan BPBD	397
4.6 Urusan Sosial	398
4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar Urusan Sosial	398
4.6.2 Target Capaian SPM Oleh Daerah Urusan Sosial	399
4.6.3 Hasil Capaian Urusan Sosial	400
4.6.4 Anggaran Urusan Sosial	401
4.6.5 Dukungan Personil Urusan Sosial	402
4.6.6 Kendala Permasalahan dan Solusi Urusan Sosial	402
4.7 Program dan Kegiatan	403
4.7.1 Program dan Kegiatan urusan Pendidikan	403
4.7.2 Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan	406



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

4.7.3 Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum...	410
4.7.4 Program dan Kegiatan Urusan Permukiman dan Perumahan Rakyat	411
4.7.5 Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	412
4.7.6 Bidang Urusan Sosial	417
BAB V PENUTUP	418



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Luas Daerah dan Pembagian wilayah Administratif Kabupaten Barru	3
TABEL 1.2 Jumlah Penduduk Tahun 2025	5
TABEL 1.3 Jumlah Kecamatan	6
TABEL 1.4 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	9
TABEL 1.5 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	34
TABEL 1.6 RPJMD 2025-2029	38
TABEL 1.7 Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025 - 2030	42
TABEL 1.8 Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025	46
TABEL 1.9 Target Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan	52
TABEL 1.10 Realisasi Pencapaian Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Barru Tahun 2025	56
TABEL 1.11 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Barru Tahun 2025	70
TABEL 1.12 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Kab.barru Tahun 2025	72
TABEL 1.13 Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten barru Tahun 2025	74
TABEL 1.14 Realisasi Capaian SPM SATPOL PP Damkar dan Penyelamatan Tahun 2025	76
TABEL 1.15 Realisasi Capaian SPM Badan Penanggulangan	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

Bencana Daerah Tahun 2025	79
TABEL 1.16 Realisasi Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2025.....	81
TABEL 2.1 Capaian Kinerja Makro Kabupaten Barru	
Tahun 2023-2024	79
TABEL 2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil	92
TABEL 2.3 Indikator Kinerja Kunci Unutuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	98
TABEL 3.1 Laporan Realisasi Dana Tugas Pembantuan Tahun 2024 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru	
	352
TABEL 3.2 Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten Barru	
	353
TABEL 4.1 Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota	
	357
TABEL 4.2 Hasil Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024 ...	359
TABEL 4.3 Anggaran Tahun 2024	360
TABEL 4.4 Rincian Anggaran SPM Urusan Pendidikan 2024	360
TABEL 4.5 Daftar Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru Berdasarkan Golongan	
	361
TABEL 4.6 Capaian Target dan Pembiayaan Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Kabupaten Barru Tahun 2024	
	374
TABEL 4.7 Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

Kabupaten Barru Tahun 2024	378
TABEL 4.8 Ketersediaan Tenaga Ahli Kesehatan	379
TABEL 4.9 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum	381
TABEL 4.10 Alokasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum	382
TABEL 4.11 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman	385
TABEL 4.12 Alokasi Anggaran Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman	386
TABEL 4.13 Target Pencapaian SPM SATPOL PP dan Penyelamatan	389
TABEL 4.14 Realisasi Sub Kegiatan SATPOL PP DAMKAR	390
TABEL 4.15 Target Pencapaian SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah	394
TABEL 4.16 Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Badan Penanggulangan Bencana Daerah	395
TABEL 4.17 Sumber Daya Manusia BPBD Kabupaten Barru Tahun 2024	397
TABEL 4.18 Target SPM Urusan Sosial	399
TABEL 4.19 Hasil Capaian SPM Urusan Sosial	400
Table 4.20 SPM Urusan Kesehatan	404
TABEL 4.21 Urusan Pekerjaan Umum SPM	406
TABEL 4.22 SPM Pekerjaan Umum	411
TABEL 4.23 Anggaran SPM Urusan Sosial	411



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 Peta Administratif Kabupaten Barru	4
GAMBAR 1.2 Visi dan Misi	30
GAMBAR 1.3 Keterkaitan Poko-Pokok Visi dengan Misi RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029	31
GAMBAR 1.4 Program Prioritas Pembangunan Daerah	38



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Penjelasan Umum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 ayat (1) mengamanatkan bahwa Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya pada pasal 71 ayat (2) disebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LPPD merupakan Laporan berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat melalui Kementrian Dalam Negeri, serta memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disampaikan Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.



a. Dasar Hukum Pembentukan Daerah

Untuk memberikan dasar pijakan yang jelas, Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025 ini berpedoman pada landasan hukum Pembentukan Daerah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
- b. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074). Undang-undang ini ditetapkan pada 28 Oktober 2024 dan mulai berlaku pada tanggal tersebut. Undang-Undang ini menggantikan ketentuan mengenai Kabupaten Barru dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.

b. Kondisi Geografis Daerah

Secara geografis Kabupaten Barru terletak diantara koordinat 4°0.5'35" - 4°47'35" Lintang Selatan dan 119°35'00" - 119°49'16" Bujur Timur dengan luas wilayah 1.174,72 km² (117.472 Ha) dan berada ± 102 km di sebelah utara Kota Makassar Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat ± 2,5 jam. Kabupaten Barru berada di antara Kota Makassar dan Kota Pare-pare dan merupakan jalur perlintasan trans Sulawesi.

Kabupaten Barru adalah salah satu kabupaten yang terletak di pesisir pantai Barat Propinsi Sulawesi Selatan dengan panjang garis pantainya 78 km. Kabupaten Barru merupakan jalur perlintasan trans Sulawesi dan merupakan daerah lintas provinsi yang terletak antara Kota Makassar dan Kota Pare-pare. Berdasarkan kondisi geografis jika dikaitkan dengan pengembangan wilayah, maka Kabupaten Barru



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

SINGGAH
di BARRU!

memiliki potensi geografis yang strategis yaitu (1) berada pada daerah lintasan perekonomian Utara-Selatan Sulawesi Selatan (2) merupakan wilayah trans Sulawesi (3) pintu perekonomian yang menghubungkan Sulawesi Selatan dengan Kalimantan Timur dan daerah lainnya. Dengan kondisi geografis tersebut, maka Kabupaten Barru dapat menjadi "hub" atau sebagai pintu bagi Sulawesi Selatan untuk pengembangan berbagai potensi yang dimiliki baik sosial budaya maupun ekonomi ke berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini telah termuat dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), dimana Kabupaten Barru termasuk sebagai salah satu daerah dalam Koridor Ekonomi IV Pembangunan Pulau Sulawesi. Secara administratif kecamatan yang ada di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 1.1
LUAS DAERAH DAN PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF
KABUPATEN BARRU

Kode	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Luas (km ²)	%
731101	TaneteRiaja	6	1	174.29	14.84
731102	Tanete Rilau	8	2	79.17	6.74
731103	B a r r u	5	5	199.32	16.97
731104	Soppeng Riaja	5	2	216.58	18.44
731105	Mallusetasi	5	3	78.90	6.72
731106	Pujananting	6	1	314.26	26.75
731107	Balusu	5	1	112.2	9.55
TOTAL		40	15	1.174.72	100

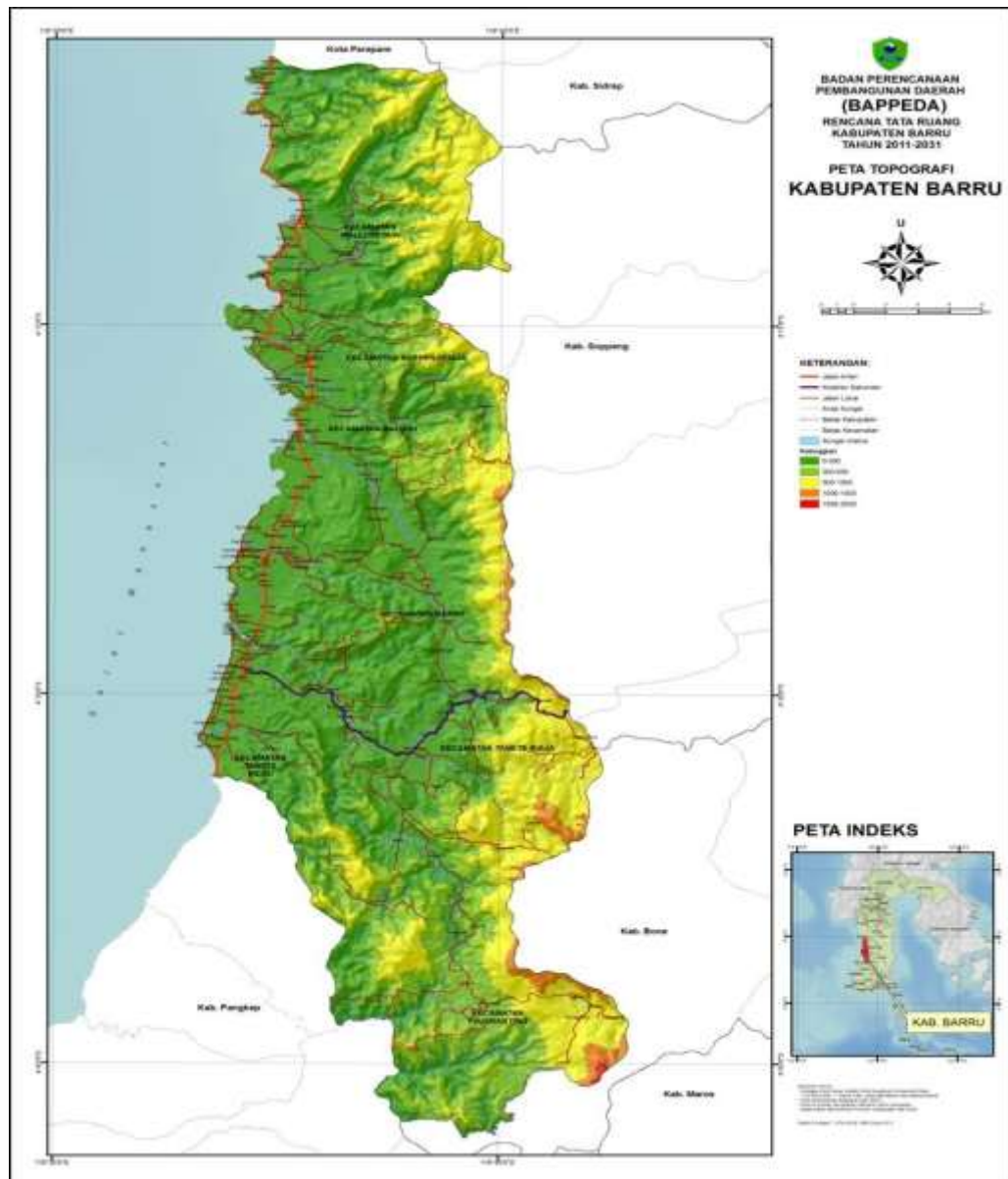
Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Barru, diolah 2025



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

SINGGAH
DI BARRU!

GAMBAR 1.1
PETA ADMINISTRATIF KABUPATEN BARRU



Sumber : Bappelitbangda Kab. Barru Tahun 2025



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

SINGGAH
DI BARRU!

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk pada Tahun 2025 sebesar 196,258 jiwa, meningkat sebesar 873 jiwa dibanding tahun 2024 sebesar 195.385 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 1.2

JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	L	P	TOTAL	%	LUAS (KM2)	KEPADATAN (JIWA/KM2)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TANETE RIAJA	13,172	13,636	26,808	13.75	174.29	153.81
2	TANETE RILAU	19,701	20,294	39,995	20.34	79.17	505.18
3	BARRU	23,261	23,954	47,215	23.97	199.32	236.88
4	MALLUSETASI	14,165	14,395	28,560	14.61	216.58	131.87
5	SOPPENG RIAJA	9,172	9,808	18,980	9.71	78.90	240,56
6	PUJANANTING	6,931	7,137	14,068	7.16	314.26	44.76
7	BALUSU	10,021	10,611	20,632	10.46	112.2	183.88
TOTAL		96,423	99,835	196,258	100	1,174.72	167.07

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kab.Barru Tahun 2025

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan

Kabupaten Barru secara administratif terbagi atas 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Barru (Ibukota Kabupaten), Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Pujananting dan Kecamatan Balusu dan terdiri dari 15 kelurahan dan 40 desa dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Kota Pare-pare dan Kabupaten Sidrap
- Sebelah Timur dengan kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

SINGGAH
DI BARRU!

- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- Sebelah Barat dengan Selat Makassar

TABEL 1.3
JUMLAH KECAMATAN

NO	KECAMATAN	LUAS (KM2)	KEPADATAN (JIWA/KM2)
1	2	3	4
1	TANETE RIAJA	174.29	153.81
2	TANETE RILAU	79.17	505.18
3	BARRU	199.32	236.88
4	MALLUSETASI	216.58	131.87
5	SOPPENG RIAJA	78.90	240,56
6	PUJANANTING	314.26	44.76
7	BALUSU	112.2	183.88
TOTAL		1,174.72	167.07

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Barru, diolah 2025

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah Dan Pegawai Pemerintah

Perangkat Daerah di Kabupaten Barru Sebanyak 34 (tigapuluh empat) dan 9 Unit Kerja yaitu :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan
3. Rumah Sakit Umum Daerah
4. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
5. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
DI BARRU!*

6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Dinas Sosial
9. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10. Dinas Tenaga Kerja
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12. Dinas Lingkungan Hidup
13. Badan Pendapatan Daerah
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Dinas Perhubungan
16. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
19. Dinas Perikanan
20. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
21. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
22. Sekretariat Dewan
23. Kecamatan Barru
24. Kecamatan Tanete Rilau
25. Kecamatan Tanete Riaja
26. Kecamatan Pujananting
27. Kecamatan Balusu
28. Kecamatan Soppeng Riaja
29. Kecamatan Mallusetasi
30. Inspektorat
31. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
32. Badan Keuangan dan Aset Daerah



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
DI BARRU!*

33. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
34. Sekretariat Daerah
35. Bagian Umum
36. Bagian Pemerintahan
37. Bagian Hukum
38. Bagian Organisasi
39. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
40. Bagian Administrasi Pembangunan
41. Bagian Perekonomian
42. Bagian Kesejahteraan Rakyat
43. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Barru pada tahun 2025 adalah sebanyak 1.354 (seribu tiga ratus lima puluh empat) diluar Guru dan tenaga Kesehatan.



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

SINGGAH
DI BARRU!

f. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

TABEL 1.4
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	915.972.161.957,00	895.010.944.103,90	97,71	914.280.919.206,80
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	123.346.052.236,00	124.897.893.158,90	101,25	111.784.187.566,50
4.1.01	Pajak Daerah	38.921.855.239,00	37.441.077.428,00	96,19	26.846.071.256,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	83.420.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	83.420.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	83.420.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	1.791.411.003,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	244.961.116,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	244.961.116,00
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	129.264.950,00
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	129.264.950,00
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	40.955.000,00
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	40.955.000,00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	1.376.229.937,00
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	1.376.229.937,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	4.575.000,00
4.1.01.08.08	Ketangkasan	0,00	0,00	0,00	4.575.000,00
4.1.01.08.08.0001	Ketangkasan	0,00	0,00	0,00	4.575.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	584.715.351,00	622.888.389,00	106,52	655.156.040,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	303.733.375,00	90.817.989,00	29,90	81.572.040,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	303.733.375,00	90.817.989,00	29,90	81.572.040,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	280.981.976,00	532.070.400,00	189,36	573.584.000,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	280.981.976,00	532.070.400,00	189,36	573.584.000,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	9.165.010.267,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	0,00	0,00	0,00	9.165.010.267,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	0,00	0,00	0,00	9.165.010.267,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	63.987.216,00	70.745.425,00	110,56	80.001.968,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	63.987.216,00	70.745.425,00	110,56	80.001.968,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	63.987.216,00	70.745.425,00	110,56	80.001.968,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	50.854.650,00	10.292.600,00	20,23	8.170.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	50.854.650,00	10.292.600,00	20,23	8.170.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	50.854.650,00	10.292.600,00	20,23	8.170.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.585.362.928,00	5.365.767.769,00	117,01	6.098.375.680,00
4.1.01.14.32	Pajak Tras	4.259.235.499,00	5.103.336.299,00	119,81	0,00
4.1.01.14.32.0001	Pajak Tras	4.259.235.499,00	5.103.336.299,00	119,81	0,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	326.127.429,00	262.431.470,00	80,46	6.098.375.680,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	326.127.429,00	262.431.470,00	80,46	6.098.375.680,00
4.1.01.15	(PBBP2)	6.358.862.100,00	6.114.185.900,00	96,15	5.995.280.177,00
4.1.01.15.01	PBBP2	6.358.862.100,00	6.114.185.900,00	96,15	5.995.280.177,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	6.358.862.100,00	6.114.185.900,00	96,15	5.995.280.177,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.628.703.648,00	2.491.273.550,00	68,65	2.960.771.121,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	3.248.740.282,00	2.296.007.950,00	70,67	2.648.663.205,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	3.248.740.282,00	2.296.007.950,00	70,67	2.648.663.205,00



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

SINGGAH
DI BARRU!

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	379.963.366,00	195.265.600,00	51,39	312.107.916,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	379.963.366,00	195.265.600,00	51,39	312.107.916,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	10.103.429.169,00	10.721.845.864,00	106,12	0,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	1.377.252.655,00	1.613.224.965,00	117,13	0,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	253.156.461,00	372.232.564,00	147,03	0,00
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	1.124.096.194,00	1.240.992.401,00	110,39	0,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	8.630.092.736,00	8.904.303.899,00	103,17	0,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	8.630.092.736,00	8.904.303.899,00	103,17	0,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	85.358.778,00	182.717.000,00	214,05	0,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	85.358.778,00	182.717.000,00	214,05	0,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	4.600.000,00	2.375.000,00	51,63	0,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	4.600.000,00	2.375.000,00	51,63	0,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	6.125.000,00	19.225.000,00	313,87	0,00
4.1.01.19.05.0008	PBJT-Permainan Ketangkasan	6.125.000,00	19.225.000,00	313,87	0,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	7.235.864.713,00	7.209.547.544,00	99,63	0,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	7.235.864.713,00	7.209.547.544,00	99,63	0,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	7.235.864.713,00	7.209.547.544,00	99,63	0,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	6.310.075.464,00	4.834.530.387,00	76,61	0,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	6.310.075.464,00	4.834.530.387,00	76,61	0,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	6.310.075.464,00	4.834.530.387,00	76,61	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	69.301.861.383,00	69.657.508.611,57	100,51	67.901.095.031,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	64.743.835.908,00	65.678.846.354,57	101,44	64.771.493.464,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	62.767.438.658,00	64.250.759.384,57	102,36	63.339.038.164,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	21.543.887.965,00	20.781.012.408,00	96,45	17.645.193.234,00
4.1.02.01.01.0005	Daerah	41.223.550.693,00	43.469.746.976,57	105,44	45.693.844.930,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	210.000.000,00	222.240.000,00	105,82	231.325.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	210.000.000,00	222.240.000,00	105,82	231.325.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	40.000.000,00	25.400.000,00	63,50	0,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	40.000.000,00	25.400.000,00	63,50	0,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	1.696.397.250,00	1.151.751.970,00	67,89	1.175.662.800,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	552.316.800,00	366.411.700,00	66,34	370.605.750,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	542.621.700,00	322.302.150,00	59,39	370.046.300,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	601.458.750,00	463.038.120,00	76,98	435.010.750,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	30.000.000,00	28.695.000,00	95,65	25.467.500,00
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	30.000.000,00	28.695.000,00	95,65	25.467.500,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.898.025.475,00	3.490.839.834,00	89,55	2.772.485.150,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.809.000.000,00	1.392.370.000,00	76,96	1.396.320.000,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	209.000.000,00	298.300.000,00	142,72	289.170.000,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	1.500.000.000,00	1.066.270.000,00	71,08	1.099.550.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	27.800.000,00	27,80	7.600.000,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	250.000.000,00	252.197.900,00	100,87	191.630.000,00
4.1.02.02.02.0002	Dikontrakkan	250.000.000,00	252.197.900,00	100,87	191.630.000,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00	140.554.000,00
4.1.02.02.04.0003	Lingkungan Terminal	0,00	0,00	0,00	140.554.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	979.025.475,00	1.000.016.000,00	102,14	474.614.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	979.025.475,00	1.000.016.000,00	102,14	474.614.000,00
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	45.000.000,00	56.250.000,00	125,00	52.750.000,00
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	45.000.000,00	56.250.000,00	125,00	52.750.000,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	375.000.000,00	383.442.934,00	102,25	411.357.150,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	375.000.000,00	383.442.934,00	102,25	411.357.150,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	90.000.000,00	109.100.000,00	121,22	95.260.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	90.000.000,00	109.100.000,00	121,22	95.260.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	250.000.000,00	157.215.000,00	62,88	10.000.000,00
4.1.02.02.11.0001	Bibit atau Benih Tanaman	250.000.000,00	157.215.000,00	62,88	10.000.000,00
4.1.02.02.14	Jalan	100.000.000,00	127.248.000,00	127,24	0,00
4.1.02.02.14.0001	Jalan	100.000.000,00	127.248.000,00	127,24	0,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

SINGGAH
DI BARRU!

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	660.000.000,00	487.822.423,00	73,91	357.116.417,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	660.000.000,00	487.822.423,00	73,91	357.116.417,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	660.000.000,00	487.822.423,00	73,91	357.116.417,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.632.531.585,00	10.632.531.585,00	100,00	10.008.783.290,00
4.1.03.01	(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	10.632.531.585,00	10.632.531.585,00	100,00	0,00
4.1.03.01.01	(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	10.632.531.585,00	10.632.531.585,00	100,00	0,00
4.1.03.01.01.0001	(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	10.632.531.585,00	10.632.531.585,00	100,00	0,00
4.1.03.02	(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	0,00	0,00	0,00	10.008.783.290,00
4.1.03.02.01	(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga	0,00	0,00	0,00	10.008.783.290,00
4.1.03.02.01.0001	(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga	0,00	0,00	0,00	10.008.783.290,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.489.804.029,00	7.166.775.534,33	159,62	7.028.237.989,50
4.1.04.05	Jasa Giro	1.350.000.000,00	1.513.146.877,00	112,08	1.891.066.931,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.350.000.000,00	1.513.146.877,00	112,08	1.891.066.931,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.350.000.000,00	1.513.146.877,00	112,08	1.891.066.931,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	1.000.000.000,00	1.867.037.676,00	186,70	1.691.519.220,00
4.1.04.07.01	Daerah	1.000.000.000,00	1.867.037.676,00	186,70	1.691.519.220,00
4.1.04.07.01.0001	Daerah	1.000.000.000,00	1.867.037.676,00	186,70	1.691.519.220,00
4.1.04.11	Pekerjaan	2.139.804.029,00	3.726.693.279,33	174,16	3.383.775.479,50
4.1.04.11.01	Pekerjaan	2.139.804.029,00	3.726.693.279,33	174,16	3.383.775.479,50
4.1.04.11.01.0001	Pekerjaan	2.139.804.029,00	3.726.693.279,33	174,16	3.383.775.479,50
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	2.384.225,00	0,00	1.820.103,00
4.1.04.13.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	2.384.225,00	0,00	1.820.103,00
4.1.04.13.03.0016	Persetujuan Bangunan Gedung	0,00	2.384.225,00	0,00	1.820.103,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	0,00	57.513.477,00	0,00	60.056.256,00
4.1.04.16.06	Sah	0,00	57.513.477,00	0,00	60.056.256,00
4.1.04.16.06.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	0,00	57.513.477,00	0,00	60.056.256,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	123.346.052.236,00	124.897.893.158,90	101,25	111.784.187.566,50
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	792.626.109.721,00	770.113.050.945,00	97,15	802.496.731.640,30
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	719.130.804.328,00	716.442.764.739,00	99,62	756.421.677.108,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	697.461.885.108,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0,00	0,00	0,00	13.515.033.000,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	2.877.431.000,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	0,00	0,00	0,00	5.043.901.000,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	0,00	0,00	325.661.000,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	51.000,00
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	401.569.000,00
4.2.01.01.01.0008	Landrent	0,00	0,00	0,00	2.308.481.000,00
4.2.01.01.01.0010	Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00	0,00	0,00	1.013.116.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	0,00	0,00	0,00	1.544.823.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00	532.173.944.769,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	0,00	0,00	0,00	419.248.563.000,00
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00
4.2.01.01.02.0004	Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0,00	0,00	0,00	5.230.455.769,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	0,00	0,00	0,00	66.703.577.000,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	0,00	0,00	0,00	31.387.227.000,00
4.2.01.01.02.0007	Umum	0,00	0,00	0,00	6.604.122.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0,00	0,00	0,00	36.828.889.417,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	0,00	0,00	0,00	235.944.600,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	0,00	0,00	0,00	4.194.260.000,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	0,00	0,00	0,00	2.132.555.000,00
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0,00	0,00	0,00	210.439.000,00
4.2.01.01.03.0031	Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar	0,00	0,00	0,00	2.611.815.232,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00	9.409.436.000,00
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	2.552.332.000,00
4.2.01.01.03.0058	Percepatan Penurunan Stunting	0,00	0,00	0,00	52.500.000,00
4.2.01.01.03.0060	Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	15.429.607.585,00
4.2.01.01.04	Fisik	0,00	0,00	0,00	114.944.017.922,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	0,00	0,00	0,00	22.672.191.645,00



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

SINGGAH
DI BARRU!

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0,00	0,00	0,00	1.250.000.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	0,00	0,00	0,00	66.575.691.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	1.276.953.000,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	3.757.500.000,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	2.693.050.000,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00	0,00	0,00	4.521.261.455,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	0,00	0,00	0,00	3.092.656.550,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	519.608.000,00
4.2.01.01.04.0022	dan Anak	0,00	0,00	0,00	406.000.000,00
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	334.880.207,00
4.2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	0,00	0,00	0,00	7.844.226.065,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	11.841.683.000,00	9.203.137.000,00	77,71	0,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	7.917.962.000,00	4.656.335.000,00	58,80	0,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	1.041.664.000,00	753.126.000,00	72,30	0,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	6.523.062.000,00	3.421.644.000,00	52,45	0,00
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	118.795.000,00	0,00	0,00
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	353.236.000,00	362.770.000,00	102,69	0,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	3.423.721.000,00	4.046.802.000,00	118,19	0,00
4.2.01.07.02.0002	DBH SDA Gas Bumi	731.148.000,00	970.655.000,00	132,75	0,00
4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara- Landrent	1.562.155.000,00	1.940.915.000,00	124,24	0,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	3.846.000,00	8.660.000,00	225,16	0,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	1.126.572.000,00	1.126.572.000,00	100,00	0,00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	0,00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	0,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	518.453.309.000,00	527.585.524.996,00	101,76	0,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	458.181.500.000,00	472.680.163.996,00	103,16	0,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	458.181.500.000,00	472.680.163.996,00	103,16	0,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	60.271.809.000,00	54.905.361.000,00	91,09	0,00
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	0,00
4.2.01.08.02.0003	Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	5.366.448.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	30.072.348.000,00	30.072.348.000,00	100,00	0,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	21.833.013.000,00	21.833.013.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	141.383.277.328,00	132.715.762.687,00	93,86	0,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	14.854.020.000,00	17.267.587.178,00	116,24	0,00
4.2.01.09.01.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	299.974.000,00	247.501.612,00	82,50	0,00
4.2.01.09.01.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	235.478.000,00	234.132.000,00	99,42	0,00
4.2.01.09.01.0060	Sistem Kesehatan	13.208.805.000,00	12.597.653.114,00	95,37	0,00
4.2.01.09.01.0076	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana	1.109.763.000,00	1.081.199.854,00	97,42	0,00
4.2.01.09.01.0117	Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	3.107.100.598,00	0,00	0,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	126.529.257.328,00	115.448.175.509,00	91,24	0,00
4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.265.750.000,00	1.195.750.000,00	94,46	0,00
4.2.01.09.02.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	2.414.259.000,00	2.414.259.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0022	dan Anak	3.825.026.900,00	223.465.900,00	5,84	0,00
4.2.01.09.02.0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	23.405.700.000,00	22.394.656.080,00	95,68	0,00
4.2.01.09.02.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	3.577.800.000,00	3.560.375.500,00	99,51	0,00
4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	2.449.800.000,00	2.318.426.000,00	94,63	0,00
4.2.01.09.02.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0033	Kabupaten/Kota	7.000.343.636,00	6.970.411.966,00	99,57	0,00
4.2.01.09.02.0034	Obat dan Makanan	50.878.000,00	50.878.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.406.644.792,00	4.374.742.854,00	99,27	0,00
4.2.01.09.02.0036	Profesi Guru	76.455.749.000,00	69.400.176.709,00	90,77	0,00
4.2.01.09.02.0037	Penghasilan Guru	441.000.000,00	1.308.727.500,00	296,76	0,00
4.2.01.09.02.0041	Perpustakaan Daerah	750.000.000,00	750.000.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0044	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	366.306.000,00	366.306.000,00	100,00	0,00
	PERIMBANGAN	671.678.269.328,00	669.504.424.683,00	99,67	697.461.885.108,00
4.2.01.05	Dana Desa	39.135.404.000,00	38.648.661.056,00	98,75	39.357.327.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	39.135.404.000,00	38.648.661.056,00	98,75	39.357.327.000,00



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

SINGGAH
DI BARRU!

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	39.135.404.000,00	38.648.661.056,00	98,75	39.357.327.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	8.317.131.000,00	8.289.679.000,00	99,66	19.602.465.000,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	19.602.465.000,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	19.602.465.000,00
4.2.01.06.02	Sebelumnya	8.317.131.000,00	8.289.679.000,00	99,66	0,00
4.2.01.06.02.0001	Sebelumnya	8.317.131.000,00	8.289.679.000,00	99,66	0,00
	PUSAT - LAINNYA	47.452.535.000,00	46.938.340.056,00	98,91	58.959.792.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	73.495.305.393,00	53.670.286.206,00	73,02	46.075.054.532,30
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	64.158.584.433,00	53.670.286.206,00	83,65	41.302.648.532,30
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	64.158.584.433,00	53.670.286.206,00	83,65	41.302.648.532,30
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	23.028.013.328,00	0,00	0,00	7.756.543.731,00
4.2.02.01.01.0002	Bermotor	0,00	0,00	0,00	5.026.423.134,00
4.2.02.01.01.0003	Bermotor	19.120.759.474,00	32.285.479.019,00	168,85	11.426.360.898,30
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	57.061.654,00	48.608.696,00	85,18	47.727.499,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	21.952.749.977,00	21.336.198.491,00	97,19	17.045.593.270,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	9.336.720.960,00	0,00	0,00	4.772.406.000,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	9.336.720.960,00	0,00	0,00	4.772.406.000,00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	9.336.720.960,00	0,00	0,00	4.772.406.000,00
	DAERAH	73.495.305.393,00	53.670.286.206,00	73,02	46.075.054.532,30
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	792.626.109.721,00	770.113.050.945,00	97,15	802.496.731.640,30
	JUMLAH PENDAPATAN	915.972.161.957,00	895.010.944.103,90	97,71	914.280.919.206,80
5	BELANJA DAERAH	970.897.750.493,00	890.527.217.587,11	91,72	967.677.429.828,90
5.1	BELANJA OPERASI	735.080.767.039,28	684.836.726.637,23	93,16	728.024.663.116,75
5.1.01	Belanja Pegawai	438.502.168.440,76	411.576.614.227,00	93,85	402.283.316.011,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	298.522.803.984,86	286.338.164.408,00	95,91	291.312.879.279,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	222.861.323.687,60	217.217.780.954,00	97,46	220.006.696.668,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	189.588.081.201,60	185.257.892.688,00	97,71	194.123.144.749,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	33.273.242.486,00	31.959.888.266,00	96,05	25.883.551.919,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	19.105.357.175,90	18.620.849.747,00	97,46	18.982.767.522,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	16.456.391.772,36	16.090.298.566,00	97,77	16.949.617.440,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.648.965.403,54	2.530.551.181,00	95,52	2.033.150.082,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.467.286.170,00	4.077.915.000,00	91,28	5.150.365.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	4.467.286.170,00	4.077.915.000,00	91,28	5.150.365.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	16.193.541.320,00	15.951.873.500,00	98,50	15.426.408.950,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	16.193.541.320,00	15.951.873.500,00	98,50	15.426.408.950,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.578.492.000,00	1.472.425.000,00	93,28	1.425.914.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.578.492.000,00	1.472.425.000,00	93,28	1.425.914.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	10.955.615.227,80	10.661.201.670,00	97,31	10.833.814.740,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	9.064.319.490,20	8.854.214.040,00	97,68	9.378.027.900,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.891.295.737,60	1.806.987.630,00	95,54	1.455.786.840,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.235.716.262,52	2.774.882.658,00	38,34	2.745.994.781,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6.514.791.110,52	2.656.301.436,00	40,77	2.745.720.792,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	720.925.152,00	118.581.222,00	16,44	273.989,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	4.805.835,91	2.604.081,00	54,18	2.827.686,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.139.023,35	2.281.871,00	55,13	2.509.179,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	666.812,56	322.210,00	48,32	318.507,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	14.268.544.294,08	13.767.951.236,00	96,49	14.929.617.154,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	13.001.810.884,54	12.559.740.995,00	96,59	13.959.675.099,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.266.733.409,54	1.208.210.241,00	95,37	969.942.055,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	463.403.940,94	447.908.067,00	96,65	452.117.623,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	392.715.505,29	380.733.820,00	96,94	398.385.088,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	70.688.435,65	67.174.247,00	95,02	53.732.535,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.388.718.070,11	1.342.772.495,00	96,69	1.356.355.155,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.177.260.726,45	1.141.257.353,00	96,94	1.195.163.944,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	211.457.343,66	201.515.142,00	95,29	161.191.211,00



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

SINGGAH
DI BARRU!

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	128.900.259.538,90	115.068.884.205,00	89,26	100.634.182.948,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	38.094.633.508,90	32.677.084.988,00	85,77	33.478.234.406,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	38.094.633.508,90	32.677.084.988,00	85,77	33.478.234.406,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	190.294.100,00	190.294.092,00	99,99	0,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	190.294.100,00	190.294.092,00	99,99	0,00
5.1.01.02.04	ASN	90.615.331.930,00	82.201.505.125,00	90,71	67.155.948.542,00
5.1.01.02.04.0001	PNS	90.615.331.930,00	82.201.505.125,00	90,71	67.155.948.542,00
5.1.01.03	Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	342.952.623,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	342.952.623,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	342.952.623,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	10.232.837.884,00	9.493.011.743,00	92,77	9.401.272.466,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	561.540.000,00	100,00	560.070.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	561.540.000,00	100,00	560.070.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	78.204.000,00	46.599.000,00	59,58	48.804.000,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	78.204.000,00	46.599.000,00	59,58	48.804.000,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	83.712.000,00	54.412.800,00	65,00	55.528.960,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	83.712.000,00	54.412.800,00	65,00	55.528.960,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000,00	48.132.000,00	100,00	47.985.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000,00	48.132.000,00	100,00	47.985.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00	814.233.000,00	100,00	812.101.500,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00	814.233.000,00	100,00	812.101.500,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	81.484.200,00	75.272.400,00	92,37	64.066.800,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	81.484.200,00	75.272.400,00	92,37	64.066.800,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	17.721.900,00	14.067.900,00	79,38	11.296.950,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	17.721.900,00	14.067.900,00	79,38	11.296.950,00
5.1.01.04.08	Anggota DPRD	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00	100,00	1.890.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Anggota DPRD	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00	100,00	1.890.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000,00	472.500.000,00	60,00	315.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000,00	472.500.000,00	60,00	315.000.000,00
5.1.01.04.10	DPRD	87.500.000,00	80.603.331,00	92,11	81.450.398,00
5.1.01.04.10.0001	DPRD	87.500.000,00	80.603.331,00	92,11	81.450.398,00
5.1.01.04.12	DPRD	2.142.690.784,00	2.060.257.312,00	96,15	2.121.608.858,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	94.500.000,00	38.636.640,00	40,88	37.777.320,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.347.696,00	1.155.168,00	85,71	1.345.150,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	14.043.088,00	3.465.504,00	24,67	3.486.388,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.032.800.000,00	2.017.000.000,00	99,22	2.079.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.585.120.000,00	3.375.394.000,00	94,15	3.159.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.585.120.000,00	3.375.394.000,00	94,15	3.159.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	55.000.000,00	0,00	0,00	234.360.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	55.000.000,00	0,00	0,00	234.360.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	355.387.033,00	208.806.544,00	58,75	155.171.571,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	112.534.500,00	93.600.000,00	83,17	51.000.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	112.534.500,00	93.600.000,00	83,17	51.000.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.799.370,00	3.888.000,00	49,85	2.160.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.799.370,00	3.888.000,00	49,85	2.160.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	202.562.100,00	98.280.000,00	48,51	91.800.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	202.562.100,00	98.280.000,00	48,51	91.800.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	9.579.356,00	4.779.720,00	49,89	2.751.960,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	9.579.356,00	4.779.720,00	49,89	2.751.960,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	10.846.040,00	2.433.864,00	22,44	2.132.651,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	10.846.040,00	2.433.864,00	22,44	2.132.651,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	4.377,00	2.080,00	47,52	1.840,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	4.377,00	2.080,00	47,52	1.840,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	11.130.719,00	5.373.600,00	48,27	4.910.400,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	11.130.719,00	5.373.600,00	48,27	4.910.400,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	232.643,00	112.320,00	48,27	103.680,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	232.643,00	112.320,00	48,27	103.680,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	697.928,00	336.960,00	48,28	311.040,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	697.928,00	336.960,00	48,28	311.040,00



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

SINGGAH
DI BARRU!

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.01.06	KDH/WKDH	490.880.000,00	467.747.327,00	95,28	436.857.124,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	110.880.000,00	100,00	92.400.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	110.880.000,00	100,00	92.400.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	380.000.000,00	356.867.327,00	93,91	344.457.124,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	380.000.000,00	356.867.327,00	93,91	344.457.124,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	279.314.834.614,52	257.441.499.403,25	92,16	286.570.967.416,57
5.1.02.01	Belanja Barang	35.685.148.081,17	32.206.612.568,25	90,25	47.349.239.490,80
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	34.102.428.252,17	30.812.139.808,25	90,35	44.082.781.276,80
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	277.479.700,00	208.120.090,00	75,00	184.340.037,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	725.053.900,00	722.830.901,00	99,69	409.860.527,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.457.062.750,00	1.345.970.838,00	92,37	1.225.109.152,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	360.497.400,00	43.071.200,00	11,94	135.172.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	26.604.000,00	22.198.600,00	83,44	19.729.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.988.158.811,00	3.871.361.802,00	97,07	4.538.787.096,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	102.592.500,00	99.516.300,00	97,00	107.332.000,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	49.916.500,00	43.960.100,00	88,06	141.300.000,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	681.000,00	654.900,00	96,16	360.000,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	1.920.000,00	1.787.388,00	93,09	1.886.776,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	58.667.300,00	46.437.640,00	79,15	64.821.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	127.089.400,00	110.803.771,00	87,18	57.079.075,00
5.1.02.01.01.0024	Kantor	843.504.490,00	667.635.541,00	79,15	570.989.789,00
5.1.02.01.01.0025	Cover	628.627.190,00	545.861.632,00	86,83	607.652.605,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.957.669.450,00	1.678.742.818,00	85,75	2.290.833.162,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	14.204.400,00	9.308.800,00	65,53	15.370.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	311.226.100,00	254.970.391,00	81,92	347.523.100,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	42.766.900,00	42.348.781,00	99,02	20.688.500,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	908.970.928,00	821.719.317,00	90,40	880.813.984,00
5.1.02.01.01.0032	Dinas	453.316.000,00	435.112.883,00	95,98	742.435.500,00
5.1.02.01.01.0034	Pendukung Olahraga	169.905.300,00	169.033.406,00	99,48	76.831.000,00
5.1.02.01.01.0035	Suvenir/Cendera Mata	38.421.600,00	37.188.660,00	96,79	68.767.000,00
5.1.02.01.01.0036	untuk Kegiatan Kantor Lainnya	213.525.965,00	160.951.241,00	75,37	119.741.950,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	124.479.572,00	106.291.054,00	85,38	2.465.005.608,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.535.609.620,00	2.371.043.550,25	93,50	1.960.482.856,80
5.1.02.01.01.0039	untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.845.273.816,00	3.638.737.220,00	94,62	13.065.382.819,00
5.1.02.01.01.0040	untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	348.327.520,00	237.561.372,00	68,20	9.986.120,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.196.210.800,00	2.132.963.427,00	97,12	2.737.925.700,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	1.355.531.700,00	1.105.313.562,00	81,54	789.785.050,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.736.075.740,00	3.889.676.489,00	82,12	4.662.607.774,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.349.497.800,00	4.323.883.507,00	99,41	4.166.726.416,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	205.000.000,00	204.999.920,00	99,99	72.199.580,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.123.468.300,17	993.585.500,00	88,43	716.904.100,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	40.860.000,00	37.906.757,00	92,77	117.500.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	63.560.000,00	57.714.000,00	90,80	69.500.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	23.608.000,00	22.789.000,00	96,53	159.437.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	2.469.000,00	2.469.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	94.212.500,00	91.950.000,00	97,59	139.000.000,00
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	1.038.000,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	3.405.000,00	2.550.000,00	74,88	3.000.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	61.176.500,00	60.053.750,00	98,16	63.600.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	235.800.800,00	193.064.700,00	81,87	146.277.000,00
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	16.688.300,00	11.192.500,00	67,06	0,00
5.1.02.01.02.0007	Belanja Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI)	5.958.800,00	2.320.000,00	38,93	0,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	7.665.000,00	6.600.000,00	86,10	0,00
5.1.02.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	3.064.500,00	2.272.500,00	74,15	0,00
5.1.02.01.04	Kapitalisasi	1.566.031.529,00	1.383.280.260,00	88,33	3.266.458.214,00
5.1.02.01.04.0023	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	2.650.300,00	2.414.800,00	91,11	0,00
5.1.02.01.04.0036	Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	417.500.000,00	406.174.482,00	97,28	22.500.000,00



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
DI BARRU!*

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.01.04.0052	Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	28.375.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.04.0077	Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu	45.400,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.04.0102	Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	4.653.500,00	2.503.050,00	53,78	1.200.000,00
5.1.02.01.04.0103	Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5.1.02.01.04.0104	Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	10.215.000,00	5.000.000,00	48,94	0,00
5.1.02.01.04.0110	Pengolahan-Alat Produksi Perikanan	11.917.500,00	11.655.000,00	97,79	0,00
5.1.02.01.04.0111	Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	511.000,00	510.600,00	99,92	0,00
5.1.02.01.04.0117	Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	69.746.200,00	43.162.332,00	61,88	73.681.000,00
5.1.02.01.04.0120	Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	16.728.400,00	11.300.385,00	67,55	25.895.900,00
5.1.02.01.04.0121	Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	22.050.000,00
5.1.02.01.04.0122	Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	22.440.400,00	21.918.855,00	97,67	12.928.750,00
5.1.02.01.04.0123	Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya	426.829.929,00	388.180.547,00	90,94	280.387.064,00
5.1.02.01.04.0124	Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	30.643.200,00	30.147.600,00	98,38	0,00
5.1.02.01.04.0125	Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.1.02.01.04.0127	Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja	76.590.100,00	67.493.500,00	88,12	95.820.000,00
5.1.02.01.04.0128	Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat	13.500.000,00	13.475.400,00	99,81	0,00
5.1.02.01.04.0130	Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
5.1.02.01.04.0131	Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Lemari dan	0,00	0,00	0,00	20.900.000,00
5.1.02.01.04.0132	Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00
5.1.02.01.04.0134	Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	9.307.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.04.0137	Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	3.405.000,00	3.405.000,00	100,00	1.490.000,00
5.1.02.01.04.0214	Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik	0,00	0,00	0,00	2.336.510.000,00
5.1.02.01.04.0232	Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	0,00	0,00	0,00	960.000,00
5.1.02.01.04.0237	Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum	0,00	0,00	0,00	34.100.000,00
5.1.02.01.04.0405	Personal Computer	30.872.000,00	28.723.000,00	93,03	0,00
5.1.02.01.04.0406	Komputer Unit Lainnya	1.702.500,00	1.702.500,00	100,00	15.000.000,00
5.1.02.01.04.0407	Peralatan Mainframe	3.405.000,00	3.405.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.04.0409	Peralatan Personal Computer	159.736.500,00	134.021.447,00	83,90	47.325.500,00
5.1.02.01.04.0410	Peralatan Jaringan	24.641.800,00	22.392.585,00	90,87	37.690.000,00
5.1.02.01.04.0411	Peralatan Komputer Lainnya	908.000,00	643.800,00	70,90	24.168.000,00
5.1.02.01.04.0448	Pelindung-Topi Kerja	16.041.300,00	13.769.230,00	85,83	11.825.000,00
5.1.02.01.04.0450	Pelindung-Sepatu Lapangan	96.192.800,00	94.037.773,00	97,75	122.680.000,00
5.1.02.01.04.0451	Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	8.853.000,00	8.759.574,00	98,94	7.500.000,00
5.1.02.01.04.0455	SAR-Alat SAR Lainnya	9.534.000,00	9.267.500,00	97,20	0,00
5.1.02.01.04.0463	Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	0,00	0,00	0,00	32.948.000,00
5.1.02.01.04.0465	Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
5.1.02.01.04.0494	Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	7.491.000,00	6.986.000,00	93,25	0,00
5.1.02.01.04.0710	Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	26.864.700,00	26.802.300,00	99,76	2.569.000,00
5.1.02.01.04.0721	Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak	4.767.000,00	454.000,00	9,52	930.000,00
5.1.02.01.04.0743	Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-	29.964.000,00	24.974.000,00	83,34	6.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	107.978.391.262,40	98.198.836.453,00	90,94	95.254.236.699,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	60.876.130.537,40	54.102.546.888,00	88,87	53.657.825.950,00
5.1.02.02.01.0003	Pembawa Acara, dan Panitia	1.933.220.000,00	1.259.200.000,00	65,13	1.510.690.000,00
5.1.02.02.01.0004	Pelaksana Kegiatan	1.407.740.000,00	1.099.325.250,00	78,09	1.560.200.000,00
5.1.02.02.01.0005	Beracara	18.000.000,00	9.000.000,00	50,00	12.900.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	8.291.650.000,00	8.212.575.000,00	99,04	8.246.125.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	106.800.000,00	106.800.000,00	100,00	98.400.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	8.452.200.000,00	8.241.300.000,00	97,50	8.798.100.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	736.600.000,00	730.300.000,00	99,14	967.200.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	235.488.000,00	109.661.500,00	46,56	99.840.000,00
5.1.02.02.01.0016	Umum	78.000.000,00	78.000.000,00	100,00	72.000.000,00
5.1.02.02.01.0017	Perlindungan Masyarakat	601.500.000,00	506.750.000,00	84,24	749.250.000,00
5.1.02.02.01.0018	Penyelamatan	987.000.000,00	972.750.000,00	98,55	1.142.250.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	435.100.000,00	391.400.000,00	89,95	506.300.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	518.140.000,00	460.084.200,00	88,79	225.281.500,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	3.491.207.500,00	3.263.842.500,00	93,48	3.247.352.500,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	349.000.000,00	328.500.000,00	94,12	383.610.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.414.270.000,00	3.316.445.000,00	97,13	3.208.295.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.452.793.000,00	2.402.175.741,00	97,93	2.123.171.340,00



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
DI BARRU!*

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.224.685.000,00	4.896.415.000,00	93,71	4.818.042.500,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	504.100.000,00	480.700.000,00	95,35	542.800.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	324.450.000,00	296.400.000,00	91,35	267.000.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	111.600.000,00	111.600.000,00	100,00	165.600.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	147.280.000,00	133.927.900,00	90,93	323.380.000,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	4.355.100.000,00	1.615.400.000,00	37,09	0,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	51.850.000,00	44.050.000,00	84,95	0,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	0,00	0,00	0,00	11.700.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	245.000.000,00	245.000.000,00	100,00	262.500.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	0,00	0,00	0,00	27.348.900,00
5.1.02.02.01.0044	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	530.400.000,00	255.000.000,00	48,07	530.400.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.220.430.000,00	974.780.000,00	79,87	721.880.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	85.000.000,00	85.000.000,00	100,00	24.750.000,00
5.1.02.02.01.0049	Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	93.370.000,00	86.914.399,00	93,08	111.463.666,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	125.793.400,00	67.746.150,00	53,85	12.996.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	47.640.000,00	35.253.600,00	74,00	0,00
5.1.02.02.01.0052	Fumigasi	0,00	0,00	0,00	383.605.600,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	30.000.000,00	1.800.880,00	6,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	333.650.000,00	310.650.000,00	93,10	257.348.000,00
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	48.000.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	715.192.884,00	599.308.070,00	83,79	530.866.275,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	9.106.661.853,40	8.825.705.271,00	96,91	8.202.993.686,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.866.580.000,00	1.804.250.000,00	96,66	1.563.460.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.609.348.900,00	1.331.909.268,00	82,76	1.429.163.303,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	2.000.000,00	540.000,00	27,00	2.196.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	454.290.000,00	276.170.159,00	60,79	243.851.600,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	135.000.000,00	87.917.000,00	65,12	225.515.080,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	37.118.721.570,00	35.577.580.095,00	95,84	36.549.598.930,00
5.1.02.02.02.0001	Perangkat Desa	730.025.760,00	730.025.760,00	100,00	737.548.764,00
5.1.02.02.02.0003	Kelas 3	35.484.220.800,00	34.145.682.400,00	96,22	34.936.588.400,00
5.1.02.02.02.0004	PBPU dan BP Kelas 3	336.000.000,00	158.906.000,00	47,29	210.350.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	50.803.200,00	37.800.000,00	74,40	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	230.076.360,00	224.518.245,00	97,58	295.626.929,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	287.595.450,00	280.647.690,00	97,58	369.484.837,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.253.422.332,00	5.932.481.778,00	94,86	3.446.369.592,00
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	37.281.132,00	37.128.000,00	99,58	46.157.592,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.731.300.000,00	3.486.199.778,00	93,43	1.833.795.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	172.950.000,00	151.750.000,00	87,74	173.500.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	230.020.000,00	196.554.000,00	85,45	191.947.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	4.137.000,00	3.450.000,00	83,39	16.650.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	2.070.519.200,00	2.050.185.000,00	99,01	1.181.820.000,00
5.1.02.02.04.0507	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Air	7.215.000,00	7.215.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	742.300.000,00	565.137.699,00	76,13	437.464.496,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	259.400.000,00	188.200.000,00	72,55	205.700.000,00
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0,00	0,00	0,00	47.179.496,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	482.900.000,00	376.937.699,00	78,05	184.585.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08.0022	Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	0,00	0,00	99.123.000,00
5.1.02.02.09.0013	Konsultansi Manajemen	0,00	0,00	0,00	99.123.000,00
5.1.02.02.12	serta Pendidikan dan Pelatihan	2.065.406.000,00	1.514.395.500,00	73,32	493.085.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	743.978.000,00	436.936.000,00	58,72	113.085.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	1.117.428.000,00	873.459.500,00	78,16	346.000.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	204.000.000,00	204.000.000,00	100,00	34.000.000,00
5.1.02.02.13	Pemungutan Pajak Daerah	780.424.565,00	485.160.432,00	62,16	506.239.978,00
5.1.02.02.13.0006	Hotel	2.796.951,00	1.464.569,00	52,36	1.362.909,00
5.1.02.02.13.0007	Restoran	44.354.065,00	23.656.512,00	53,33	28.467.331,00
5.1.02.02.13.0008	Hiburan	92.324,00	92.324,00	100,00	20.213,00



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
DI BARRU!*

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.02.13.0009	Reklame	15.787.315,00	10.037.513,00	63,57	7.692.903,00
5.1.02.02.13.0010	Penerangan Jalan	282.782.165,00	148.079.659,00	52,36	143.125.091,00
5.1.02.02.13.0011	Parkir	77.625,00	38.813,00	50,00	27.412,00
5.1.02.02.13.0012	Air Tanah	1.079.785,00	1.075.187,00	99,57	526.161,00
5.1.02.02.13.0013	Sarang Burung Walet	1.634.614,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.13.0014	Mineral Bukan Logam dan Batuan	131.265.140,00	78.674.799,00	59,93	86.744.474,00
5.1.02.02.13.0015	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	214.611.599,00	205.609.832,00	95,80	194.024.784,00
5.1.02.02.13.0016	Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	85.942.982,00	16.431.224,00	19,11	44.248.700,00
5.1.02.02.14	Pemungutan Retribusi Daerah	108.486.258,00	13.034.061,00	12,01	64.362.465,00
5.1.02.02.14.0002	Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.975.000,00	1.496.250,00	50,29	46.831.666,67
5.1.02.02.14.0005	Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	29.686.952,00	0,00	0,00	8.651.636,00
5.1.02.02.14.0009	Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan	525.000,00	0,00	0,00	51.250,00
5.1.02.02.14.0014	Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	31.076.360,00	2.116.125,00	6,80	4.898.537,33
5.1.02.02.14.0015	Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	4.375.000,00	593.750,00	13,57	593.750,00
5.1.02.02.14.0018	Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	17.097.946,00	3.222.936,00	18,84	551.250,00
5.1.02.02.14.0021	Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	6.125.000,00	3.562.500,00	58,16	2.784.375,00
5.1.02.02.14.0022	Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.675.000,00	855.000,00	23,26	0,00
5.1.02.02.14.0024	Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	2.450.000,00	1.187.500,00	48,46	0,00
5.1.02.02.14.0031	Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	23.500.000,00	8.500.000,00	36,17	167.288,00
5.1.02.02.15.0002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	0,00	0,00	0,00	167.288,00
5.1.02.02.15.0009	Lainnya	23.500.000,00	8.500.000,00	36,17	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	3.839.269.621,00	3.355.323.921,00	87,39	3.409.520.438,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.359.861.300,00	2.075.230.878,00	87,93	2.279.355.859,00
5.1.02.03.02.0003	Excavator	34.343.000,00	33.900.000,00	98,71	34.075.000,00
5.1.02.03.02.0010	Pengangkat	38.565.000,00	38.316.000,00	99,35	38.404.000,00
5.1.02.03.02.0012	Besar Darat Lainnya	20.000.000,00	19.500.000,00	97,50	0,00
5.1.02.03.02.0034	Lainnya	75.480.000,00	61.915.900,00	82,02	73.914.582,00
5.1.02.03.02.0035	Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	776.500.000,00	682.553.399,00	87,90	912.442.245,00
5.1.02.03.02.0036	Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	476.500.000,00	448.343.430,00	94,09	492.311.947,00
5.1.02.03.02.0037	Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	175.640.000,00	173.875.756,00	98,99	194.535.946,00
5.1.02.03.02.0038	Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	119.000.000,00	88.664.320,00	74,50	77.985.313,00
5.1.02.03.02.0039	Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	42.480.000,00	41.938.237,00	98,72	37.867.456,00
5.1.02.03.02.0040	Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	16.000.000,00
5.1.02.03.02.0049	Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	27.441.300,00	18.375.000,00	66,96	42.442.000,00
5.1.02.03.02.0117	Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	4.290.000,00
5.1.02.03.02.0121	Rumah Tangga-Alat Pendingin	215.775.000,00	170.809.800,00	79,16	161.486.100,00
5.1.02.03.02.0132	Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	8.000.000,00
5.1.02.03.02.0405	Computer	95.800.000,00	83.528.750,00	87,19	57.489.400,00
5.1.02.03.02.0406	Unit Lainnya	113.500.000,00	96.117.243,00	84,68	77.119.870,00
5.1.02.03.02.0409	Peralatan Personal Computer	6.275.000,00	5.961.573,00	95,00	6.705.000,00
5.1.02.03.02.0410	Peralatan Jaringan	34.580.000,00	29.289.570,00	84,70	0,00
5.1.02.03.02.0411	Peralatan Komputer Lainnya	77.982.000,00	53.141.900,00	68,14	44.047.000,00
5.1.02.03.02.0491	Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi	1.000.000,00	0,00	0,00	240.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.010.891.341,00	831.641.889,00	82,26	864.630.139,00
5.1.02.03.03.0001	Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	810.598.727,00	738.598.969,00	91,11	861.338.539,00
5.1.02.03.03.0011	Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	176.070.114,00	83.042.920,00	47,16	0,00
5.1.02.03.03.0025	Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.03.0036	Tempat Kerja-Taman	14.222.500,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.03.0051	Peringatan/Prasasti-Candi	0,00	0,00	0,00	3.291.600,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	468.516.980,00	448.451.154,00	95,71	265.534.440,00
5.1.02.03.04.0003	Kabupaten	100.000.000,00	99.976.000,00	99,97	0,00
5.1.02.03.04.0026	Bangunan Pembawa Irigasi	364.483.880,00	344.442.054,00	94,50	263.811.440,00
5.1.02.03.04.0080	Air Buangan Domestik	4.033.100,00	4.033.100,00	100,00	1.723.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	23.373.026.750,00	21.037.765.472,00	90,00	38.260.409.740,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	23.373.026.750,00	21.037.765.472,00	90,00	38.260.409.740,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.009.059.250,00	16.369.469.844,00	90,89	30.993.420.753,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.372.955.000,00	3.933.090.384,00	89,94	6.775.387.962,00



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

SINGGAH
DI BARRU!

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	90.235.000,00	84.015.000,00	93,10	127.380.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	900.777.500,00	651.190.244,00	72,29	360.121.025,00
5.1.02.05	Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.047.116.242,95	13.142.946.528,00	87,34	14.396.363.693,00
5.1.02.05.01	Lain/Masyarakat	3.202.085.200,00	2.611.554.423,00	81,55	4.311.555.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	502.085.200,00	460.254.423,00	91,66	144.755.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	2.700.000.000,00	2.151.300.000,00	79,67	2.590.800.000,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00	0,00	0,00	1.576.000.000,00
5.1.02.05.02	Lain/Masyarakat	11.845.031.042,95	10.531.392.105,00	88,90	10.084.808.693,00
5.1.02.05.02.0001	Lain	8.593.521.042,95	7.338.462.105,00	85,39	7.597.268.693,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	3.251.510.000,00	3.192.930.000,00	98,19	2.487.540.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	18.827.445.305,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	18.827.445.305,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	18.827.445.305,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	22.956.962.300,00	22.430.974.800,00	97,70	0,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	21.160.595.000,00	20.671.377.700,00	97,68	0,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	19.894.845.000,00	19.475.697.700,00	97,89	0,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	1.265.750.000,00	1.195.680.000,00	94,46	0,00
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	600.567.300,00	591.547.100,00	98,49	0,00
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	600.567.300,00	591.547.100,00	98,49	0,00
5.1.02.89.03	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	1.195.800.000,00	1.168.050.000,00	97,67	0,00
5.1.02.89.03.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	1.195.800.000,00	1.168.050.000,00	97,67	0,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	7.462.232.878,00	6.176.207.301,00	82,76	6.531.829.641,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	7.462.232.878,00	6.176.207.301,00	82,76	6.531.829.641,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	7.462.232.878,00	6.176.207.301,00	82,76	6.531.829.641,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	62.972.687.479,00	60.892.832.360,00	96,69	62.541.922.409,77
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	62.972.687.479,00	60.892.832.360,00	96,69	62.541.922.409,77
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	62.972.687.479,00	60.892.832.360,00	96,69	62.541.922.409,77
5.1.03	Belanja Bunga	2.331.248.308,00	1.760.525.169,98	75,51	1.720.723.191,18
5.1.03.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	2.331.248.308,00	1.760.525.169,98	75,51	1.720.723.191,18
5.1.03.01.02	atas Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Panjang	2.331.248.308,00	1.760.525.169,98	75,51	1.720.723.191,18
5.1.03.01.02.0001	atas Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Panjang	2.331.248.308,00	1.760.525.169,98	75,51	1.720.723.191,18
5.1.05	Belanja Hibah	14.932.515.676,00	14.058.087.837,00	94,14	36.634.256.498,00
5.1.05.04	Belanja Hibah kepada BUMD	0,00	0,00	0,00	87.934.239,00
5.1.05.04.02	Belanja Hibah Barang kepada BUMD	0,00	0,00	0,00	87.934.239,00
5.1.05.04.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada BUMD	0,00	0,00	0,00	87.934.239,00
5.1.05.05	Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	10.216.330.650,00	9.472.256.811,00	92,71	29.600.232.670,00
5.1.05.05.01	Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan	6.346.330.650,00	5.692.256.811,00	89,69	25.644.039.500,00
5.1.05.05.01.0001	Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk	740.000.000,00	670.000.000,00	90,54	21.079.440.280,00
5.1.05.05.01.0002	Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk	5.606.330.650,00	5.022.256.811,00	89,58	4.564.599.220,00
5.1.05.05.02	Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	100,00	1.900.000.000,00
5.1.05.05.02.0001	Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	100,00	1.900.000.000,00
5.1.05.05.03	Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.970.000.000,00	1.880.000.000,00	95,43	2.056.193.170,00
5.1.05.05.03.0001	Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.970.000.000,00	1.880.000.000,00	95,43	2.056.193.170,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	566.785.026,00	566.785.026,00	100,00	495.984.089,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	566.785.026,00	566.785.026,00	100,00	495.984.089,00
5.1.05.07.01.0001	Politik	566.785.026,00	566.785.026,00	100,00	495.984.089,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	4.149.400.000,00	4.019.046.000,00	96,85	6.450.105.500,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	2.903.400.000,00	2.871.420.000,00	98,89	3.757.055.500,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	2.903.400.000,00	2.871.420.000,00	98,89	3.757.055.500,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.246.000.000,00	1.147.626.000,00	92,10	2.693.050.000,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.246.000.000,00	1.147.626.000,00	92,10	2.693.050.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	815.400.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0,00	0,00	0,00	815.400.000,00
5.1.06.01.01	Individu	0,00	0,00	0,00	815.400.000,00
5.1.06.01.01.0001	Individu	0,00	0,00	0,00	815.400.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	735.080.767.039,28	684.836.726.637,23	93,16	728.024.663.116,75



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
DI BARRU!*

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.2	BELANJA MODAL	134.827.114.546,38	107.913.196.945,88	80,03	141.186.777.959,15
5.2.01	Belanja Modal Tanah	6.500.375.196,00	6.208.248.126,00	95,50	0,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	6.500.375.196,00	6.208.248.126,00	95,50	0,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	6.500.375.196,00	6.208.248.126,00	95,50	0,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	6.500.375.196,00	6.208.248.126,00	95,50	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.767.849.281,02	16.014.572.371,00	81,01	19.869.786.593,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	60.754.800,00	55.255.800,00	90,94	51.964.999,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	60.754.800,00	55.255.800,00	90,94	51.964.999,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	0,00	0,00	0,00	14.985.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	20.226.000,00	15.406.800,00	76,17	0,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	40.528.800,00	39.849.000,00	98,32	36.979.999,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	4.079.000.000,00	4.013.317.100,00	98,38	2.783.520.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	4.079.000.000,00	4.013.317.100,00	98,38	2.783.520.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.930.250.000,00	2.887.000.000,00	98,52	25.720.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	45.400.000,00	45.399.000,00	99,99	0,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	124.850.000,00	105.505.600,00	84,50	154.800.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	978.500.000,00	975.412.500,00	99,68	2.603.000.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.270.000,00	2.217.780,00	97,69	0,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	2.270.000,00	2.217.780,00	97,69	0,00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	2.270.000,00	2.217.780,00	97,69	0,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	392.600.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	392.600.000,00
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	0,00	0,00	0,00	392.600.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.421.190.184,00	2.238.016.660,00	92,43	2.175.899.450,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	24.270.765,00	20.861.900,00	85,95	229.462.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	24.270.765,00	20.861.900,00	85,95	229.462.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.257.541.919,00	2.081.469.830,00	92,20	1.807.552.450,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.292.501.900,00	1.184.259.200,00	91,62	780.681.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	11.700.000,00	9.867.900,00	84,34	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	558.988.000,00	511.260.150,00	91,46	475.994.200,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	0,00	0,00	0,00	21.900.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	394.352.019,00	376.082.580,00	95,36	228.127.250,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	300.850.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	139.377.500,00	135.684.930,00	97,35	138.885.000,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	73.207.000,00	69.922.230,00	95,51	3.000.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	53.345.000,00	53.200.500,00	99,72	6.200.000,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	12.825.500,00	12.562.200,00	97,94	129.685.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	339.217.200,00	267.499.835,00	78,85	1.088.594.500,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	214.372.200,00	151.621.575,00	70,72	1.046.495.500,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	103.171.800,00	53.728.850,00	52,07	124.300.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	27.833.700,00	25.133.000,00	90,29	663.410.000,00
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	83.366.700,00	72.759.725,00	87,27	34.419.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00	224.366.500,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	115.765.000,00	108.052.760,00	93,33	42.099.000,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	115.765.000,00	108.052.760,00	93,33	42.099.000,00
5.2.02.06.04	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	9.080.000,00	7.825.500,00	86,18	0,00
5.2.02.06.04.0007	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	9.080.000,00	7.825.500,00	86,18	0,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	710.474.000,02	680.978.000,00	95,84	638.667.806,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	1.666.000,00	0,00	0,00	586.167.806,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	0,00	0,00	0,00	494.350.000,00
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
5.2.02.07.01.0005	Kandungan	1.666.000,00	0,00	0,00	78.817.806,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	708.808.000,02	680.978.000,00	96,07	52.500.000,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	708.808.000,02	680.978.000,00	96,07	52.500.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	502.979.200,00	237.073.290,00	47,13	1.415.852.000,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	55.000.000,00	39.072.000,00	71,04	202.400.000,00
5.2.02.08.01.0004	Belanja Modal Alat Laboratorium Model Hidrolika	55.000.000,00	39.072.000,00	71,04	0,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	0,00	0,00	0,00	202.400.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	447.979.200,00	198.001.290,00	44,19	1.213.452.000,00



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

SINGGAH
DI BARRU!

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	239.979.200,00	198.001.290,00	82,50	0,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	208.000.000,00	0,00	0,00	1.213.452.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	3.053.209.192,00	2.868.936.575,00	93,96	1.496.387.500,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	2.511.861.792,00	2.370.922.887,00	94,38	1.208.002.500,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	642.375.000,00	641.930.000,00	99,93	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.869.486.792,00	1.728.992.887,00	92,48	1.170.795.500,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	37.207.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	541.347.400,00	498.013.688,00	91,99	288.385.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	505.101.400,00	465.535.088,00	92,16	20.850.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	23.900.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	36.246.000,00	32.478.600,00	89,60	243.635.000,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	24.970.000,00	20.313.000,00	81,34	0,00
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	24.970.000,00	20.313.000,00	81,34	0,00
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	24.970.000,00	20.313.000,00	81,34	0,00
5.2.02.12	Belanja Modal Alat Pengeboran	35.000.000,00	33.300.000,00	95,14	0,00
5.2.02.12.01	Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin	35.000.000,00	33.300.000,00	95,14	0,00
5.2.02.12.01.0003	Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin Lainnya	35.000.000,00	33.300.000,00	95,14	0,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	327.220.000,00
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0,00	0,00	0,00	327.220.000,00
5.2.02.16.01.0001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	0,00	0,00	0,00	29.300.000,00
5.2.02.16.01.0003	Lainnya	0,00	0,00	0,00	297.920.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	28.602.000,00	0,00	0,00	3.749.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	28.602.000,00	0,00	0,00	3.749.000,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	28.602.000,00	0,00	0,00	3.749.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	271.320.000,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	271.320.000,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	0,00	0,00	0,00	271.320.000,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	5.102.046.175,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	5.102.046.175,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	5.102.046.175,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	3.712.687.700,00	3.141.766.300,00	84,62	0,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	3.510.855.000,00	2.921.163.400,00	83,20	0,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	3.510.855.000,00	2.921.163.400,00	83,20	0,00
5.2.02.89.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD	148.832.700,00	172.852.900,00	116,13	0,00
5.2.02.89.02.0001	Reguler	148.832.700,00	172.852.900,00	116,13	0,00
5.2.02.89.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan	53.000.000,00	47.750.000,00	90,09	0,00
5.2.02.89.03.0002	Kinerja	53.000.000,00	47.750.000,00	90,09	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.797.495.005,00	2.455.898.031,00	51,19	4.121.965.163,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.797.495.005,00	2.455.898.031,00	51,19	4.121.965.163,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.797.495.005,00	2.455.898.031,00	51,19	4.121.965.163,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.715.813.399,67	30.228.487.455,18	80,14	64.680.027.133,15
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	36.711.997.917,47	29.507.839.412,98	80,37	60.850.050.121,15
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	36.620.014.667,47	29.480.835.162,98	80,50	58.458.355.324,15
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	12.725.573.695,61	8.159.970.373,11	64,12	30.936.303.198,90
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	7.924.700,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	11.959.272.988,86	10.948.849.355,87	91,55	1.565.298.435,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	7.943.615.758,00	7.572.020.443,00	95,32	18.297.855.117,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	3.084.068.011,00	2.343.621.658,00	75,99	5.556.514.025,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	129.326.580,00	4.997.220,00	3,86	0,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	41.787.600,00	0,00	0,00	36.381.520,00
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	19.818.800,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	720.525.000,00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	0,00	0,00	0,00	28.599.544,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	56.152.624,00	4.996.450,00	8,89	99.917.282,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	291.508.342,00	150.428.776,00	51,60	5.300.000,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	27.349.158,00	0,00	0,00	1.211.661.202,25
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	333.616.410,00	295.950.887,00	88,70	0,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	91.983.250,00	27.004.250,00	29,35	2.391.694.797,00
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	62.181.800,00	27.004.250,00	43,42	444.606.840,00



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
DI BARRU!*

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.2.03.01.02.0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	0,00	0,00	0,00	1.929.253.068,00
5.2.03.01.02.0005	Belanja Modal Asrama	22.971.450,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	6.830.000,00	0,00	0,00	17.834.889,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	781.654.416,20	550.293.836,20	70,40	3.549.998.852,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	781.654.416,20	550.293.836,20	70,40	3.549.998.852,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	781.654.416,20	550.293.836,20	70,40	3.549.998.852,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	222.161.066,00	170.354.206,00	76,68	279.978.160,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	222.161.066,00	170.354.206,00	76,68	279.978.160,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	222.161.066,00	170.354.206,00	76,68	279.978.160,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	70.173.558.469,69	54.800.154.786,70	78,09	56.230.308.533,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	59.010.079.166,34	46.675.131.459,70	79,09	42.811.094.254,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	54.068.461.699,34	44.464.234.521,70	82,23	39.949.503.077,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	47.620.559.675,04	38.819.247.037,00	81,51	28.278.640.795,00
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	9.978.700,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	121.363.439,70	111.276.939,70	91,68	562.678.855,00
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	423.840.614,00	255.134.930,00	60,19	2.060.647.713,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	5.892.719.270,60	5.278.575.615,00	89,57	9.047.535.714,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	4.941.617.467,00	2.210.896.938,00	44,74	2.861.591.177,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	4.941.617.467,00	2.210.896.938,00	44,74	2.861.591.177,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	8.241.421.381,35	5.528.619.022,00	67,08	10.354.699.279,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	3.360.901.127,00	1.965.596.743,00	58,48	3.659.243.206,00
5.2.04.02.01.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi	2.777.569.960,00	1.829.776.718,00	65,87	3.630.553.156,00
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	440.963.067,00	0,00	0,00	28.690.050,00
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	142.368.100,00	135.820.025,00	95,40	0,00
5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	1.798.185.852,35	1.298.864.150,00	72,23	2.744.491.950,00
5.2.04.02.02.0004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	1.798.185.852,35	1.298.864.150,00	72,23	2.744.491.950,00
5.2.04.02.04	Penanggulangan Bencana Alam	2.861.655.931,00	2.248.358.129,00	78,56	3.950.964.123,00
5.2.04.02.04.0001	Penanggulangan Bencana Alam	2.861.655.931,00	2.248.358.129,00	78,56	3.950.964.123,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	220.678.471,00	15.800.000,00	7,15	0,00
5.2.04.02.06.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.02.06.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	203.153.471,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	17.025.000,00	15.800.000,00	92,80	0,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	2.808.846.472,00	2.596.404.305,00	92,43	3.040.000.000,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	1.053.846.472,00	954.714.305,00	90,59	0,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.053.846.472,00	954.714.305,00	90,59	0,00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	1.755.000.000,00	1.641.690.000,00	93,54	3.040.000.000,00
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	1.755.000.000,00	1.641.690.000,00	93,54	3.040.000.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	113.211.450,00	0,00	0,00	24.515.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	113.211.450,00	0,00	0,00	24.515.000,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	113.211.450,00	0,00	0,00	24.515.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	669.518.200,00	661.734.207,00	98,83	406.655.700,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	669.518.200,00	661.734.207,00	98,83	406.655.700,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	669.518.200,00	661.734.207,00	98,83	406.655.700,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	27.478.000,00	27.450.000,00	99,89	130.000.000,00
5.2.05.01.01.0011	Belanja Modal Buku Laporan	642.040.200,00	634.284.207,00	98,79	276.655.700,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	134.827.114.546,38	107.913.196.945,88	80,03	141.186.777.959,15
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.226.672.807,34	1.600.840.848,00	37,87	2.521.555.792,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.226.672.807,34	1.600.840.848,00	37,87	2.521.555.792,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	4.226.672.807,34	1.600.840.848,00	37,87	2.521.555.792,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	4.226.672.807,34	1.600.840.848,00	37,87	2.521.555.792,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	4.226.672.807,34	1.600.840.848,00	37,87	2.521.555.792,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	4.226.672.807,34	1.600.840.848,00	37,87	2.521.555.792,00
5.4	BELANJA TRANSFER	96.763.196.100,00	96.176.453.156,00	99,39	95.944.432.961,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	96.763.196.100,00	96.176.453.156,00	99,39	95.944.432.961,00
5.4.02.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	100.000.000,00	0,00	0,00	15.219.939,00
5.4.02.01.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	100.000.000,00	0,00	0,00	15.219.939,00
5.4.02.01.02.0001	Provinsi	100.000.000,00	0,00	0,00	15.219.939,00



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
DI BARRU!*

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.4.02.05	Kabupaten/Kota kepada Desa	96.663.196.100,00	96.176.453.156,00	99,49	95.929.213.022,00
5.4.02.05.02	Kabupaten/Kota kepada Desa	96.663.196.100,00	96.176.453.156,00	99,49	95.929.213.022,00
5.4.02.05.02.0003	Desa	0,00	0,00	0,00	37.455.310,00
5.4.02.05.02.0004	Desa yang bersumber dari Dana Desa	39.135.404.000,00	38.648.661.056,00	98,75	39.357.327.000,00
5.4.02.05.02.0005	Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	57.527.792.100,00	57.527.792.100,00	100,00	56.534.430.712,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	96.763.196.100,00	96.176.453.156,00	99,39	95.944.432.961,00
	JUMLAH BELANJA	970.897.750.493,00	890.527.217.587,11	91,72	967.677.429.828,90
	SURPLUS/DEFISIT	(54.925.588.536,00)	4.483.726.516,79	(8,16)	(53.396.510.622,10)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	54.925.588.536,00	54.925.588.537,02	100,00	89.375.130.423,38
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	57.978.619.801,00	57.978.619.801,28	100,00	92.428.161.687,64
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	35.978.619.801,00	35.978.619.801,28	100,00	92.428.161.687,64
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	35.978.619.801,00	35.978.619.801,28	100,00	0,00
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	35.978.619.801,00	35.978.619.801,28	100,00	0,00
6.1.01.01.01.0001	(PKB)	35.978.619.801,00	35.978.619.801,28	100,00	0,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	0,00	0,00	0,00	92.428.161.687,64
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	0,00	0,00	0,00	92.428.161.687,64
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	0,00	0,00	92.428.161.687,64
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	22.000.000.000,00	22.000.000.000,00	100,00	0,00
6.1.04.03	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	22.000.000.000,00	22.000.000.000,00	100,00	0,00
6.1.04.03.05	BUMD-Jangka Menengah	22.000.000.000,00	22.000.000.000,00	100,00	0,00
6.1.04.03.05.0001	BUMD-Jangka Menengah	22.000.000.000,00	22.000.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	57.978.619.801,00	57.978.619.801,28	100,00	92.428.161.687,64
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.053.031.265,00	3.053.031.264,26	99,99	3.053.031.264,26
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	3.053.031.265,00	3.053.031.264,26	99,99	3.053.031.264,26
6.2.03.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	3.053.031.265,00	3.053.031.264,26	99,99	3.053.031.264,26
6.2.03.01.02	Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	3.053.031.265,00	3.053.031.264,26	99,99	0,00
6.2.03.01.02.0001	Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	3.053.031.265,00	3.053.031.264,26	99,99	0,00
6.2.03.01.04	Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	3.053.031.264,26
6.2.03.01.04.0001	Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	3.053.031.264,26
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.053.031.265,00	3.053.031.264,26	99,99	3.053.031.264,26
	PEMBIAYAAN NETTO	54.925.588.536,00	54.925.588.537,02	100,00	89.375.130.423,38
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	59.409.315.053,81	0,00	35.978.619.801,28

Sumber Data : Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan strategis Pemerintah Daerah Kab. Barru

Permasalahan strategis Pemerintah Daerah Kab. Barru merupakan kondisi riil yang terkait dengan adanya ketimpangan antara pencapaian pembangunan daerah dengan target yang diperoleh. Permasalahan pembangunan daerah tidak jauh dari permasalahan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD tahun 2025-2029 yang merupakan pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realitas/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya dicapai. Hasil evaluasi terhadap gambaran umum kondisi daerah dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan untuk penentuan prioritas dan



sasaran pembangunan yang perlu diselesaikan.

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kab. Barru tahun 2025 yaitu:

1. Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka;
2. Peningkatan Kualitas dan Akses pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
3. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur;
4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
5. Pengembangan Kawasan Industri Barru;
6. Pembangunan dan Pengembangan Agroteknologi, agropolitan serta Hilirisasi pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan;
7. Pengembangan Pariwisata Tuntas;
8. Pemberdayaan dan Penguatan UMKM dan Koperasi;

Berdasarkan prioritas tersebut, dirumuskan permasalahan pembangunan Kabupaten Barru secara makro sebagai berikut.

1. Penanganan Kemiskinan Yang Belum Optimal.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Barru berfluktuasi dari tahun 2014 hingga 2024, dengan persentase angka kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 9,74%, dan yang terendah di tahun 2020 sebesar 8,26%. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Barru pada tahun 2024 sebesar 8,31%. Hal tersebut memberi gambaran bahwa upaya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Barru masih belum sesuai harapan.

Kemiskinan menjadi salah satu fokus perhatian Pemerintah Kabupaten Barru. Kompleksitas masalah kemiskinan dipengaruhi oleh: (1). Tingginya beban pengeluaran masyarakat, yang disebabkan oleh inflasi, rasio ketergantungan, dan tuntutan kebutuhan hidup; (2). Masih



rendahnya pendapatan masyarakat, yang disebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan, tingginya pengangguran, derajat pendidikan yang rendah, dan derajat kesehatan belum optimal; (3). Belum berkembangnya usaha ekonomi mikro dan kecil, yang disebabkan oleh kurangnya akses terhadap permodalan dan belum optimalnya pendampingan serta penguatan kewirausahaan.

Kemiskinan yang terjadi berdampak terhadap sulitnya masyarakat untuk mendapatkan akses perumahan yang layak, terbatasnya akses air bersih, sanitasi, akses terhadap layanan ketenagalistrikan di daerah terpencil, dan kebutuhan dasar lainnya.

2. Masih Rendahnya Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Barru di tahun 2023 sebesar 62,26%, dan menurun di tahun 2024 sebesar 59,32%. Rendahnya angka partisipasi angkatan kerja disebabkan oleh calon tenaga kerja yang kurang terampil, pengembangan wirausaha yang belum optimal serta pengembangan UMK belum memadai. Selain itu terdapat juga permasalahan lain seperti masih rendahnya kualitas lulusan lembaga pelatihan serta belum optimalnya *link and match* antara dunia pelatihan dengan dunia industri.

3. Belum Optimalnya Infrastruktur Kesehatan

Kabupaten Barru menghadapi tantangan serius dalam hal ketersediaan infrastruktur kesehatan dan kelangkaan air bersih yang semakin memburuk akibat degradasi sumber daya alam. Belum optimalnya layanan kesehatan, termasuk akses terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, menjadi salah satu indikator ketimpangan dalam penyediaan fasilitas kesehatan. Situasi ini diperburuk oleh terbatasnya sarana dan prasarana sanitasi serta pengelolaan sampah yang berdampak pada kualitas lingkungan dan kesehatan



masyarakat.

4. Peningkatan Risiko Bencana Hidrometeorologi

Kabupaten Barru merupakan wilayah yang memiliki kerentanannya terhadap bencana hidrometeorologi yang besar. Dengan tren yang terus meningkat akibat perubahan iklim sesuai data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dengan kondisi ini sangat penting untuk terus memperkuat upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang lebih baik, melalui pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap bencana serta penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap risiko perubahan iklim dan bencana alam.

5. Kerentanan Sosial dan Ekonomi terhadap Dampak Lingkungan dan Perubahan Iklim

Dampak lingkungan dan perubahan iklim di Kabupaten Barru tidak hanya mempengaruhi aspek ekologis, tetapi juga memiliki implikasi yang mendalam terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Peningkatan angka kematian bayi yang terjadi, dari 27 kasus pada tahun 2023, menjadi 35 kasus pada tahun 2024, menunjukkan bahwa perubahan kondisi lingkungan yang memburuk dapat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, terutama kelompok yang rentan. Sektor pertanian dan perikanan yang menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat Barru sangat sensitif terhadap perubahan iklim. Perubahan pola curah hujan, kenaikan suhu, dan frekuensi bencana alam dapat mempengaruhi hasil pertanian dan perikanan, yang pada gilirannya dapat memperburuk kemiskinan dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, upaya pengurangan kerentanan sosial dan ekonomi terhadap dampak perubahan iklim harus menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.



6. Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Masih Rendah

Kualitas SDM dapat diukur dengan capaian indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai Indeks IPM Kabupaten Barru mengalami tren peningkatan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, hal tersebut terjadi pada semua komponen, baik kualitas kesehatan, pendidikan maupun pengeluaran per-kapita, meskipun demikian capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Barru tahun 2024 yang mencapai angka 74,51 masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan capaian IPM Provinsi Sulawesi Selatan yang berada di angka 75,18.

Capaian IPM Kabupaten Barru yang masih lebih rendah dari nilai IPM nasional dipengaruhi oleh faktor Umur Harapan Hidup (UHH) yang masih di angka 72,57 tahun, masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian nasional yang mencapai angka 73,93 tahun, dan berada pada urutan terakhir dari 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Akses pendidikan yang belum merata juga menjadi salah satu faktor penyebab yang mempengaruhi pencapaian angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Barru yang berada pada angka 8,54 tahun. Pengeluaran per-kapita yang masih rendah juga menyebabkan rendahnya IPM Kabupaten Barru. Pengeluaran per-kapita hanya di angka 11,7 juta yang masih dibawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan.

Beberapa penyebab lainnya yang mempengaruhi belum meratanya kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Barru adalah layanan kesehatan dan pendidikan yang belum berkualitas dan merata, khususnya di wilayah pegunungan yang aksesibilitasnya masih sulit, ketersediaan SDM layanan kesehatan dan tenaga pendidik/kependidikan yang belum tersebar secara merata sesuai kebutuhan baik dari aspek kuantitas maupun kualitas, terbatasnya kesempatan dan peluang kerja terutama untuk perempuan dan penyandang disabilitas, dan belum



setaranya akses perempuan dan kelompok rentan dibidang pendidikan dan ekonomi.

7. Daya Saing Daerah Yang Masih Belum Optimal

Capaian indeks daya saing daerah Kabupaten Barru tahun 2024 sebesar 3,42 dan masih berada dibawah indeks daya saing daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 3,61. Belum optimalnya daya saing daerah Kabupaten Barru dikontribusi oleh keterbatasan infrastruktur yang mendukung konektivitas dan mobilitas. Jalan yang rusak, terbatasnya akses transportasi, serta minimnya fasilitas umum dan digitalisasi yang menjadi hambatan bagi pengembangan industri dan sektor-sektor lainnya. Selain itu ada juga permasalahan terkait rendahnya kualitas lingkungan yang mampu mendorong para produsen untuk menjadi lebih inovatif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan pasar. Peningkatan daya saing daerah perlu didorong dengan hadirnya kebijakan daerah yang mendukung fleksibilitas pasar tenaga kerja, pelatihan keterampilan, dan insentif bagi perusahaan untuk merekrut lebih banyak pekerja dapat membantu menekan angka pengangguran dan perbaikan infrastruktur secara berkelanjutan.

8. Pelayanan Publik Yang Masih Belum Optimal

Capaian indeks pelayanan publik tahun 2024 yang menurun dibandingkan tahun 2023 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kabupaten Barru belum memadai. Urgensi pelayanan publik sangat tinggi karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan kelancaran administrasi di daerah. Pelayanan publik juga sangat terkait dengan hadirnya layanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat. Selain itu ada masalah terkait dengan belum optimalnya implementasi SPBE di Kabupaten Barru, padahal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat penting



dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

SPBE adalah suatu sistem yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan, termasuk dalam hal pelayanan publik, pengelolaan data, hingga pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Visi pembangunan daerah merupakan Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yaitu Bupati Barru **ANDI INA KARTIKA SARI, S.H, M.Si** dan Wakil Bupati Barru **DR. Ir. ABUSTAN, M.Si** yang disampaikan pada saat pemilihan kepala daerah dan menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah Kabupaten Barru untuk periode RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

**“BARRU BERKEADILAN,
BARRU MAJU BERKELANJUTAN,
BARRU SEJAHTERA LEBIH CEPAT”**

Rumusan visi ini mengandung tiga kata kunci visi yakni berkeadilan, maju berkelanjutan, sejahtera lebih cepat. Ketiga pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2029. Memahami substansi visi merupakan bagian dari upaya membangun value yang harus melekat dalam merencanakan pembangunan Kab. Barru kedepan. Value visi inilah yang akan menghantarkan kita dalam menyusun misi, tujuan dan sasaran

pembangunan yang lebih cepat. Beberapa value yang terkandung dalam visi diatas dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.2



Sumber : RPJMD Kab. Barru 2025-2029

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan diatas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

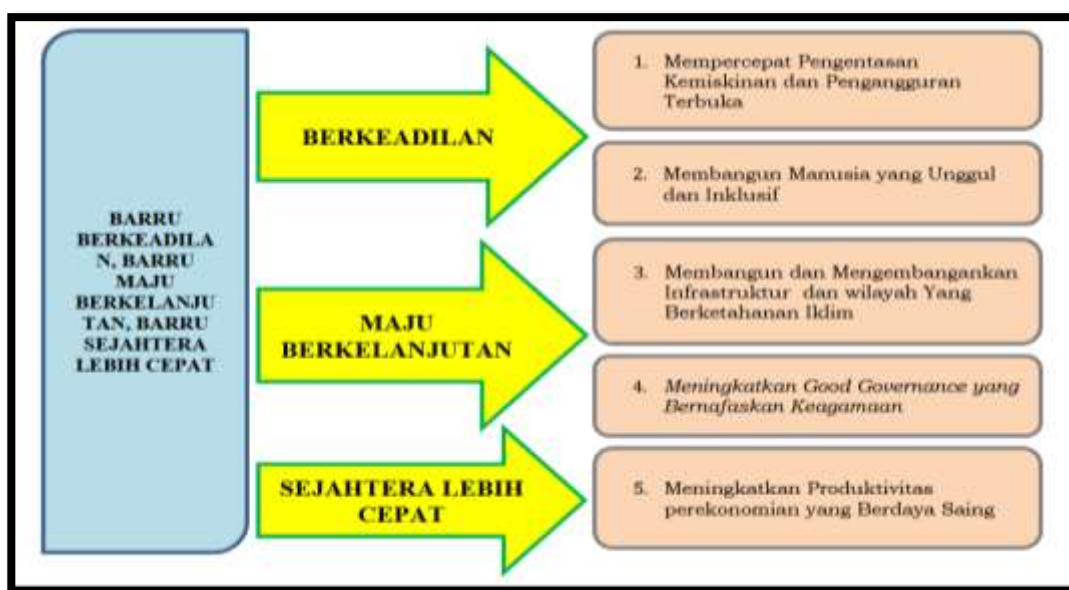
Adapun pernyataan Misi yang merupakan penjabaran Visi Kepala Daerah Kabupaten Barru sebagai berikut:

1. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka

2. Membangun Manusia yang Unggul dan Inklusif
3. Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur wilayah Yang Berketahanan Iklim
4. Meningkatkan Good Governance yang Bernafaskan Keagamaan
5. Meningkatkan Produktivitas perekonomian yang Berdaya Saing

Gambar 1.3

Ketarkaitan Pokok-Pokok Visi dengan Misi RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029



Sumber : RPJMD Kab. Barru 2025-2029

➤ **Misi 1**

“Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka”

Mengarah pada penciptaan perubahan sosial dimana pembangunan tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Pada misi ini untuk mewujudkan visi yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan setara, dimana setiap individu, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi atau budaya mereka, memiliki akses yang sama terhadap kesempatan, layanan, dan sumber daya yang diperlukan untuk



mencapai potensi penuh mereka.

Dimana misi ini fokus pada upaya untuk mengurangi dan menangani kemiskinan, serta fokus pada mengurangi tingkat pengangguran dengan menciptakan peluang kerja, memberikan pelatihan keterampilan, dan mendorong wirausaha dan investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru.

➤ **Misi 2**

“Membangun Manusia Yang Unggul dan Inklusif”

Mengarah pada upaya untuk mewujudkan pengembangan sumber daya manusia kabupaten Barru yang memiliki kualitas fisik, moral dan budaya yang baik. Ini mencakup pendidikan yang berkualitas, kesehatan yang baik, dan pembangunan budaya yang memperkuat nilai-nilai positif dalam masyarakat. Selain itu upaya pengembangan manusia yang unggul dan inklusif juga mengarahkan pada penciptaan kondisi lingkungan yang kondusif. Keamanan dan ketertiban diupayakan melalui mendorong kepatuhan masyarakat terhadap peraturan dan norma sosial untuk menciptakan lingkungan yang tertib.

➤ **Misi 3**

“Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Yang Berketahanan Iklim”

Mengarahkan perwujudan suatu kondisi dimana pembangunan infrastruktur terlaksana dengan memperhatikan dampak lingkungan, yang mengandung makna bahwa memanfaatkan sumber daya secara efisien, ekosistem alami terjaga dan dikelola secara berkelanjutan, berketahanan terhadap bencana namun tetap membangun infrastruktur baru berdasarkan potensi dan daya dukung wilayah yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat. Hal ini dimaksud untuk melindungi dan memulihkan ekosistem alami untuk mempertahankan keanekaragaman hayati dan fungsi ekologisnya.



Sementara itu berketahanan iklim mengandung makna berketahanan terhadap kondisi ekstrem yang dapat mengakibatkan bencana, ketahanan terhadap bencana diupayakan melalui pengembangan strategi untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, termasuk bencana alam dan non alam.

➤ **Misi 4**

“Meningkatkan Good Governance Yang Bernafaskan Keagamaan”

Mengarahkan perwujudan pemerintahan yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, sambil tetap memegang teguh nilai-nilai keagamaan. Pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas yang berarti setiap tindakan, keputusan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus dapat diakses dan dipahami oleh publik. Serta bertanggung jawab atas segala keputusan dan tindakan yang diambil serta meningkatkan kompetensi ASN yang Berakhlak. Pemerintah harus bersedia diawasi dan dievaluasi oleh publik serta memberikan pertanggungjawaban yang jelas atas penggunaan sumber daya publik. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga merupakan kunci untuk menciptakan pemerintahan yang inklusif dan responsif, menuju reformasi birokrasi.

Misi ini juga menekankan pentingnya nilai-nilai keagamaan sebagai landasan dalam setiap aspek tata kelola pemerintahan. Ini mencakup integritas, keadilan, dan penghormatan terhadap etika dan moral dalam menjalankan pemerintahan.

➤ **Misi 5**

“Meningkatkan Produktivitas Perekonomian Yang Berdaya Saing”

Mengarahkan sumber daya dan upaya dalam mewujudkan optimalisasi potensi ekonomi lokal guna menciptakan transformasi ekonomi yang berdaya saing. Melalui strategi ini, kami berkomitmen untuk



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
DI BARRU!*

mengidentifikasi dan mengembangkan keunggulan ekonomi Kabupaten Barru, memanfaatkan serta mengintegrasikan sumber daya lokal dengan cara yang inovatif dan berkelanjutan.

Peningkatan investasi menjadi pilar utama dalam mendukung upaya ini, dengan mengundang investasi dalam skala lokal dan internasional untuk mendukung pertumbuhan sektor basis seperti sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Dengan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat terwujud, memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan.

TABEL 1.5

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kab. Barru

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Visi : BARRU BERKEADILAN, BARRU MAJU BERKELANJUTAN, BARRU SEJAHTERA LEBIH CEPAT												
Misi 1: Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka	T.1 Meningkatkan Pemerataan Pendapatan Masyarakat		Indeks Gini	Poin	0,3	0,297	0,295	0,292	0,29	0,288		
		S1.1 Berkurangnya Kemiskinan Masyarakat	Angka Kemiskinan	%	7,45	6,58	5,85	5,13	4,4	4,07		
		S1.2 Berkembangnya Lapangan Kerja dan kualitas tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,33	6,24	5,79	5,33	4,88	4,43		
Misi 2 : Membangun Manusia yang Unggul dan Inklusif	T.2 Meningkatkan Kualitas Manusia yang Cerdas dan Sehat		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	poin	75,22	75,77	76,32	76,87	77,42	77,97		
		S2.1	Indeks Pendidikan	Poin	67,51	68,15	68,78	69,42	70,05	70,68		



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
DI BARRU!*

		Meningkatnya Mutu pendidikan	Nilai Literasi dan Numerasi Pada Rapor Pendidikan	Poin	66,11	69,59	73,08	76,56	80,05	83,54	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		S2.2 Meningkatkan Derajat Kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	82,51	83,31	84,11	84,91	85,7	86,49	
			Prevalensi Stunting	%	19,50	17,72	16,08	14,24	12,55	11	
Misi 3 : Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur dan wilayah Yang Berketahanan Iklim	T.3 Meningkatkan Daya Saing Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Wilayah yang berketahanan terhadap Bencana		Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,54	3,66	3,78	3,9	4,02	4,14	
		S3.1 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Indeks Daya saing Pilar Infrastruktur	Poin	3,995	4	4,005	4,01	4,015	4,02	
		S3.2 Menurunnya Emisi GRK	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	36,56	39,88	43,2	46,51	49,83	53,15	
		S3.3 Meningkatkan Kualitas Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana	Poin	127	112	99	92	85	78	
Misi 4 : Meningkatkan Good Governance yang Bernafaskan Keagamaan	T.4 Meningkatkan Integritas Tata Kelola Pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	70,82	73,37	75,91	78,46	81	83,54	
		S4.1 Meningkatkan kualitas birokrasi yang responsif, adaptif, kolaboratif yang bernafaskan	Nilai Sakip	Poin	62,83	65,87	68,92	71,96	75	78,04	
			Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,01	4,066	4,123	4,179	4,235	4,291	
			Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	76,5	77,3	78,1	78,9	79,7	80,5	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

SINGGAH
di BARRU!

		keagamaan	Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3	4	4	
Misi 5: Meningkatkan Produktivitas perekonomian yang Berdaya Saing	T.5 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Daerah		PDRB Perkapita	Juta Rupiah	56,26	66,75	77,23	87,52	98,21	108,75	
		S5.1 Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,74	5,81	6,11	6,37	6,72	7,03	
		S5.2 Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	5,29	5,62	5,94	6,29	6,59	7,21	
		S5.3 Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	14,17	16,01	19,27	22,17	27,07	30	

Sumber : RPJMD Kab. Barru 2025-2029

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan tujuan sasaran serta indikator yang akan mendukung pencapaian Misi Kabupaten Barru terdiri atas 5 tujuan, dan 11 sasaran dengan rumusan indikator sebanyak 5 indikator tujuan dan 16 indikator sasaran sehingga total indikator yang digunakan untuk mengukur capaian Misi Kabupaten Barru sebanyak 18 indikator.

c. Program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan dalam penyusunan program Pembangunan Jangka Menengah Daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan sasaran pembangunan daerah. Program pembangunan daerah dirumuskan



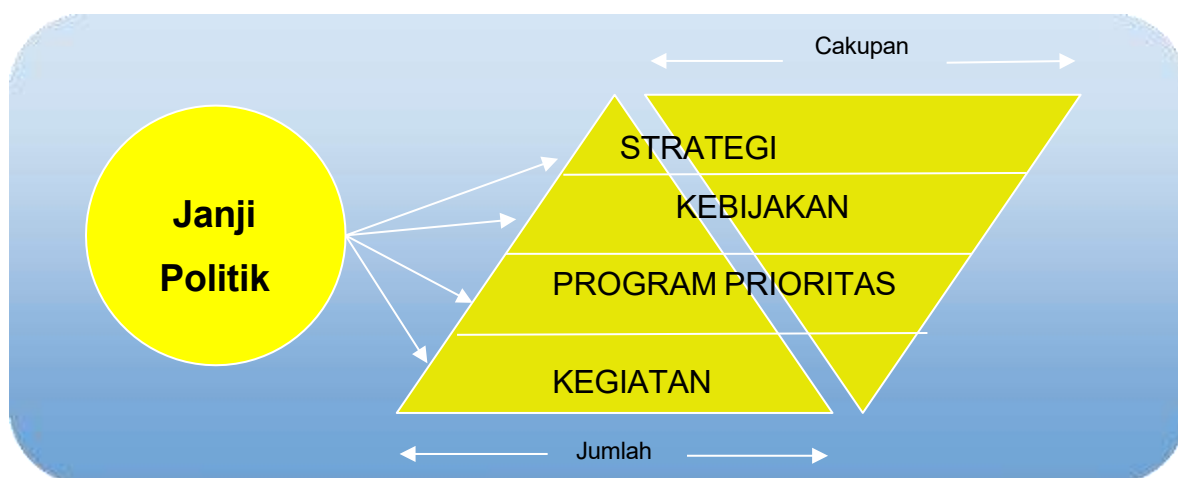
dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas terhadap sasaran Pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Prioritas Pembangunan daerah merupakan Upaya dan dukungan terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah. Adapun program prioritas yang merupakan janji politik Bupati dan Wakil Bupati akan menjadi arahan dalam menetapkan program prioritas sebagai berikut :

1. Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka;
2. Peningkatan Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
3. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur;
4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
5. Pengembangan Kawasan Industri Barru;
6. Pembangunan dan Pengembangan Agroteknologi, Agropolitan serta Hirilisasi Pada Sektor Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Peternakan;
7. Pengembangan Pariwisata Tuntas;
8. Pemberdayaan dan Penguatan UMKM;

Program prioritas pembangunan daerah adalah program yang secara langsung menopang perwujudan visi misi kepala daerah terpilih sebagaimana direpresentasikan dalam janji kampanye sebagai program unggulan. Berbasis pada analisis konten unsur visi dan misi bupati terpilih dan mengikuti regulasi nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Verifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pernyataan ini dapat diilustrasikan pada gambar berikut ini :

GAMBAR 1.4



**TABEL 1.6
RPJMD 2025-2029**

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	JANJI POLITIK BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PROGRAM PERMENDAGRI 90/2019	JADWAL PELAKSANAAN	SUMBER PENGANGGARAN	URUSAN
1	Misi 1: Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka					
	Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka	Percepatan Penanggulangan kemiskinan terintegrasi dan Terpadu (PIK PAKET).	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	2025-2030	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Sosial
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2025-2030	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Sosial
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSAL	2025-2030	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Sosial
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2025-2030	APBN, APBD Prov, APBD Kab	PUTR
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2025-2030	APBN, APBD Prov, APBD Kab	PUTR



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
DI BARRU!*

			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2025-2030	APBN, APBD Prov, APBD Kab	PUTR
		Pendidikan dan Pelatihan Vokasi;	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2025-2030	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Naker
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2025-2030	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Pemuda OR
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	2025-2030	APBN, APBD Prov, APBD Kab	PUTR
		Subsidi SPP Mahasiswa S1, S2, dan S3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2025-2030	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Pemuda OR
2	Misi 2 : Membangun Manusia yang Unggul dan Inklusif					
	Peningkatan kualitas dan akses Pelayanan Kesehatan dan pendidikan	Peningkatan Kualitas dan akses pelayanan pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	2025-2030	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Pendidikan
		Pembangunan Akademi Sepak Bola Ramang;	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2025-2030	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Pemuda OR
		Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk SD/MI dan SMP/Mts;	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	2025-2030	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Pendidikan
		Beasiswa 5 orang untuk Mahasiswa Kedokteran;	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	2025-2030	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Pendidikan
		Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	2025-2030	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Pendidikan
		Peningkatan kualitas dan akses Pelayanan Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2025-2030	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kesehatan
		Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan;	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2025-2030	APBN, APBD Prov, APBD Kab	PPPA



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

		Peningkatan kesejahteraan kader posyandu;	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2025-2030	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kesehatan
3	Misi 3 : Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur wilayah Yang Berketahanan Iklim					
	Peningkatan kualitas dan kuantitas Infrastruktur	Peningkatan Infrastruktur Jalan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	2025-2030	APBN, APBD Prov, APBD Kab	PUTR
		Peningkatan Infrastruktur Irigasi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	2025-2030	APBN, APBD Prov, APBD Kab	PUTR
		Peningkatan Infrastruktur air Bersih	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	2025-2030	APBN, APBD Prov, APBD Kab	PUTR
4	Misi 4 : Meningkatkan Good Governance yang Bernafaskan Keagamaan					

	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penerapan dan Pengembangan Pemerintahan yang berbasis elektornik (SPBE)	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2025-2030	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Komunikasi Informatika
		merit system ASN;	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2025-2030	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kepegawaian
		Digitalisasi Desa;	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2025-2030	APBN, APBD Prov, APBD Kab	PMD
		Perbaikan tata kelola musabab tilawatil qur'an dan umroh serta peningkatan insentif bagi pegawai sara dan guru mengaji;	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2025-2030	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Sekretariat Daerah
		Perbaikan Tata Kelola dan peningkatan TPP ASN termasuk TPP bagi guru bersertifikasi	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2025-2030	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Keuangan



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

5	Misi 5: Meningkatkan Produktivitas perekonomian yang Berdaya Saing					
	Pengembangan Kawasan Industri Barru	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri Barru (KIBAR);	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2025-2030	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Perindustrian
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	2025-2030	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Perindustrian
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	2025-2030	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Perindustrian
	Pembangunan dan Pengembangan Agroteknologi, agropolitan serta Hilirisasi pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan;	Perbaikan tata kelola dan subsidi pupuk;	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2025-2030	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Pertanian
		Pembangunan dan Pengembangan Agroteknologi, agropolitan serta Hilirisasi pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan;	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2025-2030	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Pertanian
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2025-2030	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Pertanian
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2025-2030	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Perikanan
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2025-2030	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Perikanan
		SPBU Nelayan;	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2025-2030	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Perikanan
	Pengembangan Pariwisata Tuntas	Pembangunan Pariwisata Gurilla	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	2025-2030	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Pariwisata
	Pemberdayaan dan Penguatan UMKM	Penguatan Kapasitas UMKM dan Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis lokal;	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2025-2030	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kop, UKM
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2025-2030	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kop, UKM

Sumber : RPJMD Kab. Barru 2025-2029



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
DI BARRU!*

TABEL 1.7

Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah
Kabupaten Barru 2025-2030

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PERMENDAGR 190/2019	Perencanaan Penganggaran						TOTAL ANGGARAN	SUMBER PENGANGGARAN	URUSAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	Misi 1: Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka											
	Meningkatkan Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Berkurangnya Kemiskinan Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	77.246.700	659.446.700	659.446.700	659.446.700	659.446.700	659.446.700	3.374.480.200	APBD	Sosial
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	158.000.000	158.000.000	158.000.000	158.000.000	158.000.000	790.000.000	APBD	Sosial
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	833.975.800	1.883.975.800	1.883.975.800	1.883.975.800	1.883.975.800	1.883.975.800	10.253.854.800	APBD	Sosial
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.752.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000	6.252.000.000	APBD	PUTR
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.249.433.710	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	6.249.433.710	APBD	PUTR
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	241.931.400	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	10.241.931.400	APBD	PUTR
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	780.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	13.280.000.000	APBD	PUTR
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	875.000.000	APBD	UMKM
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	1.750.000.000	APBD	UMKM
		Berkembangnya Lapangan Kerja dan Peluang Usaha	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	6.163.600	195.255.696	195.255.696	195.255.696	195.255.696	195.255.696	982.442.080	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Naker
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	94.623.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	1.344.623.000	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Pemuda OR
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	450.000.000	1.125.000.000	1.125.000.000	1.125.000.000	1.125.000.000	1.125.000.000	6.075.000.000	APBN, APBD Prov, APBD Kab	PUTR
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2735981500	2735981500	2735981500	2735981500	2735981500	2735981500	16.415.889.000	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Pemuda OR
2	Misi 2 : Membangun Manusia yang Unggul dan Inklusif											
	Meningkatkan Kualitas Manusia	Meningkatnya Mutu pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	10.361.715.114	18.415.563.416	18.734.765.953	19.202.427.510	19.648.646.557	20.375.149.908	104.722.268.459	APBD	Pendidikan
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAAGAN	491.735.400	1.300.000.000	1.300.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	4.891.735.400	APBD	Pemuda OR



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

SINGGAH
DI BARRU!

		Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat	PROGRAM PENUHUN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	22.068.514.871	24.425.366.358	26.852.902.994	29.523.193.293	32.460.512.623	32.460.512.623	167.791.002.762	APBD	Kesehat an
			PROGRAM PENGARUSUTA MAAN GENDER DAN PEMBERDAYAA N PEREMPUAN	22500000	47250000	51975000	57172500	62889750	69178725	310.965.975	APBN, APBD Prov, APBD Kab	PPPA
			PROGRAM PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	23.100.530	26.342.221	26.623.109	27.061.296	27.680.600		130.807.756	PPPA	PPPA
3	Misi 3 : Membangun dan mengembangkan Infrastruktur wilayah Yang Berketahanan Iklim											
	Meningkatkan Daya Saling Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Wilayah yang berketahanan terhadap Bencana	Meningkatnya Kualitas infrastruktur	PROGRAM PENYELENGGA RAAN JALAN	13.454.500.240	50.334.596.350	56.475.405.400	44.442.692.425	47.994.535.300	212.701.729.715	425.403.459.430	APBD	PUTR
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANG AN SISTEM DRAINASE	1.350.000.000	2.948.687.500	3.848.250.000	3.488.425.000	3.848.250.000	3.488.425.000	17.622.037.500	APBD	PUTR
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	4.953.624.388	6.200.000.000	6.820.000.000	6.800.000.000	8.350.000.000	8.350.000.000	41.473.624.388	APBD	PUTR
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	832.784.518	17.000.000.000	40.000.000.000	-	-	-	57.832.784.518	APBD	PUTR
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANG AN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	2.175.000.000	2.175.000.000	2.600.000.000	1.725.000.000	1.725.000.000	10.400.000.000	APBD	PUTR
		Memurunya Emisi GRK	PROGRAM PENGENDALIA N PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	50.000.000	77.385.450	769.000.000	878.000.000	685.000.000	864.000.000	900.000.000	APBD	LH
		Sasaran : Meningkatnya Kualitas Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULAN GAN, PENYELAMATA N KEBAKARAN DAN PENYELAMATA N NON KEBAKARAN	1.471.343.200	1.501.843.200	1.502.343.200	1.502.843.200	1.503.343.200	7.481.716.000	7.481.716.000	APBD	Keseatr, aman dan Kesetrta an
			PROGRAM PENANGGULAN GAN BENCANA	719.551.560	1.246.253.000	1.544.250.000	1.578.750.000	1.501.500.000	6.672.269.500	6.672.269.500	APBD	Keseatr, aman dan Kesetrta an
4	Misi 4 : Meningkatkan Good Governance yang Bernafaskan Keagamaan											
	Meningkatkan Integritas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas birokrasi yang responsif, adaptif, kolaboratif yang bernafaskan keagamaan	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.148.660.480	1.805.000.000	2.150.000.000	2.335.000.000	2.435.000.000	2.435.000.000	13.308.660.480	APBD	Kesatr, e SP
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	263.820.100	542.590.595	360.563.896	630.590.924	414.900.528	704.770.617	2.917.236.759	APBD	Kesatr, mahan



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

SINGGAH
DI BARRU!

			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	22.214.540	22.229.651	22.280.477	22.308.565	22.376.531	22.376.531	133.766.294	APBD	PMD
			PROGRAM PENATAAN DESA	42.319.600	49.268.000	120.143.200	41.920.600	-	-	253.651.400	APBD	PMD
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	14.367.899.400	15.653.736.900	15.966.811.638	16.286.147.871	16.611.870.828	16.944.108.245	81.462.675.482	APBD	Sekretariat Daerah
5	Misi 5: Meningkatkan Produktivitas perekonomian yang Berdaya Saing											
Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Daerah	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	22.830.000.000	50.000.000.000	3.500.000.000	215.000.000	150.000.000	150.000.000	76.845.000.000	APBD	Perindustrian
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	300.000.000	-	-	-	-	-	300.000.000	APBD	Perindustrian
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.407.644.500	-	-	-	-	-	1.407.644.500	APBD	PUTR
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	72.545.200	268.426.980	278.949.443	317.632.305	331.171.307	331.171.307	1.599.896.542	APBD	PMPTS P
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	180.000.000	183.600.000	187.272.000	187.272.000	187.272.000	187.272.000	1.112.688.000	APBD	PMPTS P
	Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Daerah		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	2.200.000.000	2.860.000.000	3.718.000.000	4.833.400.000	6.283.420.000	19.894.820.000	APBD	Pertanian
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	2.728.368.100	11.160.833.000	12.970.833.000	14.928.833.000	16.839.233.000	33.262.120.100	91.890.220.200	APBD	Pertanian
			AN PRASARANA PERTANIAN									
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	250.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	2.050.000.000	4.100.000.000	APBD	Pertanian
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKLAMAN BUDIDAYA	650.232.960	1.230.350.000	1.210.714.500	1.211.094.140	1.211.489.161	1.211.489.161	6.705.369.922	APBD	Pertanian
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKLAMAN TANGKAP	1.157.000.000	1.684.850.702	1.778.328.202	1.858.120.200	2.017.670.978	2.017.670.978	10.513.641.060	APBD	Pertanian
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	161.530.000	170.000.000	172.000.000	175.000.000	177.000.000	177.000.000	1.032.530.000	APBD	Pertanian
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	5.000.000.000	APBD	Pariwisata
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	93.400.000	95.000.000	9.900.000	105.000.000	105.000.000	110.000.000	518.300.000	APBD	Kop. UKM
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	17.208.000	17.208.000	17.208.000	17.208.000	17.208.000	17.208.000	103.248.000	APBD	Kop. UKM
			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	36.000.000	39.000.000	43.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	253.000.000	APBD	Kop. UKM
	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	900.867.313	941.079.223	941.079.223	941.079.223	941.079.223	941.079.223	4.765.396.115	APBD	BAPEND

Sumber : RPJMD Kab. Barru 2025-2029



d. Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan

Prioritas pembangunan daerah pada tahun 2025 merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran yang pada dasarnya meliputi program-program unggulan perangkat daerah, target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah berdasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya.

Program prioritas adalah program yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta syarat layanan minimal. Adapun tema pembangunan daerah tahun 2025 yaitu ***“Konsolidasi Sosial Ekonomi dan Penataan Pelayanan Dasar”*** dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka;
2. Peningkatan Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
3. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur;
4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
5. Pengembangan Kawasan Industri Barru;
6. Pembangunan dan Pengembangan Agroteknologi, Agropolitan serta Hirilisasi Pada Sektor Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Peternakan;



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
DI BARRU!*

7. Pengembangan Pariwisata Tuntas;
8. Pemberdayaan dan Penguatan UMKM dan Koperasi.

Dalam mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan daerah Kabupaten Barru tahun 2025 difokuskan pada sasaran sebagai mana pada tabel berikut :

TABEL 1.8

PRIORITAS DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2025

Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian tahun 2024	Target Perubahan Tahun 2025
Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka	Mengintegrasikan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui pembangunan sistem terpadu berbasis teknologi informasi, yang mencakup perbaikan infrastruktur layanan dasar, peningkatan akses pendidikan vokasi, dan pengembangan program pelatihan yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	Berkurangnya kemiskinan masyarakat	Angka Kemiskinan	8,31	7,45
			Berkembangnya lapangan kerja dan peluang usaha	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,42	6,33
Peningkatan Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan	Meningkatkan mutu pendidikan, derajat kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan lembaga terkait lainnya, dengan dukungan kebijakan yang mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk memastikan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas Manusia yang Cerdas dan Sehat	Meningkatnya Mutu pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,51	75,22
				Indeks Pendidikan	67,19	67,51
				Nilai Literasi dan Numerasi Pada Rapor Pendidikan	62,62	66,11
			Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	81,15	82,51
				Prevalensi Stunting	26,9	19,5
Peningkatan Kualitas dan kuantitas infrastruktur	Meningkatkan kualitas infrastruktur berkelanjutan dan ketahanan wilayah terhadap	Meningkatkan Daya Saing Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Wilayah yang	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Indeks Daya saing Pilar Infrastruktur	3,99	3,995
			Menurunnya Emisi GRK	Penurunan Intensitas Emisi GRK	-	36,56



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
DI BARRU!*

Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian tahun 2024	Target Perubahan Tahun 2025
	bencana melalui perencanaan terpadu berbasis risiko, optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, penguatan kapasitas sumber daya manusia dengan penerapan teknologi inovatif, penguatan sistem peringatan dini, serta perluasan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat guna membangun infrastruktur yang tangguh, ramah lingkungan, dan adaptif terhadap perubahan iklim serta risiko bencana	berketahanan terhadap Bencana	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana	168,4	127
Peningkatan tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui inovasi pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan, dengan dukungan pengembangan sumber daya manusia yang kompeten serta berbasis hasil penelitian	Meningkatkan Integritas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas birokrasi yang responsif, adaptif, kolaboratif yang bernafaskan keagamaan	Nilai SAKIP	61,42	62,83
				Indeks Pelayanan Publik	3,48	4,01
				Indeks Kerukunan Umat Beragama	75,7	76,5
Pembangunan dan Pengembangan Agroteknologi, agropolitan serta Hilirisasi pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan	Mengembangkan kawasan industri yang terintegrasi dengan sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, dan pariwisata, serta memperkuat kapasitas UMKM,	Meningkatkan Produktifitas Ekonomi Daerah	Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	4,92	5,74



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

SINGGAH
di BARRU!

Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian tahun 2024	Target Perubahan Tahun 2025
Pengembangan Kawasan Industri Barru	menciptakan iklim investasi yang kondusif, dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah		Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	4,43	5,29
Pemberdayaan dan Penguatan UMKM dan Koperasi						
Pengembangan Pariwisata Tuntas			Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	12,2	14,17

Sumber : P-RKPD Kab. Barru Tahun 2025

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) diterapkan pada Urusan Wajib Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota Sesuai dengan amanat Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018. Untuk urusan Pemerintahan lainnya, daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar indikator kinerja.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka penerapan SPM di daerah Kabupaten



Barru adalah sejumlah 6 (enam) bidang urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta Sosial.

Sesuai dengan kapasitas keuangan negara dan prioritas pembangunan yang ada, maka wujud pelayanan yang diwajibkan di atas merupakan pelayanan yang minimal yang dapat diberikan oleh pemerintah melalui pemerintahan di daerah baik pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Sehingga pelayanan yang diberikan bukanlah pelayanan yang diorientasikan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat, tetapi merupakan pelayanan dasar. Sementara bila ada daerah yang lebih mampu memberikan pelayanan yang dapat lebih memuaskan masyarakat, berdasarkan pada kreatifitas dan inovasi dari pemerintah daerah tersebut sehingga dikatakan sebagai pelayanan minimal.

1.1.3.1. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 13 Tahun 2023 tentang SPM bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 tentang



SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota;

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyusunannya didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Diterapkan pada urusan wajib. Oleh karena itu SPM merupakan bagian integral dari Pembangunan yang berkesinambungan, menyeluruh, terpadu sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
2. Diberlakukan untuk seluruh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. SPM harus mampu memberikan pelayanan kepada publik tanpa kecuali (tidak hanya masyarakat miskin), dalam bentuk, jenis, tingkat dan mutu pelayanan yang esensial dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
3. Menjamin akses masyarakat mendapat pelayanan dasar tanpa mengorbankan mutu dan mempunyai dampak luas pada masyarakat.
4. Merupakan indikator kinerja bukan standar teknis, dikelola dengan manajerial profesional sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.
5. Bersifat dinamis.



1.1.3.2. Kebijakan Umum

Kebijakan dan program pembangunan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru untuk mencapai sasaran adalah meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

SPM yang telah ditetapkan pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten Barru untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Barru menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Daerah. Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Organisasi perangkat Daerah (Renja OPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
DI BARRU!*

A. Bidang Pendidikan

1. Jenis Pelayanan Dasar

Urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

- Jenis pelayanan minimal urusan Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD);
- Jenis pelayanan minimal Urusan Pendidikan Dasar;
- Jenis pelayanan minimal urusan Pendidikan Kesetaraan.

2. Target pencapaian SPM Pemerintah Kabupaten Barru

- Rencana pemenuhan Standar Pelayanan Minimal urusan Pendidikan dan Kerangka Pendanaan tahun 2025 adalah sebagai berikut;

TABEL. 1.9

TARGET PEMENUHAN SPM BIDANG PENDIDIKAN KAB. BARRU TAHUN 2025

NO.	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	JUMLAH SASARAN PEMENUHAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA
1	Program Penyelenggaraan Pendidikan	Persentase warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM)	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1. Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit	8	358.785.114	DAU / DAK FISIK
				2. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2. Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	6.859	3.732.022.800	DAU/DAK NON FISIK
				3. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	3. Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Orang	643	5.561.601.300	DAU
				4. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	4. Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	200	123.334.100	DAU
				5. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	5. Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	254	81.138.100	DAU



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
DI BARRU!*

NO.	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	JUMLAH SASARAN PEMENUHAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				6	Pembangunan Ruang Kelas Baru	6	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	8	255.034.936	DAU
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SPM SD)	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	7	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	7	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	5	53.377.200	DAU
				8	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	8	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	14	61.819.447	DAU
				9	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	9	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	76	1.285.991.287	DAU
				10	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Perjaga Sekolah	10	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Perjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	2	204.827.975	DAU
				11	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	11	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	10	27.478.000	DAK
				12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	12	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	25	208.000.000	DAK
				13	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	13	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan	Peserta didik	600	304.772.600	DAU
NO.	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	JUMLAH SASARAN PEMENUHAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
					Non Akademik						
				14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	14	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	15	186.747.700	DAU
				15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	15	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kemahasiswaan, Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	419	312.989.700	DAU
				16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	16	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	120	25.162.200	DAU
				17	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	17	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	199	2.528.645.700	DAU



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
DI BARRU!*

NO.	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	JUMLAH SASARAN PEMENUHAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1 8 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 8 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	226	62.239.300	DAU
				1 9 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	1 9 Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan	199	173.652.300	DAU
				2 0 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2 0 Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	49	1.288.633.130	DAU
				2 1 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	2 1 Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	16.407	16.443.330.000	DAK NON FISIK
3	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2 2 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2 2 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	1	19.067.800	DAU
				2 3 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2 3 Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	2	20.367.698	DAU
				2 4 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2 4 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah	Unit	21	454.226.079	DAU
NO.	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	JUMLAH SASARAN PEMENUHAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Dibangun				
				2 5 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2 5 Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	13	1.088.975.051	DAU
				2 6 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2 6 Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	600	458.866.400	DAU
				2 7 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2 7 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	3	22.796.000	DAU
				2 8 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2 8 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kemakan Pangkat/Olongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	244	205.962.800	DAU
				2 9 Pembinaan dan Manajemen Sekolah	2 9 Jumlah Sekolah Pertama yang Dilaksanakan	Satuan Pendidikan	39	18.290.200	DAU



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
DI BARRU!*

NO.	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	JUMLAH SASARAN PEMENUHAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
4	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi	Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan/Nonformal		Pembinaan						
				30	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	30	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	39	2.498.306.400	DAU
				31	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	31	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	39	21.878.800	DAU
				32	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	32	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Satuan Pendidikan	3.407	96.843.200	DAU
				33	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	33	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	6.882	8.228.120.000	DAK NON FISIK
				34	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	34	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Peserta Didik	1050	2.545.488.600	DAU/DAK NON FISIK
NO.	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	JUMLAH SASARAN PEMENUHAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		asi dalam pendidikan kesetaraan (SPM)									

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru 2025

Rencana pemenuhan Standar Pelayanan Minimal urusan Pendidikan yang dijelaskan pada tabel diatas menegaskan komitmen Pemerintah Daerah antara lain;

1. Memperluas akses pendidikan sejak usia dini sampai menengah;
2. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik melalui pengembangan karir dan pembinaan kelembagaan;
3. Menjamin keberlanjutan belajar bagi kelompok rentan melalui program kesetaraan;
4. Mengoptimalkan anggaran dengan fokus pada pembiayaan peserta



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
DI BARRU!*

didik dan rehabilitasi sarana pendidikan.

Dengan demikian program tidak hanya berorientasi pada akses fisik tetapi juga kualitas tenaga pendidik dan tata kelola lembaga.

TABEL 1.10

REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SPM BIDANG PENDIDIKAN KAB. BARRU TAHUN 2025

No	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	FISIK	KEUANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit	8	358.785.114	5	247.501.610	82,51	68,98	DAU/DAK		
2	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	6.839	3.732.022.800		3.615.000.000	96,86	96,86	DAU/DAK NON FISIK		
3	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Orang	645	5.561.601.300	645	5.296.800.000	100	95,24	DAU		
4	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	200	123.334.100	200	106.832.000	86,62	86,62	DAU		
5	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	254	81.158.100	254	63.611.250	100	78,38	DAU		
6	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	8	255.034.936	1	188.061.030	12,5	94,98	DAU		
7	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	5	53.377.200	3	34.155.000	60,00	63,99	DAU		
8	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	14	61.819.447	2	12.230.023	14,28	19,78	DAU		
9	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	76	1.285.991.267	51	899.762.540	67,10	68,97	DAU		
10	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	2	204.827.975	1	53.763.484	50,00	26,25	DAU		
11	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	10	27.478.000	1	27.450.000	10,00	99,90	DAK FISIK		
12	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	25	208.000.000	2	-	-	-	DAK FISIK		
13	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta didik	600	304.772.700	600	151.478.219	100	49,70	DAU		
14	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	15	186.747.700	15	168.000.000	100	89,96	DAU		
15	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	419	312.989.700	419	198.652.000	100	63,47	DAU		
16	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	120	25.162.200	-	-	-	-	DAU		
17	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	199	2.528.645.700	199	2.476.620.000	100	97,94	DAU		
18	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	226	62.239.300	-	1.600.000	-	2,57	DAU		
19	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan	199	173.652.300	199	47.731.000	100	27,50	DAU		
20	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	49	1.288.633.130	31	1.054.595.762	63,26	81,84	DAU		
21	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	16.407	16.443.330.000	16.407	13.861.078.600	100	96,46	DAK NON FISIK		
22	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	1	19.067.800	-	-	-	-	DAU		
23	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	2	20.367.698	1	9.762.349	50,00	47,93	DAU		
24	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	21	454.226.079	12	360.112.930	85,43	85,43	DAU/DAK FISIK		
25	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	13	1.088.975.051	10	898.875.213	76,92	82,54	DAU		



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
DI BARRU!*

No	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	FISIK	KEUANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	600	458.866.400	600	353.200.560	100	76,97	DAU		
27	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	3	22.796.000	3	18.000.000	100	78,96	DAU		
28	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	244	205.962.800	244	144.557.721	100	70,19	DAU		
29	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	39	18.290.200	-	-	-	-	DAU		
30	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	39	2.498.306.400	39	2.478.829.600	100	99,22	DAU		
31	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	39	21.878.800	-	-	-	-	DAU		
32	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Satuan Pendidikan	3.407	96.843.200	3.407	32.030.000	100	33,07	DAU		
33	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	6.882	8.228.120.000	6.882	7.730.460.000	100	93,95	DAK NON FISIK		
34	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Peserta Didik	1050	2.545.488.600	1050	2.319.200.000	100	91,11	DAU/DAK NON FISIK		

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru 2025

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal pada bidang pendidikan merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin akses dan mutu layanan pendidikan dasar bagi seluruh warga negara. Data capaian yang disajikan pada tabel diatas mencakup indikator output, target, realisasi, presentase capaian fisik dan keuangan, serta sumber pendanaan. Dari data yang disajikan dapat disimpulkan bahwa :

1. Capaian tertinggi terdapat pada aspek pembiayaan peserta didik, pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah, dan penyediaan tenaga pendidik;
2. Capaian terendah terjadi pada pembangunan fisik seperti ruang kelas, unit kesehatan sekolah, rumah dinas, perlengkapan dan alat praktik.



B. Bidang urusan Kesehatan

1. Jenis Pelayanan Dasar

Urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2024 pada Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar
- d. Pelayanan kesehatan balita sesuai standar
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar
- i. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus sesuai standar
- j. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga TBC sesuai standar
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar.



2. Target pencapaian SPM Pemerintah Kabupaten Barru urusan Kesehatan

a). Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar

Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar adalah Pelayanan antenatal yang diberikan kepada ibu hamil dengan standar kuantitas kunjungan 6 kali selama periode kehamilan yakni satu kali trimester pertama, dua kali trimester kedua dan tiga kali trimester ketiga dengan standar kualitas yang memenuhi kriteria 10T dan pelayanan ultrasonografi. Tahun tahun 2024 jumlah sasaran ibu hamil 2370 dengan capaian 2292 (70%), pada tahun 2025 jumlah sasaran ibu hamil 3259 dengan capaian 2041 (63%) . Indikator ini turun jika dibandingkan tahun 2024. Cakupan pelayanan kesehatan dalam pemeriksaan ibu hamil K6 (kunjungan 6 kali 1,2,3) sesuai standar belum mencapai target disebabkan karena sasaran pusdatin terlalu tinggi, pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (K4) dipengaruhi oleh jumlah K1 murni yang rendah yaitu 1669 (51,21%), kesalahan pengelola dalam menentukan jumlah sasaran, ada ibu hamil yang merupakan pendatang, hamil diluar nikah, ibu hamil sibuk serta malu karena jumlah kehamilan yang dekat dan jumlah anak yang banyak serta masih ada wilayah yang sulit di akses seperti daerah pegunungan.

Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan ibu hamil adalah:

- Orientasi dan Edukasi Petugas untuk Pelayanan Catin di Puskesmas
- Pertemuan Pengkajian Audit Maternal BOK Kabupaten
- Pengadaan Stiker P4K
- Pelaksanaan Kelas ibu hamil
- Workshop Penguatan Jejaring & Pendamping Ibu Hamil Resiko Tinggi bagi Kader
- Pemantauan Bumil Resti
- Pemantauan Ibu Hamil Trimester III



- Pemantauan Ibu Hamil Yang Tidak Rutin Periksa Kehamilan
- Pemberian Suplement Zink penderita diare bagi bumil
- Sweeping Ibu Hamil Baru & Bumil Resti
- Kunjungan Rumah Bumil K4
- Pelacakan Bumil K1
- Pelayanan ANC di Posyandu
- Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil di Posyandu
- Pendampingan calon pendonor darah dalam rangka mendukung P4K
- Skreening golongan darah, protein urine dan HB pada Ibu Hamil
- Sweeping Suntikan TT pada Ibu Hamil
- Pelacakan Pada Bumil Menjelang Persalinan
- Deteksi dini kehamilan pada pengantin baru
- Screening Hepatitis pada Ibu Hamil
- Pemeriksaan HIV dan shypilis pada ibu hamil

b). Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar

Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar adalah pelayanan persalinan yang meliputi persalinan normal dan persalinan komplikasi dengan persalinan dilakukan difasilitas pelayanan kesehatan dan ditolong oleh tim paling sedikit satu orang tenaga medis dan dua orang tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dengan mengacu pada acuan persalinan normal sesuai standar dan buku saku pelayanan kesehatan ibu di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan untuk standar persalinan komplikasi. Tahun 2024 jumlah sasaran ibu bersalin 3251 dengan capaian 2379 (73%), tahun 2025 jumlah sasaran ibu bersalin 3239 dengan capaian 2195 (68%). Permasalahan dikarenakan ada ibu bersalin mendapatkan pelayanan bukan oleh tenaga kesehatan dan diluar faskes, ada ibu yang bersalin ke daerah lain, kendala biaya dan sosial budaya.



Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan ibu bersalin adalah:

- Peningkatan Kapasitas SDM Antenatal Care (ANC)
- Penguatan Manajemen Aktif Kala III kaitannya dengan pendarahan dalam proses persalinan
- Rumah tunggu kelahiran
- Pemantauan Ibu Nifas
- Sweeping ibu nifas dan neonatus
- Kegiatan rujukan persalinan

c). Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan kesehatan neonatal esensial dengan standar kuantitas kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal yakni kunjungan neonatal 1 (KN1), Kunjungan neonatal 2 (KN2), kunjungan neonatal 3 (KN3) dengan standar kualitas perawatan neonatal esensial saat lahir dan setelah lahir. Pada tahun 2024 jumlah sasaran bayi baru lahir 3091 dengan capaian 2342 (76%). Tahun 2025 jumlah sasaran Bayi Baru Lahir 3080 dengan capaian 2154 (70%) . Indikator ini menurun capaiannya dibanding tahun sebelumnya ini disebabkan karena sebagian ibu yang datang melahirkan kemudian kembali ke daerah dimana suami bekerja, kurangnya informasi mengenai pelayanan bayi baru lahir, akses ke fasyankes sulit serta sosial budaya.

Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan bayi baru lahir adalah sebagai berikut :

- Pemeriksaan neonatus atau pelayanan kesehatan bayi baru lahir/neonatal
- Pemantauan kesehatan neonatus termasuk neonatus risiko tinggi
- Orientasi Konselor ASI bagi Petugas Tkt. Kabupaten
- Orientasi Pemberian Makanan Bayi dan Anak Tkt. Kabupaten
- Pelacakan kasus kematian ibu dan bayi



- Pemantauan bayi 9-15 bulan ibu reaktif hepatitis
- Pemantauan neonatus & neonatus resti
- Pelacakan audit maternal/perinatal bayi/balita
- Pemantauan bayi resti

d). Pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan meliputi pelayanan kesehatan balita sehat dan balita sakit yang dimaksudkan untuk pemantauan tumbuh kembang anak balita. Tahun 2024 jumlah sasaran balita 15177 dengan capaian 12506 (82%), tahun 2025 jumlah sasaran balita 14866 dengan capaian 10824 (73%). Capaian Indikator mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan balita adalah:

- Pelaksanaan SDIDTK pada balita
- Pelaksanaan kelas ibu balita
- Penimbangan Rutin Bayi Balita di Posyandu
- Sweeping kegiatan SDIDTKA di Posyandu
- Pemeriksaan gigi dan Mulut di TK/PAUD
- Pelacakan Balita Yang tidak datang ke Posyandu dan yang tidak terdeteksi pertumbuhannya
- Pemberian PMT penyuluhan
- Sweping Vitamin A
- Pelaksanaan pelayanan Imunisasi dasar di posyandu

e). Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar

Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar adalah pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai dengan standar meliputi skrining kesehatan, tindak lanjut hasil skrining kesehatan dan pemberian imunisasi campak rubella, DT, td pada BIAS sesuai jadwal



dan tingkat pendidikan siswa atau usia yang setara. Pada tahun 2024 jumlah sasaran usia pendidikan dasar 26779 dengan capaian 26400 (99%), tahun 2025 jumlah sasaran usia pendidikan dasar 28338 dengan capaian 27415 (97%). Indikator ini sudah sedikit menurun dari tahun sebelumnya karena jadwal pemeriksaan yang sulit disesuaikan dengan aktivitas belajar di sekolah, komunikasi yang kurang efektif antara pihak sekolah, penyelenggara kesehatan dan orang tua siswa menyebabkan kurangnya pemahaman dan dukungan terhadap program, beberapa siswa tidak berminat atau takut melakukan pemeriksaan kesehatan, tidak ada informasi dari sekolah jika ada siswa yang sudah tidak aktif lagi dan kerang efektifnya sweping bagi siswa yang tidak hadir di sekolah. Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar adalah:

- Pelatihan dokter kecil
- Demonstrasi CTPS dan sikat gigi bersama di sekolah
- Pengukuran Kebugaran Jasmani anak sekolah
- Sosialisasi kesehatan reproduksi remaja
- Penyuluhan Kespro Remaja
- Pertemuan Tekhnis Penjaringan Anak Sekolah
- Pembinaan UKS dan kader kesehatan anak sekolah
- Pengukuran Kebugaran Jasmani anak sekolah
- Pemberian tablet Fe pada remaja putri
- Pemeriksaan berkala peserta didik
- Penyuluhan PHBS dan CTPS pada anak Sekolah Dasar
- Sweping pemberian tablet Fe pada remaja putri
- Pembinaan Kantin Sehat
- Pembinaan PKPR di sekolah
- Pemberian imunisasi BIAS



f). Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar

Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar adalah pelayanan kesehatan usia 15-59 tahun sesuai standar meliputi edukasi kesehatan tentang penyakit menular, kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, skrining faktor risiko penyakit menular dan tidak menular serta calon pengantin, skrining status imunisasi tetanus bagi WUS usia 15-39 tahun dan pemberian imunisasi td dan pelayanan KB. Tahun 2024 jumlah sasaran 122436 dengan capaian 114365 (93%), pada tahun 2025 jumlah sasaran 123600 dengan capaian 112774 (91%). Capaian Indikator mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan pemanfaatan pelayanan skrining kesehatan oleh penduduk usia produktif belum optimal dan belum merata di seluruh wilayah, masih kurang dalam pemantauan pengobatan, tindak lanjut hasil skrining belum optimal.

Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan usia produktif adalah:

- Pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut
- Skrining PPOK untuk usia ≥ 40 tahun.
- Pengukuran tekanan darah
- Pemeriksaan gula darah
- Pengukuran LILA
- Pemeriksaan Hb
- Pemeriksaan HIV dan Sifilis bagi calon pengantin jika berdasarkan hasil skrining memerlukan pemeriksaan lebih lanjut
- Pemeriksaan SADANIS dan IVA
- Pemeriksaan skrining kesehatan jiwa
- Status imunisasi TT bagi calon pengantin



- Pelayanan KB pada usia produktif adalah pelayanan KB yang dilakukan untuk PUS dengan 4T

g). Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar

Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar adalah pelayanan kesehatan usia 60 tahun ke atas sesuai standar meliputi edukasi perilaku hidup bersih dan sehat dan skrining faktor resiko pada usia lanjut. Tahun 2024 jumlah sasaran 22199 dengan capaian 15474 (70%), tahun 2025 jumlah sasaran 38863 dengan capaian 22226 (57%). Capaian Indikator sangat menurun dari tahun sebelumnya karena terbatasnya petugas dalam memberikan pelayanan dan belum optimalnya sosialisasi terkait pelayanan kesehatan lansia dan masih terbatasnya sarana pemeriksaan kesehatan lansia di semua sarana pelayanan kesehatan.

Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan lanjut usia adalah:

- Penguatan Pelayanan Posyandu Lansia
- Penguatan Petugas tentang Puskesmas Santun Lansia
- Pelayanan Kesehatan Lansia di Posyandu
- Kunjungan pelayanan homecare lansia resti
- Screening IVA
- Penimbangan BB, Pengukuran TB dan pemeriksaan TD pada lansia
- Screaning Penyakit Akibat Gangguan Kognitif, Degeneratif dan Mental Emosional
- Kunjungan kader posyandu lansia
- pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut
- anamnesis perilaku berisiko

h). Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar adalah pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi pengukuran tekanan darah, Pelayanan edukasi non farmakologi, Pelayanan farmakologi dan



Konseling kepatuhan terapi non farmakologi dan farmakologi. Pada tahun 2024 jumlah sasaran 49979 dengan capaian 44431 (89%), tahun 2025 jumlah sasaran 48812 dengan capaian 36100 (74%). Indikator mengalami penurunan dari tahun sebelumnya hal ini dikarenakan rendahnya kunjungan penderita laki-laki usia produktif ke fasilitas kesehatan karena keterbatasan waktu dan mobilitas kerja, masih ada penderita yang tidak rajin datang untuk kontrol, keterbatasan SDM dan waktu pelayanan di beberapa puskesmas dengan beban sasaran yang tinggi.

Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan hipertensi adalah:

- Pemantauan Kegiatan Pelayanan Hipertensi di Posbindu
- Pendampingan Penderita Hipertensi melalui kunjungan rumah
- Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Hipertensi berbasis Web
- Workshop Program Informasi Posbindu PTM bagi petugas Puskesmas
- Pengukuran tekanan darah
- Pelayanan edukasi non farmakologi
- Pelayanan farmakologi
- Konseling kepatuhan terapi non farmakologi dan farmakologi

i). Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus sesuai standar

Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga penderita diabetes mellitus sesuai standar meliputi pemeriksaan klinis, pemeriksaan penunjang, terapi non farmakologi (edukasi gaya hidup sehat) dan terapi farmakologi. Pada tahun 2024 jumlah sasaran 3134 dengan capaian 3510 (112%), pada tahun 2025 jumlah sasaran 3020 dengan capaian 4531 (150%). Indikator pelayanan kesehatan penderita diabetes militus telah melebihi target. Hal ini dikarenakan sudah ada kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri ke FKTP secara berkala dan ketersediaan alat.



Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan penderita Diabetes Militus adalah:

- Pelatihan Tekhnis Faktor resiko DM Secara Mandiri dan Berkelanjutan bagi petugas Puskesmas
- Pendampingan Penderita PTM (Diabetes Melitus) melalui kunjungan rumah
- Pemeriksaan klinis
- Pemeriksaan penunjang
- Terapi non farmakologi (edukasi gaya hidup sehat)
- Terapi farmakologi

j). Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar

Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada ODJG berat sesuai standar bagi psikotik akut dan skizofrenia meliputi pemeriksaan kesehatan jiwa, edukasi dan tata laksana. Pada tahun 2024 jumlah sasaran 439 dengan capaian 446 (102%), tahun 2025 jumlah sasaran 441 dengan capaian 440 (100%). Indikator pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa sudah melampaui target ini dikarenakan kegiatan pelacakan atau skrining kasus ODGJ berat sudah terlaksana dengan baik namun masih ada permasalahan yang dihadapi diantaranya sulitnya system rujukan dan masih kurangnya koordinasi lintas sektor.

Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan penderita Diabetes Militus adalah:

- Pemeriksaan kesehatan jiwa
- Edukasi
- Tata laksana



k). Pelayanan kesehatan orang terduga TBC sesuai standar

Pelayanan kesehatan orang terduga TBC sesuai standar adalah pelayanan kesehatan pada orang terduga TBC sesuai standar meliputi pemeriksaan klinis berdasarkan gejala dan tanda, pemeriksaan penunjang dan edukasi. Pada tahun 2024 jumlah sasaran 5103 dengan capaian 3669 (72%), pada tahun 2025 jumlah sasaran 4584 dengan capaian 4698 (102%) . Indikator pelayanan kesehatan orang terduga TBC mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya karena adanya sweeping bagi penderita TB, peran aktif dari petugas kesehatan dan masyarakat serta alat catridge TCM yang tersedia. Adapun permasalahan yang masih ditemui belum optimalnya penerapan kebijakan/regulasi tingkat daerah (RAD dan SK TP2TB), ketersediaan logistik catridge yang belum sesuai dengan target, keterbatasan sarana dan prasarana alat penunjang pemeriksaan (mikroskop dan mobile xray), masih ada tiga puskesmas yang masih kurang dalam pencatatan dan pelaporan (puskesmas lisu, puskesmas doi-doi, puskesmas pujananting), masih kurangnya dalam pemantauan pengobatan (pemeriksaan Follow Up untuk pasien bulan ke dua, bulan ke lima dan AP).

Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan orang terduga TBC adalah:

- Mapping Up dan Validasi Kasus TB
- Workshop Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB)
- Ketuk Pintu TB Day
- Penjaringan Suspek TB
- Pelacakan Tb Kusta Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- Gerakan Serentak Penemuan Kasus Atau Deteksi Dini Penderita TB/Suspec TB
- Pengambilan Specimen Pada Penderita Suspec TB
- Pemeriksaan Kontak Serumah Penderita TB



- pemantauan kepatuhan minum obat pasien TB Paru
- I). **Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)**

Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi edukasi perilaku berisiko dan skrining. Pada tahun 2024 jumlah sasaran 3743 dengan capaian 2650 (71%), pada tahun 2025 jumlah sasaran 3259 dengan capaian 2862 (88%). Capaian indikator meningkat dari tahun sebelumnya. Indikator ini belum mencapai target dikarenakan stigma masyarakat untuk di skrining masih rendah, koordinasi lintas program yang masih kurang, pengetahuan dan edukasi dini masih kurang dan ketersediaan anggaran operasional yang rendah.

Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV adalah :

- Sosialisasi HIV Pada Populasi Kunci
- Pemantauan Triple Eliminasi HIV, Sifilis dan Hepatitis
- Pelacakan dan deteksi dini HIV/AIDS pada Ibu hamil di posyandu
- Screening HIV pada penderita TB
- Deteksi dini dan penemuan kasus HIV / AIDS
- Pemantauan dan tatalaksana kasus HIV



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
DI BARRU!*

TABEL 1.11

CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KAB. BARRU TAHUN 2025

Provinsi		: SULAWESI SELATAN		
Kabupaten/Kota		: BARRU		
Periode		: Januari s/d Desember		
NO	JENIS PELAYANAN DASAR	Sasaran	Realisasi	%
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3259	2041	63
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3239	2195	68
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3080	2154	70
4	Pelayanan Kesehatan Balita	14866	10824	73
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	28338	27415	97
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	123600	112774	91
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	38863	22226	57
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	48812	36100	74
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	3020	4531	150
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa berat	441	440	100
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan	4584	4698	102
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3259	2862	88

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru 2025



C. Bidang urusan Pekerjaan Umum

1. Jenis Pelayanan Dasar

SPM Pekerjaan Umum merupakan penjabaran dari target yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten/Kota
- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Kabupaten/Kota.

2. Target pencapaian SPM Pemerintah Kabupaten Barru

Target dan realisasi pencapaian SPM bidang urusan Pekerjaan Umum pada Kabupaten Barru sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten/Kota.
 - Jumlah penduduk di Kabupaten Barru yang memperoleh akses air minum layak pada tahun 2025 adalah 97,52%
- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Kabupaten/Kota
 - Jumlah penduduk di Kabupaten Barru yang memperoleh akses sanitasi layak pada tahun 2025 adalah 66,64%

TABEL 1.12

**CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
PEKERJAAN UMUM KAB. BARRU TAHUN 2025**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI 2025
1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase warga negara yang memperoleh akses air minum	83%	96,75%
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	66,9%	66,46%

Sumber : Dinas PUTR- PERKIM 2025

D. Bidang urusan Perumahan Rakyat

1. Jenis Pelayanan Dasar

Penerapan SPM Perumahan Rakyat merupakan penjabaran dari target yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Daerah Kabupaten/ Kota terdiri atas:

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.



2. Target pencapaian SPM Pemerintah Kabupaten Barru

Target dan realisasi pencapaian SPM bidang urusan Perumahan Rakyat pada kabupaten Barru sebagai berikut:

- a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana;
 - Jumlah penduduk di Kabupaten Barru yang memperoleh rumah layak huni bagi korban bencana pada tahun 2025 adalah 100 %.
- b. Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah;
 - Jumlah penduduk di Kabupaten Barru yang memperoleh rumah layak huni bagi yang terkena relokasi program Pemerintah daerah 0 %.



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

SINGGAH
DI BARRU!

TABEL 1.13

REALISASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT KAB. BARRU TAHUN 2025

NO	PROG RAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		1.328.349.900	1.270.096.116	95,61 %
	1	Sub Kegiatan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani		3.682.200	2.825.600	76,74 %
	2	Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana		9.686.900	6.573.250	67,86 %
	3	Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana		15.500.000	9.704.800	62,61 %
	4	Sub Kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator		21.980.200	12.665.600	57,62 %
	5	Sub Kegiatan Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		6.398.800	6.398.800	100 %
	6	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		921.145.800	910.524.266	98,85 %
	7	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		349.956.000	327.802.600	93,67 %

Sumber : Dinas PUTR-PERKIM 2025



E. Bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Urusan Trantibum Damkar

a. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari :

- Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- Pelayanan Penegakan Perda/Perkada.
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

b. Realisasi Capaian SPM Pemerintah Kabupaten Barru

Realisasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota mencapai 100 %
- Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota bencana mencapai 100 %
- Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota mencapai 100 %



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
DI BARRU!*

TABEL 1.14
REALISASI CAPAIAN SPM
SATPOL PP DAMKAR DAN PENYELAMATAN TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Capaian / realisasi		
1.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	- Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	365 Kasus	100 %
			- Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	6 Kasus	100 %
			- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	900 Laporan	100 %
			- Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	48 dokumen	100 %



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
DI BARRU!*

2.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penyelesaian Pelanggaran perda dan peraturan bupati/walikota	- Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	7 Laporan	100 %
			- Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 Laporan	100%
3	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Dan Pengendalian Penanggulangan Bahaya Kebakaran	- Respon Time	9,6 Menit	100 %
			- Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota -	150 Laporan	100%
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	6 Unit	100 %
			- Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 Dokumen	100%

Sumber : Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan 2025



2. Urusan Trantibum Bencana

a. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :

- Pelayanan informasi rawan bencana.
- Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

b. Realisasi Capaian SPM Pemerintah Kabupaten Barru

Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

- Pelayanan informasi rawan bencana mencapai 100%.
- Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana mencapai 100%.
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana mencapai 96,49%.



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
DI BARRU!*

TABEL 1.15
REALISASI CAPAIAN SPM
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Capaian / realisasi		
1	Pelayanan informasi rawan Bencana	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	125 orang	100 %
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	1 Kawasan	100%
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1 Laporan	100%
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1 kawasan	100%
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	4 orang	100%
			Penyusunan Rencana Kontijensi	1 Dokumen	100%
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	30 Orang	100%
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	100%
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	355 Orang	58.31%
			Penyediaan Logistik	150 Orang	132.67



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

SINGGAH
di BARRU!

			Penyelamatan dan Evaluasi korban Bencana Kabupaten/Kota Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	% 100%

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

F. Bidang urusan Sosial

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diukur dalam 5 (lima) indikator pelayanan dasar yang akan dicapai secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan yang dituangkan Kabupaten Barru memiliki korelasi yang sangat jelas dengan 5 (lima) indikator SPM daerah provinsi yang akan dicapai secara bertahap, yang meliputi:

- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti
- Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti
- Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti
- Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti
- Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota.



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
DI BARRU!*

2. Target pencapaian SPM Pemerintah Kabupaten Barru

TABEL 1.16

REALISASI CAPAIAN SPM BIDANG SOSIAL TAHUN 2025

NO	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA
			VOLUME	RP	VOLUME	RP	FISIK	KEUANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	40	42.325.900	40	41.120.190	100	97	APBD
2	Jumlah Orang yang Menerima Pakaiian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	40	33.494.400	40	28.482.475	100	85	APBD
3	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	2	15.814.900	2	13.963.930	100	88	APBD
4	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	3	10.862.300	3	10.860.580	100	100	APBD
5	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	20	74.940.000	20	73.734.060	100	98	APBD
6	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggup Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kab/Kota	orang	1500	30.602.600	99	4.100.853	100	13	APBD
7	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kab/Kota	orang	40	55.398.900	29	49.664.750	100	90	APBD
8	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kab/Kota	orang	20	8.919.500	10	5.774.070	100	65	APBD

Sumber : Dinas Sosial Kab. Barru Tahun 2025



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Indikator makro pembangunan merupakan indikator kinerja pembangunan yang menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah secara umum. Pencapaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Kinerja makro merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja beberapa sektor, urusan, dan bidang pemerintahan.

TABEL 2.1

CAPAIAN KINERJA MAKRO KABUPATEN BARRU TAHUN 2024-2025

No	Indikator Kinerja Makro	2024	2025	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	74,51	75,41	1.21%
2	Angka Kemiskinan (%)	8,31	8,00	3.73%
3	Angka Pengangguran (%)	6,42	5,07	21.03%
4	Pertumbuhan ekonomi (%)	4,92	5,16	4.88%
5	Pendapatan Per Kapita (Rp)	52.274	56.391	7.88%
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) (Poin)	0,340	0,345	-1.45%

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran usia harapan hidup, pendidikan melalui pengukuran angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita.

Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

SINGGAH
di BARRU!

tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup :

1) Umur Panjang dan Hidup Sehat (*a long and healthy life*)

Dimensi ini dicerminkan oleh Angka Harapan Hidup (*life expectancy at age*)

2) Pengetahuan (*knowledge*)

Dimensi ini dicerminkan oleh dua kriteria, yaitu :

- a. Harapan Lama Sekolah (HLS)
- b. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

3) Standar Hidup Layak (*decent standard of living*)

Dimensi ini dicerminkan oleh PDRB per kapita. BPS merefleksikan dimensi ini melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

IPM yang tinggi biasanya berkorelasi dengan sistem kesehatan yang lebih baik, akses layanan kesehatan yang lebih baik, dan harapan hidup yang lebih lama. Peningkatan kesehatan berkontribusi pada produktivitas tenaga kerja yang lebih baik.

Pendidikan: Pendidikan yang lebih tinggi meningkatkan kemampuan individu untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan berkontribusi pada perekonomian. Masyarakat yang terdidik cenderung lebih inovatif dan dapat beradaptasi dengan perubahan.

Perekonomian: IPM yang lebih tinggi sering kali mencerminkan pendapatan per kapita yang lebih baik, yang berarti masyarakat memiliki lebih banyak sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar, menginvestasikan dalam pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Masyarakat dengan IPM yang tinggi umumnya memiliki tingkat kesetaraan yang lebih baik, dengan kesempatan yang lebih adil bagi semua anggota masyarakat. Ini berkontribusi pada stabilitas sosial dan pengurangan konflik.

Secara keseluruhan, IPM dapat dianggap sebagai indikator penting



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

yang menggambarkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan IPM harus menjadi bagian dari strategi pembangunan yang komprehensif untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barru pada tahun 2025 mencapai 75,41 poin, nilai ini meningkat dibanding tahun 2024 yang mencapai 74,51 poin, atau mengalami peningkatan sebesar 0,90 persen.

Kenaikan sebesar 0,90 poin pada IPM menunjukkan adanya perbaikan kualitas pembangunan manusia yang cukup signifikan dan konsisten. Peningkatan IPM tahun 2025 merupakan hasil sinergi kebijakan pembangunan manusia yang lebih terarah, kolaboratif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Capaian ini menjadi indikator bahwa pembangunan daerah berjalan pada jalur yang tepat menuju masyarakat yang lebih maju, sehat, cerdas, dan sejahtera.

Secara keseluruhan, IPM dapat dianggap sebagai indikator penting yang menggambarkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan IPM harus menjadi bagian dari strategi pembangunan yang komprehensif untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.

Indeks Kesehatan yang diwakili oleh Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator yang dapat mencerminkan derajat hidup suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, hingga kualitas kesehatan.

Sumber data utama dalam perhitungan UHH saat ini adalah hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 (LF SP2020). Usia harapan hidup adalah ukuran rata-rata yang menunjukkan berapa lama seseorang diperkirakan akan hidup, biasanya dihitung dari saat lahir. Usia harapan hidup suatu daerah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk Akses terhadap layanan kesehatan, vaksinasi, dan pengobatan penyakit menular atau kronis berpengaruh besar; Nutrisi yang baik membantu mencegah



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

SINGGAH
di BARRU!

penyakit dan meningkatkan kualitas hidup; Tingkat pendidikan dapat berhubungan dengan pengetahuan tentang kesehatan dan gaya hidup sehat; Kondisi ekonomi yang baik sering kali memungkinkan akses yang lebih baik.

UHH Barru pada tahun 2025 mencapai 75,41 tahun. Artinya, secara rata-rata bayi yang baru lahir pada tahun 2024 memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan 75,41 tahun.

Sementara itu, Indeks Pendidikan yang diwakili oleh rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/*Mean Years School* (MYS) didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang digunakan penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS Kabupaten Barru tahun 2025 sebesar 8,93, artinya secara rata-rata penduduk Barru yang berusia 25 ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,93 tahun atau setara kelas 2 SMP. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh generasi di masa mendatang. HLS Barru pada tahun 2025 sebesar 13,76 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2025 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,76 tahun atau setara dengan Diploma II.

Dimensi yang ketiga adalah standar hidup layak yang diwakili oleh indikator pengeluaran perkapita (PPP) yang disesuaikan. Pengeluaran riil per kapita disesuaikan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity*/PPP) menggambarkan rata-rata pengeluaran per individu dalam setahun yang dapat dibandingkan antar wilayah karena telah meminimalkan faktor harga dan ketimpangan daya beli antar wilayah. Pengeluaran disesuaikan PPP Kabupaten Barru tahun 2025 senilai sekitar 12,41 juta rupiah. Semakin tinggi nilai pengeluaran menandakan kekuatan ekonomi masyarakat semakin bagus.

Pertumbuhan IPM merupakan salah satu cara untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah. Secara tren pada



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

SINGGAH
di BARRU!

tahun 2025, IPM tumbuh sebesar 0,90 persen dibandingkan tahun 2024.

Keberhasilan pencapaian tujuan meningkatnya Kualitas SDM yang diukur melalui capaian Indeks Pembangunan Manusia yang melebihi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2025-2029 yaitu 75,22 poin dengan realisasi sebesar 75,41 poin atau tingkat capaian sebesar 0,19 persen.

Peningkatan IPM tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, membaiknya dimensi kesehatan, yang tercermin dari meningkatnya angka harapan hidup seiring dengan penguatan layanan kesehatan dasar. Program promotif dan preventif yang lebih masif turut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Kedua, pada dimensi pendidikan, terjadi peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Hal ini didukung oleh pemerataan akses pendidikan, penurunan angka putus sekolah, penguatan kualitas tenaga pendidik, serta optimalisasi program beasiswa dan bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu.

Ketiga, dari sisi standar hidup layak, peningkatan IPM didorong oleh membaiknya daya beli masyarakat pengembangan sektor unggulan daerah, serta berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM. Stabilitas harga kebutuhan pokok juga turut menjaga daya beli masyarakat.

2.1.2 Angka Kemiskinan

Indikator kemiskinan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Capaian angka kemiskinan yang berhasil diturunkan sebesar 0,31 persen dari 8,31 persen pada tahun 2024 meningkat menjadi 8,00 persen pada tahun 2025.



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

Keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, penguatan program perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran, melalui validasi dan pemutakhiran data DTSEN, sehingga bantuan sosial, subsidi, dan program pemberdayaan dapat menjangkau rumah tangga miskin secara lebih akurat dan efektif. Kedua, optimalisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk pengembangan UMKM, pelatihan keterampilan kerja, serta dukungan terhadap sektor pertanian, perikanan, dan usaha produktif lainnya. Program ini tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi keluarga miskin.

Secara keseluruhan, penurunan tingkat kemiskinan tahun 2025 menunjukkan bahwa sinergi antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat berjalan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi jumlah penduduk miskin secara berkelanjutan.

2.1.3 Angka Pengangguran

Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan penurunan angka kemiskinan diukur melalui indikator tingkat pengangguran terbuka dan angka kemiskinan. Tingkat pengangguran terbuka adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran dalam suatu negara atau wilayah. Pengangguran terbuka merujuk pada individu yang tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang aktif mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka didefinisikan sebagai persentase dari angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi aktif mencari pekerjaan. Angkatan kerja mencakup individu yang bekerja dan yang tidak bekerja tetapi aktif dalam mencari pekerjaan.

Perbaikan kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Barru pada Tahun 2025 dipengaruhi oleh peningkatan pada beberapa lapangan usaha seperti lapangan usaha konstruksi, lapangan usaha perdagangan, dan lapangan usaha industri pengolahan. Meski mengalami perlambatan pertumbuhan dibanding dengan periode sebelumnya, pada tahun 2024



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

lapangan usaha pertanian masih menjadi sektor penyerap tenaga kerja terbanyak di Kabupaten Barru.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,07 persen, menurun signifikan dari 6,42 persen pada tahun 2024. Penurunan sebesar 1,35 persen ini menunjukkan adanya perbaikan nyata dalam kondisi ketenagakerjaan serta meningkatnya daya serap tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi di Kabupaten Barru.

Keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor strategis. Pertama, Adanya peningkatan aktivitas ekonomi yang kemudian membuka lapangan kerja baru dan menyerap tenaga kerja lokal secara lebih optimal termasuk penyerapan tenaga kerja pada Program MBG, penerimaan P3K Paruh Waktu, penerimaan tenaga kerja pada pembangunan Sekolah rakyat serta kegiatan aktifitas ekonomi lainnya. Kedua, penguatan program pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK), pelatihan berbasis kompetensi, serta sertifikasi keahlian telah meningkatkan kesiapan dan daya saing angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Sinkronisasi antara kebutuhan pasar kerja dan kurikulum pelatihan menjadi faktor penting dalam menekan mismatch tenaga kerja.

Secara keseluruhan, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2025 mencerminkan keberhasilan sinergi kebijakan ekonomi, ketenagakerjaan, dan investasi yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, serta penguatan kemandirian ekonomi masyarakat.

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru pada tahun 2025 menunjukkan tren yang semakin positif. Angka pertumbuhan ekonomi berhasil mencapai 5,16 persen, meningkat dibandingkan capaian tahun 2024 yang berada pada angka 4,92 persen. Kenaikan ini mencerminkan adanya penguatan aktivitas ekonomi masyarakat serta efektivitas kebijakan pembangunan daerah yang diarahkan pada sektor-sektor produktif.

Peningkatan tersebut didorong oleh tumbuhnya sektor pertanian, perdagangan, jasa, serta penguatan UMKM yang semakin adaptif terhadap perkembangan pasar dan digitalisasi. Selain itu, belanja pemerintah daerah yang lebih tepat sasaran turut memberikan multiplier effect terhadap perputaran ekonomi lokal. Stabilitas harga dan meningkatnya daya beli masyarakat juga berkontribusi dalam mendorong konsumsi rumah tangga sebagai salah satu komponen utama pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Peningkatan PE pada tahun 2025 dipengaruhi oleh 3 sektor Lapangan Usaha pada 17 sektor lapangan Usaha yang merupakan pembangun struktur PDRB dengan kontribusi terbesar. 3 sektor tersebut diantaranya: Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan berkontribusi sebesar 33,54 persen, Sektor Konstruksi berkontribusi sebesar 19,54 persen, dan Sektor Perdagangan besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berkontribusi sebesar 9,78 persen. Sementara untuk 3 sektor PDRB yang mengalami pertumbuhan terbesar pada PDRB 2025 adalah Sektor Jasa Lainnya bertumbuh sebesar 10,01 persen, Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan bertumbuh sebesar 9,22 persen serta Sektor Industri Pengolahan bertumbuh sebesar 6,33 persen.

Capaian pertumbuhan sebesar 5,16 persen ini tidak hanya menunjukkan proses pemulihan ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga menjadi indikator meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pelaku



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

usaha terhadap iklim investasi daerah. Dengan tren yang terus membaik, Pemerintah Kabupaten Barru optimis bahwa struktur ekonomi daerah akan semakin kuat, inklusif, dan berdaya saing di tahun-tahun mendatang.

2.1.5 Pendapatan per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumberdaya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

PDRB Perkapita pada tahun 2025 sebesar 56,39 Juta Rupiah persen berhasil ditingkatkan dari 52,27 Juta Rupiah yang merupakan capaian tahun 2024. Peningkatan PDRB Perkapita ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi daerah semakin kokoh dan adaptif terhadap dinamika nasional maupun global. Capaian ini sekaligus menjadi indikator bahwa arah kebijakan pembangunan yang berfokus pada ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan potensi lokal telah berada pada jalur yang tepat

2.1.6 Ketimpangan Pendapatan/Indeks gini

Rasio Gini adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur ketidaksetaraan distribusi pendapatan atau kekayaan di suatu negara atau area tertentu. Rasio Gini berkisar antara 0 dan 1, di mana 0 mengindikasikan distribusi yang sempurna merata (setiap orang memiliki pendapatan atau kekayaan yang sama) dan 1 mengindikasikan distribusi yang sangat tidak merata (satu orang memiliki semua pendapatan atau kekayaan). Dari tabel diatas terlihat bahwa persentase peningkatan ratio gini sebesar 1,45 persen yaitu dari 0,340 pada tahun 2024 menjadi 0,345 pada tahun 2025. Kenaikan ini menunjukkan adanya sedikit peningkatan



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

ketimpangan distribusi pendapatan di tengah masyarakat.

Meskipun secara angka kenaikannya relatif kecil dan masih berada dalam kategori ketimpangan sedang, kondisi ini menjadi sinyal bahwa hasil pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya terdistribusi secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan aktivitas ekonomi yang terjadi kemungkinan masih lebih banyak dinikmati oleh kelompok usaha menengah dan atas, sementara sebagian masyarakat berpendapatan rendah belum memperoleh manfaat yang optimal.

Beberapa faktor yang memengaruhi kenaikan rasio gini ini antara lain perbedaan akses terhadap modal usaha, peluang kerja yang produktif, serta variasi tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. Selain itu, transformasi ekonomi yang bergerak ke sektor-sektor dengan produktivitas tinggi belum sepenuhnya inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat.

Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Barru untuk memperkuat kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, seperti penguatan program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi, perluasan akses UMKM terhadap pembiayaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah perdesaan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dapat berjalan seiring dengan perbaikan distribusi pendapatan dan penurunan tingkat ketimpangan di masa mendatang.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Barru pada Tahun 2025 dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan daerah berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah merupakan urusan pemerintahan konkuren yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terbagi



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

menjadi urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial. Sementara itu, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan. Adapun urusan pemerintahan pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

Selain melaksanakan urusan pemerintahan tersebut, pemerintah daerah juga melaksanakan fungsi pendukung dan penunjang urusan pemerintahan. Fungsi pendukung dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, sedangkan fungsi penunjang meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mencakup unsur pengawasan oleh Inspektorat, unsur kewilayahan oleh kecamatan, serta unsur pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tersebut, digunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai alat ukur kinerja pemerintah daerah. Indikator Kinerja Kunci merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan pemerintah



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, baik urusan pemerintahan wajib maupun urusan pemerintahan pilihan.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Adapun rincian capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Barru Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

TABEL 2.2
INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL

NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	SumberData	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	97,30%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pelayanan Dasar
		Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	98,05%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pelayanan Dasar
		Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	26,71%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pelayanan Dasar
		Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pelayanan Dasar
		Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	73,66%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pelayanan Dasar
2	Kesehatan	Persentase kematian ibu	0,15%	Dinas Kesehatan	Pelayanan Dasar
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	16,76%	Dinas Kesehatan	Pelayanan Dasar
		Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	62,63%	Dinas Kesehatan	Pelayanan Dasar
		Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	67,77%	Dinas Kesehatan	Pelayanan Dasar
		Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	69,94%	Dinas Kesehatan	Pelayanan Dasar
		Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	72,43%	Dinas Kesehatan	Pelayanan Dasar
		Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	93,08%	Dinas Kesehatan	Pelayanan Dasar
		Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	Pelayanan Dasar



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	SumberData	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	57,19%	Dinas Kesehatan	Pelayanan Dasar
		Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	74,86%	Dinas Kesehatan	Pelayanan Dasar
		Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standa	100%	Dinas Kesehatan	Pelayanan Dasar
		Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	97,84%	Dinas Kesehatan	Pelayanan Dasar
		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	Pelayanan Dasar
		Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	0,58%	Dinas Kesehatan	Pelayanan Dasar
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	57,29%	Dinas PUTR danKawasan Perumahan dan Pemukiman	Pelayanan Dasar
		Persentase kemandapan jalan kabupaten/kota	36,88%	Dinas PUTR danKawasan Perumahan dan Pemukiman	Pelayanan Dasar
		Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	97,60%	Dinas PUTR danKawasan Perumahan dan Pemukiman	Pelayanan Dasar
		Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Dinas PUTR danKawasan Perumahan dan Pemukiman	Pelayanan Dasar
		Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	17,96%	Dinas PUTR danPerkim	Pelayanan Dasar



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	SumberData	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	18,60%	Dinas PUTR danPerkim	Pelayanan Dasar
		Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	100%	Dinas PUTR danPerkim	Pelayanan Dasar
		Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	100%	Dinas PUTR danPerkim	Pelayanan Dasar
		Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	15,40%	Dinas PUTR danPerkim	Pelayanan Dasar
		Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	100%	Dinas PUTR danPerkim	Pelayanan Dasar
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	100%	Dinas PUTR danPerkim	Pelayanan Dasar
		Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	80,46%	Dinas PUTR danPerkim	Pelayanan Dasar
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	1,78%	Dinas PUTR danPerkim	Pelayanan Dasar
		Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Surat Keterangan	Dinas PUTR danPerkim	Pelayanan Dasar
5	Ketentraman, Ketertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	100%	BPBD	Pelayanan Dasar
		Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	100%	Satpol PP, DAMKAR, dan Penyelamatan	Pelayanan Dasar
		Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	23,40%	Satpol PP, DAMKAR, dan Penyelamatan	Pelayanan Dasar
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	0,05%	BPBD	Pelayanan Dasar



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		terhadap bencana			
		Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	BPBD	Pelayanan Dasar
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Satpol PP, DAMKAR, dan Penyelamatan	Pelayanan Dasar
6	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	Dinas Sosial dan P3A	Pelayanan Dasar
		Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	Dinas Sosial dan P3A	Pelayanan Dasar
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	Dinas Sosial dan P3A	Pelayanan Dasar
		Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	Dinas Sosial dan P3A	Pelayanan Dasar
		Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	100%	Dinas Sosial dan P3A	Pelayanan Dasar
		Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	100%	Dinas Sosial dan P3A	Pelayanan Dasar
7	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	70,00%	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Perdagangan	Non Pelayanan Dasar
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan)	39,68%	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Perdagangan	Non Pelayanan Dasar
		Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	100%	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Perdagangan	Non Pelayanan Dasar
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan	100%	Dinas Sosial dan P3A	Non Pelayanan Dasar



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	SumberData	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Anak	komprehensif			
		Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	Dinas Sosial dan P3A	Non Pelayanan Dasar
9	Pangan	Persentase jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	340,80%	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Non Pelayanan Dasar
10	Pertanahan	Persentase Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	26,52%	Dinas PUTR dan Kawasan Perumahan dan Pemukiman	Non Pelayanan Dasar
		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	100%	Dinas PUTR dan Kawasan Perumahan dan Pemukiman	Non Pelayanan Dasar
		Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan	37,27%	Dinas PUTR dan Kawasan Perumahan dan Pemukiman	Non Pelayanan Dasar
11	Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	18,18%	Dinas Lingkungan Hidup	Non Pelayanan Dasar
		Persentase jumlah sampah yang tertangani	100%	Dinas Lingkungan Hidup	Non Pelayanan Dasar
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan	98,26%	Dinas Dukcapil	Non Pelayanan Dasar
		Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	57,78%	Dinas Dukcapil	Non Pelayanan Dasar
		Persentase data profil kependudukan yang disusun dan	50,00%	Dinas Dukcapil	Non Pelayanan Dasar



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	SumberData	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dipublikasikan			
		Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	98,96%	Dinas Dukcapil	Non Pelayanan Dasar
		Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100%	Dinas Dukcapil	Non Pelayanan Dasar
		Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100%	Dinas Dukcapil	Non Pelayanan Dasar
		Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100%	Dinas Dukcapil	Non Pelayanan Dasar
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	Surat Keterangan	Dinas PMD,P2KB	Non Pelayanan Dasar
		Persentase peningkatan status desa mandiri	Surat Keterangan	Dinas PMD,P2KB	Non Pelayanan Dasar
		Persentase fasilitasi kerja sama desa	100%	Dinas PMD,P2KB	Non Pelayanan Dasar
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur usia 15-49 Tahun	99,53%	Dinas PMD,P2KB	Non Pelayanan Dasar
		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	61,73%	Dinas PMD,P2KB	Non Pelayanan Dasar
		Persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need)	92,12%	Dinas PMD,P2KB	Non Pelayanan Dasar
15	Perhubungan	Konektivitas Kabupaten/Kota	0,76 Rasio	Dinas Perhubungan	Non Pelayanan Dasar
		Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,207 Rasio	Dinas Perhubungan	Non Pelayanan Dasar
		Persentase Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	0%	Dinas Perhubungan	Non Pelayanan Dasar
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	100%	Dinas Kominfo-SP	Non Pelayanan Dasar



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	SumberData	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	Dinas Kominfo-SP	Non Pelayanan Dasar
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	92,23%	Dinas Kominfo-SP	Non Pelayanan Dasar
17	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	16,20%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Non Pelayanan Dasar
		Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	100%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Non Pelayanan Dasar
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	0,91%	DPMPSTP	Non Pelayanan Dasar
		Realisasi total terhadap target investasi	121,10%	DPMPSTP	Non Pelayanan Dasar
19	Kepemudaan dan Olahraga	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	415,00%	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan, dan Olahraga	Non Pelayanan Dasar
		Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0,66%	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan, dan Olahraga	Non Pelayanan Dasar
		Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	Surat Keterangan	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan, dan Olahraga	Non Pelayanan Dasar
		Persentase jumlah atlet berprestasi	Surat Keterangan	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan, dan Olahraga	Non Pelayanan Dasar
20	Statistik	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	100%	Diskominfo-SP	Non Pelayanan Dasar
21	Persandian	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah	36,38%	Diskominfo-SP	Non Pelayanan Dasar
22	Kebudayaan	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Non Pelayanan Dasar



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	SumberData	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	14,40%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Non Pelayanan Dasar
23	Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat	59,51%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Non Pelayanan Dasar
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	13,73%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Non Pelayanan Dasar
24	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	75,00%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Non Pelayanan Dasar
25	Kelautan dan Perikanan	Persentase Produksi perikanan tangkap dan budidaya	100,08%	Dinas Perikanan dan Kelautan	Pilihan
		Angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)	73,24%	Dinas Perikanan dan Kelautan	Pilihan
26	Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	15,39%	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan, dan Olahraga	Pilihan
		Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum	0,87%	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan, dan Olahraga	Pilihan
		Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	-51,820%	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan, dan Olahraga	Pilihan
27	Pertanian	Peningkatan produksi tanaman pangan	11,18%	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pilihan
		Peningkatan produksi hortikultura	111,73%	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pilihan
		Peningkatan produksi komoditas peternakan	-5,32%	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pilihan
		Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	100%	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pilihan



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28	Perindustrian	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota; 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota	Surat Keterangan	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Perdagangan	Pilihan
		Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	7,86%	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Perdagangan	Pilihan
		Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	37,51%	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Perdagangan	Pilihan
		Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	Surat Keterangan	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Perdagangan	Pilihan
29	Perdagangan	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	100%	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Perdagangan	Pilihan

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

TABEL 2.3
INDIKATOR KINERJA KUNCI UNTUK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

NO	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perencanaan	Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan	100%	Bapperida	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

NO	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah			
2	Pengadaan	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	35,56 Poin	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	
		Pemanfaatan sistem pengadaan	22,85 Poin	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	
		Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	15,88 Poin	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	
3	Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	78,06%	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	
4	Keuangan	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	35,84%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
		Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	13,95%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
		Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	57,84%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
		Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	28,72%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	Pelayanan Publik	Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	Surat Keterangan	Bagian Organisasi	
6	Penelitian dan Pengembangan	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	100%	Bapperida	
7	Fungsi Pengawasan	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3 Nilai	Inspektorat	
		Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	3 Nilai	Inspektorat	
		Manajemen risiko Indeks	2 Nilai	Inspektorat	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

NO	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	77,87%	Inspektorat	
8	Hubungan dengan Perwakilan Daerah	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	Tepat Waktu	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
		Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N	62,50%	Bagian Hukum	

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja untuk setiap tujuan dan sasaran melalui 7 (tujuh) analisis disajikan sebagai berikut :

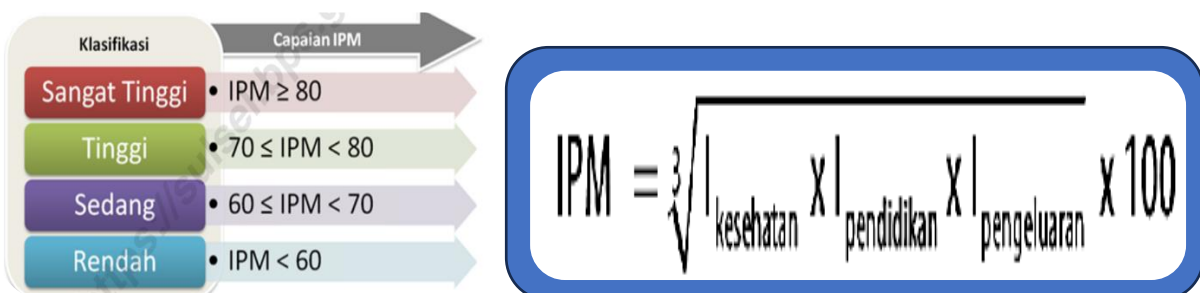
a. Analisis RPJMD Tahun 2021 - 2026

MISI 1 : MEWUJUDKAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PELAYANAN DASAR LAINNYA.

TUJUAN 1 : MENINGKATKAN KUALITAS SDM

Meningkatnya kualitas SDM diukur melalui indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan manusia merupakan model pembangunan yang menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) ditujukan untuk memperluas pilihan-pilihan yang dapat ditumbuhkan melalui upaya pemberdayaan penduduk. Walaupun pada dasarnya, pilihan tersebut tidak terbatas dan terus berubah, tetapi dalam konteks pembangunan, pemberdayaan penduduk ini dicapai melalui upaya yang menitikberatkan pada peningkatan kemampuan dasar manusia yaitu meningkatnya derajat kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan agar dapat digunakan untuk mempertinggi partisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif, sosial budaya, dan politik.

Secara berkala UNDP melakukan penyempurnaan dalam penghitungan IPM. Tahun 2010, UNDP melakukan penyempurnaan kembali dengan tetap menggunakan tiga dimensi yang sama yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak namun menggunakan indikator yang berbeda yaitu umur harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Metode agregasi IPM dihitung dengan rumus sebagai berikut :



Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Barru tahun 2021-2026, ketiga dimensi dasar IPM diuraikan menjadi 3 sasaran yang mendukung pencapaian tujuan yaitu :

1. Sasaran : Meningkatnya Kualitas dan Tingkat Pendidikan Masyarakat

Peningkatan kualitas pendidikan diukur dengan menggunakan Indeks Pendidikan yang merupakan agregasi dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. ARLS menunjukkan tingkat lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas, sedangkan AHLS digunakan untuk mengestimasi harapan lama sekolah dimasa depan yang bisa dienyam dengan melihat rata-rata proporsi setiap kelompok umur yang bersekolah pada saat ini. Baik UNDP maupun BPS memiliki formula penghitungan dan rentang nilai/ skor yang sama untuk masing-masing indikator (ARLS 0 – 15 Tahun; AHLS 0–18 Tahun). Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target indikator adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} I_{HLS} &= \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}} \\ I_{RLS} &= \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}} \\ I_{pendidikan} &= \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2} \end{aligned}$$

2. Sasaran : Meningkatnya Usia Harapan Hidup Masyarakat

Peningkatan usia harapan hidup diukur dengan menggunakan Indeks Kesehatan. Indeks ini diwakili oleh Umur Harapan Hidup yang merupakan indikator yang mencerminkan derajat hidup suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, hingga kualitas kesehatan. Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) atau *Life Expectancy* (e_0) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH

mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Mulai tahun 2023, BPS melakukan pemutakhiran sumber data Umur Harapan Hidup (UHH) hasil SP2010 dengan menggunakan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 yang memberikan gambaran lebih terkini. Dasar penghitungan UHH adalah menggunakan Angka Kematian Bayi atau *Infant Mortality Rate* (IMR) dengan pola model *West Coale-demeny Trussell equations* dan proyeksi IMR. Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target indikator adalah sebagai berikut :

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\max} - AHH_{\min}}$$

3. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Daya Beli Masyarakat

Peningkatan kualitas daya beli masyarakat diukur Paritas Daya Beli. Pengeluaran per kapita disesuaikan atau biasa disebut Paritas Daya Beli ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita ini dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Penghitungan paritas daya beli pada IPM metode baru ini menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan. Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target indikator adalah sebagai berikut :

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{1/m}$$

p_{ij} : harga komoditas i di kab/kota j
 p_{ik} : harga komoditas i di Jakarta Selatan
 m : jumlah komoditas

Pengukuran kinerja misi 1 yaitu mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya diuraikan



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

berdasarkan rumus diatas yang memuat 7 (tujuh) analisis capaian kinerja yang diuraikan sebagai berikut:

1) Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja adalah suatu proses evaluasi yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pencapaian kinerja tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pencapaian tujuan dan sasaran pada misi 1 dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
Meningkatkan Kualitas SDM		Indeks Pembangunan Manusia	Poin	75,22	75,41	100,25	Sangat Tinggi	BPS
	Meningkatnya Kualitas dan Tingkat Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	Poin	71,02	67,99	95,73	Sangat Tinggi	BPS
	Meningkatnya Usia Harapan Hidup	Indeks Kesehatan	Poin	77,51	81,82	105,56	Sangat Tinggi	BPS



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

	Masyarakat							
	Meningkatnya Kualitas Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran per Kapita	Juta	11,86	10,74	90,56	Sangat Tinggi	BPS

Sumber : BPS, 2025 dan Data Olahan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barru sebesar pada tahun 2025 sebesar 75,41. Nilai ini melampaui target sebesar 75,22 dengan tingkat capaian sebesar 100,25 persen. Capaian ini merupakan agregasi dari tiga dimensi, yaitu dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, serta standar hidup layak. Guna menghitung dimensi umur panjang dan hidup sehat, digunakan indikator umur harapan hidup saat lahir hasil long form Sensus Penduduk 2020.

Indeks Kesehatan yang diwakili oleh Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator yang dapat mencerminkan derajat hidup suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, hingga kualitas kesehatan. Sumber data utama dalam perhitungan UHH saat ini adalah hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 (LF SP2020). Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. UHH Barru pada tahun 2024 mencapai 69,73 tahun. Artinya, secara rata-rata bayi yang baru lahir pada tahun 2024 memiliki **peluang untuk bertahan hidup sampai dengan 69,73 tahun.**

Sementara itu **Indeks Pendidikan** yang diwakili oleh rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai rata-rata jumlah



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

tahun yang digunakan penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS Kabupaten Barru tahun 2025 sebesar 8,93, artinya secara rata-rata penduduk Barru yang berusia 25 ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,93 tahun atau setara kelas 2 SMP. **Harapan Lama Sekolah (HLS)** didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh generasi di masa mendatang. HLS Barru pada tahun 2025 sebesar 13,76 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2025 memiliki **peluang untuk bersekolah selama 13,76 tahun** atau setara dengan Diploma II.

Dimensi yang ketiga adalah standar hidup layak yang diwakili oleh indikator **pengeluaran perkapita (PPP)** yang disesuaikan. Pengeluaran riil per kapita disesuaikan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity/PPP*) menggambarkan rata-rata pengeluaran per individu dalam setahun yang dapat dibandingkan antar wilayah karena telah meminimalkan faktor harga dan ketimpangan daya beli antar wilayah. Pengeluaran disesuaikan PPP Kabupaten Barru tahun 2025 senilai sekitar 10,74 juta rupiah. **Semakin tinggi nilai pengeluaran menandakan kekuatan ekonomi masyarakat semakin bagus.**

2) Analisis perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Barru memperlihatkan perkembangan yang cukup signifikan dibandingkan dibanding tahun 2024 yang menunjukkan semakin baiknya pembangunan manusia di Kabupaten Barru. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tujuan	Sasaran			2024		2025



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

		Indikator Kinerja	Sat uan	Tar get	Real isasi	Cap aian %		Tar get	Real isasi	Cap aian %
Meningk atnya Kualitas SDM		Indeks Pemban gunan Manusia	Poin	72, 57	74,51	102, 67		75, 22	75,41	100, 25
	Meningk atnya Kualitas dan Tingkat Pendidik an Masyara kat	Indeks Pendidik an	Poin	70, 83	67,19	94,8 6		71, 02	67,99	95,7 3
	Meningk atnya Usia Harapan Hidup Masyara kat	Indeks Kesehat an	Poin	77, 26	81,15	105, 03		77, 51	81,82	105, 56
	Meningk atnya Kualitas Daya Beli	Pengelu aran per Kapita	Juta	11, 63	12,05	103, 61		11, 86	10,74	90,5 6



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

	Masyara kat									

Secara umum, capaian kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Barru pada Tahun 2025 menunjukkan dinamika yang beragam jika dibandingkan dengan Tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya keberhasilan pada beberapa indikator utama, namun juga terdapat indikator yang masih memerlukan perhatian dan penguatan kebijakan agar selaras dengan target RPJMD 2021–2026.

Pada indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai representasi utama kualitas SDM, realisasi Tahun 2025 mencapai 75,41 poin atau sebesar 100,25% dari target, meningkat dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar 74,51 poin dengan capaian 102,67%. Meskipun persentase capaian mengalami sedikit penurunan, secara substansi nilai IPM terus meningkat dan telah melampaui target RPJMD tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Barru berada pada jalur yang tepat (on track), didukung oleh perbaikan di sektor pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.

Pada indikator Indeks Pendidikan, capaian Tahun 2025 sebesar 67,99 poin atau 95,73% dari target, mengalami sedikit peningkatan dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar 67,19 poin (94,86%). Meskipun terjadi perbaikan kinerja, indikator ini masih belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas dan akses pendidikan, seperti peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, masih perlu dioptimalkan. Dengan demikian, sektor pendidikan masih menjadi salah satu fokus utama pembangunan ke depan.

Sementara itu, pada indikator **Indeks Kesehatan**, kinerja menunjukkan tren yang sangat positif. Realisasi Tahun 2025 mencapai 81,82 poin



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

dengan capaian 105,56%, meningkat dari Tahun 2024 sebesar 81,15 poin (105,03%). Capaian yang konsisten melampaui target ini mengindikasikan keberhasilan intervensi di sektor kesehatan, khususnya dalam peningkatan usia harapan hidup masyarakat. Hal ini sejalan dengan prioritas RPJMD dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penguatan layanan kesehatan dasar dan upaya promotif-preventif.

Berbeda dengan indikator lainnya, **Pengeluaran per Kapita** sebagai proksi daya beli masyarakat justru mengalami penurunan signifikan pada Tahun 2025. Realisasi hanya mencapai 10,74 juta atau 90,56% dari target, menurun dibandingkan Tahun 2024 yang mencapai 12,05 juta (103,61%). Penurunan ini menunjukkan adanya tekanan terhadap kondisi ekonomi masyarakat, yang dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti inflasi, perlambatan ekonomi, maupun penurunan pendapatan riil masyarakat. Kondisi ini menjadi perhatian penting karena berpotensi menghambat peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh dan mempengaruhi capaian IPM ke depan.

Secara keseluruhan, jika dibandingkan dengan Tahun 2024, kinerja pembangunan Tahun 2025 di Kabupaten Barru menunjukkan:

- Peningkatan kualitas pada aspek kesehatan dan IPM secara umum, yang telah melampaui target RPJMD.
 - Perbaikan bertahap pada sektor pendidikan, meskipun belum mencapai target.
 - Penurunan signifikan pada aspek daya beli masyarakat, yang menjadi tantangan utama dalam menjaga keberlanjutan peningkatan kesejahteraan.
- 3) **Analisis perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Kualitas SDM		Indeks Pembangunan Manusia	Poin	75,41	75,22	100,25
	Meningkatnya Kualitas dan Tingkat Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	Poin	67,99	71,02	95,73
	Meningkatnya Usia Harapan Hidup Masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	81,82	77,51	105,56
	Meningkatnya Kualitas Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran per Kapita	Juta	10,74	11,86	90,56

Capaian indikator tujuan meningkatnya kualitas SDM yaitu Indeks Pembangunan Manusia terhadap target jangka menengah mencapai nilai 100,25 poin yang menunjukkan kinerja pembangunan mengalami percepatan dibanding dengan target. Sedangkan untuk indikator sasaran yang mendukung indikator tujuan berupa berupa indikator sasaran Indeks Pendidikan belum mencapai target yang ditetapkan dengan tingkat capaian sebesar 95,73 persen yang menunjukkan bahwa intervensi terhadap indeks Pendidikan ini harus lebih maksimal



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

diintervensi ditahun berjalan sehingga saat dievaluasi mendapat memperoleh nilai 100%.

Untuk indikator kinerja indeks Kesehatan, capaian yang diperoleh sebesar 105,56 persen juga mengalami percepatan, adapun indikator kinerja pengeluaran per kapita mengalami penurunan dengan capaian sebesar 90,56 persen.

4) Analisis perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja provinsi dan nasional

Untuk analisis perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja provinsi dan nasional dapat dilihat pada tabel berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Provinsi Tahun 2025	Capaian Kabupaten terhadap realisasi Provinsi	Realisasi Nasional Tahun 2025	Capaian Kabupaten terhadap realisasi nasional
Meningkatnya Kualitas SDM		Indeks Pembangunan Manusia	Poin	75,41	75,92	99,32	75,90	99,35
	Meningkatnya Kualitas dan Tingkat	Indeks Pendidikan	Poin	67,99	-	-	-	-



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

	Pendidikan Masyarakat							
	Meningkatnya Usia Harapan Hidup Masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	81,82	74,15	110,34	-	-
	Meningkatnya Kualitas Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran per Kapita	Juta	10,74	12,77	84,10	12,80	83,91

Secara umum, perbandingan kinerja pembangunan manusia Kabupaten Barru Tahun 2025 terhadap tingkat provinsi Sulawesi Selatan dan nasional menunjukkan posisi yang relatif kompetitif pada beberapa indikator, namun juga mengindikasikan adanya kesenjangan pada indikator tertentu yang perlu menjadi perhatian dalam pencapaian target RPJMD 2021–2026.

Pada indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), realisasi Kabupaten Barru sebesar 75,41 poin, sedikit berada di bawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 75,92 poin dan nasional sebesar 75,90 poin. Tingkat capaian Kabupaten terhadap provinsi sebesar 99,32% dan terhadap nasional sebesar 99,35%. Hal ini menunjukkan bahwa posisi Kabupaten Barru hampir setara dengan rata-rata provinsi dan nasional, meskipun masih terdapat selisih tipis. Kondisi ini mencerminkan bahwa upaya peningkatan kualitas SDM di Barru sudah



berada pada jalur yang sejalan dengan arah pembangunan wilayah yang lebih luas, sebagaimana ditargetkan dalam RPJMD.

Pada indikator Indeks Pendidikan, realisasi Kabupaten Barru sebesar 67,99 poin. Namun demikian, data pembanding pada tingkat provinsi Sulawesi Selatan dan nasional tidak tersedia dalam tabel, sehingga analisis komparatif tidak dapat dilakukan secara kuantitatif. Meskipun demikian, jika dikaitkan dengan capaian internal yang belum mencapai target, dapat disimpulkan bahwa sektor pendidikan masih memerlukan perhatian serius agar mampu bersaing dengan capaian wilayah lain serta memenuhi target RPJMD.

Selanjutnya, pada indikator Indeks Kesehatan, Kabupaten Barru mencatatkan realisasi sebesar 81,82 poin, yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan capaian Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 74,15 poin, dengan tingkat capaian mencapai 110,34%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja sektor kesehatan di Kabupaten Barru berada di atas rata-rata provinsi dan menjadi salah satu keunggulan daerah. Keberhasilan ini sejalan dengan kebijakan RPJMD yang menitikberatkan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penguatan layanan kesehatan dan intervensi promotif-preventif.

Sebaliknya, pada indikator Pengeluaran per Kapita, Kabupaten Barru mencatatkan realisasi sebesar 10,74 juta, yang masih jauh di bawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 12,77 juta dan nasional sebesar 12,80 juta. Tingkat capaian Kabupaten terhadap provinsi hanya sebesar 84,10% dan terhadap nasional sebesar 83,91%. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan daya beli masyarakat yang cukup signifikan dibandingkan dengan wilayah yang lebih luas. Kondisi ini menjadi tantangan utama dalam pembangunan SDM karena aspek ekonomi merupakan salah satu komponen penting dalam pembentukan IPM.



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

Secara keseluruhan, perbandingan dengan capaian provinsi dan nasional menunjukkan bahwa:

- Kabupaten Barru **cukup kompetitif** pada indikator IPM, meskipun masih sedikit di bawah rata-rata.
- Kabupaten Barru **unggul** pada **sektor kesehatan**, dengan capaian yang melampaui provinsi.
- Kabupaten Barru **masih tertinggal** pada **aspek daya beli masyarakat**, yang menjadi faktor penghambat peningkatan kesejahteraan.
- Sektor pendidikan **masih memerlukan penguatan**, meskipun tidak tersedia data pembandingan secara langsung.



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan atau peningkatan kinerja terhadap peningkatan kualitas SDM ditandai dengan pemerataan terhadap akses pendidikan, derajat Kesehatan yang tinggi serta kemauan hidup sehat dan menurunnya tingkat pengangguran serta stabilitas harga. Keberhasilan Kabupaten Barru dalam pencapaian IPM dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
Meningkatkan Kualitas SDM		Indeks Pembangunan Manusia	Poin	75,22	75,41	100,25	Capaian IPM melampaui target yang menunjukkan keberhasilan pembangunan manusia secara umum. Hal ini didukung oleh peningkatan signifikan pada dimensi kesehatan serta perbaikan bertahap pada dimensi pendidikan. Namun, capaian yang tidak terlalu tinggi di atas target menunjukkan adanya	Penguatan integrasi program lintas sektor (pendidikan, kesehatan, ekonomi), peningkatan kualitas layanan dasar, serta intervensi peningkatan pendapatan masyarakat



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

							ketimpangan antar dimensi, khususnya pada daya beli masyarakat yang mengalami penurunan.	melalui program pemberdayaan ekonomi dan perlindungan sosial.
	Meningkatnya Kualitas dan Tingkat Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	Poin	71,02	67,99	95,73	Capaian belum memenuhi target yang disebabkan oleh masih rendahnya rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Faktor penyebab antara lain keterbatasan akses pendidikan di wilayah tertentu, angka putus sekolah, serta kondisi ekonomi masyarakat yang mempengaruhi partisipasi pendidikan. Kualitas pembelajaran dan pemerataan	Peningkatan akses pendidikan melalui program wajib belajar dan bantuan pendidikan (beasiswa/BSM), rehabilitasi dan pembangunan sarana prasarana pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta program penanga



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

							tenaga pendidik juga masih menjadi tantangan	nan anak putus sekolah melalui pendeka tan lintas sektor.
	Meningkatnya Usia Harapan Hidup Masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	77,51	81,82	105,56	Capaian melampaui target secara signifikan yang menunjukkan keberhasilan pembangunan sektor kesehatan. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya akses layanan kesehatan, optimalisasi pelayanan di fasilitas kesehatan, serta keberhasilan program promotif dan preventif (imunisasi, penurunan stunting, peningkatan gizi masyarakat). Kesadaran	Memperthankan dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan, memperluas jangkauan layanan terutama di wilayah terpencil, penguatan program promotif - preventif, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

							masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat juga meningkat.	penguatan kolaborasi lintas sektor dalam penanganan stunting dan gizi masyarakat
	Meningkatnya Kualitas Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran per Kapita	Juta	11,86	10,74	90,56	Capaian tidak memenuhi target dan menunjukkan penurunan daya beli masyarakat. Hal ini disebabkan oleh tekanan ekonomi seperti inflasi, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta belum optimalnya peningkatan pendapatan masyarakat. Struktur ekonomi daerah yang belum sepenuhnya produktif dan terbatasnya lapangan kerja	Penguatan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sektor unggulan, pengendalian inflasi daerah, serta peningkatan program perlindungan sosial untuk



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

							turut mempengaruh i kondisi ini.	menjaga daya beli masyara kat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Capaian IPM sebesar 75,41 poin (100,25%) menunjukkan kinerja yang berhasil melampaui target. Keberhasilan ini didorong oleh kontribusi positif dari komponen penyusun IPM, khususnya sektor kesehatan yang mengalami peningkatan signifikan serta perbaikan pada beberapa aspek pendidikan. Selain itu, keberhasilan program lintas sektor dalam peningkatan kualitas layanan dasar juga berkontribusi terhadap capaian ini.

Namun demikian, capaian yang hanya sedikit di atas target mengindikasikan bahwa peningkatan belum merata pada seluruh dimensi, khususnya pada dimensi daya beli masyarakat yang mengalami penurunan.

Solusi yang dilakukan meliputi penguatan integrasi program pembangunan manusia antar sektor, peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta intervensi ekonomi untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat agar pertumbuhan IPM tetap berkelanjutan sesuai target RPJMD.

Indeks Pendidikan

Realisasi Indeks Pendidikan sebesar 67,99 poin (95,73%) menunjukkan bahwa kinerja belum mencapai target. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, yang dipengaruhi oleh faktor putus sekolah, keterbatasan akses pendidikan di wilayah tertentu, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.



Selain itu, dampak pasca kondisi ekonomi sebelumnya juga berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan secara optimal.

Solusi yang dilakukan antara lain peningkatan akses pendidikan melalui program wajib belajar, pemberian bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, penguatan sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik. Selain itu, dilakukan pula intervensi untuk menekan angka putus sekolah melalui pendekatan lintas sektor.

Indeks Kesehatan

Capaian Indeks Kesehatan sebesar 81,82 poin (105,56%) menunjukkan keberhasilan yang sangat baik karena melampaui target secara signifikan. Peningkatan ini dipengaruhi oleh membaiknya usia harapan hidup yang didorong oleh peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, keberhasilan program promotif dan preventif, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat.

Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari optimalisasi peran fasilitas kesehatan serta intervensi program prioritas seperti penurunan stunting dan peningkatan pelayanan kesehatan dasar.

Solusi yang dilakukan adalah mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan, memperluas cakupan layanan, serta memperkuat program promotif dan preventif. Selain itu, dilakukan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan penguatan kolaborasi lintas sektor untuk menjaga keberlanjutan capaian.

Pengeluaran per Kapita

Realisasi Pengeluaran per Kapita sebesar 10,74 juta (90,56%) menunjukkan bahwa kinerja belum mencapai target dan mengalami



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

penurunan. Hal ini disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang mempengaruhi daya beli masyarakat, seperti inflasi, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta terbatasnya peningkatan pendapatan masyarakat.

Selain itu, struktur ekonomi daerah yang masih didominasi sektor tertentu juga menjadi faktor yang mempengaruhi lambatnya peningkatan pendapatan per kapita.

Solusi yang dilakukan meliputi penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja, pengendalian inflasi daerah, serta peningkatan program perlindungan sosial. Pemerintah daerah juga mendorong pengembangan sektor unggulan daerah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.

6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja pada misi ini adalah sebagai berikut :

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
Tujuan : Meningkatkan kualitas SDM			
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	48.958.792.417,00	43.329.107.406,00	88,50
Sasaran 2 : Meningkatnya usia harapan hidup masyarakat			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	57.468.452.743,00	53.860.069.717,25	93,72



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

KESEHATAN PERORANGAN			
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KESEHATAN	704.325.680,00	539.885.170,00	76,65
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	15.560.000,00	13.390.000,00	86,05
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	3.758.191.175,00	3.004.867.329,00	79,96
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	65.210.230,00	58.428.630,00	89,60
Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Daya Beli Masyarakat			
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	39.982.600,00	38.751.730,00	96,92
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	6.739.000,00	6.700.350,00	99,43
Total Anggaran Sasaran	111.017.253.845,00	100.851.200.332,25	90,84



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

Total Anggaran Tujuan	111.017.253.845,00	100.851.200.332,25	90,84

7) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Efisiensi pengelolaan APBD berarti penggunaan sumber daya yang ada dengan cara yang paling optimal. Efisiensi dapat ditingkatkan dengan mengurangi pemborosan dan penyalahgunaan anggaran, memperbaiki proses pengadaan barang dan jasa, serta meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap penggunaan anggaran oleh pemerintah. Efisiensi dalam penggunaan dana publik menjadi salah satu indikator penting dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sumber daya yang terbatas. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD adalah dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan APBD di lapangan. Evaluasi ini meliputi pengukuran kinerja dan dampak program-program yang dibiayai oleh APBD. Dengan mengetahui kinerja dan dampak program-program tersebut, pemerintah dapat mengetahui apakah ada program yang tidak efisien atau tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

Efisiensi anggaran dalam konteks Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merujuk pada optimalisasi penggunaan dana atau alokasi anggaran untuk mencapai peningkatan IPM dengan biaya yang minimal. IPM adalah indikator yang mengukur kualitas hidup suatu negara berdasarkan tiga dimensi utama: kesehatan (harapan hidup), pendidikan (Rata-rata lama sekolah dan Umur harapan lama sekolah), dan standar hidup (pendapatan riil per kapita). Intervensi pemerintah Kabupaten Barru untuk pencapaian IPM ini didukung oleh pelaksanaan berbagai program/kegiatan sebagaimana yang telah dijelaskan pada analisis program/kegiatan yang menunjang pencapaian IPM.

Perhitungan tingkat efisiensi berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 sebagaimana rumus berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAK_i : Pagu anggaran keluaran i

RAK_i : Realisasi anggaran keluaran i



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

Tingkat efisiensi pencapaian IPM kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	%Capaian	
Meningkatkan Kualitas SDM		Indeks Pembangunan Manusia	Poin	75,22	75,41	100,25	110.992.026.215,00	100.851.200.332,25	90,86	-



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

Menin gkatn ya Kualit as dan Tingk at Pendi dikan Masy arakat	Indeks Pendi dikan	Poi n	71, 02	67,9 9	95, 73	48.958.7 92.417,0 0	43.329.1 07.406,0 0	88,5 0	-
Menin gkatn ya Usia Harap an Hidup Masy arakat	Indeks Keseh atan	Poi n	77, 51	81,8 2	105 ,56	61.986.5 12.198,0 0	57.476.6 40.846,2 5	92,7 2	-
Menin gkatn ya Kualit as Daya Beli Masy arakat	Penge luaran per Kapita	Jut a	11, 86	10,7 4	90, 56	46.721.6 00,00	1.242.43 1.196	97,2 8	-

Secara umum, efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian tujuan *Meningkatnya Kualitas SDM* di Kabupaten Barru Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang relatif baik. Hal ini ditandai dengan capaian kinerja yang sebagian besar memenuhi bahkan melampaui target, dengan tingkat serapan anggaran yang terkendali (di bawah 100%). Kondisi ini mencerminkan adanya efisiensi dalam pemanfaatan



anggaran, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang menunjukkan ketidakseimbangan antara capaian kinerja dan penggunaan anggaran.

Pada indikator **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**, capaian kinerja sebesar 100,25% dengan realisasi anggaran sebesar 90,86% menunjukkan tingkat efisiensi yang baik. Hal ini mengindikasikan bahwa target kinerja dapat dicapai bahkan dilampaui tanpa harus menghabiskan seluruh alokasi anggaran. Efisiensi ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program lintas sektor, khususnya pada bidang pendidikan dan kesehatan, serta optimalisasi perencanaan dan pengendalian anggaran.

Pada indikator Indeks Pendidikan, capaian kinerja sebesar 95,73% dengan realisasi anggaran sebesar 88,50% menunjukkan efisiensi yang cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal dari sisi pencapaian target. Meskipun terjadi penghematan anggaran, kinerja yang belum mencapai target mengindikasikan bahwa efisiensi yang terjadi belum sepenuhnya diikuti oleh efektivitas hasil. Hal ini menunjukkan perlunya penajaman alokasi anggaran agar lebih tepat sasaran terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan indeks pendidikan.

Selanjutnya, pada indikator **Indeks Kesehatan**, capaian kinerja sebesar 105,56% dengan realisasi anggaran sebesar 92,72% menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat baik. Kinerja yang melampaui target dengan penggunaan anggaran yang tidak maksimal mencerminkan keberhasilan dalam pengelolaan sumber daya, termasuk optimalisasi program promotif dan preventif yang relatif lebih efisien namun berdampak signifikan terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Namun demikian, pada indikator **Pengeluaran per Kapita**, meskipun realisasi anggaran mencapai 97,28%, capaian kinerja hanya sebesar 90,56%. Kondisi ini menunjukkan tingkat efisiensi yang rendah, karena penggunaan anggaran yang tinggi tidak diikuti dengan pencapaian target kinerja. Hal ini mengindikasikan bahwa intervensi yang dilakukan



belum efektif dalam mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro, inflasi, dan keterbatasan pendapatan masyarakat turut mempengaruhi rendahnya capaian indikator ini.

Secara keseluruhan, analisis efisiensi menunjukkan bahwa:

- Sebagian besar indikator telah menunjukkan **efisiensi anggaran yang baik**, ditandai dengan capaian kinerja $\geq$ target dan realisasi anggaran $< 100\%$.
- **Indikator kesehatan dan IPM menjadi contoh efisiensi optimal**, karena mampu menghasilkan kinerja tinggi dengan penggunaan anggaran yang lebih hemat.
- **Indikator pendidikan cukup efisien namun belum efektif**, karena target belum tercapai.
- **Indikator daya beli masyarakat belum efisien**, karena tingginya penggunaan anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja.

Dengan demikian, ke depan perlu dilakukan:

1. Penguatan perencanaan berbasis kinerja agar alokasi anggaran lebih tepat sasaran.
2. Reorientasi program pada sektor pendidikan dan ekonomi agar lebih berdampak langsung terhadap indikator kinerja.
3. Peningkatan monitoring dan evaluasi untuk memastikan keterkaitan yang kuat antara penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai.

Upaya ini penting untuk memastikan bahwa setiap sumber daya yang digunakan benar-benar memberikan nilai tambah yang optimal dalam pencapaian target RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021–2026.

MISI 2 : MENCIPTAKAN LINGKUNGAN YANG KONDUSIF SERTA PENGEMBANGAN SENI BUDAYA LOKAL.

TUJUAN 3 : MEWUJUDKAN PENGEMBANGAN KEMAJUAN KEBUDAYAAN

SASARAN 5 : TERWUJUDNYA PENGUATAN SENI BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL

Misi kedua ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung serta memajukan seni budaya lokal sebagai bagian integral dari pembangunan masyarakat. Seni budaya lokal tidak hanya menjadi identitas suatu daerah, tetapi juga menjadi kekuatan yang dapat mendorong kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam konteks ini, pengembangan seni budaya lokal diarahkan untuk memperkuat identitas budaya, melestarikan kearifan lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi seni dan budaya.

Tujuan dari misi ini adalah untuk mewujudkan kemajuan kebudayaan yang berkelanjutan dengan mengoptimalkan potensi seni dan budaya lokal. Hal ini dilakukan melalui upaya-upaya yang sistematis dan terencana, seperti pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan seni budaya lokal dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan demikian, kebudayaan tidak hanya menjadi warisan yang dilestarikan, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan inovasi yang dapat mendorong kemajuan daerah. Dengan sasaran utama terwujudnya penguatan seni budaya dan kearifan lokal.



Gambar Objek Budaya Mappadendang



Gambar Objek Budaya Mattojang



Gambar Objek Budaya Marakkka Bola



Gambar Objek Budaya Ma'doja Bine

Keberhasilan dari tujuan diukur melalui Persentase Desa/Kel Pemajuan Kebudayaan adalah sebuah indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sejauh mana desa atau kelurahan telah berpartisipasi aktif dalam upaya pemajuan kebudayaan. Indikator ini menilai peningkatan jumlah desa atau kelurahan yang telah melaksanakan program-program kebudayaan, seperti pelestarian seni tradisional, pengembangan kearifan lokal, atau kegiatan budaya lainnya. Dengan menghitung dan menganalisis Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Pemajuan Kebudayaan, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

memastikan bahwa kebudayaan lokal tetap lestari dan berkembang sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Barru tahun 2021-2026, sasaran yang mendukung pencapaian tujuan adalah **Terwujudnya Penguatan Seni Budaya** yang diukur melalui indikator sasaran **Persentase Objek Kemajuan Budaya yang terpelihara**.

Persentase Objek Kemajuan Budaya yang terpelihara adalah sebuah indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sejauh mana objek-objek kebudayaan, seperti situs sejarah, bangunan bersejarah, seni tradisional, atau kearifan lokal, telah berhasil dilestarikan dan dipelihara. Indikator ini penting karena memberikan gambaran tentang upaya pelestarian kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Perbandingan Pelestarian Budaya Kabupaten Barru dengan beberapa Kabupaten Lainnya di Sulawesi Selatan dapat kita lihat dari tabel berikut:

No	Kabupaten	Fokus Pelsetarian Budaya	Tradisi Budaya
1	Kabupaten Barru	Tradisi lisan dan Seni Tradisional	<i>Mattojang</i> (ayunan raksasa), <i>Mappadendang</i> (pesta panen), dan <i>Sere Api</i> dan <i>Aksara Lontaraq</i>
2	Kabupaten Bone	Perlindungan Hukum & Tradisi Adat	<i>Abbotingeng</i>
3	Kabupaten Gowa	Pelestarian Tari & Cagar Budaya Makro	<i>Tari Pakarena</i> , <i>Benteng dan Makam Kerajaan</i>
4	Tana Toraja	Adat-Istiadat & Wisata Budaya	<i>upacara Rambu Solo</i> , <i>Rambu Solo</i> dan <i>rumah adat Tongkonan</i>

Sumber : repositories.kemendikdasmen.go.id



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

Pengukuran kinerja misi ini diuraikan berdasarkan rumus diatas yang memuat 6 (enam) analisis capaian kinerja karena merupakan indikator kinerja yang tidak diberlakukan seluruh kabupaten/kota se Indonesia yang diuraikan sebagai berikut:

1. Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja adalah suatu proses evaluasi yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pencapaian kinerja tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pencapaian tujuan dan sasaran pada misi 2 dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
Mewujudkan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan	Terwujudnya Penguatan Seni Budaya	Persentase Objek Kemajuan Budaya yang terpelihara	Persentase	14,29	3,30	23,09	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

Capaian Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Pemajuan Kebudayaan sangat tinggi yakni sebesar 91,66%, berbanding terbalik dengan capaian Persentase Objek Kemajuan Budaya yang Terpelihara sangat rendah yakni sebesar 23,09%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah Kabupaten Barru untuk cakupan pemajuan kebudayaan di seluruh wilayah sudah sangat baik, namun hal yang perlu menjadi perhatian adalah aspek pemeliharaan objek kemajuan budaya. Diperlukan sinergi bersama Desa/Kelurahan serta stakeholder yang lain untuk peningkatan di tahun mendatang.

2. Analisis perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

Analisis perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir untuk tujuan dan sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2024			2025		
				Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Mewujudkan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan		Persentase Peningkatan Desa/Kel Pemajuan Kebudayaan	Persen	9,09	10	110,01	10,91	10	91,66
	Terwujudnya Penguatan Seni Budaya	Persentase Objek Kemajuan Budaya yang terpelihara	Persen	12,7	37,03	291,57	14,29	3,30	23,09

Penurunan persentase peningkatan Desa/Kelurahan Pemajuan Kebudayaan dari 110,01% ditahun 2024 menjadi 91,66% di tahun 2025, menunjukkan bahwa upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan di tingkat lokal masih memerlukan penguatan baik dari aspek kebijakan, dukungan anggaran, kelembagaan, maupun partisipasi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan langkah strategis dan sinergi lintas sektor agar pemajuan kebudayaan dapat menjadi bagian integral dalam pembangunan daerah.

Penurunan nilai persentase peningkatan Desa/Kelurahan Pemajuan Kebudayaan dibanding tahun sebelumnya dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1. Terbatasnya dukungan anggaran program kebudayaan**
Alokasi anggaran untuk kegiatan pemajuan kebudayaan di tingkat desa/kelurahan belum optimal sehingga pelaksanaan program, pembinaan komunitas budaya, dan pengembangan kegiatan kebudayaan tidak berjalan maksimal.



2. **Belum meratanya kapasitas kelembagaan budaya di desa/kelurahan**
Tidak semua desa/kelurahan memiliki kelembagaan atau komunitas budaya yang aktif dalam mengelola kegiatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal.
3. **Kurangnya pendataan dan dokumentasi objek pemajuan kebudayaan**
Pendataan terkait tradisi, seni, adat istiadat, permainan rakyat, dan warisan budaya lainnya belum dilakukan secara sistematis sehingga sulit menjadi dasar pengembangan desa/kelurahan berbasis budaya.
4. **Terbatasnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan**
Partisipasi generasi muda dalam kegiatan pelestarian budaya cenderung menurun akibat pengaruh modernisasi dan kurangnya ruang ekspresi budaya di tingkat lokal.
5. **Fokus program pembangunan desa pada sektor lain**
Prioritas pembangunan desa seringkali lebih berfokus pada pembangunan fisik dan ekonomi sehingga program pemajuan kebudayaan belum menjadi prioritas utama.

Capaian **Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Terpelihara** pada tahun berjalan mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pelestarian dan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan belum berjalan optimal.

Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab penurunan capaian tersebut antara lain:

1. **Terbatasnya dukungan anggaran pemeliharaan kebudayaan**
Alokasi anggaran yang tersedia belum memadai untuk menjangkau seluruh objek pemajuan kebudayaan yang memerlukan pemeliharaan, baik berupa situs budaya, tradisi, kesenian, maupun warisan budaya lainnya.
2. **Terbatasnya kapasitas kelembagaan dan SDM kebudayaan**
Keterbatasan tenaga teknis, pelaku budaya, serta lembaga pengelola kebudayaan di daerah menyebabkan proses pemeliharaan dan

pengelolaan objek kebudayaan belum dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan.

3. **Menurunnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya**
Keterlibatan masyarakat, khususnya generasi muda, dalam menjaga dan melestarikan objek pemajuan kebudayaan masih terbatas sehingga upaya pemeliharaan tidak berjalan secara kolektif.

4. **Belum optimalnya sistem dokumentasi dan pengelolaan data kebudayaan**

Sistem pendataan, dokumentasi, serta pemantauan kondisi objek pemajuan kebudayaan masih perlu diperkuat agar proses pemeliharaan dapat dilakukan secara lebih terencana dan berkelanjutan.

3. **Analisis perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target	Tingkat Kemajuan
Mewujudkan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan		Persentase Peningkatan Desa/Kel Pemajuan Kebudayaan	Persen	10	12,73	78,55
	Terwujudnya Penguatan Seni Budaya	Persentase Objek Kemajuan Budaya yang terpelihara	Persen	3,30	15,87	20,79



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

Pada tabel diatas memperlihatkan realisasi sebesar 10% dari target jangka menengah 12,73% menunjukkan bahwa upaya peningkatan partisipasi desa/kelurahan dalam pemajuan kebudayaan masih perlu ditingkatkan melalui peningkatan partisipasi masyarakat, alokasi anggaran, dan koordinasi antarlembaga.

Sedangkan untuk indikator persentase objek kemajuan budaya yang terpelihara dengan Realisasi sebesar 3,30% sangat jauh dari target jangka menengah 15,87%, menunjukkan bahwa diperlukan upaya yang signifikan dalam pelestarian objek kebudayaan.

Dengan realisasi kinerja yang beragam untuk kedua indikator, dapat disimpulkan bahwa upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan masih perlu upaya yang signifikan melalui komitmen bersama semua stakeholder, terutama dalam hal pelestarian objek kebudayaan. Namun, untuk peningkatan partisipasi desa/kelurahan dalam pemajuan kebudayaan perlu dipertahankan dan lebih ditingkatkan. Dengan langkah-langkah strategis yang tepat, diharapkan target jangka menengah dapat tercapai dan kebudayaan lokal tetap lestari.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan atau peningkatan kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
Mewujudkan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan		Persentase Peningkatan Desa/Kel Pemajuan Kebudayaan	Persen	10,91	10	91,66		
	Terwujudnya Penguatan Seni Budaya	Persentase Objek Kemajuan Budaya yang terpelihara	Persen	14,29	3,30	23,09		



Capaian Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Pemajuan Kebudayaan sebesar 91,66% menunjukkan bahwa realisasi belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa masih perlu upaya peningkatan partisipasi desa/kelurahan dalam pemajuan kebudayaan. Faktor yang mempengaruhi kegagalan:

1. **Terbatasnya alokasi anggaran untuk program pemajuan kebudayaan**
Dukungan anggaran yang tersedia belum mampu menjangkau seluruh desa/kelurahan untuk kegiatan pembinaan, pengembangan, dan pelestarian budaya sehingga peningkatan jumlah desa/kelurahan yang memenuhi kriteria pemajuan kebudayaan berjalan lambat.
2. **Belum optimalnya kelembagaan budaya di tingkat desa/kelurahan**
Sebagian desa/kelurahan belum memiliki kelembagaan atau komunitas budaya yang aktif, seperti sanggar seni, kelompok adat, maupun forum pelaku budaya yang berperan dalam menggerakkan kegiatan kebudayaan.
3. **Terbatasnya kapasitas sumber daya manusia bidang kebudayaan**
Keterbatasan tenaga pendamping, pelaku budaya, dan pengelola kegiatan kebudayaan menyebabkan program pembinaan dan pengembangan kebudayaan di desa/kelurahan belum berjalan secara berkelanjutan.
4. **Belum optimalnya integrasi program kebudayaan dalam perencanaan pembangunan desa**
Program pemajuan kebudayaan belum sepenuhnya menjadi prioritas dalam dokumen perencanaan desa sehingga dukungan kegiatan dan pembiayaan dari desa masih terbatas.
5. **Kurangnya pendataan dan inventarisasi potensi budaya desa/kelurahan**
Belum tersedianya data yang lengkap mengenai potensi budaya lokal, tradisi, kesenian, dan warisan budaya menyebabkan pengembangan desa/kelurahan berbasis kebudayaan belum terarah.
6. **Rendahnya partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda**
Minat generasi muda dalam kegiatan pelestarian budaya cenderung



menurun sehingga keberlanjutan kegiatan kebudayaan di desa/kelurahan kurang terjaga.

Untuk alternatif Solusi yang dilakukan untuk mengatasi kegagalan yang ada antara lain:

1. **Peningkatan dukungan anggaran pemajuan kebudayaan**
Mengoptimalkan alokasi anggaran daerah serta mendorong pemanfaatan sumber pembiayaan lain seperti Dana Desa untuk kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya lokal.
2. **Penguatan kelembagaan budaya di desa/kelurahan**
Mendorong pembentukan dan pembinaan sanggar seni, komunitas budaya, serta kelompok pelaku budaya yang menjadi motor penggerak kegiatan kebudayaan di tingkat lokal.
3. **Peningkatan kapasitas SDM kebudayaan**
Melaksanakan pelatihan, pendampingan, dan pembinaan bagi pelaku budaya, pengelola kegiatan seni, serta aparat desa/kelurahan terkait pengelolaan program pemajuan kebudayaan.
4. **Integrasi program pemajuan kebudayaan dalam perencanaan pembangunan desa**
Mendorong pemerintah desa/kelurahan untuk memasukkan program pelestarian budaya dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa.
5. **Penguatan sistem pendataan dan inventarisasi objek pemajuan kebudayaan**
Melakukan pendataan secara sistematis terhadap potensi budaya desa/kelurahan sebagai dasar penyusunan program pengembangan desa berbasis budaya.
6. **Peningkatan partisipasi masyarakat dan generasi muda**
Menyelenggarakan festival budaya, lomba seni tradisional, dan kegiatan kreatif lainnya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pelestarian budaya lokal.



Capaian **Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Terpelihara** pada tahun berjalan masih berada jauh di bawah target yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemeliharaan dan pelestarian objek pemajuan kebudayaan belum dapat dilaksanakan secara optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut antara lain:

1. Keterbatasan dukungan anggaran untuk kegiatan pemeliharaan kebudayaan

Ketersediaan anggaran belum memadai untuk mendukung kegiatan pemeliharaan seluruh objek pemajuan kebudayaan, baik dalam bentuk konservasi, revitalisasi, dokumentasi, maupun pembinaan terhadap pelaku budaya.

2. Bertambahnya jumlah objek pemajuan kebudayaan yang teridentifikasi

Hasil kegiatan inventarisasi dan pendataan kebudayaan menunjukkan adanya peningkatan jumlah objek pemajuan kebudayaan yang tercatat. Hal ini menyebabkan rasio objek yang dapat dipelihara menjadi lebih kecil dibandingkan dengan total objek yang ada.

3. Keterbatasan sumber daya manusia di bidang kebudayaan

Ketersediaan tenaga teknis maupun tenaga pendamping yang memiliki kompetensi di bidang pelestarian kebudayaan masih terbatas sehingga proses pemeliharaan dan pengelolaan objek budaya belum berjalan secara optimal.

4. Belum optimalnya kelembagaan dan pengelolaan kebudayaan di tingkat masyarakat

Keterlibatan komunitas budaya, sanggar seni, serta kelompok masyarakat dalam menjaga dan merawat objek kebudayaan masih belum merata di seluruh wilayah.

5. Belum optimalnya sistem pendataan dan monitoring objek kebudayaan

Sistem dokumentasi, pemetaan, dan pemantauan kondisi objek pemajuan kebudayaan masih perlu diperkuat sehingga kegiatan pemeliharaan belum dapat dilakukan secara terarah dan berkelanjutan.



6. Terbatasnya sinergi lintas sektor dalam pengelolaan kebudayaan

Program pelestarian kebudayaan belum sepenuhnya terintegrasi dengan sektor lain seperti pariwisata, pendidikan, maupun pemberdayaan masyarakat yang sebenarnya dapat mendukung pemeliharaan objek budaya.

Untuk alternatif Solusi yang dilakukan untuk mengatasi kegagalan:

1. Peningkatan Dukungan Anggaran Pemeliharaan Kebudayaan

Pemerintah daerah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk kegiatan pelestarian dan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan, termasuk kegiatan konservasi, revitalisasi, dokumentasi, serta pembinaan terhadap pelaku budaya. Selain itu, dapat dilakukan optimalisasi sumber pembiayaan lain seperti dana desa maupun dukungan dari program lintas sektor.

2. Penguatan Pendataan dan Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan

Melakukan pendataan dan pemutakhiran database objek pemajuan kebudayaan secara sistematis sehingga pemerintah daerah memiliki basis data yang akurat mengenai kondisi, lokasi, dan kebutuhan pemeliharaan setiap objek budaya.

3. Penguatan Kelembagaan dan Komunitas Budaya

Mendorong pembentukan serta pembinaan komunitas budaya, sanggar seni, dan kelompok masyarakat yang berperan dalam menjaga dan merawat objek pemajuan kebudayaan di tingkat desa/kelurahan.

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Kebudayaan

Melaksanakan pelatihan, pendampingan, dan pembinaan bagi pelaku budaya, pengelola situs budaya, serta aparat pemerintah yang menangani bidang kebudayaan agar memiliki kemampuan dalam pengelolaan dan pelestarian budaya secara berkelanjutan.

5. Penguatan Sinergi Lintas Sektor



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

Mengintegrasikan program pemajuan kebudayaan dengan sektor lain seperti pariwisata, pendidikan, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan masyarakat sehingga pemeliharaan objek kebudayaan dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Mendorong keterlibatan masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan budaya, festival seni tradisional, lomba budaya lokal, serta edukasi kebudayaan kepada generasi muda agar pelestarian budaya menjadi tanggung jawab bersama.

7. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi

Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kondisi objek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan sebagai objek yang dipelihara sehingga dapat diketahui secara cepat kebutuhan penanganan dan upaya pelestariannya.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja pada misi ini adalah sebagai berikut :

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
Tujuan : Mewujudkan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan			
Sasaran : Terwujudnya Penguatan Seni Budaya			
Program Pengembangan Kebudayaan	286.820.200	279.216.075	97,35
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam	137.920.000	136.941.505	99,29



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

Daerah Kabupaten/Kota			
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	105.013.500	98.603.250	93,89
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	43.886.700	43.671.320	99,51
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	66.491.000	52.493.300	78,95
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	66.491.000	52.493.300	78,95
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	121.664.847	92.182.750	75,77
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	121.664.847	92.182.750	75,77
Total Anggaran Sasaran	474.976.047	423.892.125	89,24
Total Anggaran Tujuan	474.976.047	423.892.125	89,24



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

Dari tabel diatas bahwa Program pengembangan kebudayaan yang didukung tiga kegiatan dengan capaian diatas 90% menunjukkan realisasi sebesar 97,35% jika dihubungkan dengan Indikator yang akan dicapai, maka bisa dikatakan realisasi anggaran efektif dalam pencapaian target. Demikian pula dengan Program pengembangan kesenian tradisional meskipun realisasi diangka 78,95% namun telah efektif untuk mengantar pencapaian target indikator.

Khusus untuk Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan capaian yang rendah (75,77%) menunjukkan bahwa program ini masih belum efektif jika dibandingkan antara capaian target indikator dengan realisasi anggaran, dan jika dilihat dari pencapaiannya maka program ini masih menghadapi banyak tantangan dalam implementasinya.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Efisiensi pengelolaan APBD berarti penggunaan sumber daya yang ada dengan cara yang paling optimal. Efisiensi dapat ditingkatkan dengan mengurangi pemborosan dan penyalahgunaan anggaran, memperbaiki proses pengadaan barang dan jasa, serta meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap penggunaan anggaran oleh pemerintah. Efisiensi dalam penggunaan dana publik menjadi salah satu indikator penting dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sumber daya yang terbatas.

Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD adalah dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan APBD di lapangan. Evaluasi ini meliputi pengukuran kinerja dan dampak program-program yang dibiayai oleh APBD. Dengan mengetahui kinerja dan dampak program-program tersebut, pemerintah dapat mengetahui apakah ada program yang tidak efisien atau tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

Perhitungan tingkat efisiensi berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 sebagaimana rumus berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

Tingkat efisiensi pencapaian tujuan dan sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
Mewujudkan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan		Persentase Peningkatan Desa/Kel Pemajuan Kebudayaan	Persen	10,91	10	91,66	474.976.047	423.892.125	89,24	2,41
	Terwujudnya Penguatan Seni Budaya	Persentase Objek Kemajuan Budaya yang terpelihara	Persen	14,29	3,30	23,09	474.976.047	423.892.125	89,24	-66,15

Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi, capaian kinerja Persentase Peningkatan Desa/Kel Pemajuan Kebudayaan sebesar 91,66% dengan realisasi anggaran sebesar 89,24% menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 2,42%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan telah berjalan efisien karena capaian kinerja yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat penggunaan anggaran.

Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan untuk mempertahankan kinerja efisiensi yang ada antara lain:

1. Penguatan Perencanaan Program Berbasis Prioritas

Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa program pemajuan kebudayaan disusun secara terarah dengan menetapkan prioritas desa/kelurahan yang memiliki potensi budaya yang kuat sehingga penggunaan anggaran dapat lebih fokus dan memberikan dampak yang optimal terhadap peningkatan capaian indikator.

2. Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya yang Ada

Pemanfaatan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, kelembagaan budaya, maupun sarana prasarana kebudayaan perlu dioptimalkan sehingga kegiatan pemajuan kebudayaan dapat dilaksanakan secara efektif tanpa memerlukan tambahan anggaran yang besar.



3. Penguatan Sinergi dan Kolaborasi Lintas Sektor

Meningkatkan kerja sama dengan perangkat daerah terkait, pemerintah desa/kelurahan, komunitas budaya, lembaga pendidikan, serta pelaku ekonomi kreatif sehingga pelaksanaan program pemajuan kebudayaan dapat dilakukan secara kolaboratif dan lebih efisien.

4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Mendorong keterlibatan aktif masyarakat, khususnya pelaku budaya dan generasi muda, dalam kegiatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan di desa/kelurahan sehingga kegiatan dapat berjalan secara berkelanjutan dengan dukungan sumber daya lokal.

5. Penguatan Sistem Pendataan dan Monitoring Program

Melakukan pendataan serta pemantauan secara berkala terhadap perkembangan desa/kelurahan pemajuan kebudayaan sehingga pelaksanaan program dapat dievaluasi secara tepat dan penggunaan anggaran tetap terkendali.

6. Integrasi Program Pemajuan Kebudayaan dengan Program Pemberdayaan Masyarakat

Mengintegrasikan kegiatan pemajuan kebudayaan dengan program pemberdayaan masyarakat, pariwisata, dan ekonomi kreatif agar manfaat program lebih luas serta penggunaan anggaran menjadi lebih efektif dan efisien.

Untuk indikator Persentase Objek Kemajuan Budaya yang terpelihara capaian kinerja sebesar 23,09%. Sementara capaian realisasi anggarannya sebesar 89,24, hal ini menunjukkan tingkat efisiensi sebesar -66,15%. Tanda minus dalam penghitungan efisiensi menunjukkan bahwa pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sangat tidak efisien karena capaian realisasi anggaran jauh lebih tinggi daripada capaian realisasi kinerja.

Langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi dan menjaga efisiensi kinerja pada indikator Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Terpelihara

1. Penetapan Prioritas Objek Pemajuan Kebudayaan



Pemerintah daerah perlu menetapkan prioritas objek pemajuan kebudayaan yang akan dipelihara berdasarkan tingkat nilai budaya, urgensi pelestarian, serta potensi pemanfaatannya. Dengan penentuan prioritas tersebut, penggunaan anggaran dapat lebih terarah dan efektif.

2. Penguatan Pendataan dan Basis Data Kebudayaan

Melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data objek pemajuan kebudayaan secara berkala sehingga pemerintah daerah memiliki informasi yang akurat mengenai jumlah, kondisi, dan kebutuhan pemeliharaan setiap objek budaya.

3. Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya yang Ada

Pemeliharaan objek kebudayaan dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran komunitas budaya, sanggar seni, dan masyarakat lokal sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada dukungan anggaran pemerintah daerah.

4. Penguatan Sinergi Lintas Sektor

Mengintegrasikan program pelestarian kebudayaan dengan sektor lain seperti pariwisata, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan ekonomi kreatif sehingga kegiatan pemeliharaan objek budaya dapat memberikan manfaat yang lebih luas serta meningkatkan efisiensi anggaran.

5. Peningkatan Kapasitas Pelaku Budaya dan Pengelola Objek Budaya

Melaksanakan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku budaya, pengelola situs budaya, serta komunitas masyarakat agar memiliki kemampuan dalam merawat dan mengelola objek pemajuan kebudayaan secara berkelanjutan.

6. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi

Melakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi objek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan sebagai objek yang dipelihara sehingga dapat diketahui kebutuhan penanganan lebih awal dan penggunaan anggaran tetap efisien.

Dengan tingkat efisiensi yang minim dan capaian kinerja belum maksimal, dapat disimpulkan bahwa pemajuan dan pelestarian kebudayaan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Sehingga diperlukan upaya



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

berkelanjutan untuk memastikan bahwa program-program ini dapat berjalan dengan baik di tahun berikutnya, sehingga kebudayaan lokal tetap lestari dan menjadi bagian integral dari pembangunan daerah yang berkelanjutan.



**MISI 3 : MENINGKATKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR UNTUK Mendukung PERTUMBUHAN
EKONOMI MELALUI Pemanfaatan SUMBERDAYA LOKAL**

TUJUAN 3 : MENINGKATKAN KUALITAS PEMERATAAN INFRASTRUKTUR

Meningkatnya kualitas pemerataan infrastruktur diukur melalui indikator kinerja Indeks Williamson. Pada dasarnya kesenjangan pembangunan antarwilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan menjadi berbeda-beda. Terjadinya ketimpangan antarwilayah ini berimplikasi terhadap kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat antarwilayah, yang dapat mengganggu stabilitas keamanan wilayah akibat kecemburuan masyarakat terutama yang berasal dari daerah dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah.

Indeks wiliamson merupakan salah satu indeks yang digunakan dalam melihat disparitas yang terjadi antar wilayah dan lebih sensitif terhadap perubahan ketimpangan. Indeks Williamson akan menghasilkan indeks yang lebih besar atau sama dengan nol. Jika $Y_i = Y$ maka akan dihasilkan indeks = 0, yang berarti tidak adanya ketimpangan ekonomi antar daerah. Indeks lebih besar dari 0 menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi antar wilayah. Semakin besar indeks yang dihasilkan semakin besar tingkat ketimpangan antar kecamatan di satu kabupaten. Adapun sasaran strategis dari tujuan ini adalah :

**SASARAN 6 : MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH**

Indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran adalah **Indeks daya saing daerah Pilar infrastruktur.** Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target indikator adalah sebagai berikut:

Indeks daya saing daerah adalah metodologi pengukuran yang menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi yang dimilikinya guna tercapainya kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

Pengukuran kinerja misi 3 yaitu meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumberdaya lokal yang kinerjanya diukur dari indeks daya saing daerah pilar infrastruktur. Indeks daya saing daerah pilar infrastruktur mengukur keberadaan dan kualitas sarana dan prasarana pendukung aktivitas perekonomian di suatu daerah yang perhitungannya dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Berdasarkan rumus diatas yang memuat 7 (tujuh) analisis capaian kinerja yang diuraikan sebagai berikut:

1. Analisis Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja indikator “**Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur**” pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
Meningkatkan Kualitas Pemerataan Infrastruktur		Indeks Williamson	Poin	0,26	0,26	100.00	Sangat Tinggi	BPS
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	Indeks daya saing daerah Pilar infrastruktur	Poin	3,884	4,030	103.76	Sangat Tinggi	BRIN

Realisasi indikator kinerja Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur pada tahun 2025 sebesar 4,030 poin dari target sebesar 3,884 Poin. Realisasi indikator kinerja Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur berdasarkan data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat ketercapaiannya sebesar 103,76%. Capaian ini menunjukkan bahwa sektor infrastruktur di Kabupaten Barru menjadi perhatian dan memadai dalam mendukung aktivitas ekonomi menjadi lebih efisien dan produktif.

2. Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dan beberapa tahun terakhir;

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja indikator “Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur” tahun 2025 dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2024			2025		
				Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatkan Kualitas Pemerataan Infrastruktur		Indeks Williamson	Poin	0,26	0,26	100.00	0,26	0,26	100.00
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	Indeks daya saing daerah Pilar infrastruktur	Poin	3,881	3,990	102.81	3,884	4,030	103.76

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk capaian pada tahun 2025 untuk indeks Williamson telah mencapai target 100%. Untuk indeks daya saing daerah pilar infrastruktur pada tahun 2025 tingkat capaiannya adalah 103,76 persen, jika disandingkan dengan realisasi pada tahun 2024 yang tingkat capaiannya 102,81 persen menunjukkan terjadi peningkatan realiasi kinerja sebesar 0,95 Persen.

3. Analisis Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja sampai dengan tahun ini dengan target RPJMD;

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari indikator “*Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur*” sampai tahun 2025 dengan target RPJMD 2021 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target (2026)	Tingkat Kemajuan
Meningkatkan Kualitas Pemerataan Infrastruktur		Indeks Williamson	Poin	0,26	0,25	96,15
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	Indeks daya saing daerah Pilar infrastruktur	Poin	4,030	3,901	103.31

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 belum mencapai target untuk indeks Williamson. Namun untuk indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur telah mencapai target dengan tingkat kemajuan sebesar 103,31%.



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

4. Analisis Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari indikator “*Indeks daya saing daerah pilar infrastruktur*” Tahun 2025 dengan Realisasi nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Provinsi Tahun 2025	Capaian Kabupaten terhadap realisasi Provinsi	Realisasi Nasional Tahun 2025	Capaian Kabupaten terhadap realisasi nasional
Meningkatkan Kualitas Pemerataan Infrastruktur		Indeks Williamson	Poin	0,26	-	-	-	-
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	Indeks daya saing daerah Pilar infrastruktur	Poin	4,030	3,850	104,47	3,370	116,38

Realisasi indikator kinerja Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur pada tahun 2025 sebesar 4,030 Poin lebih tinggi jika dibandingkan capaian realisasi nasional untuk tahun 2025 sebesar 3,370 Poin, dengan tingkat capaian sebesar 116,38 persen. Sementara ketika disandingkan dengan capaian realisasi Provinsi Sulawesi Selatan juga lebih tinggi dari capaian Provinsi Sulsel sebesar 3,850 poin, dengan tingkat capaian sebesar 104,47 persen.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Indikator kinerja “*Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur*” diperoleh dari pelaksanaan 7 (Tujuh) Program Prioritas seperti yang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Program	Indikator Kinerja	Anggaran		Capaian
		Pagu	Realisasi	
Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pemerataan Infrastruktur				
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah				
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	6,263,573,821.00	4,422,576,901.00	70.61%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian	1 508 992 002 35	1 287 350 650 00	85 31%



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

	banjir di WS Kewenangan Kab/Kota			
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (SPM)	712,062,366.00	682,331,559.00	95.82%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	474,815,170.00	399,793,923.00	84.20%
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	52,462,491,842.04	41,130,119,975.00	78.40%
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kab/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	1,175,061,415.00	1,016,219,340.00	86.48%
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan Kawasan Perumahan memiliki kelengkapan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	5,713,760,363.00	4,569,473,765.00	79.97%
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	27,208,817,806.00	22,748,448,028.00	83.61%
JUMLAH		95,519,574,785.39	76,256,314,141.00	83.05%

Seluruh program diatas ditujukan untuk mencapai indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Barru Periode Tahun 2025 – 2029 dengan target yang sudah ditetapkan. Disamping mampu melakukan efisiensi dari sisi anggaran, target indikator kinerja “*Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur*” mencapai target kinerja yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya;

Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu Program untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar dengan kata lain persentase capaian sasaran “sama atau lebih tinggi” dari capaian input (realisasi anggarannya). Rumus yang digunakan adalah:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAK_i : Pagu anggaran keluaran i

RAK_i : Realisasi anggaran keluaran i

CK_i : Capaian keluaran i

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran dalam pencapaian indikator kinerja Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
Meningkatkan Kualitas Pemerataan Infrastruktur		Indeks Williamson	Poin	0,26	0,26	100.00	95,519,57 4,785.39	76,256,31 4,141.00	83,05	99,20%
	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	Indeks daya saing daerah Pilar infrastruktur	Poin	3,884	4,030	103.76	95,519,57 4,785.39	76,256,31 4,141.00	83,05	99,23%

Dari tabel perhitungan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya diatas menunjukkan bahwa anggaran yang digunakan untuk peningkatan Kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah telah berjalan dengan efisien. Pemerintah Kabupaten Barru telah mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mampu meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah.

7. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan atau peningkatan Kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah keberhasilannya diukur melalui Indeks Daya Saing Daerah Pilar



Infrastruktur. Capaian 103,76 persen telah menunjukkan keberhasilan pemerintah Kabupaten Barru dalam peningkatan kualitas infrastruktur daerah. Adapun penyebab keberhasilan diuraikan sebagai berikut :

1. Kebijakan yang dirancang dengan baik dan disesuaikan dengan kondisi wilayah dapat memainkan peran penting dalam mengurangi ketimpangan dalam hal ini kebijakan pembangunan infrastruktur yang merata.
2. Pembangunan Infrastruktur yang berlanjut dan konsisten membuka aksesibilitas dan memperlancar arus barang dan jasa antar wilayah.

Meskipun berhasil dalam capaian peningkatan Kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah namun tetap harus mempertimbangkan faktor penghambat yang relevan terhadap upaya peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah meskipun capaian Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur diantaranya sebagai berikut :

1. Keterbatasan Anggaran dan Pembiayaan Infrastruktur; Kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang tinggi tidak selalu sebanding dengan kapasitas fiskal daerah. Hal ini dapat menghambat percepatan pembangunan, terutama pada wilayah yang membutuhkan investasi besar seperti jalan penghubung antar wilayah terpencil.
2. Kondisi Geografis dan Topografi Wilayah; Kabupaten Barru memiliki karakteristik wilayah yang bervariasi, termasuk daerah pesisir dan perbukitan. Kondisi ini menyulitkan pembangunan infrastruktur secara merata, terutama untuk akses jalan dan jaringan transportasi.
3. Koordinasi Antar Perangkat Daerah yang Belum Optimal; Pembangunan infrastruktur membutuhkan sinergi lintas sektor. Kurangnya koordinasi dapat menyebabkan tumpang tindih program atau ketidaksinambungan pembangunan antar wilayah.
4. Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam; Curah hujan tinggi, banjir, dan longsor dapat merusak infrastruktur yang telah dibangun serta meningkatkan biaya pemeliharaan dan rehabilitasi.

Untuk dapat mempertahankan keberhasilan capaian ini dan kedepannya lebih meningkat capaian kinerjanya, pemerintah Kabupaten Barru harus mampu



mempertahkannya dengan beberapa solusi yang harus dilakukan sebagai berikut :

1. Percepatan penyerapan anggaran
Melakukan lelang dini untuk proyek-proyek infrastruktur strategis agar pengerjaan fisik tidak menumpuk diakhir tahun, sehingga realisasi anggaran bisa maksimal.
2. Peningkatan kolaborasi lintas sektor
Melakukan kolaborasi untuk capaian indikator yang membutuhkan kolaborasi antar dinas.
3. Mitigasi risiko bencana pada infrastruktur
Infrastruktur yang dibangun harus memiliki standar ketahanan bencana agar tidak terjadi kerusakan dini yang dapat menurunkan kualitas infrastruktur daerah dimasa depan.

**MISI 4 : MENINGKATKAN DAYA SAING MENUJU KEMANDIRIAN
EKONOMI DAERAH YANG BERKUALITAS DAN
BERKELANJUTAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN**

**TUJUAN 4 : MEWUJUDKAN KEMANDIRIAAN EKONOMI YANG
BERKELANJUTAN**

Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan diukur melalui indikator kinerja Pertumbuhan Ekonomi. Daya saing daerah merupakan kemampuan daerah untuk menumbuhkembangkan daerah yang bersangkutan yang direfleksikan pada adanya pertumbuhan ekonomi yang kuat, peningkatan daya beli, kemakmuran rakyat, dan kualitas diri rakyat (masyarakat), tingginya daya tarik daerah bersangkutan bagi para investor luar untuk berinvestasi dan berbisnis, dan kemampuan daerah itu menghasilkan outputnya (produk atau jasa) untuk bersaing dan menang dalam persaingan dengan output (produk atau jasa) yang dihasilkan pihak lain di luar daerah yang bersangkutan secara global, Untuk itu potensi lokal di setiap wilayah harus digali untuk menumbuhkan kembangkan potensi daya saing perekonomian Kabupaten Barru.



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

SINGGAH
di BARRU!

Pertumbuhan Ekonomi adalah laju pertumbuhan Produk domestik regional bruto (PDRB) yang diukur dari Produk domestik regional bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan. $PE = \frac{\text{Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun tertentu}}{\text{nilai PDRB pada tahun sebelumnya}}$

Adapun sasaran strategis dari tujuan ini adalah :

SASARAN 7 : MENINGKATNYA SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS PEREKONOMIAN DAERAH

Indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran adalah **Persentase Kontribusi Sektor-sektor strategis terhadap PDRB**. Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target indikator adalah sebagai berikut.

Indikator untuk menghitung besaran kontribusi sektor-sektor strategis yang terdapat di Kabupaten Barru yang dapat meningkatkan PDRB, diantaranya : Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Sektor Industri Pengolahan

1. Analisis Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja indikator “Persentase Kontribusi Sektor-sektor strategis terhadap PDRB” pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan		Pertumbuhan Ekonomi	%	5,74	5,16	89,90	Tinggi	BPS
	Meningkatnya sektor-sektor strategis perekonomian daerah	Persentase Kontribusi Sektor-sektor strategis terhadap PDRB	%	53,29	50,25	94,30	Sangat Tinggi	BPS

Indikator kinerja tujuan mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan adalah pertumbuhan ekonomi. Realisasi capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru tidak mencapai target. Target tahun 2025 sebesar 5,74 persen sementara capaian hanya berada pada angka 5,16 persen dan masuk



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

dalam kategori tinggi untuk capaian kinerja. Adapun untuk realisasi indikator kinerja untuk Persentase Kontribusi Sektor-sektor strategis terhadap PDRB pada tahun 2025 sebesar 50,24 persen dari target sebesar 53,29 persen. Realisasi indikator kinerja Persentase Kontribusi Sektor-sektor strategis terhadap PDRB berdasarkan data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat ketercapaiannya sebesar 94,30% dan masuk kategori capaian sangat tinggi.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dan beberapa tahun terakhir;

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja indikator “Persentase Kontribusi Sektor-sektor strategis terhadap PDRB” tahun 2025 dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2024			2025		
				Targ et	Realisa si	Capaian %	Targ et	Realisa si	Capaian %
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan		Pertumbuhan Ekonomi	%	6,64	4,92	74,10	5,74	5,16	89,90
	Meningkatnya sektor-sektor strategis Perekonomian daerah	Persentase Kontribusi Sektor-sektor strategis terhadap PDRB	%	52,97	49,21	92,90	53,29	50,25	94,30

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk indikator kinerja tujuan pertumbuhan ekonomi terjadi peningkatan tingkat capaian kinerja. Pada tahun 2024 realisasi PE sebesar 4,92 persen dari target 6,64 persen yang kemudian mencapai tingkat capaian kinerja pada angka 74,10 persen. Mengalami peningkatan tingkat capaian pada tahun 2025, pada tahun 2025 realisasi PE sebesar 5,16 persen dari target sebesar 5,74 persen, yang kemudian menyebabkan tingkat capaian pada tahun 2025 sebesar 89,90 persen.

Percepatan PE pada tahun 2025 dipengaruhi oleh 3 sektor Lapangan Usaha pada 17 sektor lapangan Usaha yang merupakan pembangun struktur



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

PDRB. 3 sektor tersebut diantaranya : Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor administrasi pemerintahan, dan sektor Jasa Keuangan dan asuransi. Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan bertumbuh dari 4,50 % pada tahun 2024 menjadi 9,22 % pada tahun 2025. Peningkatan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang notabene merupakan penyumbang share terbesar pada PDRB Kabupaten Barru berpengaruh besar sebagai penyebab utama percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru.

Sementara dua sektor lapangan usaha mengalami kontraksi yakni pertambangan dan penggalian yang tumbuh -0,54% pada tahun 2025 dan penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh -0.28%. Meskipun tidak menjadi share terbesar, namun sektor ini cukup mempengaruhi pelambatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru.

3. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja sampai dengan tahun ini dengan target RPJMD;

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari indikator “Persentase Kontribusi Sektor-sektor strategis terhadap PDRB” sampai tahun 2025 dengan target RPJMD 2021 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target (2026)	Tingkat Kemajuan
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan		Pertumbuhan Ekonomi	%	5,16	7,51	68,71%
	Meningkatnya sektor-sektor strategis Perekonomian daerah	Persentase Kontribusi Sektor-sektor strategis terhadap PDRB	%	50,25	53,86	93,30%

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 untuk indikator kinerja utama Pertumbuhan ekonomi belum mencapai target RPJMD yaitu sebesar 5,16 persen dibandingkan dengan target dalam RPJMD sebesar 7,51 persen. Capaian kinerja tahun ini jika disandingkan dengan target RPJMD sampai dengan tahun 2026 yakni sebesar 68,71 persen. Sementara untuk pencapaian realisasi kinerja indikator kinerja sasaran Persentase Kontribusi Sektor-sektor strategis



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

terhadap PDRB sampai dengan tahun 2025 juga belum mencapai target RPJMD yaitu sebesar 50,25% dibandingkan dengan target dalam RPJMD sebesar 53,86%. Capaian kinerja tahun ini jika disandingkan dengan target RPJMD sampai dengan tahun 2026 yakni sebesar 93,30%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari indikator “Persentase Kontribusi Sektor-sektor strategis terhadap PDRB” Tahun 2025 dengan Realisasi nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Provinsi Tahun 2025	Capaian Kabupaten terhadap realisasi Provinsi	Realisasi Nasional Tahun 2025	Capaian Kabupaten terhadap realisasi nasional
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan		Pertumbuhan Ekonomi	%	5,16	5,43	95,03	5,11	100,98
	Meningkatnya sektor-sektor strategis Perekonomian daerah	Persentase Kontribusi Sektor-sektor strategis terhadap PDRB	%	50,25	50,53	99,45	44	114,20

Realisasi indikator kinerja Persentase Kontribusi Sektor-sektor strategis terhadap PDRB pada tahun 2025 sebesar 50,25% persen lebih rendah jika dibandingkan capaian realisasi provinsi sulawesi selatan untuk tahun 2025 sebesar 50,53% dengan capaian kinerja 99,45%.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Indikator kinerja “Persentase Kontribusi Sektor-sektor strategis terhadap PDRB” diperoleh dari pelaksanaan 7 (Tujuh) Program Prioritas seperti yang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Program	Anggaran		Capaian
	Pagu	Realisasi	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

TUJUAN : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan				
SASARAN : Meningkatnya sektor-sektor strategis Perekonomian daerah				
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	53.105.900,00	50.954.683,00	95,95%	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	262.721.130,00	258.511.937,00	98,40%	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	127.048.660,00	110.934.968,00	87,32%	
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	34.669.554,00	-	0,00%	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	174.606.100,00	150.529.145,00	86,21%	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.283.988.440,00	836.144.825,00	65,12%	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.109.735.273,00	677.790.565,00	61,08%	
JUMLAH	3.045.875.057,00	2.084.866.123,00	68,45%	

Seluruh program diatas ditujukan untuk mencapai indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Barru Periode Tahun 2021 – 2026 dengan target yang sudah ditetapkan. Disamping mampu melakukan efisiensi dari sisi anggaran, target indikator kinerja Persentase Kontribusi Sektor-sektor strategis terhadap PDRB mencapai target kinerja yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya;

Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu Program untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar dengan kata lain persentase capaian sasaran “sama atau lebih tinggi” dari capaian input (realisasi anggarannya). Rumus yang digunakan adalah.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi
PAKi : Pagu anggaran keluaran i
RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
CKi : Capaian keluaran i

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran dalam pencapaian indikator kinerja Persentase Kontribusi Sektor-sektor strategis terhadap PDRB dapat dilihat pada tabel berikut.

Tujuan	Sasaran	Indikat or Kinerj a	Satua n	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
				Target	Realisa si	Capa ian %	Angga ran	Realisa si	Cap aian %	
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan		Pertumbuhan Ekonomi	%	5,74	5,16	89,9	3.045.875,05	2.084.866.123,00	68,45	99,24
	Meningkatnya sektor-sektor strategis Perekonomian daerah	Persentase Kontribusi Sektor-sektor strategis terhadap PDRB	%	53,29	50,25	94,30	3.045.875,05	2.084.866.123,00	68,45	99,27

Dari tabel perhitungan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya diatas menunjukkan bahwa anggaran yang digunakan untuk peningkatan sektor-sektor strategis Perekonomian daerah dinilai tidak efisien. Kedepannya, Pemerintah Kabupaten Barru harus lebih memikirkan kegiatan-kegiatan yang harus mampu meningkatkan sektor-sektor strategis Perekonomian daerah agar anggaran yang rencanakan dapat efektif mencapai indikator kinerja sasaran yang ditetapkan.

7. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

A. Keberhasilan



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

Kabupaten Barru mengalami peningkatan Persentase Kontribusi Sektor-sektor strategis terhadap PDRB dari 49,21 % pada tahun 2024 menjadi 50,25% pada tahun 2025. Peningkatan kinerja pada sektor Pertanian dan Industri Pengolahan didorong oleh laju pertumbuhan riil yang melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah 5,16% pada tahun 2025.

Berikut adalah beberapa faktor yang berkontribusi terhadap capaian tersebut:

- Lonjakan Pertumbuhan Sektor pertanian mencatatkan pertumbuhan yang sangat signifikan sebesar 9,22% pada tahun 2025. Angka ini meningkat pesat dibanding tahun 2024 yang tumbuh 4,35%.
- Pertumbuhan industri pengolahan mengindikasikan mulai berkembangnya aktivitas nilai tambah pada produk-produk mentah di Kabupaten Barru.

B. Kegagalan

Meskipun telah berhasil meningkatkan Persentase Kontribusi Sektor-sektor strategis terhadap PDRB terdapat penurunan kontribusi pada sektor Perdagangan, hal ini bukan berarti nilainya berkurang secara nominal, melainkan laju pertumbuhannya yang tertinggal dibanding sektor lain. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran mengalami penurunan laju pertumbuhan dari 6,09% di tahun 2024 menjadi hanya 2,21% di tahun 2025.

C. Alternatif Solusi

Berikut adalah beberapa alternatif solusi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barru untuk meningkatkan Persentase Kontribusi Sektor-sektor strategis terhadap PDRB:

1. Integrasi Pertanian-Industri (Hilirisasi)

Pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sangat dominan (33,54%), pemerintah perlu mendorong pembangunan pabrik pengolahan hasil tani dan nelayan skala kecil hingga menengah. Hal ini bertujuan agar nilai tambah dari hasil pertanian dinikmati di daerah Barru, yang secara otomatis akan meningkatkan kontribusi sektor Industri Pengolahan.

2. Penguatan Rantai Pasok Lokal

Membangun kemitraan antara sektor Pertanian, perikanan dan Industri Pengolahan dengan sektor Perdagangan untuk memastikan distribusi produk lokal berjalan efisien tanpa banyak perantara, sehingga dapat meningkatkan margin keuntungan di tingkat pedagang lokal

Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, diharapkan dapat Persentase Kontribusi Sektor-sektor strategis terhadap PDRB.

SASARAN 8 : MENINGKATNYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA TERPADU

Indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target indikator adalah sebagai berikut.

indeks kualitas lingkungan hidup adalah indeks yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang kualitas lingkungan dan sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang terdiri dari indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan

$$IKLH = \text{Indeks Kualitas Air (30\%)} + \text{Indeks Kualitas Udara (30\%)} + \text{Indeks Kualitas Tutupan Lahan (40\%)}$$

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja indikator “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)” pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan		Pertumbuhan Ekonomi	%	5,74	5,16	89,90	Tinggi	BPS
	Meningkatnya pengelolaan sumber daya	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	77	78,25	101,62	Sangat Tinggi	Dinas LH



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

SINGGAH
di BARRU!

	alam dan lingkungan hidup secara terpadu							

Realisasi indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2025 sebesar 78,25 poin dari target sebesar 77 Poin. Realisasi indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) berdasarkan data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat ketercapaiannya sebesar 101,62% dan masuk menjadi status capaian sangat tinggi.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dan beberapa tahun terakhir;

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja indikator “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)” tahun 2024 dengan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2024			2025		
				Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan		Pertumbuhan Ekonomi	%	6,64	4,92	74,10	5,74	5,16	89,90
	Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	78,20	76,65	98,02	77	78,25	101,62

Berdasarkan tabel diatas, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mengalami peningkatan pada tahun 2025 adalah 78,25 poin dan tahun 2024 76,65 poin dan tergolong kategori Baik.

3. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja sampai dengan tahun ini dengan target RPJMD;

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari indikator “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)” sampai tahun 2025 dengan target RPJMD 2021 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target (2026)	Tingkat Kemajuan
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan		Pertumbuhan Ekonomi	%	5,16	7,51	68,71%
	Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	78,25	75	104,33%

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 melampaui target RPJMD yaitu sebesar 78,25 Poin dibandingkan dengan target dalam RPJMD sebesar 75 poin, atau sebesar 104,33%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari indikator “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup” Tahun 2025 dengan Realisasi provinsi dan nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Provinsi Tahun 2025	Capaian Kabupaten terhadap realisasi Provinsi	Realisasi Nasional Tahun 2025	Capaian Kabupaten terhadap realisasi nasional
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan		Pertumbuhan Ekonomi	%	5,16	5,43	95,03	5,11	100,98
	Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	78,25	75,69*	103,38	73,53*	106,42



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

Realisasi indikator kinerja Indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2025 sebesar 78,25 Poin lebih tinggi jika dibandingkan capaian realisasi provinsi untuk tahun 2025 sebesar 75,69 poin dan nasional untuk tahun 2025 sebesar 75,53 Poin.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Indikator kinerja “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup” diperoleh dari pelaksanaan 8 (Delapan) Program Prioritas seperti yang dicantumkan pada tabel berikut ini :

Program	Anggaran		Capaian
	Pagu	Realisasi	
Tujuan : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan			
Sasaran : Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu			
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	143.316.500	142.103.014	99,15%
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	50.208.950	44.531.340	88,69%
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	45.149.900	29.152.650	64,57%
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	17.439.500	16.678.000	95,63%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	13.977.500	13.797.500	98,71%
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	24.254.000	23.251.250	95,87%
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	9.951.000	9.811.500	98,60%
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4.219.002.632	4.089.680.681	96,93%
Total	4.523.299.982	4.369.005.935	96,59%

Seluruh program diatas ditujukan untuk mencapai indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Barru Periode Tahun 2021 – 2026 dengan

target yang sudah ditetapkan menunjukkan capaian 98,60% dengan kategori sangat tinggi.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya;

Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu Program untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar dengan kata lain persentase capaian sasaran “sama atau lebih tinggi” dari capaian input (realisasi anggarannya). Rumus yang digunakan adalah:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran dalam pencapaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan		Pertumbuhan Ekonomi	%	5,74	5,16	89,9	4.523.299.982	4.369.005.935	96,59	98,93
	Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	77	78,25	101,62	4.523.299.982	4.369.005.935	96,59	99,05

Dari tabel perhitungan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya diatas menunjukkan bahwa anggaran yang digunakan untuk peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu dinilai telah efisien.



7. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Sasaran strategis meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu keberhasilannya diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) antara lain :

- 1) Melakukan pembinaan dan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat untuk turut serta dalam menjaga kualitas air sungai dengan tidak melakukan aktivitas yang menambah beban pencemaran air sungai;
- 2) Guna mengurangi pembuangan sampah ke sungai, maka bagi usaha yang membuang limbah ke sungai pemberian izin dilakukan secara ketat serta tetap dilaksanakan pemantauan terhadap pelaku usaha yang sudah beroperasi;
- 3) Pemantauan Evaluasi Kegiatan Udara yang memantau emisi gas buang dari kendaraan bermotor dan emisi udara tidak bergerak di beberapa ruas jalan Kabupaten Barru;
- 4) Memelihara dan membangun RTH sebagai upaya menjaga kualitas air dan mengurangi polutan;
- 5) Pemanfaatan pekarangan serta penghijauan di lingkungan rumah-rumah warga, untuk menciptakan suasana lingkungan yang asri dan nyaman;
- 6) Penanaman pohon sehingga ada penambahan luasan ruang terbuka hijau.

Beberapa permasalahan yang masih ditemui dalam upaya mencapai peningkatan kualitas lingkungan hidup antara lain :

- 1) Kebiasaan dari sebagian besar masyarakat yang berada di pinggir sungai masih membuang limbah domestiknya ke dalam sungai yang mengakibatkan kadar fecal coli, total coliform, COD dan fosfat melebihi baku mutu, hal ini sangat berperan dalam menurunkan kualitas air sungai;



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

- 2) Masih ada warga yang memelihara ternak di sepanjang pinggir sungai yang mengakibatkan kadar fecal coli dan total coliform melebihi batas baku mutu sehingga meningkatkan pencemaran air sungai;
- 3) Masih ada sebagian warga masyarakat yang masih membuang sampah di sungai dan melakukan pembakaran sampah.



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

MISI 5 : MEWUJUDKAN PEMERATAAN PENDAPATAN, PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

TUJUAN 1 : MENURUNKAN KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR MASYARAKAT DAN ANGKA KEMISKINAN

Tujuan Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Dan Penurunan Angka Kemiskinan yang diukur melalui indikator kinerja Indeks Gini. Rasio Gini atau Indeks Gini merupakan indikator statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran masyarakat dalam suatu wilayah. Indikator ini sering digunakan oleh untuk melihat seberapa merata kesejahteraan ekonomi masyarakat yang perhitungannya dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Nilai Rasio Gini berada pada rentang 0 sampai dengan 1, dengan interpretasi sebagai berikut:

Nilai Rasio Gini	Tingkat Ketimpangan
0	Pemerataan sempurna (semua penduduk memiliki pendapatan yang sama)
0 – 0,3	Ketimpangan rendah
0,3 – 0,5	Ketimpangan sedang
> 0,5	Ketimpangan tinggi
1	Ketimpangan sempurna (pendapatan hanya dimiliki oleh satu orang/kelompok)

Semakin besar nilai Indeks Gini, maka ketimpangan distribusi pendapatan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin kecil nilainya, maka distribusi pendapatan semakin merata. Perhitungan Indeks Gini didasarkan pada Kurva Lorenz (Lorenz Curve), yaitu kurva yang menggambarkan hubungan antara:

- Persentase kumulatif penduduk (dari yang termiskin sampai terkaya)
- Persentase kumulatif pendapatan atau pengeluaran

Indeks Gini dihitung sebagai perbandingan antara luas area ketimpangan dengan luas area total di bawah garis pemerataan sempurna. Dalam statistik, Rasio Gini dapat dihitung dengan rumus berikut:



$$G = 1 - \sum_{i=1}^n (Y_i + Y_{i-1})(X_i - X_{i-1})$$

Keterangan:

G = Rasio Gini

X_i = Proporsi kumulatif penduduk pada kelompok ke-i

Y_i = Proporsi kumulatif pendapatan/pengeluaran pada kelompok ke-i

n = Jumlah kelompok penduduk

SASARAN MENINGKATNYA PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN

Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Barru tahun 2021-2026, Tujuan Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Dan Penurunan Angka Kemiskinan akan dicapai melalui sasaran Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan penurunan angka kemiskinan yang diukur melalui 2 indikator yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka dan Angka Kemiskinan.

1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur persentase jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Indikator ini dihitung secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menggambarkan kondisi pasar tenaga kerja.

Pengangguran terbuka mencakup penduduk usia kerja yang:

- Tidak bekerja,
- Sedang mencari pekerjaan,
- Mempersiapkan usaha, atau
- Merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan tetapi sebenarnya bersedia bekerja.

TPT menjadi indikator penting dalam pembangunan daerah karena menunjukkan kemampuan perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Semakin tinggi nilai TPT, maka semakin besar proporsi angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan.

Rumus TPT yang digunakan dalam statistik ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:



$$TPT = \frac{\text{Jumlah Penganggur}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Keterangan

- TPT** = Tingkat Pengangguran Terbuka
- Jumlah Penganggur** = Penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan
- Jumlah Angkatan Kerja** = Jumlah penduduk yang bekerja + penganggur

2. Angka Kemiskinan

Angka Kemiskinan adalah indikator yang digunakan untuk menunjukkan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Indikator ini menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat dan menjadi salah satu ukuran penting dalam evaluasi pembangunan ekonomi dan sosial.

Pengukuran angka kemiskinan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menggunakan pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).

Garis Kemiskinan sendiri terdiri dari dua komponen utama, yaitu:

- Garis Kemiskinan Makanan (GKM) – nilai pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan makanan setara 2100 kilokalori per kapita per hari.
- Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) – kebutuhan minimum untuk perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian, transportasi, dan kebutuhan dasar lainnya.

Rumus yang digunakan untuk menghitung Angka Kemiskinan (Headcount Index / P0) adalah:

$$P0 = \frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$$

Keterangan

- P0** = Persentase penduduk miskin
- Jumlah Penduduk Miskin** = penduduk dengan pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan
- Jumlah Penduduk** = total penduduk dalam wilayah tersebut



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

1) Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini Tujuan dan sasaran yang akan mendukung pelaksanaan misi 5 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
Menurunkan Ketimpangan Pendapatan antar masyarakat dan angka kemiskinan		Indeks Gini	Poin	0,32	0,345	92,19	Cukup	BPS
	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan penurunan angka kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,98	5,07	98,19	Cukup	BPS
		Angka Kemiskinan	Persen	8,06	8	100,74	Sangat Baik	BPS

Pengukuran capaian kinerja pada tujuan menurunkan ketimpangan pendapatan antar masyarakat dan angka kemiskinan dilakukan dengan menggunakan indikator Indeks Gini. Indeks Gini merupakan ukuran yang digunakan untuk menggambarkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu wilayah. Semakin kecil nilai Indeks Gini, maka semakin merata distribusi pendapatan masyarakat.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja, target Indeks Gini yang ditetapkan adalah sebesar 0,32 poin. Sementara itu, berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), realisasi capaian Indeks Gini pada periode pengukuran tercatat sebesar 0,345 poin.

Karena indikator ini bersifat semakin kecil semakin baik, maka capaian kinerja dihitung dengan membandingkan target dengan realisasi. Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh tingkat capaian kinerja sebesar 92,19 persen. Nilai capaian ini menunjukkan bahwa kinerja dalam upaya menurunkan ketimpangan pendapatan belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih berada pada kategori “Cukup”.



Selisih antara target dan realisasi tersebut mengindikasikan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat masih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan dalam perjanjian kinerja. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain ketimpangan akses terhadap kesempatan kerja, perbedaan tingkat produktivitas antar sektor ekonomi, serta belum meratanya distribusi pembangunan antar wilayah dan kelompok masyarakat.

Meskipun demikian, capaian sebesar 92,19 persen menunjukkan bahwa berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan dalam rangka pengurangan ketimpangan pendapatan telah memberikan dampak positif, meskipun masih diperlukan penguatan intervensi program yang lebih terarah dan terintegrasi, khususnya dalam peningkatan kesempatan kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat berpendapatan rendah, serta perluasan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi produktif.

Dengan demikian, ke depan diperlukan upaya yang lebih optimal melalui sinergi program pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan pendapatan, sehingga target penurunan Indeks Gini sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja dapat tercapai secara maksimal.

Tujuan tersebut didukung oleh sasaran Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan penurunan angka kemiskinan yang dinilai keberhasilannya melalui 2 indikator yaitu tingkat pengangguran terbuka dan angka kemiskinan.

Berdasarkan tabel diatas target Tingkat Pengangguran Terbuka ditetapkan sebesar 4,98 persen. Namun berdasarkan data BPS, realisasi yang dicapai sebesar 5,07 persen. Karena indikator ini bersifat semakin rendah semakin baik, maka capaian kinerja dihitung dengan membandingkan target terhadap realisasi sehingga diperoleh tingkat capaian sebesar 98,19 persen dengan kategori “Cukup”.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja telah berjalan, namun



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

hasilnya belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dinamika pasar tenaga kerja, keterbatasan kesempatan kerja di sektor formal, serta ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, perkembangan sektor ekonomi yang belum sepenuhnya mampu menyerap tenaga kerja secara optimal juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka.

Pada indikator Angka Kemiskinan, target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebesar 8,06 persen, sementara realisasi yang dicapai sebesar 8 persen. Karena indikator ini juga bersifat semakin kecil semakin baik, maka hasil tersebut menunjukkan bahwa realisasi yang dicapai lebih baik dari target yang telah ditetapkan. Berdasarkan perhitungan capaian kinerja, diperoleh nilai 100,74 persen dengan kategori “Sangat Baik”.

Capaian ini menunjukkan bahwa berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah telah memberikan dampak positif terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Program-program yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta berbagai bentuk bantuan sosial dan penguatan ekonomi lokal, berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan.

2) Analisis perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Untuk analisis perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu Berdasarkan data kinerja pada indikator tujuan dan sasaran pembangunan, dapat dilakukan analisis perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dan tahun 2025, sekaligus melihat keterkaitan antar indikator yaitu Indeks Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Angka Kemiskinan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tujuan	Sasaran		Satuan	2024	2025



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Menurunkan Ketimpangan Pendapatan antar masyarakat dan angka kemiskinan	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan penurunan angka kemiskinan	Indeks Gini	Poin	0,33	0,31	106,06	0,32	0,345	92,19
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,14	6,42	75,10	4,98	5,07	98,19
		Angka Kemiskinan	Persen	6,41	8,31	70,36	8,06	8	100,74

Indikator Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat. Pada tahun 2024, target yang ditetapkan sebesar 0,33 poin dengan realisasi 0,31 poin, sehingga capaian kinerja mencapai 106,06 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan pada tahun tersebut lebih rendah dari target yang ditetapkan, sehingga distribusi pendapatan masyarakat relatif lebih merata.

Namun pada tahun 2025, meskipun target ditetapkan lebih rendah yaitu 0,32 poin, realisasi yang dicapai justru meningkat menjadi 0,345 poin dengan capaian 92,19 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga target yang telah ditetapkan tidak tercapai.

Apabila dibandingkan secara langsung, terjadi peningkatan Indeks Gini dari 0,31 pada tahun 2024 menjadi 0,345 pada tahun 2025, yang mengindikasikan adanya pelebaran kesenjangan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat.

Pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka, tahun 2024 menunjukkan kondisi yang kurang baik, di mana target sebesar 5,14 persen namun realisasi mencapai 6,42 persen, sehingga capaian kinerja hanya 75,1 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja pada tahun tersebut belum optimal.

Pada tahun 2025, kondisi ketenagakerjaan menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Target ditetapkan sebesar 4,98 persen dan realisasi sebesar 5,07 persen, dengan capaian 98,19 persen. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target, tingkat pengangguran telah menurun cukup



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

besar dibandingkan tahun 2024, yaitu dari 6,42 persen menjadi 5,07 persen.

Pada indikator Angka Kemiskinan, tahun 2024 menunjukkan capaian yang relatif rendah. Target yang ditetapkan sebesar 6,41 persen, namun realisasi mencapai 8,31 persen, sehingga capaian kinerja hanya 70,36 persen.

Pada tahun 2025, kondisi kemiskinan menunjukkan perbaikan yang signifikan. Target ditetapkan sebesar 8,06 persen dan realisasi sebesar 8 persen, sehingga capaian kinerja mencapai 100,74 persen atau melampaui target yang telah ditetapkan.

Secara konseptual, terdapat hubungan yang erat antara tingkat pengangguran, angka kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan (Indeks Gini).

Perbaikan Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2025 yang turun dari 6,42 persen menjadi 5,07 persen menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja mulai membaik. Kondisi ini turut memberikan dampak terhadap penurunan angka kemiskinan, yang berhasil turun dari 8,31 persen pada tahun 2024 menjadi 8 persen pada tahun 2025.

Namun demikian, meskipun pengangguran menurun dan kemiskinan berhasil ditekan, kondisi tersebut belum sepenuhnya mampu menurunkan ketimpangan pendapatan, yang justru tercermin dari meningkatnya Indeks Gini pada tahun 2025.

Hal ini mengindikasikan bahwa perbaikan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya bersifat inklusif, di mana peningkatan pendapatan lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu, terutama kelompok dengan tingkat produktivitas dan akses ekonomi yang lebih tinggi. Sementara itu, kelompok masyarakat berpendapatan rendah mungkin hanya mengalami peningkatan pendapatan yang relatif kecil.

Dengan kata lain, penurunan pengangguran dan kemiskinan tidak selalu secara langsung menurunkan ketimpangan pendapatan, apabila distribusi manfaat pembangunan tidak merata.

3) Analisis perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Analisis perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah dalam RPJMD dilakukan untuk melihat tingkat kemajuan pencapaian indikator pembangunan daerah menuju target akhir periode. Indikator yang dianalisis meliputi Indeks Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Angka Kemiskinan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Akhir Periode	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Menurunkan Ketimpangan Pendapatan antar masyarakat dan angka kemiskinan		Indeks Gini	Poin	0,31	0,345	88,71
	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan penurunan angka kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,45	5,07	86,07
		Angka Kemiskinan	Persen	6,05	8	67,77

Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat. Target yang ditetapkan dalam RPJMD pada akhir periode adalah sebesar 0,31 poin, sedangkan realisasi sampai dengan tahun berjalan tercatat sebesar 0,345 poin. Dengan kondisi tersebut, tingkat kemajuan yang dicapai adalah sebesar 88,71 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat masih berada di atas target yang diharapkan, sehingga upaya penurunan ketimpangan pendapatan belum sepenuhnya mencapai arah yang ditargetkan dalam RPJMD. Nilai Indeks Gini yang lebih tinggi dari target mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat masih belum merata.



Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti perbedaan tingkat produktivitas ekonomi antar kelompok masyarakat, keterbatasan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap kesempatan kerja produktif, serta ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi.

Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan persentase angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan. Target RPJMD pada akhir periode ditetapkan sebesar 4,45 persen, sedangkan realisasi sampai dengan tahun berjalan mencapai 5,07 persen. Dengan demikian tingkat kemajuan yang dicapai sebesar 86,07 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja belum sepenuhnya optimal sehingga tingkat pengangguran masih berada di atas target yang direncanakan. Meskipun demikian, capaian tersebut menunjukkan adanya progres menuju target RPJMD, meskipun masih diperlukan peningkatan upaya dalam menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kualitas tenaga kerja.

Pada indikator Angka Kemiskinan, target RPJMD akhir periode ditetapkan sebesar 6,05 persen, sedangkan realisasi sampai dengan tahun berjalan tercatat sebesar 8 persen. Dengan kondisi tersebut tingkat kemajuan yang dicapai sebesar 67,77 persen.

Capaian ini menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan masih cukup jauh dari target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Tingginya angka kemiskinan dibandingkan target dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan kesempatan kerja produktif, rendahnya tingkat pendapatan sebagian masyarakat, serta ketimpangan akses terhadap layanan dasar dan sumber daya ekonomi.

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah RPJMD, dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator telah menunjukkan kemajuan menuju target akhir periode, namun tingkat pencapaiannya masih bervariasi.



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

4) Analisis perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja provinsi dan nasional

Analisis perbandingan ini dilakukan untuk melihat posisi kinerja Kabupaten Barru Tahun 2025 dibandingkan dengan capaian pada tingkat provinsi dan nasional, khususnya pada indikator Indeks Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Angka Kemiskinan yang berkaitan dengan tujuan penurunan ketimpangan pendapatan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Provinsi Tahun 2025	Realisasi Kabupaten Barru Tahun 2025	Capaian Kabupaten terhadap realisasi Provinsi	Realisasi Nasional Tahun 2025	Realisasi Kabupaten Barru Tahun 2025	Capaian Kabupaten terhadap realisasi nasional
Menurunkan Ketimpangan Pendapatan antar masyarakat dan angka kemiskinan		Indeks Gini	Poin	0,35	0,345	101,43	0,383	0,345	109,92
	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan penurunan angka kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,21	5,07	79,57	4,9	5,07	96,53
		Angka Kemiskinan	Persen	7,6	8	94,74	8,5	8	105,88

Pada indikator Indeks Gini, realisasi Kabupaten Barru tahun 2025 tercatat sebesar 0,345 poin, sedangkan realisasi pada tingkat provinsi sebesar 0,35 poin dan pada tingkat nasional sebesar 0,383 poin. Dengan demikian, capaian Kabupaten Barru terhadap realisasi provinsi sebesar 101,43 persen, dan terhadap realisasi nasional sebesar 109,92 persen.

Karena indikator Indeks Gini bersifat semakin rendah semakin baik, kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

Kabupaten Barru relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan masyarakat di Kabupaten Barru cenderung lebih merata dibandingkan wilayah yang lebih luas.

Pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka, realisasi Kabupaten Barru pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,07 persen, sementara realisasi pada tingkat provinsi sebesar 4,21 persen dan pada tingkat nasional sebesar 4,9 persen.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa capaian Kabupaten Barru terhadap provinsi sebesar 79,57 persen, dan terhadap nasional sebesar 96,53 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Kabupaten Barru masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional.

Hal ini mengindikasikan bahwa penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Barru masih perlu ditingkatkan, terutama melalui pengembangan sektor ekonomi produktif, peningkatan investasi daerah, serta penguatan program pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Pada indikator Angka Kemiskinan, realisasi Kabupaten Barru pada tahun 2025 tercatat sebesar 8 persen, sedangkan pada tingkat provinsi sebesar 7,6 persen dan pada tingkat nasional sebesar 8,5 persen.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa capaian Kabupaten Barru terhadap provinsi sebesar 94,74 persen, sementara terhadap nasional sebesar 105,88 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Barru masih sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi, namun lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional.

Kondisi ini menunjukkan bahwa program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barru telah menunjukkan hasil yang cukup baik dalam konteks nasional, namun masih perlu ditingkatkan agar dapat mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi.

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Tujuan pembangunan daerah yang diarahkan pada menurunkan ketimpangan pendapatan antar masyarakat dan angka kemiskinan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi dan sosial suatu daerah. Dalam teori pembangunan ekonomi, indikator seperti Indeks Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Angka Kemiskinan sering digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat, pemerataan hasil pembangunan, serta efektivitas kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
Menurunkan Ketimpangan Pendapatan antar masyarakat dan angka kemiskinan		Indeks Gini	Poin	0,32	0,345	92,19
	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan penurunan angka kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,98	5,07	98,19
		Angka Kemiskinan	Persen	8,06	8	100,74

Indikator Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat. Secara teoritis, menurut konsep distribusi pendapatan dalam ekonomi pembangunan (Todaro & Smith), ketimpangan pendapatan mencerminkan sejauh mana hasil pembangunan ekonomi dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Nilai Indeks Gini berada pada rentang 0 sampai 1, di mana semakin mendekati 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang semakin merata, sedangkan semakin mendekati 1 menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.

Berdasarkan data capaian kinerja, target Indeks Gini yang ditetapkan sebesar 0,32 poin, sementara realisasi yang dicapai sebesar 0,345 poin, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 92,19 persen. Hal ini menunjukkan bahwa indikator tersebut belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, yang berarti tingkat ketimpangan pendapatan di masyarakat masih relatif lebih tinggi dari kondisi yang diharapkan.

Menurut teori Kuznets Curve dalam ekonomi pembangunan, pada tahap awal pertumbuhan ekonomi sering terjadi peningkatan ketimpangan pendapatan karena manfaat pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat yang memiliki akses lebih besar terhadap modal, teknologi, dan kesempatan ekonomi. Kondisi ini dapat menjelaskan mengapa meskipun kegiatan ekonomi berkembang, distribusi pendapatan belum sepenuhnya merata.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi belum tercapainya target Indeks Gini antara lain:

- a. Perbedaan tingkat produktivitas antar sektor ekonomi.
- b. Keterbatasan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap sumber daya ekonomi.
- c. Ketimpangan kesempatan kerja antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
- d. Peningkatan pendapatan yang lebih cepat pada kelompok masyarakat tertentu dibandingkan kelompok berpendapatan rendah.

Sebagai alternatif solusi, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki pemerataan distribusi pendapatan melalui penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan usaha mikro dan kecil, peningkatan akses masyarakat terhadap sumber permodalan dan pasar, serta pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi daerah.

Berdasarkan data ketenagakerjaan Kabupaten Barru tahun 2025 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, TPT pada Agustus 2025 tercatat



sebesar 5,07 persen, mengalami penurunan sebesar 1,34 persen poin dibandingkan Agustus 2024 yang mencapai 6,42 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Barru selama periode tersebut.

Penurunan tingkat pengangguran tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang dapat dijelaskan berdasarkan data ketenagakerjaan yang tersedia.

Pertama, meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2025 mencapai 89.482 orang, meningkat sebanyak 8.329 orang dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah penduduk yang bekerja ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi di Kabupaten Barru mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Bertambahnya jumlah penduduk yang bekerja secara langsung berkontribusi terhadap penurunan jumlah pengangguran di daerah tersebut.

Kedua, meningkatnya jumlah angkatan kerja dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Pada tahun 2025 jumlah angkatan kerja di Kabupaten Barru tercatat sebanyak 94.262 orang, meningkat sekitar 8,70 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Seiring dengan peningkatan tersebut, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami peningkatan sebesar 4,59 persen poin menjadi 63,91 persen. Peningkatan partisipasi angkatan kerja menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja.

Ketiga, meningkatnya penyerapan tenaga kerja pada sektor ekonomi tertentu, terutama sektor jasa. Struktur ketenagakerjaan Kabupaten Barru menunjukkan bahwa sektor jasa merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja dengan kontribusi sebesar 56,25 persen, diikuti oleh sektor pertanian sebesar 29,11 persen, dan sektor industri sebesar 14,64 persen. Dominasi sektor jasa dalam penyerapan tenaga kerja menunjukkan bahwa perkembangan aktivitas ekonomi pada



sektor tersebut memiliki peran penting dalam menciptakan kesempatan kerja baru bagi masyarakat.

Keempat, peningkatan aktivitas ekonomi informal dan kewirausahaan masyarakat. Data ketenagakerjaan menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja di Kabupaten Barru masih bekerja pada sektor informal, yaitu sekitar 55,19 persen, sementara tenaga kerja formal sekitar 44,81 persen. Peningkatan aktivitas ekonomi pada sektor informal seperti usaha mandiri, usaha keluarga, serta usaha mikro dan kecil turut memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran.

Kelima, perbaikan kondisi ketenagakerjaan secara umum dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan tren data ketenagakerjaan, TPT Kabupaten Barru menunjukkan penurunan dari tahun 2024 ke tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesempatan kerja serta berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah mulai memberikan dampak positif terhadap kondisi pasar tenaga kerja.

Dengan demikian, penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Barru pada tahun 2025 dapat dijelaskan oleh kombinasi beberapa faktor, antara lain meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja, meningkatnya partisipasi angkatan kerja, berkembangnya sektor jasa sebagai penyerap tenaga kerja utama, serta meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat baik pada sektor formal maupun informal.

Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan dalam struktur dan dinamika pasar kerja di Kabupaten Barru, yang diharapkan dapat terus berlanjut melalui penguatan kebijakan pembangunan ekonomi daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan sektor ekonomi produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja secara berkelanjutan.

Indikator Angka Kemiskinan menunjukkan kinerja yang cukup baik karena berhasil melampaui target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan



sebesar 8,06 persen, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 8 persen, sehingga capaian kinerja mencapai 100,74 persen.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, persentase penduduk miskin Kabupaten Barru pada Maret 2025 tercatat sebesar 8,00 persen, mengalami penurunan 0,31 persen poin dibandingkan tahun 2024. Secara absolut jumlah penduduk miskin mencapai sekitar 14,13 ribu orang, turun sekitar 0,51 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan angka kemiskinan tersebut menunjukkan bahwa berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini juga didukung oleh stabilnya kondisi ekonomi daerah serta efektivitas berbagai program perlindungan sosial yang mampu memperkuat daya beli masyarakat.

Selain itu, indikator Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga menunjukkan perbaikan dengan nilai masing-masing 0,94 dan 0,17, yang menunjukkan bahwa kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin menurun.

Untuk mempertahankan tren penurunan kemiskinan tersebut, pemerintah daerah terus memperkuat berbagai program penanggulangan kemiskinan melalui integrasi program lintas sektor, peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, penguatan perlindungan sosial, serta peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang usaha produktif.

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program yang mendukung penurunan ketimpangan pendapatan, peningkatan penyerapan tenaga kerja, serta penurunan angka kemiskinan telah menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat baik. Hal ini terlihat dari perbandingan antara anggaran yang dialokasikan dengan realisasi



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

anggaran serta capaian kinerja yang dihasilkan yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
Menurunkan Ketimpangan Pendapatan antar masyarakat dan angka kemiskinan	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan penurunan angka kemiskinan	Indeks Gini	Poin	0,32	0,345	92,19	564.732.090	506.781.872	84,89	99,03
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,98	5,07	98,19	564.732.090	506.781.872	75,97	99,09
		Angka Kemiskinan	Persen	8,06	8	100,74				

Pada indikator Indeks Gini sebagai ukuran ketimpangan pendapatan, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp506.781.872 dari total anggaran Rp564.732.090 atau sekitar 84,89%. Dengan tingkat capaian kinerja sebesar 92,19%, program ini menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 99,03%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak seluruh anggaran terserap, pelaksanaan program tetap mampu menghasilkan output kinerja yang relatif optimal. Kondisi ini mencerminkan adanya pengelolaan sumber daya yang cukup efektif, dimana penggunaan anggaran dapat diarahkan pada kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap upaya pengurangan ketimpangan pendapatan.

Pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), realisasi kinerja mencapai 98,19% dari target yang telah ditetapkan, dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 75,97% dari total alokasi. Dengan kondisi tersebut, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya mencapai 99,09%, yang menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu menghasilkan capaian kinerja yang hampir memenuhi target meskipun menggunakan sumber daya anggaran yang relatif lebih rendah dari yang direncanakan. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan telah dilakukan secara cukup efisien melalui optimalisasi program peningkatan kesempatan kerja, pelatihan tenaga kerja, maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat.



Sementara itu, pada indikator Angka Kemiskinan, realisasi sebesar 8% dari target 8,06% menunjukkan capaian kinerja 100,74%, yang berarti target penurunan kemiskinan berhasil dilampaui. Meskipun tidak disertai rincian realisasi anggaran pada indikator ini secara khusus, capaian tersebut menunjukkan bahwa program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada program ini dapat dikategorikan sangat baik, yang tercermin dari tingginya capaian kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran yang tidak sepenuhnya terserap. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilakukan secara optimal dan tepat sasaran. Namun demikian, ke depan tetap diperlukan peningkatan kualitas perencanaan program, penguatan koordinasi antar perangkat daerah, serta integrasi kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial agar penggunaan sumber daya tidak hanya efisien tetapi juga semakin efektif dalam menurunkan ketimpangan pendapatan, mengurangi pengangguran, dan menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan.

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Berdasarkan data anggaran dan realisasi program yang mendukung tujuan menurunkan ketimpangan pendapatan antar masyarakat dan angka kemiskinan serta sasaran meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan penurunan angka kemiskinan, secara umum pelaksanaan program menunjukkan capaian yang cukup baik dengan tingkat realisasi anggaran sebesar Rp506.781.872 dari total Rp564.732.090 atau sebesar 89,74%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar program yang direncanakan telah dilaksanakan dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tujuan : Menurunkan Ketimpangan Pendapatan antar masyarakat dan angka kemiskinan



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

Sasaran : Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan penurunan angka kemiskinan			
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	4.493.600	4.308.550	95,88
Program Penempatan Tenaga Kerja	9.978.000	7.548.530	75,65
Program Rehabilitasi Sosial	177.437.500	168.161.235	94,77
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	336.834.100	290.950.022	86,38
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	35.988.890	35.813.535	99,51
Program Pengembangan UMKM	-	-	0,00
Total Anggaran Sasaran	564.732.090	506.781.872	89,74
Total Anggaran Tujuan	564.732.090	506.781.872	89,74

Program yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap keberhasilan pencapaian sasaran adalah Program Rehabilitasi Sosial dengan realisasi anggaran 94,77% dari total alokasi. Tingginya tingkat realisasi ini menunjukkan bahwa kegiatan rehabilitasi sosial bagi kelompok masyarakat rentan berjalan cukup optimal. Program ini berperan dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok miskin dan rentan sehingga berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan.

Selain itu, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial juga memberikan dukungan signifikan dengan tingkat realisasi anggaran sebesar 86,38%. Program ini berfungsi sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat miskin melalui bantuan sosial dan jaminan sosial sehingga mampu menjaga daya beli masyarakat serta mengurangi risiko jatuhnya masyarakat ke dalam kemiskinan yang lebih dalam.



Selanjutnya, Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) menunjukkan tingkat realisasi yang sangat tinggi yaitu 99,51%, yang menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi masyarakat berjalan sangat baik. Program ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas usaha masyarakat, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong peningkatan pendapatan masyarakat sehingga turut mendukung upaya pengurangan ketimpangan pendapatan.

Sementara itu, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja juga menunjukkan capaian yang cukup baik dengan realisasi 95,88%. Program ini berkontribusi terhadap peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan peluang masyarakat untuk memperoleh pekerjaan atau membuka usaha mandiri.

Namun demikian, terdapat beberapa program yang belum memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian sasaran. Program Penempatan Tenaga Kerja hanya memiliki realisasi anggaran sebesar 75,65%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum sepenuhnya optimal dalam menghubungkan tenaga kerja dengan peluang kerja yang tersedia. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka yang masih sedikit di atas target.

Selain itu, Program Pengembangan UMKM tidak memiliki alokasi maupun realisasi anggaran (0%), sehingga program ini tidak memberikan kontribusi terhadap upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Tidak terlaksananya program ini berpotensi menjadi salah satu faktor yang menghambat optimalisasi peningkatan kesempatan usaha dan perluasan lapangan kerja bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, keberhasilan pencapaian kinerja terutama didukung oleh program-program yang berkaitan dengan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pelatihan tenaga kerja, dan pemberdayaan UMKM yang memiliki tingkat realisasi anggaran tinggi. Namun demikian, optimalisasi program penempatan tenaga kerja serta pelaksanaan program pengembangan UMKM masih perlu ditingkatkan agar upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja, pengurangan ketimpangan pendapatan, serta



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

penurunan angka kemiskinan dapat tercapai secara lebih optimal pada periode berikutnya.



MISI 6 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih (Good And Governance Serta Layanan Publik Yang Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi

TUJUAN : Mewujudkan Manajemen Pemerintahan Yang Melayani, Baik Dan Bersih.

SASARAN : Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Pelayanan Publik Yang Baik

Analisis pencapaian Sasaran “Meningkatnya kinerja pemerintahan yang akuntabel dan pelayanan publik yang baik” dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran kinerja “Meningkatnya kinerja pemerintahan yang akuntabel dan pelayanan publik yang baik” diukur melalui dua indikator kinerja, yaitu Nilai SAKIP dan Indeks Pelayanan Publik.

1. Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, atau disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

2. Indeks Pelayanan Publik

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan PermenPAN RB No.17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

1. Analisis target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran “Meningkatnya Kinerja Pemerintahan yang Akuntabel dan Pelayanan Publik yang Baik” Tahun 2025.

No	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
1	Nilai SAKIP	75 Poin	62,57 Poin	83,43%
2	Indeks Pelayanan Publik	4,25 Poin	3,02 Poin	71%

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025, diuraikan sebagai berikut:

- Realisasi indikator kinerja “Nilai SAKIP” tahun 2025 sebesar 83,43 Persen dari target nilai yang tercantum dalam dokumen Perencanaan dengan capaian nilai 62,57 Poin dan belum mampu memenuhi Target RPJMD dengan target sebesar 75 Poin. Nilai SAKIP diperoleh berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/37/AA.01/2025 Tanggal 14 November 2025 Tentang Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Hasil Evaluasi Penilaian Sakip Kabupaten Barru Tahun 2025

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI
			2025
1	Perencanaan Kinerja	30	23,06
2	Pengukuran Kinerja	30	16,11
3	Pelaporan Kinerja	15	10,09
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	13,31
	Nilai Hasil Evaluasi	100	62,57
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Berdasarkan Tabel diatas, capaian nilai SAKIP Kabupaten Barru untuk Tahun 2025 berada pada predikat nilai “B” namun belum mencapai target nilai SAKIP pada RPJMD untuk tahun 2025. Target nilai SAKIP pada tahun 2025 yaitu 75 Poin sementara capaian nilai SAKIP yaitu 62,57 Poin. Sehingga capaian nilai SAKIP Kabupaten Barru tahun 2025 terhadap target kinerja pada tahun 2025 adalah 83,43 % dari Target.



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

- b. Realisasi indikator kinerja “Indeks Pelayanan Publik” tahun 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kementerian, Lembaga, Dan Daerah Tahun 2025 sebesar 3,02 Poin dengan predikat B- dan belum mencapai target sebesar 4,25 Poin yang ditetapkan dalam RPJMD dengan capaian kinerja 71%.

NO	Nama Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Capaian 2025	Persentase
1	Indeks Pelayanan Publik	4,25	3,02	71%

Pencapaian Indeks Pelayanan Publik dinilai berdasarkan penilaian evaluasi terhadap unit-unit penyelenggara pelayanan publik di lingkup Pemerintahan Kabupaten Barru dengan 2 Unit Lokus yang di tetapkan oleh Kementerian PAN RB dan 17 unit lokus yang dilakukan penilaian secara mandiri oleh Pemerintahan Kabupaten Barru dengan rincian nilai sebagai berikut:

❖ Hasil Penilaian IPP Unit Lokus Nasional

NO	Unit Lokus Nasional	F03	F02	Rata Rata
1	Dinas Pendidikan	4,34	1,94	3,14
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4,87	4,74	4,81

❖ Hasil Penilaian IPP Unit Lokus Mandiri

NO	Unit Lokus Mandiri	F02
1	Dinas Sosial	2,73
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4,05
3	Dinas Kesehatan	2,8
4	RSUD La Patarai	4,36
5	UPT Puskesmas Padongko	3,2
6	UPT Puskesmas Bojo Baru	2,88
7	UPT Puskesmas Pekkae	3,23
8	UPT Puskesmas Pancana	3
9	UPT Puskesmas Pujananting	3,53



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

NO	Unit Lokus Mandiri	F02
10	UPT Puskesmas Doi-Doi	2,7
11	UPT Puskesmas Palanro	2,37
12	UPT Puskesmas Mangkoso	2,68
13	UPT Puskesmas Madello	2,77
14	UPT Puskesmas Lisu	4,04
15	UPT Puskesmas Palakka	3,31
16	UPT Puskesmas Ralla	2,6
17	UPT Metrologi Legal	1,89

Dari Hasil penilaian evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian PANRB melalui aplikasi evaluasi.menpan.go.id Pemerintah Kabupaten Barru secara umum mendapatkan nilai 3,02 dengan predikat B-. IPP Kabupaten Barru yang ditargetkan dalam Dokumen Perencanaan adalah 4,25. Sehingga realisasi kinerja tahun 2025 belum mampu memenuhi target kinerja pada tahun 2025.

2. Analisis Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran dengan Beberapa Tahun Terakhir

Analisis Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

NO	Indikator Kinerja	Satuan	2024			2025		
			Target	Capaian	Persentase	Target	Capaian	Persentase
1	Nilai SAKIP	Nilai	70	61,42	88%	75	62,57	83%
2	Indeks Pelayanan Publik	Poin	4	3,48	87%	4,25	3,02	71%

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam beberapa tahun terakhir capaian kinerja dengan indikator Nilai SAKIP dan Indeks Pelayanan Publik belum mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan (RPJMD 2021-2026), namun secara pencapaian kinerja pada indikator kinerja Nilai SAKIP mengalami kenaikan sebesar 1,15 poin dan pada indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik mengalami penurunan sebesar 0,46 poin. Namun secara persentase pencapaian kinerja dari tahun 2024 sampai 2025 mengalami penurunan hal ini disebabkan karna target kinerja yang ditetapkan pada dokumen perencanaan (RPJMD 2021-2026) naik dari tahun 2024 ke tahun 2025.



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

3. Analisis realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran “Meningkatnya Kinerja Pemerintahan yang Akuntabel dan Pelayanan Publik yang Baik” sampai dengan tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah adalah sebagai berikut.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Jangka Menengah s.d. Tahun 2026	Realisasi Kinerja s.d. Tahun 2025	Capaian
1	Nilai SAKIP	Nilai	80	62,57	78%
2	Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,25	3,02	71%
Rata-Rata Capaian					75%

Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD, diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Nilai SAKIP sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah Tahun 2026 capaian nilai SAKIP Kabupaten Barru berada pada nilai 78% dari target yang ditetapkan pada akhir periode RPJMD. maka untuk mencapai target RPJMD sampai dengan tahun 2026 sebagai periode akhir perencanaan jangka menengah sebesar 80 terdapat paling sedikit 17,43 poin yang harus dicapai selama periode perencanaan.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Indeks Pelayanan Publik sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah Tahun 2026, nilai Indeks Pelayanan Publik Kabupaten barru saat ini mencapai 71% dari target akhir periode RPJMD. Maka untuk mencapai target RPJMD sampai dengan tahun 2026 sebagai periode akhir perencanaan jangka menengah sebesar 4,25 Poin terdapat paling sedikit 1,23 poin yang harus dicapai selama periode perencanaan.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

Tidak terdapat Perbandingan Capaian dan realisasi kinerja dengan target atau standar Nasional.



5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

A. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Analisis Penyebab Keberhasilan

Beberapa faktor penyebab keberhasilan dalam capaian nilai SAKIP antara lain:

1. Dokumen Perencanaan telah disusun secara berjenjang mulai dari level Pemerintah Daerah (RPJMD) hingga ke level Perangkat Daerah (Renstra, Renja);
2. Penjenjangan kinerja telah dilakukan hingga level individu;
3. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala;
4. Pelaporan kinerja disusun dan pada level Pemerintah Daerah telah diintegrasikan dengan Dokumen LPPD;
5. Pelaporan kinerja berdasarkan Tindak lanjut LHE tahun sebelumnya
6. Melakukan penyusunan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal;

Analisis Penyebab Kegagalan

Faktor – faktor penyebab kegagalan dalam pencapaian kinerja pada indikator kinerja adalah sebagai berikut:

a) Indikator “Nilai SAKIP.

Berdasarkan hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Barru tahun 2025 capaian nilai SAKIP Kabupaten Barru tahun 2025 yang sudah mencapai nilai 62,57 dan berada pada kategori B. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “baik”, yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintahan daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perubahan dan komitmen dalam manajemen dan akuntabilitas kinerja.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Barru tahun 2024 sebagai berikut:

❖ **Perencanaan kinerja**

Capaian Nilai pada Komponen Perencanaan Kinerja telah menunjukkan perubahan dan mengalami sedikit kenaikan dari tahun 2024 dengan nilai 23,04 menjadi 23,06 pada tahun 2025 dari total nilai maksimal pada komponen ini sebesar 30 poin maksimal. Hal ini terlihat pada catatan hasil evaluasi SAKIP oleh Kementerian PAN RB seperti:



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

- Masih terdapat perencanaan Perangkat Daerah (PD) yang belum berorientasi hasil (outcome) dan belum sepenuhnya mencerminkan mandat atau tugas PD, antara lain:
 - Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan belum menetapkan kinerja yang mencerminkan kesiapsiagaan pemadam kebakaran maupun response time penyelamatan sebagai kinerja utama;
 - Sasaran strategis “Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral” pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian masih belum berorientasi hasil
- Masih ditemukan beberapa indikator yang belum memenuhi ditemukan beberapa kinerja yang kriteria belum memenuhi kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Bound (SMART) serta belum cukup dalam mengukur kinerja yang diharapkan, antara lain:
 - Indikator kinerja “Persentase atlet yang masuk pelatda” belum cukup menggambarkan keberhasilan sasaran “Meningkatnya kualitas pembibitan dan pembinaan olahraga” pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga;
 - Indikator kinerja “Persentase penurunan korban meninggal dan hilang akibat bencana” belum sepenuhnya mencerminkan pencapaian kinerja “Meningkatnya ketangguhan bencana” pada RPJMD Pemerintah Daerah;
- Pohon kinerja yang disusun pada tingkat Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah belum memenuhi prinsip penyusunan pohon kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021, khususnya dalam hubungan logis antar level kinerja, serta penjabaran kondisi antara (intermediate outcome) dan Critical Success Factor (CSF) yang memadai.

❖ Pengukuran Kinerja

Pada Komponen Pengukuran Kinerja nilai capaian nilainya juga mengalami kenaikan dari 15,92 pada tahun 2024 menjadi 16,11 pada tahun 2025 dari nilai maksimal poin 30. Adapun catatan hasil evaluasi pada pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

- Masih ditemukan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Perangkat Daerah (PD) yang belum selaras dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti Perjanjian Kinerja (PK) dan Renstra, sehingga dokumen IKU belum dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar pengukuran kinerja



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

- IKU Perangkat Daerah yang telah disusun umumnya sudah dilengkapi dengan formulasi dan sumber data. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator dengan formulasi yang belum tepat untuk mengukur kinerja yang diharapkan, contoh pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Indikator:

Persentase pelaku usaha yang tertib usaha” yang dihitung berdasarkan jumlah alat UTTP yang bertanda tera berlaku;

Indikator

Indikator kerajinan “Persentase industri dan pengolahan yang berbasis teknologi” yang dihitung berdasarkan jumlah kelompok pengrajin yang menerima bantuan Pemerintah Daerah;

- Pelaksanaan evaluasi secara berkala telah dilakukan pada tingkat Perangkat Daerah Kabupaten melalui dan tingkat kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) rencana aksi setiap triwulan. Namun demikian, pelaksanaan monev belum didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi, serta monev atas rencana aksi belum disertai dengan analisis hambatan dan faktor pendukung kinerja, sehingga belum optimal dimanfaatkan sebagai sarana dialog kinerja.

❖ Pelaporan Kinerja

Komponen Pelaporan Kinerja tahun 2024 dengan tahun 2025 tidak mengalami kenaikan dan penurunan nilai yaitu berada pada nilai 10,09 dari 15 poin maksimal yang bisa dicapai pada komponen penilaian pelaporan kinerja hal ini tertuang dalam hasil evaluasi Kementerian PANRB Pemerintah Daerah Kabupaten Barru telah menyusun laporan kinerja, baik pada tingkat Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah. Namun demikian, kualitas Laporan Kinerja (LAKIP) Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih ditemukannya data kinerja yang tidak sinkron antar tabel, sehingga informasi kinerja yang disajikan kurang andal, serta belum dilakukannya perbandingan realisasi kinerja dengan capaian regional maupun nasional. Selain itu, analisis keberhasilan dan kegagalan kinerja, serta faktor pendukung dan hambatan, belum disajikan secara komprehensif untuk menggambarkan kondisi nyata yang dihadapi organisasi maupun unit kerja sebagai dasar perbaikan dan perumusan solusi ke depan. Pemanfaatan LAKIP, baik pada tingkat Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah, belum optimal. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya penetapan target kinerja tahun berjalan yang lebih rendah dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya,



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

sehingga belum mencerminkan pemanfaatan laporan kinerja sebagai dasar perencanaan dan belum menunjukkan penetapan target kinerja menantang (challenging).

❖ Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Perolehan nilai pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal juga mengalami kenaikan dari tahun 2024 dengan nilai 12,37 menjadi 13,31 pada tahun 2025 dengan nilai maksimal yang bisa dicapai adalah 25 poin. Berikut catatan hasil penilaian Kementerian PANRB:

- Laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum memuat rekomendasi yang memadai dan belum secara langsung menyasar akar permasalahan Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan SAKIP;
- Belum terdapat kebijakan reward dan punishment yang didasarkan pada hasil evaluasi SAKIP internal, sehingga hasil evaluasi belum cukup efektif dalam mendorong peningkatan implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah.

b) Indikator Penilaian Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Barru pada tahun 2025 mendapat nilai 3,02 atau kategori B-. Perolehan nilai IPP tahun 2025 mengalami penurunan dari tahun 2024 dimana tahun 2024 nilai IPP Kabupaten Barru berada pada angka 3,48. Indeks Pelayanan Publik mengalami penurunan disebabkan beberapa faktor antara lain:

- 1) Dokumen Standar Pelayanan Pada unit penyelenggara pelayanan publik yang belum dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala;
- 2) Masih banyaknya Unit Penyelenggara Pelayanan belum melibatkan peran serta masyarakat;
- 3) Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik yang belum merata di seluruh unit kerja pelayanan publik;
- 4) Hasil Forum Konsultasi Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat belum sepenuhnya dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyusunan dokumen Standar Pelayanan;
- 5) Sarana Prasarana Ramah Kelompok rentan pada setiap unit layanan publik yang belum lengkap dan memadai;
- 6) Layanan Aduan masyarakat yang belum optimal.
- 7) Masih kurangnya Inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

B. Alternative Solusi

a) Indikator Nilai SAKIP



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

Berdasarkan hasil penilaian SAKIP Pemerintah Kabupaten Barru dan catatan hasil evaluasi dari Kementerian PANRB alternative solusi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barru adalah sebagai berikut:

1) Komponen Perencanaan Kinerja

- Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah melakukan reviu dokumen perencanaan dengan melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah selaku Unit/ Stakeholder Koordinator Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Inspektorat selaku Stakeholder Pengawasan dan Evaluator Internal Kabupaten agar dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah lebih berorientasi pada hasil (outcome) dan selaras dengan mandat serta tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- Pemerintah Daerah melakukan penyempurnaan indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria SMART dan prinsip kecukupan pengukuran, sehingga indikator yang ditetapkan mampu mengukur pencapaian kinerja secara tepat dan mendukung penilaian kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah secara akuntabel
- Pemerintah Kabupaten Barru melakukan menyempurnakan penyusunan pohon kinerja pada tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021, dengan memperkuat hubungan logis antar kondisi, penjabaran kondisi antara, serta penetapan Critical Success Factor yang jelas.

2) Komponen Pengukuran Kinerja

- Pemerintah menyelaraskan Daerah dokumen agar IKU Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya, Renstra dan khususnya Perjanjian Kinerja sehingga IKU dapat berfungsi secara optimal sebagai dasar pengukuran kinerja.
- Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah agar melakukan peninjauan dan penyempurnaan formulasi indikator IKU yang belum tepat, sehingga indikator yang digunakan benar-benar mencerminkan kinerja yang diharapkan dan dapat diukur secara akurat.
- Pemerintah Daerah agar meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi serta melengkapi monev rencana aksi dengan analisis hambatan dan faktor pendukung kinerja, sehingga monev dapat dimanfaatkan secara efektif sebagai sarana dialog kinerja dan perbaikan berkelanjutan.



3) Komponen Pelaporan Kinerja

- Pemerintah Daerah Kabupaten Barru agar meningkatkan kualitas penyusunan LAKIP memastikan konsistensi dengan dan keandalan data kinerja antar tabel, menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan capaian regional dan nasional, serta memperkuat analisis keberhasilan, kegagalan, faktor pendukung, dan hambatan kinerja secara komprehensif sebagai dasar perbaikan berkelanjutan;
- Pemerintah Daerah Kabupaten Barru agar memanfaatkan LAKIP secara optimal perencanaan berikutnya, sebagai kinerja khususnya dasar tahun dalam penetapan target kinerja yang lebih menantang dan realistis, sehingga mendorong peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah secara berkelanjutan

4) Komponen Evaluasi Internal

- Pemerintah Daerah agar meningkatkan kualitas laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan menyusun rekomendasi yang lebih spesifik, terarah, dan menyasar langsung akar Perangkat permasalahan Daerah dalam mengimplementasikan SAKIP;
- Pemerintah menetapkan dan Daerah dalam agar menerapkan kebijakan reward dan punishment yang berbasis pada hasil evaluasi SAKIP internal, sehingga evaluasi dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mendorong peningkatan kinerja dan implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah.

b) Indikator Indeks Pelayanan Publik

1. Melakukan monitoring dan evaluasi Dokumen Standar Pelayanan serta mendorong seluruh unit penyelenggara pelayanan publik untuk melakukan update dokumen Standar Pelayanan secara berkala;
2. Mewajibkan seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dalam melaksanakan Forum Konsultasi Publik serta menjadikan Forum Konsultasi Publik menjadi sarana aduan dan masukan masyarakat dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik;
3. Melengkapi sarana dan prasarana ramah kelompok rentan pada setiap unit penyelenggara pelayanan;
4. Meningkatkan kualitas dan kapabilitas SDM penyelenggara Pelayanan Publik;
5. Peningkatan layanan aduan masyarakat dalam perbaikan pelaksanaan pelayanan publik.
6. Mendorong seluruh unit penyelenggara pelayanan publik dalam hal menciptakan inovasi untuk mempermudah akses pelayanan.



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu Program untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar dengan kata lain persentase capaian sasaran “sama atau lebih tinggi” dari capaian input (realisasi anggarannya). Rumus yang digunakan adalah

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi
PAKi : Pagu anggaran keluaran i
RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
CKi : Capaian keluaran i

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran dalam pencapaian indikator kinerja Nilai SAKIP dan Indeks Pelayanan Publik dapat dilihat pada tabel berikut

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
Mewujudkan Manajemen Pemerintahan Yang Melayani, Baik Dan Bersih	Meningkatkan kinerja pemerintahan yang akuntabel dan pelayanan publik	Nilai SAKIP	Poin	75	62,57	83,43	567.059.894.786	465.197.883.933,48	82,04	99,02



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

	yang baik									
		Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,25	3,02	71,06	6.231.757.560	3.503.526.716	56,22	99,21

Dari tabel perhitungan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya diatas menunjukkan bahwa anggaran yang digunakan untuk Meningkatkan kinerja pemerintahan yang akuntabel dan pelayanan publik yang baik telah efisien. Pemerintah Kabupaten Barru harus tetap mengoptimalkan dengan cara memikirkan kegiatan-kegiatan yang harus mampu Mewujudkan Manajemen Pemerintahan Yang Melayani, Baik Dan Bersih agar anggaran yang direncanakan dapat efektif dalam mencapai indikator kinerja sasaran yang ditetapkan.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
Indikator kinerja “Nilai SAKIP” dan Indikator Indeks Pelayanan Publik** diperoleh dari pelaksanaan 11 Program Prioritas seperti yang dicantumkan pada tabel berikut ini :

NO	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
	Tujuan : Mewujudkan Manajemen Pemerintahan Yang Melayani, Baik Dan Bersih Sasaran : Meningkatkan kinerja pemerintahan yang akuntabel dan pelayanan publik yang baik			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 560.866.984.078,24	Rp 460.534.616.290,50	82,11%



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

2	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Rp 884.902.470,00	Rp 857.299.757,00	96,88%
3	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 363.031.200,00	Rp 286.108.535,00	78,81%
4	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 4.083.453.338,00	Rp 2.924.401.847,98	71,62%
5	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 861.523.700,00	Rp 595.457.503,00	69,12%
6	Program Kepegawaian Daerah	Rp 774.673.790,00	Rp 637.266.831,00	82,26%
7	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp 1.186.701.900,00	Rp 1.110.467.020,00	93,58%
8	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 4.027.037.970,00	Rp 1.526.907.350,00	37,92%
9	Program Pendaftaran Penduduk	Rp 118.011.200,00	Rp 111.315.795,00	94,33%
10	Program Pencatatan Sipil	Rp 55.128.400,00	Rp 54.540.286,00	98,93%
11	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 70.204.300,00	Rp 63.029.434,00	89,78%
	Total Anggaran	Rp 573.291.652.346,24	Rp 468.701.410.649,48	81,76%

Seluruh program diatas ditujukan untuk mencapai indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Barru Periode Tahun 2021 – 2026 dengan target yang sudah ditetapkan. Disamping mampu melakukan efisiensi dari sisi anggaran, target indikator kinerja “Nilai SAKIP” dan Indikator Indeks Pelayanan Publik” mencapai target kinerja yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan.



**MISI 7 : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA
YANG MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI AGAMA**

**TUJUAN 8 : MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG
TENTERAM, TERTIB, DAN AMAN BERLANDASKAN PADA NILAI-NILAI AGAMA**

**Sasaran 11 : Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama, norma-norma, hukum
dan ideology kebangsaan pada masyarakat**

Analisis pencapaian Sasaran “Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama, norma-norma, hukum dan ideology kebangsaan pada masyarakat” dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kondisi Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Barru ditunjukkan oleh indikator kinerja angka kriminalitas. Angka kriminalitas terdiri dari berbagai kategori tindak kriminal adalah seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya.

Angka Kriminalitas adalah Angka yang menunjukkan kondisi keamanan dan ketertiban suatu daerah relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun untuk kegiatan investasi. Angka Kriminalitas dihitung dengan cara : (Jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 tahun/jumlah penduduk) x 10.000.

Indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran adalah **Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.**

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target indikator adalah sebagai berikut:

Indikator ini merupakan indikator SDGs yang tertuang dalam Tujuan ke 16 yakni menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

PPKK : Jumlah penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan lalu dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut dikali 100%



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*



Gambar Upaya Aparat dalam Pelayanan Kamtibmas

Perbandingan Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan, Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk, Persentase Penyelesaian Kejahatan, dan Selang Waktu Terjadinya Kejahatan Kabupaten Barru dengan beberapa Kabupaten di Sulawesi Selatan tahun 2024, berdasarkan data yang dirilis BPS yang sumbernya dari Kepolisian Daerah Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat (POLDA SULSELBAR) Reserse Kriminal Umum/Regional Police Department of Sulawesi Selatan Province- Direktoral Reserse Kriminal Umum.

Kabupaten/Kota	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan	Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana	Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana
Maros	751	182	83,89	11,66
Pangkajene Dan Kepulauan	428	119	92,52	20,47
Barru	235	124	95,32	37,28
Soppeng	358	150	116,48	24,47
Wajo	508	131	85,04	17,24
Sidenreng Rappang	595	180	100,17	14,72

Sumber : BPS Sulawesi Selatan, 2024



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

Dari tabel diatas, terlihat Kabupaten Barru dibanding Kabupaten sekitar, jumlah kejahatan yang dilaporkan jauh lebih sedikit dengan persentase penyelesaian 95,32% setelah soppeng da sidrap. Rasio penduduk terjadi tindak pidana per 100.000 penduduk menunjukkan angka paling rendah setelah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Barru tergolong masih aman dari sisi kriminalitas dibanding beberapa Kabupaten yang ada di sekitar.

1. Analisis Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja indikator misi 7 ini pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
Tujuan : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib, dan aman berlandaskan pada nilai-nilai agama		Angka Kriminalitas	Per 10.000 pddk	5,7	3,4	59,65	Rendah	Badan Kesbangpol
	Sasaran : Meningkatnya penerapan Niai-nilai Agama, norma-norma, hukum dan Ideologi kebangsaan	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	%	0,001	0,00034	34 %	Sangat rendah	KAPOLRES



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

	pada masyarakat							

Realisasi indikator kinerja Angka Kriminalitas pada tahun 2025 sebesar 3,4 per 10.000 penduduk dari target sebesar 5,7 per 10.000 penduduk. Realisasi indikator kinerja angka kriminalitas berdasarkan data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat ketercapaiannya sebesar 59,65 persen dan masuk dalam kategori Rendah. Sementara untuk capaian proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir sebanyak 0,00034 persen dari yang ditargetkan sebesar 0,001 persen, dengan tingkat capaian sebesar 34 persen atau dengan kategori sangat rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kejadian kejahatan kekerasan yang menimpa masyarakat relatif kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan. Dengan demikian, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah dapat dikategorikan cukup kondusif.

Rendahnya proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya efektivitas upaya pencegahan dan penanganan tindak kriminal oleh aparat keamanan, meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan, serta adanya dukungan berbagai program pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Meskipun demikian, upaya peningkatan keamanan dan perlindungan masyarakat tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, serta partisipasi aktif masyarakat guna menjaga stabilitas keamanan dan mencegah terjadinya tindak kejahatan kekerasan di masa mendatang.

2. Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja indikator misi 7 tahun 2025 dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2024			2025		
				Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Tujuan : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib, dan aman berlandaskan pada nilai-nilai agama		Angka Kriminalitas	Per 10.000 pddk	5,9	4,5	123,73%	5,7	3,4	59,65%
	Sasaran : Meningkatnya penerapan Nilai-nilai Agama, norma-norma, hukum dan Ideologi kebangsaan pada masyarakat	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Poin	0,001	0,052	-5.000%	0,001	0,00034	34%

Berdasarkan hasil pengukuran indikator **Proporsi Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir**, pada tahun 2025 terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan dalam situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah. Penurunan proporsi korban kejahatan kekerasan mengindikasikan bahwa berbagai upaya pencegahan dan penanganan tindak kriminal yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama aparat keamanan dan masyarakat



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

telah memberikan dampak positif dalam menekan potensi terjadinya kejahatan kekerasan.

3. Analisis Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja sampai dengan tahun ini dengan target RPJMD;

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari indikator pada misi 7 sampai tahun 2025 dengan target RPJMD 2021 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target (2026)	Tingkat Kemajuan
Tujuan : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib, dan aman berlandaskan pada nilai-nilai agama		Angka Kriminalitas	Per 10.000 pddk	3,4	5	68%
	Sasaran : Meningkatnya penerapan Nilai-nilai Agama, norma-norma, hukum dan	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Poin	0,00034	0	-



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

	Ideologi kebangsaan pada masyarakat					

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 belum mencapai target. Untuk capaian indikator angka kriminalitas dengan tingkat capaian sampai dengan tahun 2025 yaitu 68 persen. Sementara untuk Indikator kinerja sasaran proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir sampai dengan tahun 2025 belum mencapai target yang ditargetkan 0 kasus.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Indikator Kinerja “Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir” merupakan indikator bermakna negatif yang artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya. Adapun keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
Tujuan : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib, dan aman		Angka Kriminalitas	Poin	5,7	3,4	59,65%



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

berlandaskan pada nilai- nilai agama						
	Meningkatnya penerapan Nilai-nilai Agama, norma- norma, hukum dan Ideologi kebangsaan pada	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Persen	0,001	0,00034	34%

Dari Tabel diatas, menurunnya angka kriminalitas serta menurunnya proporsi penduduk yang menjadi korban kekerasan menunjukkan adanya peningkatan efektivitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab keberhasilan tersebut antara lain:

a. Penguatan koordinasi antar lembaga keamanan

Sinergi antara pemerintah daerah dengan aparat keamanan seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam kegiatan pengamanan wilayah, patroli terpadu, serta penanganan gangguan keamanan telah meningkatkan efektivitas pencegahan tindak kriminal.

b. Peningkatan peran perangkat daerah dalam ketertiban umum

Optimalisasi peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah dan pengawasan aktivitas masyarakat turut menekan potensi gangguan ketertiban yang dapat berkembang menjadi tindakan kriminal.

c. Penguatan sistem keamanan berbasis masyarakat

Peningkatan partisipasi masyarakat melalui pengaktifan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling), forum kewaspadaan dini masyarakat, serta



peningkatan kesadaran hukum masyarakat mampu meningkatkan deteksi dini terhadap potensi tindak kriminal.

d. Perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat

Program pemberdayaan ekonomi, penguatan UMKM, serta peningkatan kesempatan kerja turut mengurangi faktor pendorong terjadinya tindak kriminal yang umumnya dipicu oleh tekanan ekonomi.

e. Peningkatan layanan perlindungan masyarakat

Penguatan layanan perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak, serta meningkatnya akses masyarakat terhadap mekanisme pelaporan turut menekan terjadinya kasus kekerasan.

Meskipun terjadi penurunan, masih terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi stabilitas kinerja, antara lain:

1. **Perkembangan dinamika sosial masyarakat**, termasuk urbanisasi dan mobilitas penduduk.
2. **Pengaruh faktor ekonomi dan pengangguran**, yang dapat memicu tindak kriminalitas tertentu.
3. **Masih adanya kasus kekerasan dalam lingkup domestik** yang tidak seluruhnya dilaporkan.
4. **Keterbatasan sarana prasarana pengawasan keamanan** di beberapa wilayah.

Untuk menjaga tren penurunan angka kriminalitas dan korban kekerasan, pemerintah daerah telah dan akan terus melakukan berbagai upaya strategis, antara lain:

a. Penguatan pencegahan kriminalitas berbasis wilayah

- Peningkatan patroli rutin di wilayah rawan.
- Penguatan sistem keamanan lingkungan.
- Pemasangan sarana pengawasan keamanan seperti CCTV pada titik strategis.

b. Peningkatan edukasi dan kesadaran hukum masyarakat

- Sosialisasi pencegahan tindak kriminal.



- Edukasi terkait pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak.

c. Penguatan sistem perlindungan sosial

- Peningkatan layanan pengaduan masyarakat.
- Penguatan layanan pendampingan bagi korban kekerasan.

d. Penguatan kolaborasi lintas sektor

- Koordinasi berkelanjutan antara pemerintah daerah, aparat keamanan, lembaga perlindungan masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan.

e. Pengembangan sistem deteksi dini konflik sosial

- Pemantauan wilayah rawan konflik.
- Peningkatan kapasitas aparaturnya dan masyarakat dalam mitigasi potensi gangguan keamanan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Efisiensi pengelolaan APBD berarti penggunaan sumber daya yang ada dengan cara yang paling optimal. Efisiensi dapat ditingkatkan dengan mengurangi pemborosan dan penyalahgunaan anggaran, memperbaiki proses pengadaan barang dan jasa, serta meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap penggunaan anggaran oleh pemerintah. Efisiensi dalam penggunaan dana publik menjadi salah satu indikator penting dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sumber daya yang terbatas.

Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD adalah dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan APBD di lapangan. Evaluasi ini meliputi pengukuran kinerja dan dampak program-program yang dibiayai oleh APBD. Dengan mengetahui kinerja dan dampak program-program tersebut, pemerintah dapat mengetahui apakah ada program yang tidak efisien atau tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

Perhitungan tingkat efisiensi berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 sebagaimana rumus berikut :



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

Tingkat efisiensi Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi i
				Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib, dan aman berlandaskan pada nilai-nilai agama		Angka Kriminalitas	Per 10.000 pddk	5,7	3,4	59,65	16.297.137.150	15.754.343.112	96,67	-37,02%
	Meningkatnya penerapan Nilai-nilai Agama, norma-norma, hukum dan Ideologi kebangsaan pada masyarakat	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	%	0,001	0,00034	34	16.297.137.150	15.754.343.112	96,67	-62,67%

Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi, capaian kinerja Angka Kriminalitas sebesar 59,65% dengan realisasi anggaran sebesar 96,67% menunjukkan tingkat efisiensi sebesar -37,02%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program/kegiatan tidak berjalan efisien karena capaian kinerja yang diperoleh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat penggunaan anggaran.



Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja yang efisiensi antara lain:

1. Penguatan Pencegahan Kejahatan

- Meningkatkan kegiatan **patroli rutin** pada wilayah rawan kriminalitas.
- Mengoptimalkan **pos keamanan lingkungan (poskamling)** dan sistem keamanan berbasis masyarakat.
- Melakukan **edukasi dan sosialisasi hukum** kepada masyarakat agar meningkatkan kesadaran hukum.

2. Pemanfaatan Teknologi Keamanan

- Pemasangan **CCTV** di titik rawan kejahatan.
- Penggunaan **aplikasi pelaporan masyarakat secara online** untuk mempercepat respon aparat.
- Analisis data kriminalitas untuk menentukan **wilayah prioritas penanganan**.

3. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

- Pelatihan bagi aparat dalam **teknik investigasi, patroli modern, dan pelayanan masyarakat**.
- Peningkatan koordinasi antara **kepolisian, pemerintah daerah, dan aparat keamanan lainnya**.
- Penempatan personel secara **lebih tepat berdasarkan tingkat kerawanan wilayah**.

4. Kolaborasi dengan Masyarakat dan Lembaga Sosial

- Membentuk **forum kemitraan polisi dan masyarakat (FKPM)**.
- Melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi pemuda dalam **program pencegahan kriminalitas**.
- Mengembangkan program **pembinaan bagi kelompok rentan melakukan tindak kriminal**.

5. Penanganan Faktor Sosial Penyebab Kriminalitas

- Program **pemberdayaan ekonomi masyarakat** untuk mengurangi faktor ekonomi penyebab kejahatan.
- Pembinaan bagi **remaja berisiko** melalui kegiatan pendidikan, olahraga, dan keterampilan.



- Penguatan program **rehabilitasi dan reintegrasi sosial** bagi mantan pelaku kejahatan.

6. Monitoring dan Evaluasi Kinerja

- Melakukan **evaluasi rutin terhadap angka kriminalitas** dan efektivitas program yang dijalankan.
- Menetapkan **target penurunan kriminalitas yang terukur**.
- Menggunakan **indikator kinerja dan analisis efisiensi anggaran** untuk memastikan penggunaan sumber daya optimal.

tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya diatas indikator Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir sangat tidak efisien dengan tingkat efisiensi sebesar -66,67%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program/kegiatan tidak berjalan efisien karena capaian kinerja yang diperoleh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat penggunaan anggaran.

Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja yang efisiensi antara lain:

- 1. Penguatan upaya pencegahan kriminalitas**
Meningkatkan kegiatan pencegahan kejahatan melalui patroli rutin di wilayah rawan, penguatan sistem keamanan lingkungan (siskamling), serta penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.
- 2. Peningkatan koordinasi antar lembaga terkait**
Memperkuat kerja sama antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta instansi terkait dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kejahatan kekerasan agar penanganannya lebih cepat dan terintegrasi.
- 3. Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem keamanan**
Mengoptimalkan penggunaan teknologi seperti kamera pengawas (CCTV), sistem pelaporan masyarakat berbasis aplikasi, serta analisis data kriminalitas untuk mengidentifikasi wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.



4. Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat

Mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui pembentukan forum kemitraan antara aparat keamanan dan masyarakat serta peningkatan peran tokoh masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman.

5. Penanganan faktor sosial penyebab kriminalitas

Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembinaan generasi muda, serta kegiatan sosial yang dapat mengurangi potensi terjadinya tindak kekerasan.

6. Peningkatan kapasitas aparat dan kualitas pelayanan

Memberikan pelatihan kepada aparat terkait dalam penanganan kasus kejahatan kekerasan, peningkatan kemampuan investigasi, serta pelayanan kepada masyarakat agar proses penanganan kasus menjadi lebih efektif dan efisien.

7. Monitoring dan evaluasi program secara berkala

Melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran tepat sasaran serta memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka korban kejahatan kekerasan.

Sehingga sasaran upaya untuk Meningkatkan penerapan Nilai-nilai Agama, norma-norma, hukum dan Ideologi kebangsaan pada masyarakat dari analisis efisiensi, masih sangat tidak efisien sehingga pemerintah kabupaten barru harus segera mengambil langkah-langkah strategis untuk lebih meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan anggaran yang efektif.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Indikator kinerja “Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir” diperoleh dari pelaksanaan 4 (empat) Program Prioritas seperti yang dicantumkan pada tabel berikut ini :



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
Tujuan : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib, dan aman berlandaskan pada nilai-nilai agama			
Sasaran : Meningkatnya penerapan Nilai-nilai Agama, norma-norma, hukum dan Ideologi kebangsaan pada			
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	867.390.300	743.284.120	85,69
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	763.550.000	657.783.900	86,15
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	103.840.300	85.500.220	82,34
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	15.952.000	15.130.000	94,85
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	15.952.000	15.130.000	94,85
Program Program Pemerintah dan Kesejahteraan	15.413.794.850	14.995.928.992	97,29
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	14.895.130.350	14.504.621.082,00	97,38
Administrasi Tata Pemerintahan	192.488.100	187.592.397	97,45
Fasilitasi Kerja Sama Daerah	30.315.200	28.428.250	93,77



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	295.861.200	275.287.263	93,04
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	266.446.800	254.780.840	95,62
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	266.446.800	254.780.840	95,62
Total Anggaran Sasaran	16.563.583.950	15.754.343.112	96,67%
Total Anggaran Tujuan	16.563.583.950	15.754.343.112	96,67%

Pencapaian kinerja dalam upaya menurunkan angka kriminalitas serta menurunkan proporsi penduduk yang menjadi korban kekerasan dipengaruhi oleh pelaksanaan beberapa program strategis pemerintah daerah. Evaluasi terhadap program tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan maupun potensi kendala pencapaian indikator kinerja dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan program sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program ini berperan penting dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah melalui kegiatan patroli, pengawasan ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Terdiri dari dua kegiatan yakni Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

Keberhasilan program tidak lepas dari dua kegiatan yang telaksana dengan capaian yang baik , hal ini tercermin dari meningkatnya intensitas pengawasan



wilayah dan penanganan gangguan ketertiban secara cepat sehingga potensi tindak kriminal dapat dicegah sejak dini. Namun demikian, efektivitas program ini masih dapat dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah personel serta cakupan wilayah pengawasan yang relatif luas.

2. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya memberikan kontribusi positif terhadap penurunan angka kriminalitas serta menurunnya proporsi penduduk yang menjadi korban kekerasan. Didukung dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang memperlihatkan capaian yang sangat baik, program ini berperan sebagai pendekatan preventif yang memperkuat ketahanan masyarakat dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya sehingga mampu mengurangi faktor-faktor yang berpotensi memicu terjadinya tindak kriminal dan kekerasan.

Ke depan, efektivitas program ini perlu terus diperkuat melalui peningkatan kualitas kegiatan pemberdayaan masyarakat, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan lingkungan.

3. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Secara umum, Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat memberikan kontribusi terhadap terciptanya stabilitas sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berdampak pada menurunnya angka kriminalitas serta menurunnya proporsi penduduk yang menjadi korban kekerasan. Melalui empat kegiatan, masing masing Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, Administrasi Tata Pemerintahan, Fasilitasi kerjasama daerah, dan fasilitasi dan koordinasi hukum, penguatan koordinasi pemerintahan, peningkatan layanan kepada masyarakat, serta penguatan perlindungan sosial, berperan dalam mengurangi berbagai faktor yang berpotensi memicu terjadinya tindak kriminal dan kekerasan.

Ke depan, efektivitas program ini perlu terus ditingkatkan melalui penguatan integrasi kebijakan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan



publik, serta peningkatan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya guna menjaga keberlanjutan stabilitas sosial dan keamanan masyarakat.

4. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Secara umum, Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitas Penanganan Konflik Sosial memberikan kontribusi positif terhadap penurunan angka kriminalitas dan menurunnya proporsi penduduk yang menjadi korban kekerasan. Melalui kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, Program ini berperan dalam memperkuat sistem pencegahan konflik, meningkatkan kapasitas penanganan konflik secara dini, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ke depan, efektivitas program ini perlu terus ditingkatkan melalui penguatan sistem deteksi dini konflik sosial, peningkatan kapasitas aparat dan masyarakat dalam penyelesaian konflik secara damai, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan wilayah.



b. Analisis RPJMD Tahun 2025 - 2029

MISI 1 MEMPERCEPAT PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN TERBUKA

TUJUAN : MENINGKATNYA PEMERATAAN PENDAPATAN MASYARAKAT

Tujuan Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Dan Penurunan Angka Kemiskinan yang diukur melalui indikator kinerja Indeks Gini. Rasio Gini atau Indeks Gini merupakan indikator statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran masyarakat dalam suatu wilayah. Indikator ini sering digunakan oleh untuk melihat seberapa merata kesejahteraan ekonomi masyarakat yang perhitungannya dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Nilai Rasio Gini berada pada rentang 0 sampai dengan 1, dengan interpretasi sebagai berikut:

Nilai Rasio Gini	Tingkat Ketimpangan
0	Pemerataan sempurna (semua penduduk memiliki pendapatan yang sama)
0 – 0,3	Ketimpangan rendah
0,3 – 0,5	Ketimpangan sedang
> 0,5	Ketimpangan tinggi
1	Ketimpangan sempurna (pendapatan hanya dimiliki oleh satu orang/kelompok)

Semakin besar nilai Indeks Gini, maka ketimpangan distribusi pendapatan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin kecil nilainya, maka distribusi pendapatan semakin merata. Perhitungan Indeks Gini didasarkan pada Kurva Lorenz (Lorenz Curve), yaitu kurva yang menggambarkan hubungan antara:

- c. Persentase kumulatif penduduk (dari yang termiskin sampai terkaya)
- d. Persentase kumulatif pendapatan atau pengeluaran

Indeks Gini dihitung sebagai perbandingan antara luas area ketimpangan dengan luas area total di bawah garis pemerataan sempurna. Dalam statistik, Rasio Gini dapat dihitung dengan rumus berikut:



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

SINGGAH
di BARRU!

$$G = 1 - \sum_{i=1}^n (Y_i + Y_{i-1})(X_i - X_{i-1})$$

Keterangan:

G = Rasio Gini

X_i = Proporsi kumulatif penduduk pada kelompok ke-i

Y_i = Proporsi kumulatif pendapatan/pengeluaran pada kelompok ke-i

n = Jumlah kelompok penduduk

Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Barru tahun 2025-2029, Tujuan Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat dicapai melalui 2 sasaran yaitu :

SASARAN 1. BERKURANGNNYA KEMISKINAN MASYARAKAT

Berkurangnya kemiskinan masyarakat ini diukur melalui indikator kinerja angka kemiskinan. Angka Kemiskinan adalah indikator yang digunakan untuk menunjukkan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Indikator ini menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat dan menjadi salah satu ukuran penting dalam evaluasi pembangunan ekonomi dan sosial.

Pengukuran angka kemiskinan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menggunakan pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).

Garis Kemiskinan sendiri terdiri dari dua komponen utama, yaitu:

- c. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) – nilai pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan makanan setara 2100 kilokalori per kapita per hari.
- d. Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) – kebutuhan minimum untuk perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian, transportasi, dan kebutuhan dasar lainnya.

Rumus yang digunakan untuk menghitung Angka Kemiskinan (Headcount Index / P0) adalah:

$$P0 = \frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$$



Keterangan

- d. P0 = Persentase penduduk miskin
- e. Jumlah Penduduk Miskin = penduduk dengan pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan
- f. Jumlah Penduduk = total penduduk dalam wilayah tersebut

SASARAN 2. BERKEMBANGNYA LAPANGAN KERJA DAN KUALITAS TENAGA KERJA

Sasaran berkembangnya lapangan kerja dan kualitas tenaga kerja diukur melalui indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur persentase jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Indikator ini dihitung secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menggambarkan kondisi pasar tenaga kerja.

Pengangguran terbuka mencakup penduduk usia kerja yang:

- a. Tidak bekerja,
- b. Sedang mencari pekerjaan,
- c. Mempersiapkan usaha, atau
- d. Merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan tetapi sebenarnya bersedia bekerja.

TPT menjadi indikator penting dalam pembangunan daerah karena menunjukkan kemampuan perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Semakin tinggi nilai TPT, maka semakin besar proporsi angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan.

Rumus TPT yang digunakan dalam statistik ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Penganggur}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Keterangan

- d. TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

- e. Jumlah Penganggur = Penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan
- f. Jumlah Angkatan Kerja = Jumlah penduduk yang bekerja + penganggur

a. Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Hasil pengukuran kinerja pada tahun berjalan, capaian indikator menunjukkan hasil yang bervariasi antara indikator pemerataan pendapatan, penurunan kemiskinan, dan perkembangan lapangan kerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat		Indeks Gini	Poin	0,304	0,345	86,51	Cukup	BPS
	Berkurangnya Kemiskinan Masyarakat	Angka Kemiskinan	Persen	7,65	8	95,42	Cukup	BPS
	Berkembangnya Lapangan Kerja dan Kualitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,33	5,07	119,91	Sangat Baik	BPS

Pada tujuan meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat, indikator yang digunakan adalah Indeks Gini dengan target sebesar 0,304 dan realisasi sebesar 0,345. Capaian kinerja sebesar 86,51% dengan kategori cukup menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat masih relatif lebih tinggi dibandingkan kondisi yang diharapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat belum sepenuhnya merata. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain masih terbatasnya akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap sumber daya ekonomi, ketimpangan kepemilikan aset produktif, serta perbedaan tingkat produktivitas tenaga kerja. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya memberikan dampak yang merata bagi seluruh lapisan



masyarakat, sehingga kelompok masyarakat tertentu masih memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan kelompok lainnya.

Pada sasaran berkurangnya kemiskinan masyarakat, indikator yang digunakan adalah angka kemiskinan dengan target sebesar 7,65 persen dan realisasi sebesar 8 persen, sehingga capaian kinerja mencapai 95,42 persen dengan kategori cukup. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan masih sedikit lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan. Meskipun selisih antara target dan realisasi relatif kecil, kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan belum sepenuhnya mampu mencapai target yang direncanakan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan kesempatan kerja yang layak, rendahnya tingkat produktivitas sebagian tenaga kerja, serta masih terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar dan sumber pendapatan yang berkelanjutan.

Sementara itu, pada sasaran berkembangnya lapangan kerja dan kualitas tenaga kerja, indikator yang digunakan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan target sebesar 6,33 persen dan realisasi sebesar 5,07 persen. Capaian kinerja mencapai 119,91 persen dengan kategori sangat baik, yang menunjukkan bahwa kondisi ketenagakerjaan mengalami perkembangan yang positif. Penurunan tingkat pengangguran ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan, baik melalui penciptaan lapangan kerja baru maupun melalui peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Program pelatihan kerja, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta fasilitasi penempatan tenaga kerja diduga turut berkontribusi dalam meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa keberhasilan dalam menurunkan tingkat pengangguran belum sepenuhnya diikuti oleh perbaikan yang signifikan pada pemerataan pendapatan dan penurunan angka kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian pekerjaan yang tercipta masih berada pada sektor dengan tingkat

produktivitas dan pendapatan yang relatif rendah. Oleh karena itu, upaya pembangunan ke depan perlu lebih difokuskan pada peningkatan kualitas pekerjaan, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta pengembangan kegiatan ekonomi produktif yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat secara lebih merata.

Dengan memperkuat sinergi program pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan ekonomi lokal, diharapkan upaya pembangunan dapat memberikan dampak yang lebih optimal dalam menurunkan tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

b. Analisis perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024, terlihat adanya dinamika pada indikator pemerataan pendapatan, kemiskinan, dan ketenagakerjaan yang dapat dijelaskan melalui beberapa pendekatan teori ekonomi pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2024			2025		
				Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat		Indeks Gini	Poin	0,33	0,31	106,06	0,304	0,345	86,51
	Berkurangnya Kemiskinan Masyarakat	Angka Kemiskinan	Persen	6,41	8,31	70,36	7,65	8	95,42
	Berkembangnya Lapangan Kerja dan Kualitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,14	6,42	75,10	6,33	5,07	119,91

Pada indikator Indeks Gini sebagai ukuran pemerataan pendapatan, pada tahun 2024 realisasi sebesar 0,31 dari target 0,33 dengan capaian kinerja 106,06%, yang menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan berada pada kondisi yang lebih baik dari yang ditargetkan.



Namun pada tahun 2025 nilai Indeks Gini meningkat menjadi 0,345 dari target 0,304 dengan capaian kinerja 86,51%, yang mengindikasikan meningkatnya ketimpangan pendapatan dibandingkan tahun sebelumnya. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui Teori Kuznets Curve yang menyatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan cenderung meningkat karena manfaat pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat yang memiliki akses terhadap modal, pendidikan, dan peluang ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun aktivitas ekonomi berkembang dan lapangan kerja meningkat, distribusi manfaat ekonomi belum sepenuhnya merata di seluruh lapisan masyarakat.

Pada indikator angka kemiskinan, terjadi perbaikan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 realisasi angka kemiskinan tercatat sebesar 8,31% dari target 6,41% dengan capaian kinerja 70,36%, yang menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan masih cukup jauh dari target yang ditetapkan. Namun pada tahun 2025 realisasi angka kemiskinan menurun menjadi 8% dari target 7,65% dengan capaian kinerja meningkat menjadi 95,42%. Perbaikan ini menunjukkan adanya kecenderungan penurunan tingkat kemiskinan meskipun belum sepenuhnya mencapai target. Secara teoritis, kondisi ini dapat dijelaskan melalui Teori Trickle Down Effect, yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesempatan kerja secara bertahap dapat memberikan dampak pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan kesempatan memperoleh pendapatan. Selain itu, menurut Teori Lingkaran Kemiskinan (Vicious Circle of Poverty) yang dikemukakan oleh Ragnar Nurkse, kemiskinan seringkali disebabkan oleh rendahnya produktivitas, keterbatasan modal, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, penurunan kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memerlukan intervensi kebijakan yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan tenaga kerja, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.



Sementara itu, pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terjadi peningkatan kinerja yang sangat signifikan. Pada tahun 2024 realisasi TPT sebesar 6,42% dari target 5,14% dengan capaian kinerja 75,1%, yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran masih relatif tinggi dan belum mencapai target yang diharapkan. Namun pada tahun 2025 realisasi TPT menurun menjadi 5,07% dari target 6,33% dengan capaian kinerja 119,91%, yang menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Kondisi ini dapat dijelaskan melalui Teori Permintaan Tenaga Kerja (Labour Demand Theory) yang menyatakan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi dan investasi akan meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja sehingga tingkat pengangguran dapat menurun. Selain itu, menurut Teori Human Capital yang dikemukakan oleh Gary Becker, peningkatan keterampilan, pendidikan, dan kompetensi tenaga kerja akan meningkatkan produktivitas serta peluang masyarakat untuk memperoleh pekerjaan. Dengan demikian, program pelatihan kerja, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta pengembangan kegiatan ekonomi produktif berperan penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Secara keseluruhan, perbandingan kinerja antar tahun menunjukkan bahwa penurunan tingkat pengangguran pada tahun 2025 mulai memberikan dampak terhadap perbaikan kondisi kemiskinan, namun belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan pemerataan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian pekerjaan yang tercipta kemungkinan masih berada pada sektor dengan tingkat produktivitas dan pendapatan yang relatif rendah, sehingga belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap penurunan ketimpangan pendapatan. Dalam perspektif teori ekonomi pembangunan, kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya memerlukan peningkatan jumlah kesempatan kerja, tetapi juga peningkatan kualitas pekerjaan, produktivitas tenaga kerja, serta pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

c. Analisis perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Analisis perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah RPJMD pada akhir periode, terlihat bahwa capaian kinerja menunjukkan hasil yang bervariasi pada masing-masing indikator pembangunan, yaitu pemerataan pendapatan, penurunan kemiskinan, serta perkembangan lapangan kerja dan kualitas tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Akhir Periode	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat		Indeks Gini	Poin	0,304	0,345	86,51
	Berkurangnya Kemiskinan Masyarakat	Angka Kemiskinan	Persen	7,65	8	95,42
	Berkembangnya Lapangan Kerja dan Kualitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,33	5,07	119,91

Pada indikator Indeks Gini sebagai ukuran pemerataan pendapatan masyarakat, target RPJMD akhir periode ditetapkan sebesar 0,304, sedangkan realisasi sampai dengan tahun ini tercatat sebesar 0,345 dengan tingkat kemajuan 86,51%. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemerataan pendapatan masyarakat belum sepenuhnya mencapai target jangka menengah yang ditetapkan. Nilai Indeks Gini yang lebih tinggi dari target mengindikasikan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan masih relatif tinggi. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan akses masyarakat terhadap peluang ekonomi, tingkat pendidikan dan keterampilan yang tidak merata, serta perbedaan kepemilikan aset produktif. Meskipun demikian,



tingkat kemajuan yang telah mencapai lebih dari delapan puluh persen menunjukkan bahwa upaya pemerataan pendapatan telah berjalan, namun masih memerlukan penguatan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh kelompok masyarakat.

Pada indikator angka kemiskinan, target RPJMD akhir periode ditetapkan sebesar 7,65 persen, sementara realisasi sampai dengan tahun ini sebesar 8 persen dengan tingkat kemajuan 95,42 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja penurunan kemiskinan sudah mendekati target jangka menengah yang telah ditetapkan. Selisih antara target dan realisasi relatif kecil, sehingga dapat dikatakan bahwa berbagai program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Namun demikian, angka kemiskinan yang masih berada di atas target menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan masih perlu diperkuat melalui pendekatan yang lebih terintegrasi, seperti peningkatan akses masyarakat terhadap lapangan kerja produktif, penguatan perlindungan sosial, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.

Sementara itu, pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebagai ukuran perkembangan lapangan kerja dan kualitas tenaga kerja, target RPJMD akhir periode ditetapkan sebesar 6,33 persen, sedangkan realisasi sampai dengan tahun ini sebesar 5,07 persen dengan tingkat kemajuan 119,91 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pada sektor ketenagakerjaan telah melampaui target jangka menengah yang ditetapkan. Penurunan tingkat pengangguran tersebut menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha, berkembangnya usaha mikro dan kecil, serta adanya program peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan kerja dan pengembangan kewirausahaan yang mampu memperluas peluang kerja bagi masyarakat.



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

Secara keseluruhan, perbandingan antara realisasi kinerja hingga tahun berjalan dengan target RPJMD menunjukkan bahwa indikator ketenagakerjaan telah melampaui target yang ditetapkan, indikator kemiskinan telah mendekati target jangka menengah, sedangkan indikator pemerataan pendapatan masih memerlukan perhatian dan penguatan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kesempatan kerja telah memberikan dampak positif terhadap perbaikan kondisi ekonomi masyarakat, namun peningkatan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan ke depan perlu diarahkan tidak hanya pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga pada peningkatan kualitas pekerjaan, produktivitas tenaga kerja, serta pemerataan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi agar tujuan pembangunan yang lebih inklusif dapat tercapai secara optimal.

d. Analisis perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja provinsi dan nasional

Analisis perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 menunjukkan posisi kinerja Kabupaten Barru dibandingkan dengan capaian di tingkat provinsi dan nasional pada beberapa indikator utama pembangunan, yaitu pemerataan pendapatan, penurunan kemiskinan, serta perkembangan lapangan kerja dan kualitas tenaga kerja. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Provinsi Tahun 2025	Realisasi Kabupaten Barru Tahun 2025	Capaian Kabupaten terhadap realisasi Provinsi	Realisasi Nasional Tahun 2025	Realisasi Kabupaten Barru Tahun 2025	Capaian Kabupaten terhadap realisasi nasional
Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat		Indeks Gini	Poin	0,35	0,345	101,43	0,383	0,345	109,92
	Berkurangnya Kemiskinan Masyarakat	Angka Kemiskinan	Persen	7,6	8	94,74	8,5	8	105,88



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

	Berkembangnya Lapangan Kerja dan Kualitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,21	5,07	79,57	4,9	5,07	96,53

Pada indikator Indeks Gini sebagai ukuran pemerataan pendapatan masyarakat, realisasi Kabupaten Barru pada tahun 2025 tercatat sebesar 0,345, sedangkan realisasi di tingkat provinsi sebesar 0,35 dan nasional sebesar 0,383. Dengan demikian, capaian Kabupaten Barru terhadap provinsi sebesar 101,43 persen dan terhadap nasional sebesar 109,92 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Barru relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional, yang berarti distribusi pendapatan masyarakat di Kabupaten Barru cenderung lebih merata. Meskipun demikian, nilai Indeks Gini tersebut masih menunjukkan adanya kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat sehingga upaya peningkatan pemerataan ekonomi tetap perlu diperkuat melalui peningkatan kesempatan kerja produktif serta penguatan ekonomi masyarakat.

Pada indikator angka kemiskinan, realisasi Kabupaten Barru pada tahun 2025 tercatat sebesar 8 persen, sementara tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 7,6 persen dan tingkat nasional sebesar 8,5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa capaian Kabupaten Barru terhadap provinsi sebesar 94,74 persen, yang berarti tingkat kemiskinan di Kabupaten Barru masih sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi. Namun jika dibandingkan dengan tingkat nasional, capaian Kabupaten Barru mencapai 105,88 persen, yang menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Barru relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Berdasarkan publikasi Profil Kemiskinan Kabupaten Barru Maret 2025, persentase penduduk miskin di Kabupaten Barru tercatat sebesar 8,00 persen atau sekitar 14,13 ribu jiwa, mengalami penurunan 0,31 persen poin dibandingkan tahun 2024 serta menurun 0,46 persen poin dibandingkan tahun 2023. Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat yang dipengaruhi oleh stabilitas ekonomi



daerah serta efektivitas program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi yang mampu memperkuat daya beli masyarakat.

Pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebagai ukuran perkembangan lapangan kerja dan kualitas tenaga kerja, realisasi Kabupaten Barru pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,07 persen, sedangkan tingkat pengangguran provinsi sebesar 4,21 persen dan nasional sebesar 4,9 persen. Capaian Kabupaten Barru terhadap provinsi sebesar 79,57 persen dan terhadap nasional sebesar 96,53 persen, yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Kabupaten Barru masih relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional. Berdasarkan publikasi Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Barru Tahun 2025, tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,07 persen berarti dari setiap 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 5 orang yang belum memperoleh pekerjaan. Pada Agustus 2025 jumlah angkatan kerja di Kabupaten Barru mencapai 94.262 orang, dengan 89.482 orang bekerja dan sekitar 4.780 orang penganggur, serta tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 63,91 persen yang menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, hasil perbandingan ini menunjukkan bahwa kinerja Kabupaten Barru relatif baik dalam aspek pemerataan pendapatan dan cukup kompetitif dalam penurunan kemiskinan jika dibandingkan dengan tingkat nasional, namun masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja apabila dibandingkan dengan capaian provinsi dan nasional. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan daerah ke depan perlu diarahkan pada penguatan penciptaan lapangan kerja produktif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan sektor ekonomi lokal yang mampu memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam bentuk paragraf berdasarkan data pada publikasi BPS dan pendekatan teori ekonomi pembangunan disajikan pada tabel berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat		Indeks Gini	Poin	0,304	0,345	86,51
	Berkurangnya Kemiskinan Masyarakat	Angka Kemiskinan	Persen	7,65	8	95,42
	Berkembangnya Lapangan Kerja dan Kualitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,33	5,07	119,91

Pada Tujuan Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat yang diukur melalui Indeks Gini, target yang ditetapkan sebesar 0,304, sedangkan realisasinya mencapai 0,345 dengan capaian kinerja 86,51 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa target belum tercapai, sehingga dapat dikategorikan sebagai kinerja yang belum optimal. Kegagalan pencapaian indikator ini terutama dipengaruhi oleh masih adanya ketimpangan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat. Berdasarkan data ketenagakerjaan Kabupaten Barru tahun 2025, struktur tenaga kerja masih didominasi oleh sektor jasa sebesar 56,25 persen, sementara sektor industri yang umumnya memiliki nilai tambah lebih tinggi baru menyerap 14,64 persen tenaga kerja. Selain itu, proporsi pekerja informal masih cukup besar yaitu 55,19 persen, yang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat bekerja pada sektor dengan tingkat kepastian pendapatan dan perlindungan kerja yang relatif rendah. Dalam perspektif teori Kuznets Curve, kondisi ini dapat dijelaskan bahwa pada fase tertentu pertumbuhan ekonomi cenderung lebih dahulu dinikmati oleh kelompok masyarakat yang memiliki akses lebih baik terhadap modal, pendidikan, dan peluang usaha, sehingga ketimpangan pendapatan justru dapat meningkat. Oleh karena itu, alternatif solusi yang telah dan perlu terus



dilakukan adalah mendorong pemerataan akses ekonomi melalui pemberdayaan UMKM, peningkatan akses permodalan, penguatan ekonomi lokal, serta peningkatan kualitas keterampilan tenaga kerja agar masyarakat dapat masuk ke pekerjaan yang lebih produktif dan berpendapatan lebih baik.

Pada Sasaran Berkurangnya Kemiskinan Masyarakat yang diukur melalui Angka Kemiskinan, target ditetapkan sebesar 7,65 persen, sedangkan realisasi mencapai 8,00 persen dengan capaian 95,42 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa target belum sepenuhnya tercapai, tetapi secara kinerja sudah mendekati sasaran dan menunjukkan arah perbaikan. Berdasarkan publikasi Profil Kemiskinan Kabupaten Barru Maret 2025, persentase penduduk miskin di Barru turun 0,31 persen poin dibandingkan Maret 2024 dan turun 0,46 persen poin dibandingkan Maret 2023, dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2025 mencapai sekitar 14,13 ribu jiwa. Publikasi tersebut juga menjelaskan bahwa penurunan ini dipengaruhi oleh membaiknya stabilitas ekonomi daerah, meredanya dampak El Niño, serta efektivitas stimulus ekonomi dan program perlindungan sosial yang memperkuat daya beli masyarakat. Namun demikian, kemiskinan masih belum mencapai target karena tekanan kebutuhan dasar masyarakat masih meningkat, yang tercermin dari kenaikan garis kemiskinan menjadi Rp426.792 per kapita per bulan. Selain itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 0,94 dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,17 menunjukkan bahwa meskipun tingkat kemiskinan menurun, masih terdapat kelompok masyarakat yang pengeluarannya berada dekat atau di bawah garis kemiskinan. Dalam teori Vicious Circle of Poverty dari Ragnar Nurkse, kemiskinan sulit diputus karena rendahnya pendapatan menyebabkan rendahnya tabungan, investasi, pendidikan, dan produktivitas. Oleh sebab itu, solusi yang telah dilakukan dan perlu diperkuat adalah penguatan perlindungan sosial yang tepat sasaran, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, pengembangan usaha produktif berbasis potensi lokal, serta peningkatan akses terhadap



pendidikan, kesehatan, dan permodalan agar masyarakat miskin memiliki kemampuan keluar dari perangkap kemiskinan secara berkelanjutan.

Pada sasaran Berkembangnya Lapangan Kerja dan Kualitas Tenaga Kerja yang diukur melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), target ditetapkan sebesar 6,33 persen, sedangkan realisasi sebesar 5,07 persen dengan capaian 119,91 persen. Capaian ini menunjukkan keberhasilan yang sangat baik karena realisasi lebih rendah dari target, yang berarti tingkat pengangguran berhasil ditekan. Berdasarkan publikasi Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Barru Tahun 2025, TPT tahun 2025 turun 1,34 persen poin dibandingkan Agustus 2024, jumlah angkatan kerja mencapai 94.262 orang, dan jumlah penduduk bekerja meningkat menjadi 89.482 orang. Data tersebut juga menunjukkan bahwa TPAK meningkat menjadi 63,91 persen, menandakan semakin banyak penduduk usia kerja yang aktif di pasar kerja. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, terutama di sektor jasa. Dalam perspektif Teori Permintaan Tenaga Kerja, peningkatan kegiatan ekonomi akan mendorong permintaan terhadap tenaga kerja sehingga pengangguran menurun. Selain itu, dari sudut pandang Teori Human Capital, peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja akan memperbesar peluang masyarakat untuk terserap dalam pasar kerja. Namun, keberhasilan penurunan pengangguran ini masih perlu dicermati karena kualitas pekerjaan belum sepenuhnya kuat, tercermin dari masih dominannya pekerja informal dan tingginya proporsi pekerja berpendidikan dasar ke bawah sebesar 48,94 persen. Oleh karena itu, solusi yang telah dilakukan dan perlu dilanjutkan adalah penguatan pelatihan kerja, peningkatan kompetensi berbasis kebutuhan pasar, fasilitasi penempatan tenaga kerja, pengembangan kewirausahaan, serta penguatan sektor-sektor ekonomi produktif agar penurunan pengangguran tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan terbesar terdapat pada indikator ketenagakerjaan, yang

tercermin dari menurunnya tingkat pengangguran secara signifikan, sedangkan indikator kemiskinan menunjukkan perbaikan tetapi belum sepenuhnya mencapai target, dan indikator pemerataan pendapatan masih menghadapi tantangan paling besar. Hal ini mengindikasikan bahwa penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Barru sudah mulai berjalan efektif, namun manfaatnya belum sepenuhnya terdistribusi secara merata kepada seluruh kelompok masyarakat. Karena itu, kebijakan pembangunan ke depan perlu diarahkan pada penciptaan lapangan kerja yang lebih berkualitas, penguatan ekonomi produktif masyarakat, serta pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi agar pertumbuhan ekonomi dapat berdampak langsung pada penurunan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan secara lebih berkelanjutan.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja indikator dengan realisasi anggaran yang digunakan dapat dilihat pada tabel :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat		Indeks Gini	Poin	0,304	0,345	86,51	8.808.147.951	7.099.650.288	84,89	99,07
	Berkurangnya Kemiskinan Masyarakat	Angka Kemiskinan	Persen	7,65	8	95,42	5.722.423.911	4.677.527.259	75,97	99,14
	Berkembangnya Lapangan Kerja dan Kualitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,33	5,07	119,91	3.085.724.040	2.422.123.029	92,89	99,35

Pada Tujuan Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat yang diukur melalui Indeks Gini, target kinerja sebesar 0,304 dengan realisasi 0,345 sehingga capaian kinerja mencapai 86,51 persen. Dari sisi penggunaan sumber daya, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp8.808.147.951 dengan realisasi anggaran Rp7.099.650.288 atau sebesar 84,89 persen dari total anggaran. Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya tercatat 99,07 persen, yang menunjukkan bahwa



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

pemanfaatan anggaran relatif efisien karena realisasi anggaran lebih rendah dari pagu yang ditetapkan namun tetap menghasilkan capaian kinerja yang cukup tinggi. Meskipun demikian, capaian kinerja yang belum mencapai target menunjukkan bahwa efisiensi anggaran belum sepenuhnya diikuti oleh efektivitas dalam mencapai tujuan pemerataan pendapatan. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor struktural seperti ketimpangan akses terhadap peluang ekonomi, dominasi sektor informal, dan perbedaan produktivitas tenaga kerja masih mempengaruhi distribusi pendapatan masyarakat.

Pada sasaran Berkurangnya Kemiskinan Masyarakat yang diukur melalui Angka Kemiskinan, target sebesar 7,65 persen dengan realisasi 8 persen sehingga capaian kinerja mencapai 95,42 persen. Dari sisi penggunaan anggaran, total anggaran sebesar Rp5.722.423.911 dengan realisasi Rp4.677.527.259 atau sebesar 75,97 persen dari pagu anggaran. Tingkat efisiensi tercatat 99,14 persen, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan telah menggunakan sumber daya secara efisien. Realisasi anggaran yang relatif lebih rendah dibandingkan pagu menunjukkan adanya penghematan atau optimalisasi penggunaan sumber daya tanpa mengurangi capaian kinerja secara signifikan. Meskipun target belum sepenuhnya tercapai, capaian kinerja yang mendekati target menunjukkan bahwa berbagai program pengentasan kemiskinan telah berjalan cukup efektif dalam menurunkan jumlah penduduk miskin.

Sementara itu, pada sasaran Berkembangnya Lapangan Kerja dan Kualitas Tenaga Kerja yang diukur melalui Tingkat Pengangguran Terbuka, target sebesar 6,33 persen dengan realisasi 5,07 persen, sehingga capaian kinerja mencapai 119,91 persen. Dari sisi penggunaan anggaran, pagu anggaran sebesar Rp3.085.724.040 dengan realisasi Rp2.422.123.029 atau 92,89 persen dari total anggaran yang tersedia. Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya tercatat 99,35 persen, yang menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan tingkat pengangguran berhasil dicapai dengan penggunaan anggaran yang



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

relatif optimal. Tingginya capaian kinerja dengan realisasi anggaran yang lebih rendah dari pagu menunjukkan bahwa program-program ketenagakerjaan mampu memberikan hasil yang maksimal dengan penggunaan sumber daya yang efisien.

Secara keseluruhan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya menunjukkan bahwa ketiga indikator memiliki tingkat efisiensi yang sangat tinggi, dengan nilai efisiensi di atas 99 persen. Hal ini menandakan bahwa pengelolaan anggaran telah dilakukan secara optimal dan tidak terjadi pemborosan dalam penggunaan sumber daya. Meskipun demikian, terdapat perbedaan tingkat efektivitas antar indikator, di mana indikator ketenagakerjaan menunjukkan hasil yang paling optimal karena mampu melampaui target kinerja, sementara indikator pemerataan pendapatan masih memerlukan penguatan kebijakan agar efisiensi penggunaan anggaran juga dapat diikuti oleh peningkatan capaian kinerja yang lebih maksimal.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja berdasarkan data anggaran dan realisasi program dapat dilihat pada tabel berikut :

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
Tujuan : Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat			
Sasaran : Berkurangnya Kemiskinan Masyarakat			
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	712.062.366	682.331.559	95,82
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	474.815.170	399.793.923	84,20



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

Program Pengembangan Perumahan	1.328.349.900	1.276.494.916	96,10
Program Kawasan Pemukiman	1.175.061.415	1.016.219.340	86,48
Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh	632.311.500	623.005.600	98,53
Program Pemberdayaan Sosial	132.805.900	126.630.259	95,35
Program Penanggulangan Bencana	752.746.060	716.946.005	95,24
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	336.834.100	290.950.022	86,38
Program Rehabilitasi Sosial	177.437.500	168.161.235	94,77
Total Anggaran Sasaran 1	5.722.423.911	5.300.532.859	92,63
Sasaran : Berkembangnya Lapangan Kerja dan Kualitas Tenaga Kerja			
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	0	0	0,00
Program Perencanaan Tenaga Kerja	12.304.800	10.304.850	83,75
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	4.493.600	4.308.550	95,88
Program Penempatan Tenaga Kerja	9.978.000	7.548.530	75,65
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	35.988.890	35.813.535	99,51



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	3.022.958.750	2.364.147.564	78,21
Total Anggaran Sasaran 2	3.085.724.040	2.422.123.029	78,49
Total Anggaran Sasaran	8.808.147.951	7.722.655.888	87,68
Total Anggaran Tujuan	8.808.147.951	7.722.655.888	87,68

Pencapaian tujuan meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dengan sasaran berkurangnya kemiskinan masyarakat didukung oleh beberapa program yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur dasar, perlindungan sosial, serta pemberdayaan masyarakat. Secara umum, total anggaran yang dialokasikan untuk mendukung sasaran ini sebesar Rp5.722.423.911 dengan realisasi Rp5.300.532.859 atau sebesar 92,63 persen, yang menunjukkan bahwa sebagian besar program telah dilaksanakan secara optimal dan berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan.

Program yang memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat antara lain Program Pengembangan Perumahan dengan realisasi anggaran sebesar 96,10 persen serta Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dengan capaian 98,53 persen. Kedua program tersebut berperan penting dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat dan memperbaiki kondisi lingkungan permukiman, yang secara tidak langsung berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Selain itu, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan capaian 95,82 persen juga mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan akses air bersih yang layak. Infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan perumahan merupakan komponen penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat karena berpengaruh terhadap kesehatan, produktivitas, dan kualitas hidup.



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

Di sisi lain, terdapat beberapa program yang realisasinya relatif lebih rendah dibandingkan program lainnya, seperti Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan capaian 84,20 persen, Program Kawasan Permukiman dengan capaian 86,48 persen, serta Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan capaian 86,38 persen. Capaian yang belum maksimal pada beberapa program ini dapat mempengaruhi optimalisasi upaya penurunan kemiskinan, terutama dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar dan perlindungan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar program telah berjalan dengan baik, masih terdapat ruang perbaikan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program agar dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan dapat lebih optimal.

Sementara itu, untuk sasaran berkembangnya lapangan kerja dan kualitas tenaga kerja, total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp3.085.724.040 dengan realisasi Rp2.422.123.029 atau sebesar 78,49 persen. Program yang paling berkontribusi dalam mendukung peningkatan kesempatan kerja adalah Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro dengan capaian realisasi 99,51 persen, yang menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi masyarakat berjalan dengan sangat baik. Program ini berperan penting dalam mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah yang mampu menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

Namun demikian, terdapat beberapa program yang capaian realisasinya masih relatif rendah, seperti Program Penempatan Tenaga Kerja dengan capaian 75,65 persen serta Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan capaian 78,21 persen. Selain itu, Program Pengembangan Jasa Konstruksi tidak memiliki alokasi anggaran pada tahun berjalan sehingga tidak memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kesempatan kerja. Rendahnya realisasi pada beberapa program ini dapat mempengaruhi optimalisasi peningkatan kualitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja baru.



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

Secara keseluruhan, analisis program menunjukkan bahwa sebagian besar program telah dilaksanakan dengan tingkat realisasi yang cukup tinggi dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan. Program yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi faktor utama yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja. Namun demikian, beberapa program yang realisasinya belum maksimal menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi, perencanaan, dan efektivitas pelaksanaan program agar dampak program terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penurunan kemiskinan dapat lebih optimal di masa mendatang.



MISI 2 : MEMBANGUN MANUSIA YANG UNGGUL DAN INKLUSIF

TUJUAN 2 : MENINGKATKAN KUALITAS MANUSIA YANG CERDAS DAN SEHAT

peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu prioritas utama pembangunan daerah Kabupaten Barru sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan pembangunan pada **RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025–2029**. Pembangunan manusia diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan memiliki daya saing guna mendukung percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Upaya peningkatan kualitas manusia yang cerdas dan sehat dilaksanakan melalui penguatan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai layanan dasar yang menjadi hak fundamental masyarakat. Dalam sektor pendidikan, pembangunan difokuskan pada peningkatan akses, pemerataan, dan kualitas layanan pendidikan, termasuk peningkatan mutu pembelajaran, penguatan kompetensi tenaga pendidik, serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong peningkatan kualitas hasil belajar peserta didik melalui penguatan kemampuan dasar literasi dan numerasi yang menjadi fondasi penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sementara itu, dalam sektor kesehatan, pembangunan diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui perluasan akses dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, penguatan pelayanan kesehatan dasar, serta peningkatan upaya promotif dan preventif. Pemerintah Kabupaten Barru juga terus memperkuat berbagai program kesehatan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan status gizi, penurunan angka stunting, peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular.

Secara berkala UNDP melakukan penyempurnaan dalam penghitungan IPM. Tahun 2010, UNDP melakukan penyempurnaan kembali dengan tetap menggunakan tiga dimensi yang sama yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak namun menggunakan indikator yang berbeda yaitu umur harapan hidup



saat lahir, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Metode agregasi IPM dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$IPM = \sqrt[3]{|kesehatan| \times |pendidikan| \times |pengeluaran|} \times 100$$

Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Barru tahun 2025-2029, ketiga dimensi dasar IPM diuraikan menjadi 2 sasaran yang mendukung pencapaian tujuan yaitu :

4. Sasaran : Meningkatnya Mutu Pendidikan

Indeks Pendidikan adalah salah satu komponen utama dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pencapaian pembangunan di sektor pendidikan. Indeks Pendidikan dibentuk dari dua indikator utama :

- Harapan Lama Sekolah (HLS) : Rata-rata jumlah tahun sekolah yang diharapkan akan dijalani oleh anak usia 7 tahun.
- Rata-rata Lama Sekolah (RLS) : Rata-rata jumlah tahun sekolah yang telah dijalani oleh penduduk usia 25 tahun ke atas

Nilai Rapor Pendidikan adalah skor kuantitatif yang mencerminkan capaian mutu pendidikan di suatu satuan pendidikan (sekolah/PAUD) atau daerah,



berdasarkan data Asesmen Nasional. Nilai ini disusun dalam rentang 1,00 hingga 3,00

5. Sasaran : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Indeks Kesehatan adalah salah satu dari tiga komponen utama penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan di bidang kesehatan dan umur panjang.

Indeks Kesehatan diukur melalui Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH), yaitu rata-rata perkiraan usia yang akan dicapai oleh seseorang yang baru lahir, jika mengalami pola kematian seperti yang berlaku saat ini:

Prevalensi stunting adalah indikator yang menunjukkan persentase balita (anak di bawah 5 tahun) yang mengalami stunting dibandingkan dengan total jumlah balita dalam suatu wilayah dan waktu tertentu. Prevalensi stunting diukur dengan indikator tinggi badan menurut umur (TB/U) menggunakan standar WHO Child Growth Standards, dengan formulasi = jumlah balita stunting dibagi jumlah total balita X 100%

1) Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja adalah suatu proses evaluasi yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pencapaian kinerja tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pencapaian tujuan dan sasaran pada misi 1 dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
Meningkatkan Kualitas Manusia		Indeks Pembangunan Manusia	Poin	75,22	75,41	100,25	Sangat Tinggi	BPS



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

yang Sehat dan Cerdas								
		Indeks Pendidikan	Poin	67,51	67,99	100,71	Sangat Tinggi	BPS
	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Nilai Literasi dan Numerasi Pada Rapor Pendidikan	poin	66,11	62,77	94,95	tinggi	Disdikbud
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	82,51	81,82	99,16	Sangat Tinggi	BPS
		Prevalensi Stunting	%	19,50	16,71	85,69	baik	Dinkes

Sumber : BPS, 2025 dan Data Olahan

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah Kabupaten Barru yang diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, dan produktif. Pencapaian tujuan ini diukur melalui beberapa indikator kinerja utama yang menggambarkan kondisi pembangunan manusia, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pendidikan, Nilai Literasi dan Numerasi pada Rapor Pendidikan, Indeks Kesehatan, serta Prevalensi Stunting.



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, capaian indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan kinerja yang sangat baik. Target IPM yang ditetapkan sebesar 75,22 poin dapat direalisasikan sebesar 75,41 poin, sehingga tingkat capaian mencapai 100,25 persen dari target. Pencapaian ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Barru mengalami peningkatan yang ditandai dengan membaiknya dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup masyarakat. Hal ini juga mencerminkan efektivitas berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pada sasaran meningkatnya mutu pendidikan, indikator Indeks Pendidikan juga menunjukkan capaian yang sangat baik. Target yang ditetapkan sebesar 67,51 poin dapat direalisasikan sebesar 67,99 poin dengan capaian sebesar 100,71 persen. Pencapaian ini menunjukkan adanya peningkatan pada indikator pendidikan yang diukur melalui rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa akses dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan semakin meningkat seiring dengan berbagai kebijakan dan program pembangunan di sektor pendidikan.

Namun demikian, apabila dilihat dari indikator kualitas pembelajaran yaitu Nilai Literasi dan Numerasi pada Rapor Pendidikan, capaian yang diperoleh masih berada di bawah target yang ditetapkan. Dari target sebesar 66,11 poin, realisasi yang dicapai sebesar 62,77 poin dengan tingkat capaian 94,95 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun akses pendidikan semakin meningkat, kualitas pembelajaran khususnya pada kemampuan dasar literasi dan numerasi peserta didik masih perlu mendapat perhatian lebih. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kualitas pembelajaran melalui peningkatan kompetensi tenaga pendidik, optimalisasi proses pembelajaran di satuan pendidikan, serta peningkatan kualitas manajemen pendidikan.



Pada sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, indikator Indeks Kesehatan menunjukkan capaian yang sangat baik dengan realisasi sebesar 81,82 poin dari target 82,51 poin atau mencapai 99,16 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Barru relatif baik yang ditunjukkan melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan, peningkatan cakupan program kesehatan masyarakat, serta berbagai upaya promotif dan preventif yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

Selain itu berdasarkan data Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPBGM), indikator Prevalensi Stunting juga menunjukkan perkembangan yang positif. Target prevalensi stunting yang ditetapkan sebesar 19,50 persen berhasil ditekan menjadi 16,71 persen. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan secara terpadu melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif yang melibatkan berbagai perangkat daerah, pemerintah desa, serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan.

Secara keseluruhan, capaian indikator pada tujuan Meningkatkan Kualitas Manusia yang Sehat dan Cerdas pada Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik, dimana sebagian besar indikator telah mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia masih perlu terus ditingkatkan, khususnya dalam memperkuat kualitas pembelajaran pada aspek literasi dan numerasi serta mempertahankan tren penurunan prevalensi stunting guna mendukung peningkatan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Barru secara berkelanjutan.

2) Analisis perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Barru memperlihatkan perkembangan yang cukup signifikan dibandingkan dibanding tahun 2024 yang menunjukkan semakin baiknya pembangunan manusia di Kabupaten Barru. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2024			2025		
				Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatkan Kualitas Manusia yang Sehat dan Cerdas		Indeks Pembangunan Manusia	Poin	72,57	74,51	102,67	75,22	75,41	100,25
	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	70,83	67,19	94,86	67,51	67,99	100,71
		Nilai Literasi dan Numerasi Pada Rapor	poin	-	-	-	66,1	62,77	94,95



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

		Pendidikan							
	Meningkatnya	Indeks Kesehatan	Poin	77,26	81,15	105,03	82,51	81,82	99,16
	Derajat Kesehatan masyarakat	Prevalensi Stunting	%				19,50	16,71	85,69

Peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Barru merupakan prioritas pembangunan daerah yang dilaksanakan secara berkelanjutan melalui penguatan sektor pendidikan dan kesehatan. Evaluasi capaian kinerja tujuan ini dilakukan dengan membandingkan realisasi indikator kinerja utama pada tahun 2024 dan tahun 2025 guna melihat tren perkembangan serta efektivitas program pembangunan yang telah dilaksanakan.

Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan tren peningkatan yang positif. Pada tahun 2024, realisasi IPM mencapai 74,51 poin dari target 72,57 poin atau dengan capaian 102,67 persen. Selanjutnya pada tahun 2025, IPM meningkat menjadi 75,41 poin dari target 75,22 poin dengan capaian 100,25 persen. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan pada dimensi utama pembentuk IPM, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup masyarakat.

Pada dimensi kesehatan, perkembangan ditunjukkan oleh indikator Usia Harapan Hidup (UHH). Pada tahun 2024, UHH tercatat sebesar 67,59 tahun, dan pada tahun 2025 diproyeksikan meningkat menjadi 74,47 tahun. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan derajat



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

kesehatan masyarakat yang dipengaruhi oleh meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan, serta penguatan program promotif dan preventif di bidang kesehatan.

Pada dimensi pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia ditunjukkan melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS meningkat dari 8,84 tahun pada tahun 2024 menjadi 8,93 tahun pada tahun 2025, yang menunjukkan adanya peningkatan rata-rata lama pendidikan yang ditempuh oleh penduduk. Sementara itu, HLS juga mengalami peningkatan dari 13,63 tahun pada tahun 2024 menjadi 13,76 tahun pada tahun 2025, yang mencerminkan meningkatnya peluang anak usia sekolah untuk mengenyam pendidikan lebih lama di masa yang akan datang.

Pada sasaran meningkatnya mutu pendidikan, indikator Indeks Pendidikan menunjukkan perbaikan kinerja. Pada tahun 2024, capaian belum memenuhi target yaitu sebesar 67,19 poin dari target 70,83 poin atau capaian 94,86 persen. Namun pada tahun 2025, realisasi meningkat menjadi 67,99 poin dari target 67,51 poin dengan capaian 100,71 persen. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas program pembangunan pendidikan, khususnya dalam meningkatkan akses dan partisipasi pendidikan masyarakat.

Meskipun demikian, indikator kualitas pembelajaran yang diukur melalui Nilai Literasi dan Numerasi pada Rapor Pendidikan pada tahun 2025 masih berada di bawah target. Dari target 66,10 poin, realisasi yang dicapai sebesar 62,77 poin atau capaian 94,95 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran, khususnya pada kemampuan dasar literasi dan numerasi, masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kompetensi guru dan perbaikan proses pembelajaran di satuan pendidikan.

Pada sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, indikator Indeks Kesehatan menunjukkan capaian yang sangat baik. Pada tahun



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

2024, realisasi mencapai 81,15 poin dari target 77,26 poin atau capaian 105,03 persen. Sedangkan pada tahun 2025, realisasi sebesar 81,82 poin dari target 82,51 poin dengan capaian 99,16 persen, yang menunjukkan kondisi kesehatan masyarakat tetap terjaga pada kategori sangat baik.

Selain itu, indikator Prevalensi Stunting pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif. Target sebesar 19,50 persen berhasil ditekan menjadi 16,71 persen, yang menunjukkan keberhasilan intervensi program percepatan penurunan stunting secara terintegrasi. Penurunan ini juga mencerminkan perbaikan status gizi masyarakat, khususnya pada kelompok balita. Jumlah kasus anak stunting tahun 2025 sesuai data Dinas Kesehatan sebanyak 1.510 kasus.

Secara keseluruhan, capaian kinerja tujuan Meningkatkan Kualitas Manusia yang Sehat dan Cerdas menunjukkan tren yang positif dari tahun 2024 ke tahun 2025. Peningkatan IPM yang didukung oleh perbaikan komponen UHH, RLS, dan HLS menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Barru berjalan dengan baik. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya peningkatan terutama pada aspek kualitas pembelajaran serta percepatan penurunan stunting secara berkelanjutan guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih optimal di masa yang akan datang

3) Analisis perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat pada tabel berikut :



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target	Tingkat Kemajuan
Meningkatkan Kualitas Manusia yang Cerdas dan Sehat		Indeks Pembangunan Manusia	Poin	75,41	75,22	100,25
		Indeks Pendidikan	Poin	67,99	71,02	95,73
	Meningkatnya Mutu pendidikan	Nilai Literasi dan Numerasi Pada Rapor Pendidikan	Poin	66,11	62,77	94,95
	Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	82,51	81,82	99,16
		Prevalensi Stunting	%	16,71	19,50	85,69



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam dokumen RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025–2029 bertujuan untuk mengukur tingkat kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Analisis ini penting untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja telah berada pada jalur yang tepat dalam mencapai target akhir periode RPJMD.

Pada tujuan Meningkatkan Kualitas Manusia yang Cerdas dan Sehat, indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan capaian yang sangat baik. Realisasi IPM tercatat sebesar 75,41 poin, melampaui target jangka menengah sebesar 75,22 poin, dengan tingkat kemajuan mencapai 100,25 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Barru telah berada di atas target yang direncanakan pada tahap awal periode RPJMD, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian target akhir.

Pada sasaran meningkatnya mutu pendidikan, indikator Indeks Pendidikan menunjukkan tingkat kemajuan yang cukup baik namun belum mencapai target jangka menengah. Realisasi sebesar 67,99 poin dibandingkan dengan target 71,02 poin, menghasilkan tingkat kemajuan 95,73 persen. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan, masih diperlukan upaya percepatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD, khususnya dalam peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.

Sementara itu, indikator kualitas pembelajaran yang diukur melalui Nilai Literasi dan Numerasi pada Rapor Pendidikan menunjukkan tingkat kemajuan sebesar 94,95 persen, dengan realisasi 62,77 poin dibandingkan target 66,11 poin. Capaian ini mengindikasikan bahwa kualitas pembelajaran masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Barru. Oleh karena itu, diperlukan penguatan intervensi yang lebih terarah dalam peningkatan



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

kompetensi guru, kualitas proses pembelajaran, serta pemanfaatan asesmen pendidikan secara optimal.

Pada sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, indikator Indeks Kesehatan menunjukkan capaian yang sangat baik dengan tingkat kemajuan 99,16 persen, dimana realisasi sebesar 81,82 poin dibandingkan target 82,51 poin. Hal ini mencerminkan bahwa pembangunan sektor kesehatan telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan RPJMD, meskipun masih diperlukan upaya peningkatan untuk mencapai target secara penuh.

Selanjutnya, berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat indikator Prevalensi Stunting menunjukkan tingkat kemajuan sebesar 85,69 persen, dimana realisasi sebesar 16,71 persen telah lebih baik dibandingkan target 19,50 persen (semakin rendah semakin baik). Penurunan prevalensi stunting ini menunjukkan bahwa intervensi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Barru telah berjalan efektif. Namun demikian, upaya penurunan stunting tetap perlu dilanjutkan secara konsisten untuk mencapai target jangka menengah secara optimal.

Secara keseluruhan, capaian kinerja tujuan Meningkatkan Kualitas Manusia yang Cerdas dan Sehat menunjukkan bahwa sebagian besar indikator telah berada pada jalur yang tepat dalam mencapai target jangka menengah RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025–2029. Beberapa indikator bahkan telah melampaui target, seperti IPM, sementara indikator lainnya menunjukkan capaian yang mendekati target. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya percepatan khususnya pada sektor pendidikan, terutama dalam peningkatan kualitas pembelajaran literasi dan numerasi, guna memastikan seluruh target RPJMD dapat tercapai secara optimal pada akhir periode perencanaan.



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

4) Analisis perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja provinsi dan nasional

Untuk analisis perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja provinsi dan nasional dapat dilihat pada tabel berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Provinsi Tahun 2025	Capaian Kabupaten terhadap realisasi Provinsi	Realisasi Nasional Tahun 2025	Capaian Kabupaten terhadap realisasi nasional
Meningkatkan Kualitas Manusia yang Cerdas dan Sehat		Indeks Pembangunan Manusia	Poin	75,41	75,92	99,32	75,90	99,35
	Meningkatnya Mutu pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	67,99	-	-	-	-
		Nilai Literasi dan Numerasi Pada Rapor	Poin	66,11	-	-	-	-



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

		Pendidikan						
	Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	81,82	74,15	110,34	74,47	109,87
		Pravelan si Stunting	%	16,71	-	-	-	-

Secara umum, kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Barru Tahun 2025 menunjukkan capaian yang kompetitif dan relatif baik jika dibandingkan dengan tingkat provinsi maupun nasional, khususnya pada aspek kesehatan dan pembangunan manusia secara agregat.

Pada indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kabupaten Barru mencatat capaian sebesar 75,41 poin, sedikit lebih rendah dibandingkan capaian Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 75,92 poin dan nasional Indonesia sebesar 75,90 poin. Tingkat capaian Kabupaten Barru terhadap provinsi mencapai 99,32% dan terhadap nasional sebesar 99,35%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Barru sudah mendekati rata-rata provinsi dan nasional, meskipun masih terdapat ruang perbaikan terutama pada dimensi pendidikan dan daya beli.

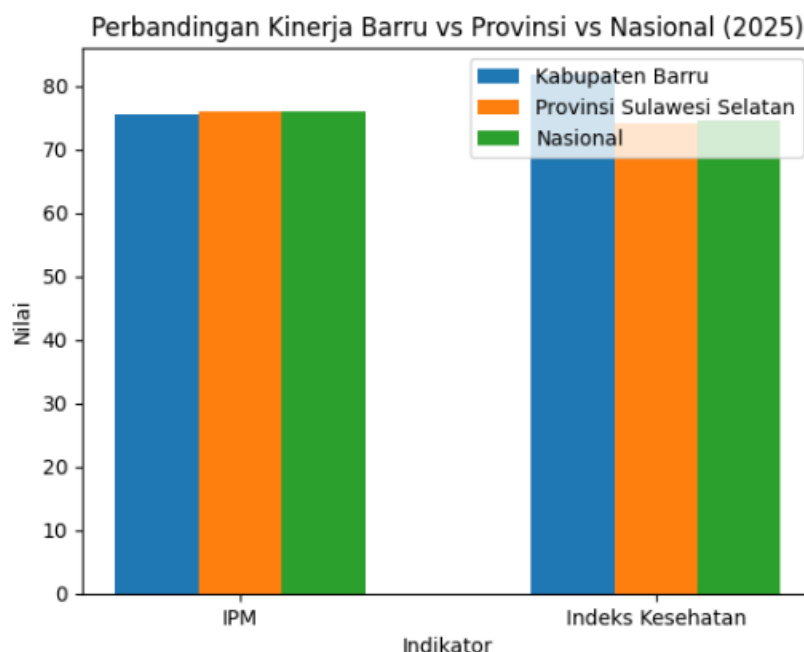
Pada aspek pendidikan, indikator Indeks Pendidikan Kabupaten Barru tercatat sebesar 67,99 poin, serta nilai literasi dan numerasi pada Rapor Pendidikan sebesar 66,11 poin. Meskipun belum tersedia data pembandingan tingkat provinsi dan nasional pada indikator ini, capaian tersebut mengindikasikan bahwa kualitas pendidikan di Barru masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam penguatan kompetensi dasar peserta didik. Hal ini menjadi penting mengingat dimensi pendidikan merupakan salah satu penopang utama dalam peningkatan IPM secara berkelanjutan.



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

Sementara itu, pada indikator Indeks Kesehatan, Kabupaten Barru menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melampaui capaian provinsi maupun nasional. Barru mencatat nilai sebesar 81,82 poin, jauh di atas Provinsi Sulawesi Selatan (74,15 poin) dan nasional (74,47 poin), dengan tingkat capaian masing-masing sebesar 110,34% terhadap provinsi dan 109,87% terhadap nasional. Kondisi ini mencerminkan bahwa derajat kesehatan masyarakat Barru relatif lebih tinggi, yang dapat dipengaruhi oleh peningkatan akses layanan kesehatan, keberhasilan program promotif-preventif, serta perbaikan perilaku hidup sehat masyarakat. Namun demikian, pada indikator prevalensi stunting, Kabupaten Barru masih berada pada angka 16,71%. Meskipun tidak tersedia pembandingan langsung dalam tabel ini, angka tersebut masih menunjukkan bahwa permasalahan gizi kronis pada balita tetap menjadi isu strategis yang memerlukan intervensi berkelanjutan dan terintegrasi lintas sektor.



Grafik tersebut memperlihatkan secara visual bahwa:

IPM Barru masih sedikit di bawah provinsi dan nasional (selisih tipis)



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

Indeks Kesehatan Barru jauh lebih tinggi dibanding provinsi dan nasional (keunggulan signifikan)

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan atau peningkatan kinerja terhadap peningkatan kualitas SDM ditandai dengan pemerataan terhadap akses pendidikan, derajat Kesehatan yang tinggi serta kemauan hidup sehat dan menurunnya tingkat pengangguran serta stabilitas harga. Keberhasilan Kabupaten Barru dalam pencapaian IPM dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
Meningkatkan Kualitas Manusia yang Cerdas dan Sehat		Indeks Pembangunan Manusia	Poin	75,22	75,41	100,25	Capaian IPM melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh peningkatan pada dimensi kesehatan	Penguatan intervensi lintas sektor melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, perluasan jaminan sosial, serta menjaga



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

							an dan pendidikan, serta stabilitas daya beli masyarakat. Akses layanan dasar yang semakin baik turut mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat.	stabilitas ekonomi masyarakat.
	Meningkatnya Mutu pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	67,51	67,99	100,71	Indeks Pendidikan melampaui target, menunjukkan adanya peningkatan pada harapan lama sekolah dan rata-	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, penguatan kapasitas tenaga pendidik, serta pemberian bantuan



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

							rata lama sekolah . Hal ini didukung oleh peningk atan akses pendidi kan dan progra m bantuan pendidi kan.	pendidik an bagi siswa kurang mampu.
		Nilai Literasi dan Numer asi Pada Rapor Pendidi kan	Poi n	66, 11	62,7 7	94,9 5	Target belum tercapai akibat masih rendah nya kompet ensi dasar peserta didik, khusus nya dalam literasi dan numera si. Kualitas pembel ajaran belum merata dan	Peningk atan kompete nsi guru melalui pelatiha n, impleme ntasi pembela jaran berbasis asesme n, pendam pingan sekolah, serta optimalis asi pemanfa atan Rapor



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

							masih terdapat dampak learning loss.	Pendidikan.
	Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	82,51	81,82	99,16	Capaian mendekati target namun belum terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh belum meratanya akses layanan kesehatan serta keterbatasan tenaga dan fasilitas di beberapa wilayah.	Peningkatan layanan kesehatan dasar, penguatan program promotif dan preventif, optimalisasi puskesmas dan posyandu, serta peningkatan cakupan jaminan kesehatan.
		Prevalensi Stunting	%	19,50	16,71	85,69	Penurunan prevalensi stunting	Penguatan intervensi konverg



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

							melampaui target (semakin rendah semakin baik). Keberhasilan dipengaruhi oleh intervensi gizi spesifik dan sensitif yang berjalan efektif dan terintegrasi.	ensilintas sektor, peningkatan peran posyandu, pemberian PMT, serta edukasi gizi dan perilaku hidup sehat kepada masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Capaian **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** Kabupaten Barru Tahun 2025 sebesar **75,41 poin** telah melampaui target yang ditetapkan (**75,22 poin**) dengan tingkat capaian **100,25%**.

Analisis Keberhasilan:

Keberhasilan ini dipengaruhi oleh peningkatan pada komponen penyusun IPM, khususnya pada dimensi kesehatan dan pendidikan. Peningkatan akses layanan kesehatan dasar, perluasan jaminan kesehatan, serta peningkatan rata-rata lama sekolah turut memberikan kontribusi positif terhadap capaian ini. Selain itu, stabilitas ekonomi daerah juga mendukung daya beli masyarakat.

Solusi/Upaya yang Dilakukan:



Pemerintah Kabupaten Barru terus melakukan penguatan intervensi lintas sektor melalui peningkatan akses pendidikan, pelayanan kesehatan promotif-preventif, serta perlindungan sosial untuk menjaga keberlanjutan peningkatan IPM.

Indeks Pendidikan

Realisasi **Indeks Pendidikan** mencapai **67,99 poin**, melampaui target **67,51 poin** dengan capaian **100,71%**.

Analisis Keberhasilan:

Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan pada indikator pendidikan seperti harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Program wajib belajar, bantuan pendidikan, serta peningkatan akses terhadap fasilitas pendidikan menjadi faktor utama keberhasilan.

Solusi/Upaya yang Dilakukan:

Pemerintah daerah telah melakukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, penguatan kapasitas tenaga pendidik, serta pemberian bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu untuk mempertahankan tren positif ini.

3. Nilai Literasi dan Numerasi (Rapor Pendidikan)

Nilai literasi dan numerasi tercatat sebesar **62,77 poin**, lebih rendah dari target **66,11 poin**, dengan capaian **94,95%**.

Analisis Kegagalan:

Belum tercapainya target ini disebabkan oleh masih rendahnya kompetensi dasar peserta didik, khususnya dalam kemampuan membaca pemahaman dan numerasi. Faktor lain yang mempengaruhi antara lain kualitas pembelajaran yang belum merata, keterbatasan kapasitas guru dalam implementasi kurikulum berbasis kompetensi, serta dampak learning loss pada periode sebelumnya.

Solusi/Upaya yang Dilakukan:

Pemerintah Kabupaten Barru telah melakukan berbagai langkah perbaikan, antara lain:

- Penguatan program peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan literasi dan numerasi
- Implementasi pembelajaran diferensiasi dan berbasis asesmen
- Pemanfaatan platform Rapor Pendidikan sebagai dasar intervensi sekolah



- Pendampingan intensif pada sekolah dengan capaian rendah

4. Indeks Kesehatan

Capaian **Indeks Kesehatan** sebesar **81,82 poin** masih berada di bawah target **82,51 poin**, dengan tingkat capaian **99,16%**.

Analisis Kegagalan (Parsial):

Meskipun capaian relatif tinggi, target belum sepenuhnya tercapai. Hal ini dipengaruhi oleh belum optimalnya pemerataan layanan kesehatan, khususnya di wilayah terpencil, serta masih adanya kendala dalam pemenuhan tenaga kesehatan dan fasilitas layanan dasar.

Solusi/Upaya yang Dilakukan:

Upaya yang telah dilakukan meliputi:

- Peningkatan akses dan kualitas layanan fasilitas kesehatan tingkat pertama
- Penguatan program promotif dan preventif (imunisasi, skrining kesehatan)
- Optimalisasi peran puskesmas dan posyandu
- Peningkatan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat

5. Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting berhasil ditekan menjadi **16,71%** dari target **19,50%**, dengan capaian **85,69%** (semakin rendah semakin baik).

Analisis Keberhasilan:

Penurunan stunting yang cukup signifikan ini menunjukkan keberhasilan intervensi gizi spesifik dan sensitif yang dilakukan secara konvergen. Faktor pendukung antara lain peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, intervensi gizi pada 1.000 HPK, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola asuh dan gizi.

Solusi/Upaya yang Dilakukan:

Langkah yang telah dilakukan antara lain:

- Pelaksanaan intervensi terintegrasi lintas sektor (kesehatan, sanitasi, pendidikan, sosial)
- Peningkatan peran kader posyandu dalam pemantauan tumbuh kembang balita
- Pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita dan ibu hamil
- Edukasi gizi dan perilaku hidup bersih dan sehat



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

Secara keseluruhan, kinerja Kabupaten Barru Tahun 2025 menunjukkan:

- Capaian positif pada indikator makro (IPM dan Indeks Pendidikan)
- Keberhasilan signifikan dalam penurunan stunting
- Masih adanya tantangan pada kualitas pembelajaran (literasi-numerasi)
- Perlu optimalisasi sektor kesehatan untuk mencapai target secara penuh

Ke depan, diperlukan penguatan kebijakan yang lebih terfokus pada peningkatan kualitas SDM, terutama pada aspek pendidikan dasar dan pemerataan layanan kesehatan, guna mendorong peningkatan kinerja pembangunan manusia secara berkelanjutan.

6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja pada misi ini adalah sebagai berikut :

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
Tujuan : Meningkatnya Kualitas Manusia yang Cerdas dan Sehat			
Sasaran : Meningkatnya Mutu pendidikan			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	48.958.792.417,00	43.329.107.406,00	88,50
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	23.167.666.539,00	20.746.171.589	89,55
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	13.133.700.928,00	12.086.942.183,00	92,03



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	10.111.936.350,00	9.336.082.628,00	92,33
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.545.488.600,00	1.159.911.006,00	45,57
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.644.223.680,00	2.240.447.485,00	84,73
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	998.189.580,00	618.705.978,00	61,98
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	118.541.100,00	101.731.682,00	85,82
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	27.206.500,00	20.009.825,00	73,55
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1.500.286.500,00	1.500.000.000,00	99,98
Sasaran : Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat			



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	57.468.452.743,00	53.860.069.717,25	93,72
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	12.437.552.147,00	11.026.307.281,25	88,65
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	44.959.858.096,00	42.782.897.337,00	99,16
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	71.042.500,00	50.865.099,00	71,60
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	704.325.680,00	539.885.170,00	76,65
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	3.716.800,00	3.623.920,00	97,50
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM	9.966.000,00	9.311.200,00	93,43



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

di Wilayah Kabupaten/Kota			
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	690.642.880,00	526.950.050,00	76,30
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	15.560.000,00	13.390.000,00	86,05
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.560.000,00	13.390.000,00	86,05
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	572.576.782,92	503.254.900,00	87,89
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	572.576.782,92	503.254.900,00	87,89
Total Anggaran Sasaran	110.363.931.302,92	100.486.154.678,25	91,05



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

Total Anggaran Tujuan	110.363.931.302,92	100.486.154.678,25	91,05

7) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Efisiensi pengelolaan APBD berarti penggunaan sumber daya yang ada dengan cara yang paling optimal. Efisiensi dapat ditingkatkan dengan mengurangi pemborosan dan penyalahgunaan anggaran, memperbaiki proses pengadaan barang dan jasa, serta meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap penggunaan anggaran oleh pemerintah. Efisiensi dalam penggunaan dana publik menjadi salah satu indikator penting dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sumber daya yang terbatas. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD adalah dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan APBD di lapangan. Evaluasi ini meliputi pengukuran kinerja dan dampak program-program yang dibiayai oleh APBD. Dengan mengetahui kinerja dan dampak program-program tersebut, pemerintah dapat mengetahui apakah ada program yang tidak efisien atau tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

Efisiensi anggaran dalam konteks Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merujuk pada optimalisasi penggunaan dana atau alokasi anggaran untuk mencapai peningkatan IPM dengan biaya yang minimal. IPM adalah indikator yang mengukur kualitas hidup suatu negara berdasarkan tiga dimensi utama: kesehatan (harapan hidup), pendidikan (Rata-rata lama sekolah dan Umur harapan lama sekolah), dan standar hidup (pendapatan riil per kapita). Intervensi pemerintah Kabupaten Barru untuk pencapaian IPM ini didukung oleh pelaksanaan berbagai program/kegiatan sebagaimana yang telah dijelaskan pada analisis program/kegiatan yang menunjang pencapaian IPM.

Perhitungan tingkat efisiensi berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 sebagaimana rumus berikut :



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
PAKi : Pagu anggaran keluaran i
RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
CKi : Capaian keluaran i

Tingkat efisiensi pencapaian IPM kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut :

Tujua n	Sasar an	Indikat or Kinerja	Sa tua n	Kinerja			Anggaran			Tin gka t Efis ien si
				Ta rg et	Rea lisa si	Ca pai an %	Anggar an	Realisa si	%C apai an	
Menin gkatk an Kualit as Manu sia yang Cerdas		Indeks Pemba ngunan Manusi a	Poi n	75 ,2 2	75,4 1	100 ,25	110.363. 931.302, 92	100.486. 154.678, 25	91,0 5	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

s dan Sehat										
	Menin gkatn ya Mutu pendi dikan Masy arakat	Indeks Pendi kan	Poi n	71 ,0 2	67,9 9	95, 73	51.603.0 16.097,0 0	45.569.5 54.891,0 0	88,3 1	
		Nilai Litera si dan Num erasi Pada Rapo r Pend idika n	poi n	66 ,1 1	62,7 7	94, 95				
	Menin gkatn ya Deraj at Kese hatan masy arakat	Indeks Keseha tan	Poi n	77 ,5 1	81,8 2	105 ,56	58.760.9 15.205,9 2	54.916.5 99.787,2 5	93,4 6	
		Prevale nsi Stuntin g	%	19 ,5 0	16,7 1	85, 69				



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pembangunan pada tujuan *Meningkatkan Kualitas Manusia yang Cerdas dan Sehat*, secara umum penggunaan sumber daya APBD Kabupaten Barru Tahun 2025 menunjukkan tingkat efisiensi yang cukup baik. Hal ini terlihat dari capaian indikator kinerja yang sebagian besar mendekati bahkan melampaui target, sementara realisasi anggaran berada di bawah pagu yang telah ditetapkan.

Pada indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), target yang ditetapkan sebesar 75,22 poin dengan realisasi sebesar 75,41 poin atau mencapai 100,25%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Barru berhasil melampaui target yang direncanakan. Sementara itu, dari sisi anggaran, pagu sebesar Rp110.363.931.302,92 terealisasi sebesar Rp100.486.154.678,25 atau sebesar 91,05%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja yang melebihi target dapat diraih dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari yang direncanakan, sehingga dapat dikategorikan sebagai penggunaan sumber daya yang efisien.

Selanjutnya pada sasaran Meningkatnya Mutu Pendidikan Masyarakat, indikator Indeks Pendidikan menunjukkan target sebesar 71,02 poin dengan realisasi sebesar 67,99 poin atau capaian 95,73%. Walaupun target belum sepenuhnya tercapai, penggunaan anggaran menunjukkan tingkat efisiensi dengan realisasi sebesar Rp45.569.554.891,00 dari pagu Rp51.603.016.097,00 atau sebesar 88,31%. Hal ini menggambarkan bahwa program dan kegiatan sektor pendidikan telah dilaksanakan dengan pengendalian anggaran yang cukup baik, namun masih diperlukan optimalisasi program untuk meningkatkan capaian indikator kinerja, khususnya peningkatan kualitas pembelajaran yang tercermin pada nilai literasi dan numerasi dalam Rapor Pendidikan yang juga masih berada di bawah target (94,95%).

Sementara itu pada sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, indikator Indeks Kesehatan menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan target sebesar 77,51 poin dan realisasi mencapai



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

81,82 poin atau 105,56%. Capaian ini didukung oleh penggunaan anggaran yang relatif efisien, dimana dari alokasi sebesar Rp58.760.915.205,92 terealisasi Rp54.916.599.787,25 atau sebesar 93,46%. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa program kesehatan, termasuk upaya penurunan prevalensi stunting yang tercatat sebesar 16,71% dari target 19,50%, memberikan dampak positif terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Secara keseluruhan, efisiensi penggunaan APBD pada tujuan pembangunan kualitas manusia di Kabupaten Barru Tahun 2025 dapat dinilai cukup efektif. Hal ini tercermin dari keseimbangan antara capaian kinerja yang relatif tinggi dengan tingkat penyerapan anggaran yang terkendali. Meskipun demikian, beberapa indikator khususnya pada sektor pendidikan masih memerlukan penguatan intervensi program agar capaian kinerja dapat lebih optimal sejalan dengan efisiensi penggunaan anggaran yang telah dicapai.



**MISI 3 : MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN INFRASTRUKTUR
DAN WILAYAH YANG BERKETAHANAN IKLIM**

**TUJUAN 3 : MENINGKATNYA DAYA SAING INFRASTRUKTUR YANG
BERKELANJUTAN DAN WILAYAH YANG BERKETAHANAN
TERHADAP BENCANA**

Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur Yang Berkelanjutan Dan Wilayah Yang Berketahanan Terhadap Bencana diukur dengan Indeks daya saing pilar infrastruktur dimana komponen dari Indeks daya saing daerah (IDSD) yang mengukur kualitas dan ketersediaan infrasturktur sebagai faktor pendukung utama dalam meningkatkan daya saing suatu daerah dan Indeks Risiko Bencana dimana Indeks risiko bencana (IRBI) yang merupakan ukuran komposit yang digunakan untuk menilai potensi risiko bencana di suatu wilayah (kabupaten/kota/provinsi). Indeks ini dihitung berdasarkan interaksi antara tiga komponen utama:

1. Bahaya (Hazard) – frekuensi dan intensitas potensi kejadian bencana.
2. Kerentanan (Vulnerability) – tingkat paparan penduduk, ekonomi, dan lingkungan terhadap bahaya tersebut.
3. Kapasitas (Capacity) – kemampuan daerah dalam mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanggulangan bencana

Mengarahkan perwujudan suatu kondisi di mana pembangunan infrastruktur terlaksana dengan memperhatikan dampak lingkungan, yang mengandung makna bahwa memanfaatkan sumber daya secara efisien, ekosistem alami terjaga dan dikelola secara berkelanjutan, berketahanan terhadap bencana namun tetap membangun infrastruktur baru berdasarkan potensi dan daya dukung wilayah yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat.

Adapun sasaran strategis dari tujuan ini adalah :

SASARAN 3.1 : MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR

Indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran adalah **Indeks Infrastruktur Daerah**



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

SINGGAH
di BARRU!

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target indikator adalah sebagai berikut:

Indeks Infrastruktur Daerah (IID) merupakan ukuran komposit yang digunakan untuk menilai capaian kualitas pembangunan infrastruktur Kabupaten Barru. Indeks ini dihitung berdasarkan :

1. Tingkat Kemantapan Jalan (%)
2. Rasio Konektivitas (%)
3. Persentase rumah layak huni (%)
4. Persentase RT terlayani akses air minum aman (%)
5. Persentase RT terlayani sanitasi layak (%)
6. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dulayani oleh jaringan irigasi (%)

1. Analisis Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja indikator “Indeks Infrastruktur Daerah” pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Wilayah yang berketahanan terhadap Bencana		Indeks Daya saing Pilar Infrastruktur	Poin	3,995	4,03	100,88	Sangat Tinggi	BRIN
		Indeks Resiko Bencana	poin	136,41	153,59	88,81	Tinggi	BNBP
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur Daerah	%	55	52,5	95,45	Sangat Tinggi	Bapperida

Indikator kinerja tujuan Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Wilayah yang berketahanan terhadap Bencana. Realisasi capaian indeks daya saing pilar infrastruktur dengan target tahun 2025 sebesar 3,995 dengan realisasi 4,030 dan indeks resiko bencana target tahun 2025 sebesar 136,41 dengan realisasi 153,59. Adapun untuk realisasi indikator kinerja untuk Indeks Infrastruktur Daerah pada tahun 2025 sebesar 52,5 persen dari target sebesar 55 persen. Realisasi indikator kinerja Indeks Infrastruktur Daerah berdasarkan data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat ketercapaiannya sebesar 95,45% dan masuk kategori capaian sangat tinggi.



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dan beberapa tahun terakhir;

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja indikator “Indeks Infrastruktur Daerah” tahun 2025 dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	2024		2025		
					Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Wilayah yang berketahanan terhadap Bencana		Indeks Daya saing Pilar Infrastruktur	Poin	-	-	-	3,995	4,03	100,88
		Indeks Resiko Bencana	poin	-	-	-	136,41	153,59	88,81
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur Daerah	%	-	-	-	55	52,5	95,45

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya belum bisa dilakukan karena untuk indikator kinerja tujuan dan sasaran sebelumnya karena merupakan produk RPJMD periode baru.

3. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja sampai dengan tahun ini dengan target RPJMD;

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari indikator “Indeks Infrastruktur Daerah” sampai tahun 2025 dengan target RPJMD 2025 - 2030 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target (2030)	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Wilayah yang berketahanan terhadap Bencana		Indeks Daya saing Pilar Infrastruktur	Poin	4,03	4,20	95,95%
		Indeks Resiko Bencana	poin	153,59	99,00	64,46%



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur Daerah	%	52,5	65,78	79,81%

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 untuk indikator kinerja utama indeks daya saing pilar infrastruktur belum mencapai target RPJMD yaitu sebesar 4,03 dibandingkan dengan target dalam RPJMD sebesar 4,20. Capaian kinerja tahun ini jika disandingkan dengan target RPJMD sampai dengan tahun 2030 yakni sebesar 95,95 persen. Sementara indeks risiko bencana yang belum mencapai target RPJMD yaitu sebesar 153,59 dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 99,00. Capaian kinerja tahun ini jika disandingkan dengan target RPJMD sampai dengan tahun 2030 yakni 64,46% Sementara untuk pencapaian realisasi kinerja indikator kinerja sasaran Indeks Infrastruktur Daerah sampai dengan tahun 2025 belum mencapai target RPJMD yaitu sebesar 52,5% dibandingkan dengan target dalam RPJMD sebesar 53,86%. Capaian kinerja tahun ini jika disandingkan dengan target RPJMD sampai dengan tahun 2026 yakni sebesar 79,81%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari indikator “Indeks Infrastruktur Daerah” Tahun 2025 dengan Realisasi nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Provinsi Tahun 2025	Capaian Kabupaten terhadap realisasi Provinsi	Realisasi Nasional Tahun 2025	Capaian Kabupaten terhadap realisasi nasional
Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Wilayah yang berketahanan terhadap Bencana		Indeks Daya saing Pilar Infrastruktur	Poin	4,03	3,85	104,67	3,37	119,58
		Indeks Risiko Bencana	poin	153,59	148,05	103,74	39,8	385,91



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur Daerah	%	52,5	-	-	-	-

Realisasi indikator kinerja indeks infrastruktur daerah pada tahun 2025 sebesar 52,5% persen tidak dapat disandingkan dengan nilai capaian nasional dan provinsi Sulawesi Selatan, karena untuk Indeks Infrastruktur Daerah tidak dihitung oleh Provinsi Sulsel dan Nasional, yang bisa disandingkan adalah nilai Indeks Daya Saing Pilar Infrastruktur. Untuk Capaian Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur, capaian Kabupaten Barru lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian Nasional dan Provinsi Sulsel, dengan presentase capaian terhadap nasional sebesar 119,58% dan persentase capaian terhadap provinsi Sulsel sebesar 104,67%.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Indikator kinerja “Indeks Infrastruktur Daerah” diperoleh dari pelaksanaan 7 (Tujuh) Program Prioritas seperti yang dicantumkan pada tabel berikut ini:

Program	Anggaran		Capaian
	Pagu	Realisasi	
TUJUAN : Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Wilayah yang berketahanan terhadap Bencana			
SASARAN : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur			
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	52.462.491.842,04	41.130.119.975,00	78,40%
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	6.263.573.821,00	4.422.576.901,00	70,61%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.508.992.002,35	1.287.350.650,00	85,31%
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	27.208.817.806,00	22.748.448.028,00	83,61%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.021.939.500,00	333.641.285,00	32,65%
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	5.713.760.363,00	4.569.473.765,00	79,97%
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.702.926.950,00	1.401.480.995,00	82,30%



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

JUMLAH	95.882.502.284,39	75.893.091.599,00	79,15%

Seluruh program diatas ditujukan untuk mencapai indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Barru Periode Tahun 2025 – 2029 dengan target yang sudah ditetapkan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu Program untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar dengan kata lain persentase capaian sasaran “sama atau lebih tinggi” dari capaian input (realisasi anggarannya). Rumus yang digunakan adalah:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi
PAKi : Pagu anggaran keluaran i
RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
CKi : Capaian keluaran i

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran dalam pencapaian indikator kinerja indeks infrastruktur daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tujuan	Sasaran	Indikat or Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Wilayah yang berketahanan terhadap Bencana		Indeks Daya saing Pilar Infrastruktur	Poin	3,995	4,03	100,88	98.882.502.284,39	75.893.091.599,00	76,75	99,24
		Indeks Resiko Bencana	poin	136,41	153,59	88,81				
	Meningkatnya Kualitas	Indeks Infrastru	%	55	52,5	95,45	98.882.502.284,39	75.893.091.599,00	76,75	99,20



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

	Infrastruktur	ktur Daerah								

Dari tabel perhitungan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya diatas menunjukkan bahwa anggaran yang digunakan untuk peningkatan indeks infrastruktur daerah dinilai efisien. Kedepannya, Pemerintah Kabupaten Barru harus lebih memikirkan kegiatan-kegiatan yang harus mampu meningkatkan indeks infrastruktur daerah agar anggaran yang rencanakan dapat efektif mencapai indikator kinerja sasaran yang ditetapkan.

7. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Meskipun masuk dalam kategori sangat tinggi, realisasi IID 52,5% belum mencapai target yang ditetapkan 55%. Beberapa faktor penyebabnya antara lain :

1. Optimalisasi anggaran yang belum maksimal yang hanya mencapai 79,15%. Terdapat sisa anggaran sekitar 20% yang tidak terserap. Tidak terserapnya anggaran secara maksimal berdampak pada belum tuntasnya beberapa proyek fisik yang menjadi indikator penyusunan IID seperti kemantapan jalan maupun jaringan irigasi.
2. Kendala teknis dilapangan yang disebabkan administrasi dan faktor cuaca yang menghambat pekerjaan infrastruktur fisik atau fluktuasi harga material konstruksi yang menyebabkan beberapa kontrak harus mengalami penyusaian.

Berikut adalah beberapa alternatif solusi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barru untuk meningkatkan indeks infrastruktur daerah:

1. Percepatan penyerapan anggaran
Melakukan lelang dini untuk proyek-proyek infrastruktur strategis agar pengerjaan fisik tidak menumpuk diakhir tahun, sehingga realisasi anggaran bisa maksimal.
2. Peningkatan kolaborasi lintas sektor
Melakukan kolaborasi untuk capaian indikator yang membutuhkan kolaborasi antar dinas.

3. Mitigasi risiko bencana pada infrastruktur

Infrastruktur yang dibangun harus memiliki standar ketahanan bencana agar tidak terjadi kerusakan dini yang dapat menurunkan kualitas infrastruktur daerah dimasa depan.

SASARAN 3.2 : MENURUNNYA EMISI GRK

Indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran adalah **Penurunan Intensitas Emisi GRK**

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target indikator adalah sebagai berikut:

Penurunan Intensitas Gas Rumah Kaca (GRK) secara operasional mengacu pada pengurangan jumlah emisi GRK yang dihasilkan per unit output ekonomi atau aktivitas tertentu dalam suatu wilayah atau sektor selama periode waktu tertentu. Indeks ini dihitung berdasarkan :

Dengan Formulasi : $(\text{Intensitas GRK pada periode awal} - \text{Intensitas GRK pada periode akhir}) \div \text{Intensitas GRK pada periode awal} \times 100\%$

1. Analisis Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja indikator “Penurunan intensitas emisi GRK” pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
Meningkatkan Daya Saing Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Wilayah yang berketahanan terhadap Bencana		Indeks Daya saing Pilar Infrastruktur	Poin	3,995	4,03	100,88	Sangat Tinggi	BRIN
		Indeks Resiko Bencana	poin	136,41	153,59	88,81	Tinggi	BNBP
	Menurunnya emisi GRK	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	36,56	34,51	94,39	Sangat Tinggi	Kementrian LH/Bappalitbangda Prov Sulsel



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

Realisasi indikator kinerja untuk penurunan intensitas emisi GRK pada tahun 2025 sebesar 34,51 persen dari target sebesar 36,56 persen. Realisasi indikator kinerja Penurunan intensitas emisi GRK berdasarkan data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat ketercapaiannya sebesar 94,39% dan masuk kategori capaian sangat tinggi.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dan beberapa tahun terakhir;

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja indikator “Penurunan intensitas emisi GRK” tahun 2025 dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2024			2025		
				Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Wilayah yang berketahanan terhadap Bencana		Indeks Daya saing Pilar Infrastruktur	Poin	-	-	-	3,995	4,03	100,88
		Indeks Resiko Bencana	poin	-	-	-	136,41	153,59	88,81
	Menurunnya emisi GRK	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	-	-	-	36,56	34,51	94,39

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya belum bisa dilakukan karena untuk indikator kinerja tujuan dan sasaran sebelumnya karena merupakan produk RPJMD periode baru.

3. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja sampai dengan tahun ini dengan target RPJMD;

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari indikator “Penurunan intensitas emisi GRK” sampai tahun 2025 dengan target RPJMD 2025 - 2030 dapat dilihat pada tabel berikut ini :



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target (2030)	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Wilayah yang berketahanan terhadap Bencana		Indeks Daya saing Pilar Infrastruktur	Poin	4,03	4,20	95,95%
		Indeks Resiko Bencana	poin	153,59	99,00	64,46%
	Menurunnya emisi GRK	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	34,51	53,15	64,93%

Berdasarkan tabel diatas pencapaian realisasi kinerja indikator kinerja sasaran Penurunan intensitas emisi GRK sampai dengan tahun 2025 belum mencapai target RPJMD yaitu sebesar 34,51% dibandingkan dengan target dalam RPJMD sebesar 53,15%. Capaian kinerja tahun ini jika disandingkan dengan target RPJMD sampai dengan tahun 2026 yakni sebesar 64,93%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari indikator “Penurunan intensitas emisi GRK” Tahun 2025 dengan Realisasi nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Provinsi Tahun 2025	Capaian Kabupaten terhadap realisasi Provinsi	Realisasi Nasional Tahun 2025	Capaian Kabupaten terhadap realisasi nasional
Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Wilayah yang berketahanan terhadap Bencana		Indeks Daya saing Pilar Infrastruktur	Poin	4,03	3,85	104,67	3,37	119,58
		Indeks Resiko Bencana	poin	153,59	148,05	103,74	39,8	385,91
	Menurunnya emisi GRK	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	34,51	-	-	26,67	129,39

Realisasi indikator kinerja Penurunan Intensitas Emisi GRK pada tahun 2025 sebesar 34,51% persen tidak dapat disandingkan dengan nilai capaian provinsi Sulawesi Selatan karena belum dirilis capaiannya, sementara jika disandingkan dengan capaian Nasional lebih tinggi dengan presentase capaian terhadap nasional sebesar 129,39%.



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Indikator kinerja “Penurunan intensitas emisi GRK” diperoleh dari pelaksanaan 8 (Delapan) Program Prioritas seperti yang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Program	Anggaran		Capaian
	Pagu	Realisasi	
Tujuan : Meningkatkan Daya Saing Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Wilayah yang berketahanan terhadap Bencana			
Sasaran : Menurunnya Emisi GRK			
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	50.208.950	44.531.340	88,69%
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	45.149.900	29.152.650	64,57%
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	17.439.500	16.678.000	95,63%
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4.219.002.632	4.089.680.681	96,93%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	13.977.500	13.797.500	98,71%
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	9.951.000	9.811.500	98,60%
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	24.254.000	23.251.250	95,87%
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	143.316.500	142.103.014	99,15%
Total	4.523.299.982	4.369.005.935	96,59%

Seluruh program diatas ditujukan untuk mencapai indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Barru Periode Tahun 2025 – 2029 dengan target yang sudah ditetapkan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya;

Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu Program untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar dengan kata lain persentase capaian sasaran “sama atau lebih tinggi” dari capaian input (realisasi anggarannya). Rumus yang digunakan adalah:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi
PAK_i : Pagu anggaran keluaran i
RAK_i : Realisasi anggaran keluaran i
CK_i : Capaian keluaran i

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran dalam pencapaian indikator kinerja Penurunan intensitas emisi GRK dapat dilihat pada tabel berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Wilayah yang berketahanan terhadap Bencana		Indeks Daya saing Pilar Infrastruktur	Poin	3,995	4,03	100,88	4.523.299,982	4.369.005.935	96,59	99,04
		Indeks Resiko Bencana	poin	136,41	153,59	88,81				
	Menurunnya emisi GRK	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	36,56	34,51	94,39	4.523.299,982	4.369.005.935	96,59	98,98

Dari tabel perhitungan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya diatas menunjukkan bahwa anggaran yang digunakan untuk penurunan intensitas



emisi GRK dinilai efisien. Kedepannya, Pemerintah Kabupaten Barru harus lebih memikirkan kegiatan–kegiatan yang harus mampu menurunkan intensitas emisi GRK agar anggaran yang rencanakan dapat efektif mencapai indikator kinerja sasaran yang ditetapkan.

7. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Penurunan intensitas emisi GRK untuk memperlihatkan sinergitas antara upaya penurunan emisi dengan pertumbuhan ekonomi. Dari sektor-sektor tersebut yang paling signifikan berperan dalam peningkatan emisi adalah pada sektor kehutanan dan sektor energi. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya kegiatan alih fungsi hutan menjadi Kawasan non hutan seperti pemukiman, area pertanian dan Perkebunan. Pada sektor energi, kontributor terbesar penghasil emisi GRK yang tercakup pada inventarisasi GRK di Kabupaten Barru adalah kegiatan pembakaran bahan bakar fosil untuk kebutuhan transportasi. Adapun penyebab kegagalan dalam penurunan intensitas emisi GRK diuraikan sebagai berikut :

1. Keterbatasan Integrasi Kebijakan dan Perencanaan; Belum adanya petunjuk teknis terkait penurunan emisi GRK yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah yang menyebabkan implementasi aksi mitigasi tidak berjalan secara sistematis dan terarah. Hal ini berdampak pada lemahnya sinergi lintas sektor.
2. Rendahnya Implementasi Program Mitigasi; Program-program yang berkontribusi terhadap penurunan emisi, seperti pengelolaan sampah berkelanjutan, energi terbarukan, dan efisiensi energi, belum berjalan maksimal.
3. Keterbatasan Anggaran dan Pembiayaan Hijau; Alokasi anggaran untuk program berbasis lingkungan dan mitigasi perubahan iklim masih terbatas. Selain itu, belum optimalnya pemanfaatan skema pembiayaan alternatif seperti green financing, CSR, atau kerja sama dengan pihak swasta turut menghambat pencapaian target.



4. Lemahnya Sistem Data dan Monitoring Emisi; Ketersediaan data emisi GRK yang akurat dan terintegrasi masih menjadi kendala. Sistem Monitoring, Reporting, and Verification (MRV) belum berjalan optimal, sehingga sulit mengukur capaian penurunan emisi secara tepat.
5. Aktivitas Sektor Penyumbang Emisi yang Masih Tinggi, diantaranya : Transportasi (peningkatan jumlah kendaraan bermotor), Pengelolaan limbah (pembakaran terbuka dan TPA belum ramah lingkungan), Pertanian dan peternakan (emisi metana) masih menunjukkan tren peningkatan yang belum diimbangi dengan kebijakan pengendalian yang efektif.
6. Rendahnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat; Perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, seperti kebiasaan membakar sampah dan penggunaan energi yang tidak efisien, masih menjadi tantangan. Program edukasi dan kampanye perubahan perilaku belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
7. Keterbatasan Kapasitas Kelembagaan dan SDM; SDM yang memiliki kompetensi di bidang perubahan iklim dan penghitungan emisi GRK masih terbatas. Selain itu, koordinasi antar OPD dalam pelaksanaan aksi mitigasi belum optimal.

Berikut adalah beberapa alternatif solusi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barru untuk menurunkan intensitas emisi GRK:

1. Penerapan pertanian ramah lingkungan, seperti Sistem Pertanian Organik
2. Pengurangan penggunaan pupuk kimia dan pestisida sintetis, yang berkontribusi terhadap emisi N_2O
3. Pemanfaatan limbah pertanian sebagai pupuk kompos untuk mengurangi emisi metana (CH_4) dari limbah organik
4. Pemberdayaan masyarakat adat/lokal dalam menjaga kawasan hutan melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) Pembangunan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) skala kecil di desa-desa terpencil seperti di Kecamatan Tanete Riaja dan Pujananting

5. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui program bank sampah dan 3R (Reduce, Reuse, Recycle)

SASARAN 3.3 : MENINGKATNYA KUALITAS MANAJEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran adalah **Indeks Ketahanan Daerah**

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target indikator adalah sebagai berikut:

Indeks Ketahanan Daerah adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu daerah dalam menghadapi, mengelola, dan pulih dari berbagai tantangan dan ancaman, baik yang bersifat sosial, ekonomi, lingkungan, maupun bencana.

1. Analisis Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja indikator “Indeks Ketahanan Daerah” pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Wilayah yang berketahanan terhadap Bencana		Indeks Daya saing Pilar Infrastruktur	Poin	3,995	4,03	100,88	Sangat Tinggi	BRIN
		Indeks Resiko Bencana	poin	136,41	153,59	88,81	Tinggi	BNBP
	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,53	0,44	83,02	Tinggi	BNBP

Realisasi indikator kinerja untuk peningkatan indeks ketahanan daerah pada tahun 2025 sebesar 0,44 poin dari target sebesar 0,53 poin. Realisasi indikator kinerja Indeks ketahanan daerah berdasarkan data tersebut di atas



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

dapat disimpulkan bahwa tingkat ketercapaiannya sebesar 83,02% dan masuk kategori capaian tinggi.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dan beberapa tahun terakhir;

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja indikator “Indeks Ketahanan Daerah” tahun 2025 dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2024			2025		
				Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Wilayah yang berketahanan terhadap Bencana		Indeks Daya saing Pilar Infrastruktur	Poin	-	-	-	3,995	4,03	100,88
		Indeks Resiko Bencana	poin	-	-	-	136,41	153,59	88,81
	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	-	-	-	0,53	0,44	83,02

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya belum bisa dilakukan karena untuk indikator kinerja tujuan dan sasaran sebelumnya karena merupakan produk RPJMD periode baru.

3. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja sampai dengan tahun ini dengan target RPJMD;

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari indikator “Indeks Ketahanan Daerah” sampai tahun 2025 dengan target RPJMD 2025 - 2030 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target (2030)	Tingkat Kemajuan



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Wilayah yang berketahanan terhadap Bencana		Indeks Daya saing Pilar Infrastruktur	Poin	4,03	4,20	95,95%
		Indeks Resiko Bencana	Poin	153,59	99,00	64,46%
	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,44	0,61	72,13%

Berdasarkan tabel diatas pencapaian realisasi kinerja indikator kinerja sasaran indeks ketahanan daerah sampai dengan tahun 2025 belum mencapai target RPJMD yaitu sebesar 0,44 dibandingkan dengan target dalam RPJMD sebesar 0,61. Capaian kinerja tahun ini jika disandingkan dengan target RPJMD sampai dengan tahun 2026 yakni sebesar 72,13%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari indikator “Indeks Ketahanan Daerah” Tahun 2025 dengan Realisasi nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Provinsi Tahun 2025	Capaian Kabupaten terhadap realisasi Provinsi	Realisasi Nasional Tahun 2025	Capaian Kabupaten terhadap realisasi nasional
Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Wilayah yang berketahanan terhadap Bencana		Indeks Daya saing Pilar Infrastruktur	Poin	4,03	3,85	104,67	3,37	119,58
		Indeks Resiko Bencana	poin	153,59	148,05	103,74	39,8	385,91
	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,44	-	-	-	-



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

Realisasi indikator kinerja indeks ketahanan daerah pada tahun 2025 sebesar 0,44 poin tidak dapat disandingkan dengan nilai capaian nasional dan provinsi Sulawesi Selatan, karena untuk ketahanan daerah capaian Provinsi Sulsel dan Nasional belum dihitung, yang bisa disandingkan adalah nilai Indeks Resiko Bencana. Untuk Capaian Indeks Indeks Resiko Bencana, capaian Kabupaten Barru lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian Nasional dan Provinsi Sulsel, dengan presentase capaian terhadap nasional sebesar 385,91% dan persentase capaian terhadap provinsi Sulsel sebesar 103,74%.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Indikator kinerja “Indeks Ketahanan Daerah” diperoleh dari pelaksanaan 2 (Dua) Program Prioritas seperti yang dicantumkan pada tabel berikut ini:

Program	Anggaran		Capaian
	Pagu	Realisasi	
Tujuan : Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Wilayah yang berketahanan terhadap Bencana			
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana			
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	752.746.060	716.946.005	95,24%
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.252.612.000	1.232.423.900	98,39%
Total	2.005.358.060	1.949.369.905	97,21%

Seluruh program diatas ditujukan untuk mencapai indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Barru Periode Tahun 2025 – 2029 dengan target yang sudah ditetapkan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya;

Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu Program untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar dengan kata lain persentase capaian sasaran

“sama atau lebih tinggi” dari capaian input (realisasi anggarannya). Rumus yang digunakan adalah :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi
PAK_i : Pagu anggaran keluaran i
RAK_i : Realisasi anggaran keluaran i
CK_i : Capaian keluaran i

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran dalam pencapaian indikator kinerja Penurunan intensitas emisi GRK dapat dilihat pada tabel berikut.

Tujuan	Sasaran	Indikator or Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Wilayah yang berketahanan terhadap Bencana		Indeks Daya saing Pilar Infrastruktur	Poin	3,995	4,03	100,88	2.005.358.060	1.949.369.905	97,21	99,04
		Indeks Resiko Bencana	poin	136,41	153,59	88,81				
	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,53	0,44	83,02	2.005.358.060	1.949.369.905	97,21	98,83

Dari tabel perhitungan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya diatas menunjukkan bahwa anggaran yang digunakan untuk peningkatan indeks ketahanan daerah dinilai efisien. Kedepannya, Pemerintah Kabupaten Barru harus lebih memikirkan kegiatan-kegiatan yang harus mampu meningkatkan indeks ketahanan daerah agar anggaran yang rencanakan dapat efektif mencapai indikator kinerja sasaran yang ditetapkan.



7. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Walaupun penyerapan anggaran sudah optimal sebesar 97,21% namun realisasi IKD sebesar 0,44 masih dibawah target 0,53, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor :

1. Realisasi Indeks Risiko Bencana yang melonjak ke angka 153,59 (dari target 136,41) memberikan tekanan besar pada kapasitas daerah. Ancaman bencana meningkat lebih cepat dari pada kecepatan pembangunan infrastruktur berbasis mitigasi bencana, maka nilai IKD akan terkoreksi turun.
2. Fokus anggaran masih pada pemulihan bukan pencegahan.

Berikut adalah beberapa alternatif solusi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barru untuk meningkatkan indeks ketahanan daerah:

1. Penguatan regulasi dan kelembagaan.
2. Memastikan pembangunan infrastruktur fisik (jalan/jembatan) yang berketahanan iklim.

Meningkatkan kualitas program desa tangguh bencana.



MISI 4 : Meningkatkan Good Governance Yang Bernafaskan Keagamaan

TUJUAN : Meningkatnya Integritas Tata Kelola Pemerintahan

SASARAN : Meningkatnya kualitas birokrasi yang responsif, adaptif, kolaboratif

Analisis pencapaian Sasaran “Meningkatnya kualitas birokrasi yang responsif, adaptif, kolaboratif” dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran kinerja “Meningkatnya kualitas birokrasi yang responsif, adaptif, kolaboratif” diukur melalui dua indikator kinerja, yaitu Nilai SAKIP dan Indeks Pelayanan Publik, Indeks Pemerintahan Digital dan Maturitas SPIP.

1. Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, atau disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

2. Indeks Pelayanan Publik

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan PermenPAN RB No.17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana,



Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

3. Indeks Pemerintahan Digital

Indeks Pemerintahan Digital (IPD) adalah alat ukur transformasi digital pemerintah yang berevolusi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), berfokus pada integrasi layanan, keamanan siber, dan kepuasan publik. Mulai 2026, indeks ini menggantikan SPBE dengan fokus lebih tinggi pada layanan digital yang berpusat pada pengguna (*user-centric*) dan *interoperabilitas* data nasional.

Pemerintah secara resmi melakukan migrasi dari Indeks SPBE menjadi Indeks Pemerintahan Digital mulai tahun 2025/2026. Perubahan ini bertujuan untuk:

- **Melampaui Digitalisasi:** Tidak sekadar mengubah layanan manual menjadi *online*, tetapi mengintegrasikan seluruh proses bisnis untuk menciptakan nilai bagi masyarakat.
- **Integrasi Layanan:** Fokus pada penggabungan ribuan aplikasi pemerintah yang terfragmentasi ke dalam platform terpadu seperti Portal Layanan Satu Pintu atau *Super-App*.
- **Manajemen Data:** Memperkuat tata kelola data melalui Pusat Data Nasional (PDN) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)

Berdasarkan kebijakan terbaru, fokus penguatan indeks ini mencakup:

- **Keamanan Informasi:** Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang lebih ketat untuk menjamin keandalan sistem.
- **Interoperabilitas:** Memastikan sistem antar instansi bisa saling "berbicara" atau bertukar data secara otomatis melalui SPLP.
- **Kepuasan Pengguna:** Mendesain ulang layanan dengan pendekatan *User Experience* (UX) agar lebih mudah digunakan oleh masyarakat.

4. Maturitas SPIP

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi:

- a. mekanisme penilaian;
- b. fokus penilaian;
- c. komponen penilaian; dan
- d. periode yang dinilai.

Penyelenggaraan SPIP diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang mencakup peningkatan kapabilitas APIP, pengelolaan risiko, dan pengendalian korupsi sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Hasil Evaluasi menunjukkan penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Barru telah memberikan keyakinan memadai dalam mendukung pencapaian tujuan dimana Pemerintah Kabupaten Barru mampu mendefinisikan kinerja dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya relevan dan terintegrasi namun pengendalian yang dibangun dan dikembangkan belum efektif dalam memberikan keyakinan yang memadai atas ketercapaian tujuannya.

1. Analisis target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran “Meningkatnya kualitas birokrasi yang responsif, adaptif, kolaboratif” Tahun 2025.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
1	Nilai SAKIP	Poin	62,83	62,57	99,59%
2	Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,01	3,02	75,31%



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

3	Indeks Pemerintahan Digital	Poin	0	0	0,00%
4	Maturitas SPIP	Level	3	3	100,00%
Rata-Rata Capaian					68,72%

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025, diuraikan sebagai berikut:

- c. Realisasi indikator kinerja “Nilai SAKIP” tahun 2025 sebesar 99,59 Persen dari target nilai yang tercantum dalam dokumen Perencanaan dengan capaian nilai 62,57 Poin dan belum mampu memenuhi Target RPJMD dengan target sebesar 62,83 Poin. Nilai SAKIP diperoleh berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/37/AA.01/2025 Tanggal 14 November 2025 Tentang Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Hasil Evaluasi Penilaian Sakip Kabupaten Barru Tahun 2025

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI
			2025
1	Perencanaan Kinerja	30	23,06
2	Pengukuran Kinerja	30	16,11
3	Pelaporan Kinerja	15	10,09
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	13,31
	Nilai Hasil Evaluasi	100	62,57
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Berdasarkan Tabel diatas, capaian nilai SAKIP Kabupaten Barru untuk Tahun 2025 berada pada predikat nilai “B” namun belum mencapai target nilai SAKIP pada RPJMD untuk tahun 2025. Target nilai SAKIP pada tahun 2025 yaitu 62,83 Poin sementara capaian nilai SAKIP yaitu 62,57 Poin. Sehingga capaian nilai



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

SAKIP Kabupaten Barru tahun 2025 terhadap target kinerja pada tahun 2025 adalah 99,59 % dari Target.

- d. Realisasi indikator kinerja “Indeks Pelayanan Publik” tahun 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kementerian, Lembaga, Dan Daerah Tahun 2025 sebesar 3,02 Poin dengan predikat B- dan belum mencapai target sebesar 4,01 Poin yang ditetapkan dalam RPJMD dengan capaian kinerja 75,31%.

NO	Nama Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Capaian 2025	Persentase
1	Indeks Pelayanan Publik	4,01	3,02	75,31%

Pencapaian Indeks Pelayanan Publik dinilai berdasarkan penilaian evaluasi terhadap unit-unit penyelenggara pelayanan publik di lingkup Pemerintahan Kabupaten Barru dengan 2 Unit Lokus yang ditetapkan oleh Kementerian PAN RB dan 17 unit lokus yang dilakukan penilaian secara mandiri oleh Pemerintah Kabupaten Barru dengan rincian nilai sebagai berikut:

❖ Hasil Penilaian IPP Unit Lokus Nasional

NO	Unit Lokus Nasional	F03	F02	Rata Rata
1	Dinas Pendidikan	4,34	1,94	3,14
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4,87	4,74	4,81

❖ Hasil Penilaian IPP Unit Lokus Mandiri



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

NO	Unit Lokus Mandiri	F02
1	Dinas Sosial	2,73
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4,05
3	Dinas Kesehatan	2,8
4	RSUD La Patarai	4,36
5	UPT Puskesmas Padongko	3,2
6	UPT Puskesmas Bojo Baru	2,88
7	UPT Puskesmas Pekkae	3,23
8	UPT Puskesmas Pancana	3
9	UPT Puskesmas Pujananting	3,53
10	UPT Puskesmas Doi-Doi	2,7
11	UPT Puskesmas Palanro	2,37
12	UPT Puskesmas Mangkoso	2,68
13	UPT Puskesmas Madello	2,77
14	UPT Puskesmas Lisu	4,04
15	UPT Puskesmas Palakka	3,31
16	UPT Puskesmas Ralla	2,6
17	UPT Metrologi Legal	1,89

Dari Hasil penilaian evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian PANRB melalui aplikasi evaluasi.menpan.go.id Pemerintah Kabupaten Barru secara umum mendapatkan nilai 3,02 dengan predikat B-. IPP Kabupaten Barru yang ditargetkan dalam Dokumen RPJMD 2025-2029 adalah 4,01. Sehingga realisasi kinerja tahun 2025 belum mampu memenuhi target kinerja pada tahun 2025.

- e. Realisasi indikator kinerja “Indeks Pemerintahan Digital” tahun 2025 masih bernilai 0, hal ini disebabkan karena Indikator Indeks Pemerintahan Digital pada Dokumen Perencanaan RPJMD 2021-2026 belum ada dan belum pernah dilakukan penilaian, namun pada Dokumen RPJMD 2025-2029 indikator Indeks Pemerintahan Digital merupakan salah satu indikator kinerja yang



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

dilaksanakan dan Pemerintah Kabupaten Barru pada tahun 2025 belum dilakukan penilaian sehingga capaian indikator Indeks Pemerintahan Digital masih bernilai 0.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
1	Indeks Pemerintahan Digital	Poin	0	0	0,00%

- f. Realisasi indikator kinerja “Maturitas SPIP” tahun 2025 berdasarkan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : PE.09.03/LHP-671/PW21/3/2025 Hal Laporan Evaluasi Atas Hasil Penilaian Mandiri Dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 Pada Pemerintah Kabupaten Barru. Hasil evaluasi menunjukkan secara umum proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kabupaten Barru Tahun 2025 telah sesuai dengan langkah-langkah proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, sebagaimana ditetapkan dalam pedoman (Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D), sebagai berikut:

NOMOR	TAHAP	KESESUAIAN DENGAN STANDAR	BOBOT	NILAI	KETERANGAN
1	Persiapan	84,88%	20,00%	16,98%	
2	Pelaksanaan	94,12%	60,00%	54,67%	
3	pelaporan	87,22%	20,00%	17,44%	
Rata Rata Skor				88,74%	

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan pada tahun 2025, Nilai Maturitas SPIP pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Barru telah memenuhi target kinerja pada tahun 2025 sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan RPJMD tahun 2025-2029 yaitu dengan target



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

level 3, dan capaian Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Barru tahun 2025 adalah 3,091 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Level 3 (Terdefinisi) sehingga persentase capaian kinerja Maturitas SPIP Tahun 2025 adalah 100%.

2. Analisis Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran dengan Beberapa Tahun Terakhir

Analisis Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

N O	Indikator Kinerja	Satu an	2024			2025		
			Targ et	Capai an	Persent ase	Targ et	Capai an	Persent ase
1	Nilai SAKIP	Poin	70	61,42	87,74%	62,83	62,57	99,59%
2	Indeks Pelayanan Publik	Poin	4	3,48	87,00%	4,01	3,02	75,31%
3	Indeks Pemerintah Digital	Poin	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4	Maturitas SPIP	Level	3	3	100%	3	3	100%
Rata Rata Capaian					68,69%			68,72%

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam beberapa tahun terakhir capaian kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025 secara keseluruhan belum memenuhi target kinerja hanya indikator Maturitas SPIP yang memenuhi target 100 %.

a. Nilai SAKIP

Capaian Kinerja untuk Nilai SAKIP Tahun 2024 dan 2025 belum mampu memenuhi target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perencanaan. Tahun 2024 Target Kinerja nilai SAKIP yaitu nilai 70 dengan capaian 61,42 dengan persentase capaian 87,74% dan pada tahun 2025 dengan target nilai 62,83 berdasarkan dokumen RPJMD 2025-2029 dan capaian kinerja pada



tahun 2025 berada pada nilai 62,57 dengan persentase capaian kinerja 99,59 %. Capaian kinerja nilai SAKIP dari tahun 2024 hingga 2025 baik secara pencapaian nilai maupun persentase capaian mengalami kenaikan namun belum memenuhi target yang ditetapkan pada dokumen Perencanaan baik di tahun 2024 maupun tahun 2025.

b. Indeks Pelayanan Publik

Capaian indikator Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2024 dan 2025 belum memenuhi Target Kinerja yang di tetapkan pada dokumen Perencanaan. Indeks Pelayanan Publik pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Barru memperoleh nilai 3,48 dari target 4,00 atau dengan capaian 87%, sedangkan pada tahun 2025 memperoleh nilai 3,02 dari target 4,01 atau dengan capaian 75,31%. Capaian kinerja dari tahun 2024 ke tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 0,46 poin.

c. Indeks Pemerintahan Digital

Penilaian Indeks Pemerintahan Digital dari tahun 2024 hingga 2025 Pemerintah Kabupaten Barru belum pernah dilakukan serta belum pernah ditetapkan targetnya pada dokumen Perencanaan baik pada dokumen RPJMD 2021-2026 maupun pada dokumen RPJMD 2025-2029.

d. Maturitas SPIP

Penilaian Maturitas SPIP tahun 2024 hingga 2025 telah memenuhi target yang ditetapkan pada dokumen perencanaan, pada tahun 2024 dan 2025 target kinerja Maturitas SPIP yaitu level 3 dan capaian kinerja pada tahun 2024 dan 2025 juga telah mencapai level 3 atau capaian kinerja pada indikator Maturitas SPIP pemerintah kabupaten Barru 2024 dan 2025 adalah 100 % dari target yang ditetapkan.



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

3. Analisis realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran “Meningkatnya kualitas birokrasi yang responsif, adaptif, kolaboratif” sampai dengan tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah adalah sebagai berikut.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Jangka Menengah s.d. Tahun 2030	Realisasi Kinerja s.d. Tahun 2025	Capaian
1	Nilai SAKIP	Poin	78,04	62,57	80%
2	Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,291	3,02	70%
3	Indeks Pemerintahan Digital	Poin	1,8	0	0%
4	Maturitas SPIP	Poin	4	3	75%
Rata-Rata Capaian					56%

Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2025-2029, diuraikan sebagai berikut:

a. Nilai SAKIP

Realisasi kinerja Nilai SAKIP sampai dengan tahun 2030 dengan target jangka menengah Tahun 2030 capaian nilai SAKIP Kabupaten Barru berada pada nilai 80% dari target yang ditetapkan pada akhir periode RPJMD. maka untuk mencapai target RPJMD sampai dengan tahun 2030 sebagai periode akhir perencanaan jangka menengah sebesar 78,04 terdapat paling sedikit 15,47 poin yang harus dicapai selama periode perencanaan.



b. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik pada tahun 2025 memperoleh nilai sebesar 3,02 sementara target akhir periode dokumen perencanaan yaitu 4,291. Capaian nilai Indeks Pelayanan publik pada tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir periode perencanaan baru mencapai 70 % dari target yang telah ditetapkan.

c. Indeks Pemerintahan Digital

Target kinerja Indeks Pemerintahan Digital pada akhir periode dokumen Perencanaan adalah 1,8, sedangkan pencapaian nilai Indeks Pemerintahan Digital hingga tahun 2025 untuk Pemerintah Kabupaten Barru belum pernah dilakukan penilaian sehingga pencapaian Nilai Indeks Pemerintahan Digital sampai tahun 2025 belum ada atau masih berada pada nilai 0.

d. Maturitas SPIP

Capaian nilai Maturitas SPIP tahun 2025 yaitu level 3, sedangkan target akhir periode dokumen perencanaan yaitu level 4. Capaian nilai Maturitas SPIP pada tahun 2025 sudah mencapai 75% dari target yang ditetapkan pada akhir periode dokumen perencanaan.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Sasaran “Meningkatnya kualitas birokrasi yang responsif, adaptif, kolaboratif” sampai dengan tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dokumen Perencanaan RPJMD rata rata secara keseluruhan adalah 56%.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

Tidak terdapat Perbandingan Capaian dan realisasi kinerja dengan target atau standar Nasional.



5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

C. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

c) Indikator “Nilai SAKIP.

Berdasarkan hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Barru tahun 2025 capaian nilai SAKIP Kabupaten Barru tahun 2025 yang sudah mencapai nilai 62,57 dan berada pada kategori B. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “baik”, yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintahan daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perubahan dan komitmen dalam manajemen dan akuntabilitas kinerja.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Barru tahun 2024 sebagai berikut:

❖ **Perencanaan kinerja**

Capaian Nilai pada Komponen Perencanaan Kinerja telah menunjukkan perubahan dan mengalami sedikit kenaikan dari tahun 2024 dengan nilai 23,04 menjadi 23,06 pada tahun 2025 dari total nilai maksimal pada komponen ini sebesar 30 poin maksimal. Hal ini terlihat pada catatan hasil evaluasi SAKIP oleh Kementerian PAN RB seperti:

- Masih terdapat perencanaan Perangkat Daerah (PD) yang belum berorientasi hasil (outcome) dan belum sepenuhnya mencerminkan mandat atau tugas PD, antara lain:
 - Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan belum menetapkan kinerja yang mencerminkan kesiapsiagaan pemadam kebakaran maupun response time penyelamatan sebagai kinerja utama;

- Sasaran strategis “Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral” pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian masih belum berorientasi hasil
 - Masih ditemukan beberapa indikator yang belum memenuhi ditemukan beberapa kinerja yang kriteria belum memenuhi kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Bound (SMART) serta belum cukup dalam mengukur kinerja yang diharapkan, antara lain:
 - Indikator kinerja “Persentase atlet yang masuk pelatda” belum cukup menggambarkan keberhasilan sasaran “Meningkatnya kualitas pembibitan dan pembinaan olahraga” pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga;
 - Indikator kinerja “Persentase penurunan korban meninggal dan hilang akibat bencana” belum sepenuhnya mencerminkan pencapaian kinerja “Meningkatnya ketangguhan bencana” pada RPJMD Pemerintah Daerah;
 - Pohon kinerja yang disusun pada tingkat Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah belum memenuhi prinsip penyusunan pohon kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021, khususnya dalam hubungan logis antar level kinerja, serta penjabaran kondisi antara (intermediate outcome) dan Critical Success Factor (CSF) yang memadai.
- ❖ **Pengukuran Kinerja**
- Pada Komponen Pengukuran Kinerja nilai capaian nilainya juga mengalami kenaikan dari 15,92 pada tahun 2024 menjadi 16,11 pada tahun 2025 dari nilai maksimal poin 30. Adapun catatan hasil evaluasi pada pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:
- Masih ditemukan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Perangkat Daerah (PD) yang belum selaras dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti Perjanjian Kinerja (PK) dan Renstra,



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

sehingga dokumen IKU belum dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar pengukuran kinerja

- IKU Perangkat Daerah yang telah disusun umumnya sudah dilengkapi dengan formulasi dan sumber data. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator dengan formulasi yang belum tepat untuk mengukur kinerja yang diharapkan, contoh pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Indikator:

Persentase pelaku usaha yang tertib usaha” yang dihitung berdasarkan jumlah alat UTTP yang bertanda tera berlaku;

Indikator

Indikator kerajinan “Persentase industri dan pengolahan yang berbasis teknologi” yang dihitung berdasarkan jumlah kelompok pengrajin yang menerima bantuan Pemerintah Daerah;

- Pelaksanaan evaluasi secara berkala telah dilakukan pada tingkat Perangkat Daerah Kabupaten melalui dan tingkat kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) rencana aksi setiap triwulan. Namun demikian, pelaksanaan monev belum didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi, serta monev atas rencana aksi belum disertai dengan analisis hambatan dan faktor pendukung kinerja, sehingga belum optimal dimanfaatkan sebagai sarana dialog kinerja.

❖ Pelaporan Kinerja

Komponen Pelaporan Kinerja tahun 2024 dengan tahun 2025 tidak mengalami kenaikan dan penurunan nilai yaitu berada pada nilai 10,09 dari 15 poin maksimal yang bisa dicapai pada komponen penilaian pelaporan kinerja hal ini tertuang dalam hasil evaluasi Kementerian PANRB Pemerintah Daerah Kabupaten Barru telah menyusun laporan kinerja, baik pada tingkat Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah. Namun demikian, kualitas Laporan Kinerja (LAKIP) Pemerintah Daerah

dan Perangkat Daerah masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih ditemukannya data kinerja yang tidak sinkron antar tabel, sehingga informasi kinerja yang disajikan kurang andal, serta belum dilakukannya perbandingan realisasi kinerja dengan capaian regional maupun nasional. Selain itu, analisis keberhasilan dan kegagalan kinerja, serta faktor pendukung dan hambatan, belum disajikan secara komprehensif untuk menggambarkan kondisi nyata yang dihadapi organisasi maupun unit kerja sebagai dasar perbaikan dan perumusan solusi ke depan. Pemanfaatan LAKIP, baik pada tingkat Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah, belum optimal. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya penetapan target kinerja tahun berjalan yang lebih rendah dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya, sehingga belum mencerminkan pemanfaatan laporan kinerja sebagai dasar perencanaan dan belum menunjukkan penetapan target kinerja menantang (challenging).

❖ **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Perolehan nilai pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal juga mengalami kenaikan dari tahun 2024 dengan nilai 12,37 menjadi 13,31 pada tahun 2025 dengan nilai maksimal yang bisa dicapai adalah 25 poin. Berikut catatan hasil penilaian Kementerian PANRB:

- Laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum memuat rekomendasi yang memadai dan belum secara langsung menyasar akar permasalahan Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan SAKIP;
- Belum terdapat kebijakan reward dan punishment yang didasarkan pada hasil evaluasi SAKIP internal, sehingga hasil evaluasi belum cukup efektif dalam mendorong peningkatan implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah.

d) **Indikator Penilaian Indeks Pelayanan Publik**



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Barru pada tahun 2025 mendapat nilai 3,02 atau kategori B-. Perolehan nilai IPP tahun 2025 mengalami penurunan dari tahun 2024 dimana tahun 2024 nilai IPP Kabupaten Barru berada pada angka 3,48. Indeks Pelayanan Publik mengalami penurunan disebabkan beberapa faktor antara lain:

- 8) Dokumen Standar Pelayanan Pada unit penyelenggara pelayanan publik yang belum dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala;
- 9) Masih banyaknya Unit Penyelenggara Pelayanan belum melibatkan peran serta masyarakat;
- 10) Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik yang belum merata di seluruh unit kerja pelayanan publik;
- 11) Hasil Forum Konsultasi Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat belum sepenuhnya dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyusunan dokumen Standar Pelayanan;
- 12) Sarana Prasarana Ramah Kelompok rentan pada setiap unit layanan publik yang belum lengkap dan memadai;
- 13) Layanan Aduan masyarakat yang belum optimal.
- 14) Masih kurangnya Inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

e) Indeks Pemerintahan Digital

Indeks Pemerintahan Digital merupakan indikator baru dan belum pernah dilakukan penilaian pada tahun 2025 sehingga belum bisa dilakukan analisis terkait faktor keberhasilan maupun faktor kegagalan untuk pencapaian nilai pada Indeks Pemerintahan Digital pada tahun 2025

f) Nilai Maturitas SPIP

Hasil evaluasi menunjukkan secara umum proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kabupaten Barru Tahun 2025 telah sesuai dengan langkah-langkah proses penilaian mandiri maturitas



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, sebagaimana ditetapkan dalam pedoman (Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D), berdasarkan KKE Proses Lead SPIP Terintegrasi Kabupaten Barru Catatan Hasil Evaluasi Kabupaten Barru adalah sebagai berikut:

- Tahap persiapan mendapatkan skor 16,98% dan tidak mendapatkan skor maksimal disebabkan pemaparan Rencana Penilaian Mandiri (RPM) belum dihadiri seluruh pejabat dari Perangkat Daerah sampel, dan pemaparan RPM tidak didokumentasikan;
- Tahap pelaksanaan mendapatkan skor 54,67% disebabkan Pelaksanaan PK selesai 29 Juni 2025 sementara Laporan PM terbit tanggal 14 Juli 2025;
- Tahap pelaporan mendapatkan skor 17,44%, disebabkan Rekomendasi perbaikan belum diarahkan untuk satu level di atasnya.

D. Alternative Solusi

c) Indikator Nilai SAKIP

Berdasarkan hasil penilaian SAKIP Pemerintah Kabupaten Barru dan catatan hasil evaluasi dari Kementerian PANRB alternative solusi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barru adalah sebagai berikut:

5) Komponen Perencanaan Kinerja

- Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah melakukan reviu dokumen perencanaan dengan melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah selaku Unit/ Stakeholder Koordinator Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Inspektorat selaku Stakeholder Pengawasan dan Evaluator Internal Kabupaten Barru agar dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah lebih berorientasi pada hasil (outcome) dan selaras dengan mandat serta tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- Pemerintah Daerah melakukan penyempurnaan indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria SMART dan prinsip kecukupan



pengukuran, sehingga indikator yang ditetapkan mampu mengukur pencapaian kinerja secara tepat dan mendukung penilaian kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah secara akuntabel

- Pemerintah Kabupaten Barru melakukan menyempurnakan penyusunan pohon kinerja pada tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021, dengan memperkuat hubungan logis antar kondisi, penjabaran kondisi antara, serta penetapan Critical Success Factor yang jelas.

6) Komponen Pengukuran Kinerja

- Pemerintah menyelaraskan Daerah dokumen agar IKU Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya, Renstra dan khususnya Perjanjian Kinerja sehingga IKU dapat berfungsi secara optimal sebagai dasar pengukuran kinerja.
- Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah agar melakukan peninjauan dan penyempurnaan formulasi indikator IKU yang belum tepat, sehingga indikator yang digunakan benar-benar mencerminkan kinerja yang diharapkan dan dapat diukur secara akurat.
- Pemerintah Daerah agar meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi serta melengkapi monev rencana aksi dengan analisis hambatan dan faktor pendukung kinerja, sehingga monev dapat dimanfaatkan secara efektif sebagai sarana dialog kinerja dan perbaikan berkelanjutan.

7) Komponen Pelaporan Kinerja

- Pemerintah Daerah Kabupaten Barru agar meningkatkan kualitas penyusunan LAKIP memastikan konsistensi dengan dan keandalan data kinerja antar tabel, menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan capaian regional dan nasional, serta



memperkuat analisis keberhasilan, kegagalan, faktor pendukung, dan hambatan kinerja secara komprehensif sebagai dasar perbaikan berkelanjutan;

- Pemerintah Daerah Kabupaten Barru agar memanfaatkan LAKIP secara optimal perencanaan berikutnya, sebagai kinerja khususnya dasar tahun dalam penetapan target kinerja yang lebih menantang dan realistis, sehingga mendorong peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah secara berkelanjutan

8) Komponen Evaluasi Internal

- Pemerintah Daerah agar meningkatkan kualitas laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan menyusun rekomendasi yang lebih spesifik, terarah, dan menasar langsung akar Perangkat permasalahan Daerah dalam mengimplementasikan SAKIP;
- Pemerintah menetapkan dan Daerah dalam agar menerapkan kebijakan reward dan punishment yang berbasis pada hasil evaluasi SAKIP internal, sehingga evaluasi dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mendorong peningkatan kinerja dan implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah.

d) Indikator Indeks Pelayanan Publik

7. Melakukan monitoring dan evaluasi Dokumen Standar Pelayanan serta mendorong seluruh unit penyelenggara pelayanan publik untuk melakukan update dokumen Standar Pelayanan secara berkala;
8. Mewajibkan seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dalam melaksanakan Forum Konsultasi Publik serta menjadikan Forum Konsultasi Publik menjadi sarana aduan dan masukan masyarakat dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik;
9. Melengkapi sarana dan prasarana ramah kelompok rentan pada setiap unit penyelenggara pelayanan;



10. Meningkatkan kualitas dan kapabilitas SDM penyelenggara Pelayanan Publik;
11. Peningkatan layanan aduan masyarakat dalam perbaikan pelaksanaan pelayanan publik.
12. Mendorong seluruh unit penyelenggara pelayanan publik dalam hal menciptakan inovasi untuk mempermudah akses pelayanan.

e) Indeks Pemerintahan Digital

Indeks Pemerintahan Digital merupakan salah satu indikator baru pada dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Barru. **Indeks Pemerintahan Digital (IPD)** adalah sebuah ukuran atau indikator kematangan yang digunakan untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah (pusat maupun daerah) memanfaatkan teknologi digital, data, dan budaya kerja digital untuk mentransformasi tata kelola pemerintahan dan layanan publik. **Indeks Pemerintahan Digital** merupakan kelanjutan dan evolusi dari Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang lebih komprehensif, mencakup penguatan tata kelola, teknologi, serta kompetensi digital ASN.

Beberapa alternatif solusi yang bisa dilakukan agar nilai Indeks Pemerintahan Digital Pemerintah Kabupaten Barru mampu memperoleh hasil sesuai target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan adalah sbeagai berikut:

- Melakukan evaluasi tingkat kematangan transformasi digital pemerintah, efektivitas pelayanan publik, tata kelola, dan kepercayaan masyarakat;
- Memenuhi 35 indikator penilaian Indeks Pemerintahan Digital, mulai dari kebijakan, tata kelola, hingga budaya digital;
- Melakukan penilaian bagaimana pemerintah beralih dari sekadar memberikan layanan online (e-government) menjadi pemerintahan yang terintegrasi (digital government);

- Melakukan pengumpulan data melalui evaluasi mandiri atau survei, yang kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh instansi terkait (seperti Kementerian PANRB dan Kominfo).

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu Program untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar dengan kata lain persentase capaian sasaran “sama atau lebih tinggi” dari capaian input (realisasi anggarannya). Rumus yang digunakan adalah

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
PAK_i : Pagu anggaran keluaran i
RAK_i : Realisasi anggaran keluaran i
CK_i : Capaian keluaran i

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas birokrasi yang responsif, adaptif, kolaboratif” berdasarkan tabel berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

Mewujudkan Manajemen Pemerintahan Yang Melayani, Baik Dan Bersih	Meningkatnya kinerja pemerintahan yang akuntabel dan pelayanan publik yang baik	Nilai SAKIP	Poin	62,83	62,57	99,59	567.059.894.786	465.197.883.933,48	82,04	99,18
		Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,01	3,02	75,31	6.231.757.560	3.503.526.716	56,22	99,25
		Indeks Pemerintahan Digital	Poin	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		Maturnas SPIP	Poin	3	3	100	4.027.037.970	1.526.907.350	37,92	99,62

Dari tabel perhitungan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya diatas menunjukkan bahwa anggaran yang digunakan untuk sasaran “Meningkatnya kualitas birokrasi yang responsif, adaptif, kolaboratif” telah efisien. Dari 4 (empat) Indikator kinerja yang dinilai terdapat 3 indikator yang sudah ditetapkan anggaran pada dokumen



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

Pemerintah Kabupaten Barru harus tetap mengoptimalkan dengan cara memikirkan kegiatan–kegiatan yang harus mampu Mewujudkan Manajemen Pemerintahan Yang Melayani, Baik Dan Bersih agar anggaran yang direncanakan dapat efektif dalam mencapai indikator kinerja sasaran yang ditetapkan.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Indikator kinerja

1. Nilai SAKIP
2. Indeks Pelayanan Publik
3. Indeks Pemerintahan Digital
4. Maturitas SPIP

diperoleh dari pelaksanaan 10 Program Prioritas seperti yang dicantumkan pada tabel berikut ini :

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
	Tujuan : Mewujudkan Manajemen Pemerintahan Yang Melayani, Baik Dan Bersih			
	Sasaran : Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Pelayanan Publik Yang Baik			
1	Program Pendaftaran Penduduk	118.011.200	111.315.795	94,33%
2	Program Pencatatan Sipil	55.128.400	54.540.286	98,93%
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.002.219.870	979.483.116	97,73%
4	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.331.302.100	1.322.818.337	99,36%
5	Program Penyelenggaraan Pengawasan	4.027.037.970	1.526.907.350	37,92%
6	Program Pelayanan Penanaman Modal	70.204.300	63.029.434	89,78%



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

7	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	363.031.200	286.108.535	78,81%
8	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	4.083.453.338	2.924.401.848	71,62%
9	Program Kepegawaian Daerah	774.673.790	637.266.831	82,26%
10	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.186.701.900	1.110.467.020	93,58%
	Total Anggaran	13.011.764.068	9.016.338.552	69,29%

Seluruh program diatas ditujukan untuk mencapai indikator kinerja tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Barru Periode Tahun 2025 – 2029 dengan target yang sudah ditetapkan. Disamping mampu melakukan cukup efisien dari sisi anggaran, target indikator kinerja Nilai SAKIP, Indeks Pelayanan Publik, Indeks Pemerintahan Digital dan Maturitas SPIP mampu mencapai target kinerja yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan.



**MISI 5 MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS PEREKONOMIAN YANG
BERDAYA SAING**

TUJUAN 5. MENINGKATNYA PRODUKTIFITAS EKONOMI DAERAH

Mengarahkan sumber daya dan upaya dalam mewujudkan optimalisasi potensi ekonomi lokal guna menciptakan transformasi ekonomi yang berdaya saing. Melalui strategi ini, kami berkomitmen untuk mengidentifikasi dan mengembangkan keunggulan ekonomi Kabupaten Barru, memanfaatkan serta mengintegrasikan sumber daya lokal dengan cara yang inovatif dan berkelanjutan.

Peningkatan investasi menjadi pilar utama dalam mendukung upaya ini, dengan mengundang investasi dalam skala lokal dan internasional untuk mendukung pertumbuhan sektor basis seperti sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Dengan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat terwujud, memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan. Selain itu dalam rangka mewujudkan kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Barru menempatkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu strategis pembangunan daerah pada misi ini. Strategi ini diwujudkan melalui optimalisasi potensi sumber-sumber penerimaan daerah yang berkelanjutan, inovatif, dan berkeadilan. Adapun sasaran strategis dari tujuan ini adalah :

SASARAN 5.1 MENINGKATNYA NILAI TAMBAH EKONOMI DAERAH

Indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran adalah **Pertumbuhan Ekonomi**

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target indikator adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu wilayah dalam memproduksi barang dan jasa, yang diukur dari perubahan PDRB atas dasar harga konstan dari tahun ke tahun. Data dirilis : BPS – Badan Pusat Statistik

1. Analisis Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja indikator “Pertumbuhan Ekonomi” pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
Meningkatnya Produktifitas Ekonomi Daerah		PDRB Perkapita	Juta Rupiah	56,26	56,39	100,23	Sangat Tinggi	BPS
	Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,74	5,16	89,90	Tinggi	BPS

Realisasi indikator kinerja untuk pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 sebesar 5,16 persen dari target sebesar 5,74 persen. Realisasi indikator kinerja pertumbuhan ekonomi berdasarkan data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat ketercapaiannya sebesar 89,90% dan masuk kategori capaian tinggi.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dan beberapa tahun terakhir;

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja indikator “pertumbuhan ekonomi” tahun 2025 dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2024			2025		
				Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya Produktifitas Ekonomi Daerah		PDRB Perkapita	Juta Rupiah	0	0		56,26	56,39	100,23
	Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,64	4,92	74,10	5,74	5,16	89,90

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya belum bisa dilakukan karena untuk indikator kinerja tujuan dan sasaran sebelumnya karena merupakan produk RPJMD periode baru. Sementara untuk Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kinerja



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

yang baik, meningkatnya capaian realisasi pada tahun 2024 sebesar 74,10 persen, meningkat 89,90 persen pada tahun 2025.

3. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja sampai dengan tahun ini dengan target RPJMD;

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari indikator “Pertumbuhan Ekonomi” sampai tahun 2025 dengan target RPJMD 2025 - 2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target (2030)	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Produktifitas Ekonomi Daerah		PDRB Perkapita	Juta Rupiah	56,39	108,75	51,85%
	Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,16	7,81	66,07%

Berdasarkan tabel diatas pencapaian realisasi kinerja indikator kinerja sasaran Pertumbuhan Ekonomi sampai dengan tahun 2030 belum mencapai target RPJMD yaitu sebesar 5,16% dibandingkan dengan target dalam RPJMD sebesar 7,81%. Capaian kinerja tahun ini jika disandingkan dengan target RPJMD sampai dengan tahun 2025 yakni sebesar 66,07%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari indikator “Pertumbuhan Ekonomi” Tahun 2025 dengan Realisasi nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Provinsi Tahun 2025	Capaian Kabupaten terhadap realisasi Provinsi	Realisasi Nasional Tahun 2025	Capaian Kabupaten terhadap realisasi nasional
Meningkatnya Produktifitas Ekonomi Daerah		PDRB Perkapita	Juta Rupiah	56,39	78,75	71,60%	83,74	67,33
	Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,16	5,43	95,02	5,11	100,98



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

Realisasi indikator kinerja Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 sebesar 5,16% persen, angka ini lebih rendah jika dibandingkan capaian realisasi provinsi sulawesi selatan untuk tahun 2025 sebesar 5,43% dengan capaian kinerja 95,02%. Namun jika dibandingkan dengan realisasi nasional untuk tahun 2025 lebih tinggi, dikarenakan nasional capaiannya sebesar 5,11% dengan capaian kinerja 100,98%

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Indikator kinerja “Pertumbuhan Ekonomi” diperoleh dari pelaksanaan 20 (Dua Puluh) Program Prioritas seperti yang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Program	Anggaran		Capaian
	Pagu	Realisasi	
Tujuan : Meningkatnya Produktifitas Ekonomi Daerah			
Sasaran : Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Daerah			
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	70,204,300.00	63,029,434.00	89.78%
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	174,606,100.00	150,529,145.00	86.21%
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	43,243,400.00	37,583,970.00	86.91%
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	459,617,685.00	455,626,148.00	99.13%
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	39,982,600.00	38,751,730.00	96.92%
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	262,721,130.00	258,511,937.00	98.40%
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	74,306,530.00	69,870,090.00	94.03%
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	169,101,200.00	144,673,012.00	85.55%
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	136,989,500.00	128,367,865.00	93.71%
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	80,531,700.00	66,050,720.00	82.02%
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	234,479,480.00	232,779,249.00	99.27%



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	53,105,900.00	50,954,683.00	95.95%
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	127,048,660.00	110,934,968.00	87.32%
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	7,697,900.00	7,657,616.00	99.48%
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	34,669,554.00	-	0.00%
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	419,678,840.00	248,204,579.00	59.14%
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1,109,735,273.00	677,790,565.00	61.08%
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1,283,988,440.00	836,144,825.00	65.12%
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	639,757,184.00	531,592,753.00	83.09%
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	5,907,200.00	5,827,415.00	98.65%
JUMLAH	5,427,372,576.00	4,114,880,704.00	75.82%

Seluruh program diatas ditujukan untuk mencapai indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Barru Periode Tahun 2025 – 2029 dengan target yang sudah ditetapkan. Berdasarkan tabel diatas terlihat capaian kinerja keuangan ditahun 2025 sebesar 75,82%.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya;

Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu Program untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar dengan kata lain persentase capaian sasaran “sama atau lebih tinggi” dari capaian input (realisasi anggarannya). Rumus yang digunakan adalah:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi
PAK_i : Pagu anggaran keluaran i
RAK_i : Realisasi anggaran keluaran i
CK_i : Capaian keluaran i

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran dalam pencapaian indikator kinerja Pertumbuhan Ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator or Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
Meningkatnya Produktifitas Ekonomi Daerah		PDRB Perkapita	Juta Rupiah	56,26	56,39	100,23	9,241,592,919.00	7,383,307,882.00	79.89%	99.20
	Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,74	5,16	89,90	5,427,372,576.00	4,114,880,704.00	75.82%	99.16

Dari tabel perhitungan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya diatas menunjukkan bahwa anggaran yang digunakan untuk pertumbuhan ekonomi dinilai efisien. Kedepannya, Pemerintah Kabupaten Barru harus lebih memikirkan kegiatan-kegiatan yang harus mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar anggaran yang rencanakan dapat efektif mencapai indikator kinerja sasaran yang ditetapkan.

7. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Realisasi indikator kinerja pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 sebesar 5,16 persen dari target yang ditetapkan sebesar 5,74 persen, sehingga tingkat ketercapaian mencapai 89,90 persen dan termasuk dalam kategori capaian tinggi. Meskipun demikian, terdapat selisih sebesar 0,58 persen dari



target yang ditetapkan sehingga perlu dilakukan analisis terhadap faktor penyebab dan langkah perbaikan yang dilakukan.

- Analisis Penyebab keberhasilan Capaian Kinerja
 - a. Stabilitasnya aktivitas sektor pertanian dan perikanan, yang masih menjadi sektor basis perekonomian daerah serta memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
 - b. Meningkatnya aktivitas UMKM dan perdagangan, seiring dengan berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti fasilitasi pemasaran, digitalisasi UMKM, dan pengembangan produk lokal.
 - c. Adanya dukungan program pemerintah daerah dan pemerintah pusat, terutama pada sektor pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ketahanan pangan, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha.
- Analisis Penyebab Belum Tercapainya Target
 - a. Fluktuasi harga komoditas dan hasil produksi sektor primer, yang mempengaruhi nilai tambah sektor pertanian dan perkebunan sebagai sektor unggulan daerah.
 - b. Belum optimalnya investasi daerah, baik investasi swasta maupun penanaman modal baru yang mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.
 - c. Terbatasnya infrastruktur pendukung ekonomi di beberapa wilayah, seperti akses listrik, jaringan distribusi, serta sarana logistik yang mempengaruhi efisiensi kegiatan ekonomi.
 - d. Produktivitas sektor ekonomi tertentu yang masih rendah, terutama pada sektor industri pengolahan dan sektor jasa yang belum berkembang secara optimal.
- Alternatif Solusi yang ditawarkan

Untuk meningkatkan capaian pertumbuhan ekonomi serta menutup kesenjangan terhadap target yang ditetapkan, pemerintah Kabupaten Barru harus melakukan beberapa langkah strategis, antara lain:

 - a. Mendorong penguatan sektor unggulan daerah, khususnya pertanian, perikanan, dan peternakan melalui peningkatan produktivitas, hilirisasi produk, serta pengembangan kawasan agropolitan dan agrowisata.



- b. Pengembangan dan pemberdayaan UMKM, melalui fasilitasi pelatihan kewirausahaan, peningkatan kualitas produk, sertifikasi halal, program peningkatan kemasan produk, serta pemasaran digital.
- c. Peningkatan iklim investasi daerah, dengan penyederhanaan perizinan, promosi potensi daerah, serta pengembangan kawasan ekonomi yang dapat menarik investor.
- d. Peningkatan pembangunan infrastruktur ekonomi, seperti akses jalan produksi, jaringan listrik, dan sarana pendukung distribusi untuk memperlancar arus barang dan jasa.
- e. Penguatan kolaborasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan masyarakat, guna menciptakan ekosistem ekonomi daerah yang lebih produktif dan berkelanjutan.

SASARAN 5.2. MENINGKATNYA DAYA SAING INDUSTRI PENGOLAHAN

Indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran adalah **Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB**

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target indikator adalah sebagai berikut:

Kontribusi sektor industri pengolahan secara operasional adalah persentase sumbangan nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di suatu wilayah dalam periode tertentu. Kontribusi sektor industri pengolahan adalah perbandingan antara nilai tambah bruto sektor industri pengolahan terhadap total PDRB atas dasar harga berlaku, dinyatakan dalam persentase. Data dirilis : Badan Pusat Statistik – BPS

1. Analisis Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja indikator “Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB” pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

Meningkatnya Produktifitas Ekonomi Daerah		PDRB Perkapita	Juta Rupiah	56,26	56,39	100,23	Sangat Tinggi	BPS
	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	5,29	6,33	119,66	Sangat Tinggi	BPS

Realisasi indikator kinerja untuk Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB pada tahun 2025 sebesar 6,33 persen dari target sebesar 5,29 persen. Realisasi indikator kinerja Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB berdasarkan data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat ketercapaiannya sebesar 119,66% dan masuk kategori capaian sangat tinggi.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dan beberapa tahun terakhir;

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja indikator “kontribusi sektor industry pengolahan terhadap PDRB” tahun 2025 dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2024			2025		
				Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya Produktifitas Ekonomi Daerah		PDRB Perkapita	Juta Rupiah	-	-	-	56,26	56,39	100,23
	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	-	-	-	5,29	6,33	119,66

Untuk kontribusi sektor industry pengolahan terhadap PDRB tidak dapat dihitung perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya belum bisa dilakukan karena untuk indikator kinerja tujuan dan sasaran sebelumnya karena merupakan produk RPJMD periode baru.



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

3. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja sampai dengan tahun ini dengan target RPJMD;

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari indikator “Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB” sampai tahun 2025 dengan target RPJMD 2025 - 2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target (2030)	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Produktifitas Ekonomi Daerah		PDRB Perkapita	Juta Rupiah	56,39	108,75	51,85%
	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	6,33	7,21	87,79

Berdasarkan tabel diatas pencapaian realisasi kinerja indikator kinerja sasaran Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB sampai dengan tahun 2030 belum mencapai target RPJMD yaitu sebesar 6,33% dibandingkan dengan target dalam RPJMD sebesar 7,21%. Capaian kinerja tahun ini jika disandingkan dengan target RPJMD sampai dengan tahun 2025 yakni sebesar 87,79%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari indikator “Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB” Tahun 2025 dengan Realisasi nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Provinsi Tahun 2025	Capaian Kabupaten terhadap realisasi Provinsi	Realisasi Nasional Tahun 2025	Capaian Kabupaten terhadap realisasi nasional
Meningkatnya Produktifitas Ekonomi Daerah		PDRB Perkapita	Juta Rupiah	56,39	78,75	71,60%	83,74	67,33
	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	5,16	12,50	41,28	19,07	27,05



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

Realisasi indikator kinerja Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB pada tahun 2025 sebesar 5,16% persen, angka ini sangat rendah jika dibandingkan capaian realisasi provinsi sulawesi selatan untuk tahun 2025 sebesar 12,50% dengan capaian kinerja 41,28%. Dan juga lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi nasional untuk tahun 2025 sebesar 19,07% dengan capaian kinerja 27,05%.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Indikator kinerja “Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB” diperoleh dari pelaksanaan 6 (Enam) Program Prioritas seperti yang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Program	Anggaran		Capaian
	Pagu	Realisasi	
Tujuan : Meningkatnya Produktifitas Ekonomi Daerah			
Sasaran : Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan			
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	197,075,850.00	193,740,283.00	98.31%
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	15,287,800.00	15,177,880.00	99.28%
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	39,668,200.00	39,319,191.00	99.12%
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	6,739,000.00	6,700,350.00	99.43%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1,129,434,870.00	1,110,278,970.00	98.30%
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	22,984,900.00	22,900,870.00	99.63%
JUMLAH	1,411,190,620.00	1,388,117,544.00	98.36%

Seluruh program diatas ditujukan untuk mencapai indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Barru Periode Tahun 2025 – 2029 dengan target yang sudah ditetapkan. Berdasarkan tabel diatas terlihat capaian kinerja keuangan ditahun 2025 sebesar 98,36%.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya;

Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu Program untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar dengan kata lain persentase capaian sasaran “sama atau lebih tinggi” dari capaian input (realisasi anggarannya). Rumus yang digunakan adalah:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi
PAK_i : Pagu anggaran keluaran i
RAK_i : Realisasi anggaran keluaran i
CK_i : Capaian keluaran i

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran dalam pencapaian indikator kinerja Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB dapat dilihat pada tabel berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
Meningkatkan Produktifitas Ekonomi Daerah		PDRB Perkapita	Juta Rupiah	56,26	56,39	100,23	9,241,592,919.00	7,383,307,882.00	79.89%	99.20
	Meningkatkan Daya Saing Industri Pengolahan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	5,29	6,33	119,66	1,411,190,620.00	1,388,117,544.00	98.36%	99.18

Dari tabel perhitungan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya diatas menunjukkan bahwa anggaran yang digunakan untuk Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB dinilai efisien. Kedepannya, Pemerintah Kabupaten Barru harus lebih memikirkan kegiatan–kegiatan yang harus mampu meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB agar anggaran yang rencanakan dapat efektif mencapai indikator kinerja sasaran yang ditetapkan.

7. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Realisasi indikator kinerja Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB pada tahun 2025 mencapai 6,33 persen, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 5,29 persen. Dengan demikian, tingkat ketercapaian indikator ini mencapai 119,66 persen dan termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan peran sektor industri pengolahan dalam struktur perekonomian daerah

- Analisis Penyebab keberhasilan Capaian Kinerja
 - a. Berkembangnya usaha kecil dan menengah di sektor industri rumah tangga, khususnya pada pengolahan makanan, produk olahan hasil laut, dan produk agroindustri.
 - b. Adanya dukungan program pemerintah dalam pengembangan industri dan UMKM, seperti peningkatan kualitas kemasan produk, sertifikasi halal, serta fasilitasi pemasaran produk lokal.
- Analisis Penyebab Belum Tercapainya target
 - a. Skala industri yang masih didominasi oleh industri kecil dan rumah tangga, sehingga kapasitas produksi dan daya saing masih terbatas.
 - b. Keterbatasan teknologi dan inovasi dalam proses produksi, yang mempengaruhi efisiensi serta kualitas produk.
 - c. Akses pasar dan jaringan distribusi yang belum optimal, khususnya untuk menjangkau pasar yang lebih luas.
 - d. Keterbatasan investasi di sektor industri pengolahan, terutama untuk pengembangan industri menengah dan besar.
- Alternatif Solusi yang ditawarkan
 - a. Penguatan hilirisasi komoditas unggulan daerah, melalui pengembangan industri pengolahan berbasis pertanian, perikanan, dan peternakan guna meningkatkan nilai tambah produk.
 - b. Peningkatan kapasitas pelaku industri dan UMKM, melalui pelatihan teknologi produksi, manajemen usaha, dan inovasi produk.

- c. Fasilitasi legalitas dan standarisasi produk, seperti sertifikasi halal, izin edar, serta peningkatan kualitas kemasan agar produk mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
- d. Pengembangan kemitraan usaha dan akses pasar, termasuk pemanfaatan platform digital serta dukungan promosi produk lokal.
- e. Mendorong investasi di sektor industri pengolahan, melalui penyediaan kawasan industri atau sentra industri kecil serta peningkatan kemudahan perizinan usaha.

SASARAN 5.3 MENINGKATNYA KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH

Indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran adalah **Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah**

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target indikator adalah sebagai berikut:

Rasio PAD terhadap APBD adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rasio ini menggambarkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya. Rasio PAD terhadap APBD adalah persentase Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan total pendapatan dalam APBD, yang mencerminkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan fiskalnya dari sumber pendapatan sendiri. Data Dirilis : BPK/BKAD

1. Analisis Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja indikator “Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah” pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
Meningkatnya Produktifitas Ekonomi Daerah		PDRB Perkapita	Juta Rupiah	56,26	56,39	100,23	Sangat Tinggi	BPS
	Meningkatnya kemandiria	Rasio PAD terhadap	%	12,97	13,95	107,56	Sangat Tinggi	BPS



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

	n fiskal daerah	Pendapatan Daerah						

Realisasi indikator kinerja untuk Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2025 sebesar 13,95 persen dari target sebesar 12,97 persen. Realisasi indikator kinerja pertumbuhan ekonomi berdasarkan data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat ketercapaiannya sebesar 107,66 persen dan masuk kategori capaian sangat tinggi.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dan beberapa tahun terakhir;

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja indikator “Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah” tahun 2025 dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2024			2025		
				Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya Produktifitas Ekonomi Daerah		PDRB Perkapita	Juta Rupiah	-	-	-	56,26	56,39	100,23
	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	-	-	-	12,97	13,95	107,56

Untuk Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah tidak dapat dihitung perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya belum bisa dilakukan karena untuk indikator kinerja tujuan dan sasaran sebelumnya karena merupakan produk RPJMD periode baru.

3. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja sampai dengan tahun ini dengan target RPJMD;

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari indikator “Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah” sampai tahun 2025 dengan target RPJMD 2025 - 2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini :



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target (2030)	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Produktifitas Ekonomi Daerah		PDRB Perkapita	Juta Rupiah	56,39	108,75	51,85%
	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	13,95	18,63	74,88

Berdasarkan tabel diatas pencapaian realisasi kinerja indikator kinerja sasaran Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah sampai dengan tahun 2030 belum mencapai target RPJMD yaitu sebesar 13,95% dibandingkan dengan target dalam RPJMD sebesar 18,63%. Capaian kinerja tahun ini jika disandingkan dengan target RPJMD sampai dengan tahun 2025 yakni sebesar 74,88%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari indikator “Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah” Tahun 2025 dengan Realisasi nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Provinsi Tahun 2025	Capaian Kabupaten terhadap realisasi Provinsi	Realisasi Nasional Tahun 2025	Capaian Kabupaten terhadap realisasi nasional
Meningkatnya Produktifitas Ekonomi Daerah		PDRB Perkapita	Juta Rupiah	56,39	78,75	71,60%	83,74	67,33
	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	13,95	8,37	166,67	13	107,31

Realisasi indikator kinerja Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2025 sebesar 13,95% persen, angka ini lebih rendah jika dibandingkan capaian realisasi provinsi sulawesi selatan untuk tahun 2025 sebesar 8,37% dengan capaian kinerja 166,67%. Dan juga lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi nasional untuk tahun 2025 sebesar 13% dengan capaian kinerja 107,31%.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Indikator kinerja “Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah” diperoleh dari pelaksanaan 6 (Enam) Program Prioritas seperti yang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Program	Anggaran		Capaian
	Pagu	Realisasi	
Tujuan : Meningkatnya Produktifitas Ekonomi Daerah			
Sasaran : Meningkatnya kemandirian fiskal daerah			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2,403,029,723.00	1,880,309,634.00	78.25%
JUMLAH	2,403,029,723.00	1,880,309,634.00	78.25%

Seluruh program diatas ditujukan untuk mencapai indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Barru Periode Tahun 2025 – 2029 dengan target yang sudah ditetapkan. Berdasarkan tabel diatas terlihat capaian kinerja keuangan ditahun 2025 sebesar 78,25%.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya;

Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu Program untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar dengan kata lain persentase capaian sasaran “sama atau lebih tinggi” dari capaian input (realisasi anggarannya). Rumus yang digunakan adalah:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi
PAKi : Pagu anggaran keluaran i
RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
CKi : Capaian keluaran i



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran dalam pencapaian indikator kinerja Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikat or Kinerj a	Satua n	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiens i
				Target	Realisa si	Capai an %	Angga ran	Realisa si	Cap aian %	
Meningka tnya Produktifit as Ekonomi Daerah		PDRB Perkap ita	Juta Rupiah	56,26	56,39	100,2 3	9,241, 592,91 9.00	7,383,30 7,882.00	79.8 9%	99.20
	Meningk atnya kemandi rian fiskal daerah	Rasio PAD terhad ap Penda patan Daerah	%	12,97	13,95	107,5 6	2,403, 029,7 23.00	1,880,3 09,634. 00	78.2 5%	99,27

Dari tabel perhitungan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya diatas menunjukkan bahwa anggaran yang digunakan untuk Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah dinilai efisien. Kedepannya, Pemerintah Kabupaten Barru harus lebih memikirkan kegiatan-kegiatan yang harus mampu meningkatkan Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah agar anggaran yang rencanakan dapat efektif mencapai indikator kinerja sasaran yang ditetapkan.

7. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Realisasi indikator kinerja Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2025 sebesar 13,95 persen, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 12,97 persen. Dengan demikian, tingkat ketercapaian indikator ini mencapai 107,66 persen dan termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan daerah dalam menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah sebagai salah satu indikator kemandirian fiskal daerah.

➤ Analisis Penyebab keberhasilan Capaian Kinerja

- Optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, melalui peningkatan pengawasan, intensifikasi, serta perbaikan sistem administrasi pemungutan pendapatan daerah.



- b. Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, yang berdampak pada meningkatnya potensi penerimaan dari sektor pajak daerah seperti pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, serta pajak lainnya.
- c. Peningkatan kinerja pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pemanfaatan aset daerah yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
- d. Adanya upaya digitalisasi layanan dan sistem pembayaran pajak daerah, yang mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.
- e. Koordinasi yang lebih baik antar perangkat daerah pengelola pendapatan, dalam rangka pemetaan potensi serta pengawasan terhadap sumber-sumber PAD.
- Analisis Penyebab Belum Tercapainya Target
 - a. Potensi PAD yang belum tergali secara optimal, terutama dari sektor-sektor ekonomi baru dan pemanfaatan aset daerah.
 - b. Tingkat kepatuhan sebagian wajib pajak dan retribusi yang masih perlu ditingkatkan, khususnya pada sektor usaha kecil dan menengah.
 - c. Ketergantungan pendapatan daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat yang masih relatif tinggi sehingga perlu terus meningkatkan kontribusi PAD.
 - d. Keterbatasan sistem pendataan dan pemutakhiran basis data potensi pajak dan retribusi daerah.
- Alternatif Solusi yang ditawarkan
 - a. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah, melalui pemutakhiran data objek dan subjek pajak serta peningkatan pengawasan pemungutan.
 - b. Penguatan sistem digitalisasi pengelolaan pendapatan daerah, termasuk penerapan sistem pembayaran non-tunai dan integrasi data pajak daerah.
 - c. Pemanfaatan dan optimalisasi aset daerah, melalui kerja sama pemanfaatan aset, pengembangan usaha daerah, serta peningkatan kinerja BUMD.



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

- d. Peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
- e. Pengembangan potensi ekonomi daerah, termasuk sektor pariwisata, perdagangan, dan industri lokal yang dapat memperluas basis penerimaan PAD



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat, atau dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan provinsi.

Skema tugas pembantuan menjadi salah satu strategi pelaksanaan pembangunan wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dilakukan karena tidak seluruh kewenangan dan fungsi pemerintahan dapat dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah Pusat, sehingga diperlukan pendelegasian tugas kepada daerah otonom agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau wilayah daerah.

Pelaksanaan tugas pembantuan dimaksudkan agar pemerintah daerah turut membantu Pemerintah Pusat dalam menjalankan kewenangannya di daerah, terutama apabila kewenangan tersebut berlokasi di daerah dan kementerian/lembaga memandang pembentukan instansi vertikal baru tidak efisien.

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas pembantuan, Pemerintah Pusat sebagai pemberi tugas menyediakan dukungan anggaran beserta pedoman pelaksanaannya melalui kementerian/lembaga terkait yang disalurkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Satuan Kerja (Satker) pemerintah daerah kabupaten/kota. Selanjutnya, pemerintah daerah berkewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pembantuan tersebut kepada pihak pemberi tugas.



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

3.1. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pelaksanaan Tugas Pembantuan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022, Tugas Pembantuan diartikan sebagai penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.

Peraturan Pemerintah tersebut juga menegaskan bahwa pemberian Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, serta pelayanan publik. Adapun tujuan pemberian Tugas Pembantuan adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, membantu penyelenggaraan pemerintahan, serta mendukung percepatan pembangunan daerah.

3.2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan di Kabupaten Barru dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru yang berganti nama menjadi Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Barru.

Tugas Pembantuan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Barru diterima dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian RI. Anggaran Tugas Pembantuan Urusan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru pada Tahun 2025 sebesar Rp 10.090.955.000,-. Adapun Program dan kegiatan Tugas Pembantuan yang



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

dilaksanakan yaitu :

Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

1. Optimalisasi Lahan

Program Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Mesin Pertanian

1. Persiapan Monev dan Laporan

Program Fasilitas Pupuk dan Pestisida

1. Penerimaan Pupuk Bersubsidi yang di validasi dan diverifikasi
2. Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida

Program Dukungan Manajemen

1. Layanan Manajemen Keuangan

3.3. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.3.1. Target Kinerja

Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru target Program/ kegiatannya serta target anggarannya sebagai berikut :

Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, target program/kegiatannya Tersedianya Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas atau 100% sedangkan target anggarannya Rp 10.039.355.000,- dari total anggaran yang diterima sebesar Rp 10.090.955.000,- jadi target anggarannya 100%; dengan rincian target kegiatan sebagai berikut :

- a. Perlindungan dan penyediaan lahan Untuk Pertanian, dengan anggaran sebesar Rp 9.910.825.000,- dengan target sebesar Rp 9.910.825.000,- atau 100%;
- b. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian dengan anggaran sebesar Rp 15.000.000,- dengan target sebesar Rp 15.000.000,- atau 100%;
- c. Fasilitas pupuk dan pestisida dengan anggaran sebesar Rp. 113.530.000,- dengan target sebesar Rp. 113.530.000,- atau 100%;



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

Program Dukungan manajemen, target kegiatan Layanan Manajemen Keuangan dengan anggaran sebesar Rp 51.600.000,- atau 100%.

3.3.2 Realisasi

Pada Dinas Pertanian Kabupaten realisasi Program/ kegiatannya serta realisasi anggarannya sebagai berikut :

Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas realisasi program/kegiatannya yaitu Tersedianya Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, sedangkan realisasi anggarannya Rp 9.829.268.000,- dari total anggaran yang diterima sebesar Rp.10.039.355.000,- jadi realisasi anggarannya 99,17 %; Adapun rincian dari realisasi per kegiatannya yaitu :

- Perindungan dan penyediaan lahan Untuk Pertanian, dengan anggaran sebesar Rp 9.910.825.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.829.268.000,- atau 99,17%;
- Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian, dengan anggaran sebesar Rp 15.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 14.930.000,- atau 99,53 %;
- Fasilitasi pupuk dan pestisida dengan anggaran sebesar Rp. 113.530.000,- dan realisasi sebesar Rp. 112.227.000,- atau 98,11 %

Program Dukungan manajemen, target kegiatan Layanan Manajemen Keuangan dengan anggaran sebesar Rp 51.600.000,- dan realisasi sebesar Rp. 40.648.220,- atau 78,75 %

Adapun capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan pusat yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru Urusan Pertanian dapat dilihat pada tabel berikut :



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

TABEL 3.1

LAPORAN REALISASI DANA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2025 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BARRU

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		REALISASI	
		JUMLAH	REALISASI	KEUANGAN	FISIK
1	2	3	4	5	6
	ANGGARAN DIPA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2025	10.090.955.000	9.997.073.220	99,07	100
I	PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS	10.039.355.000	9.829.268.000	99,17	100
A	PERLINDUNGAN DAN PENYEDIAAN LAHAN	9.910.825.000	9.956.425.000	99,17	100
1	Optimasi Lahan	9.910.825.000	9.829.268.000	99,17	100
B	PENGELOAAN SISTEM PENYEDIAAN DAN PENGAWASAN ALAT MESIN PERTANIAN	15.000.000	14.930.000	99,53	100
1	Persiapan Monev dan Pelaporan	15.000.000	14.930.000	99,53	100
C	FASILITASI PUPUK DAN PESTISIDA	113.530.000	112.227.000	98,11	100
1	Penerimaan Pupuk Bersubsidi yang di validasi dan diverifikasi	83.530.000	83.257.000	99,67	100
2	Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida	30.300.000	28.970.000	96,56	100
II	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	51.600.000	40.648.220	78,75	100



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		REALISASI	
		JUMLAH	REALISASI	KEUANGAN	FISIK
1	2	3	4	5	6
1	Layanan Manajemen Keuangan	51.600.000	40.648.220	78,75	100

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025

TABEL 3.2
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN
BARRU

NO.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian)	Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 21 Tahun 2020 Tanggal 01 September 2020 Mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 52 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.	1. Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas 2. Program Dukungan Manajemen	Kabupaten Barru	Dinas Pertanian	10.039.355.000	9.829.268.000	99,17	Tersedianya Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	100	
						51.600.000	40.648.220	78,75		100	

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025

3.4. Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota Tugas Pembantuan dari Daerah Provinsi yang Ditugaskan Kepada Daerah Kabupaten/Kota

Pada Pemerintah Kabupaten Barru tidak terdapat tugas pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Kabupaten atau tugas pembantuan dari Daerah Provinsi yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten/Kota.

3.5. Permasalahan dan Kendala

Dalam Melaksanakan Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru ada beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi baik dari aspek administrasi, keuangan maupun teknis kegiatan. Permasalahan dan Kendala tersebut yaitu :



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

Permasalahan :

- Keterbatasan kapasitas penyimpanan air dapat menyebabkan kekurangan air pada musim kemarau yang mempengaruhi perkembangan pertumbuhan tanaman.
- Kerusakan pada saluran irigasi, embung dan fasilitas irigasi pertanian lainnya.
- Kurangnya partisipasi petani dalam pengelolaan air irigasi pertanian seperti menjaga dan memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana pertanian yang diberikan.
- Pemberian bantuan sarana dan prasarana pertanian kepada petani.
- Kurangnya pengawasan penggunaan sarana dan prasarana pertanian.

3.6. Saran dan Tindak Lanjut

Saran dan tindak lanjut berisi masukan dan saran serta langkah tindak lanjut untuk penyelesaian permasalahan sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan tugas pembantuan ke depan. Adapun Saran dan Tindak Lanjut pada tugas Pembantuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yaitu :

- Peningkatan infrastruktur irigasi dapat meningkatkan efisiensi irigasi dan mengurangi kehilangan air.
- Perbaikan saluran irigasi dan embung pertanian dengan melakukan rehabilitasi jaringan irigasi dan Pembangunan embung pada kelompok tani secara bertahap dengan memperhatikan calon petani calon lokasi penerima.
- Peningkatan partisipasi petani dalam menjaga infrastruktur pertanian yang diberikan dengan memberikan pemahaman efisiensi penggunaan sarana dan prasarana pertanian melalui penyuluhan pertanian oleh penyuluh dan aparat setempat.



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

- Pemberian bantuan sarana dan prasarana pertanian dengan tetap mengikuti Petunjuk Teknis dan memperhatikan usulan Calon Petani dan Calon Lokasi melalui proposal serta melakukan monitoring terhadap kecocokan lokasi dan legalitas petani terutama harus masuk dalam database SIMLUHTAN sebagai salah satu ketentuan dalam pemberian bantuan kepada petani.
- Peningkatan pengawasan penggunaan sarana dan prasarana pertanian sehingga tepat sasaran terpelihara dan dimanfaatkan untuk sebaik baiknya pengembangan pertanian yang menghasilkan produksi pertanian yang berkualitas.



BAB IV

PENCAPAIAN SPM

4.1. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

b. Pendidikan Dasar

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan terbagi dua jenjang pendidikan yaitu :

- 1) Sekolah dasar yang melayani peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
- 2) Sekolah Menengah Pertama melayani peserta didik yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

c. Pendidikan Kesetaraan

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

4.1.2 Target Capaian SPM Oleh Daerah Urusan Pendidikan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, target dan indikator kinerja pencapaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

SINGGAH
di BARRU!

TABEL. 4.1
TARGET DAN INDIKATOR KINERJA CAPAIAN SPM BIDANG
PENDIDIKAN KAB. BARRU TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 100 % Setiap tahun	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7- 15 tahun yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang pendidikan
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun				
2	Pendidikan Kesenjangan	Jumlah Warga Negara Usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun				
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 5-6 tahun yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
		menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			sumber daya manusia	menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang akan dipenuhi)		
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun				
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 5-6 tahun yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

4.1.3 Hasil Capaian Urusan Pendidikan

Hasil pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2025 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru sebagai berikut :

TABEL 4.2
HASIL CAPAIAN SPM BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2025

No	Jenis pelayanan dasar	Hasil Capaian										
		Penerima Layanan Dasar (Bobot Nilai 80%)					Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot Nilai 20%)					Indeks Pencapaian SPM
		Indikator	Target	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian	Indikator	Target	Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Capaian	
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %	6.270	6.101	97,30	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100 %	6.101	6.101	100%	97,30
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100 %	29.154	28.591	98,06	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100 %	28.591	28.591	100%	98,06
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %	2.320	2.263	97,54	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100 %	2.263	2.263	100%	97,54

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2025

4.1.4 Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan

Alokasi anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersumber dari APBD dan APBN. Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru Tahun 2025 adalah sebagai berikut :



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

SINGGAH
di BARRU!

TABEL 4.3
ANGGARAN PENDIDIKAN TAHUN 2025

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN
1.	Alokasi Anggaran Pendidikan	Rp. 48.958.792.417,00
2.	Total Belanja Langsung	Rp. 298.935.643.143,90
3.	Persentase Alokasi	16,37 %

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2025

Adapun rincian anggaran untuk penerapan dan pencapaian SPM Tahun 2025 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu:

TABEL 4.4
RINCIAN ANGGARAN SPM URUSAN PENDIDIKAN TAHUN 2025

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Alokasi PAUD	Rp. 10.111.936.350,00	Rp. 9.508.935.528	94,04
2	Alokasi Pendidikan Dasar	Rp. 36.301.367.467,00	Rp. 32.883.113.772	90,43
3	Alokasi Pendidikan Kesetaraan	Rp. 2.545.488.600,00	Rp. 2.390.874.378	93,93

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2025

4.1.5 Dukungan Personil Urusan Pendidikan

Sumber daya aparatur pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru digambarkan sebagai berikut :

TABEL 4.5

**DAFTAR PEGAWAI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB.
BARRU BERDASARKAN GOLONGAN TAHUN 2025**

NO.	GOL	JENIS KELAMIN		
		L	P	JUMLAH
1.	GOL. IV	17	8	25
2.	GOL. III	7	14	21
3.	GOL. IX	3	1	4
4.	GOL. II	4	2	6
JUMLAH		31	25	56

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2025

4.1.6 Kendala, Permasalahan dan Solusi Urusan Pendidikan

a. Permasalahan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka telah dilakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam rangka penerapan dan pemenuhan SPM Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya ketersediaan basis data sebagai dasar penghitungan dalam penerapan dan pemenuhan SPM Bidang Pendidikan, terlebih untuk data eksternal yang bersifat lintas sektoral.
- 2) Sebaran anak sekolah belum merata (wilayah perkotaan dan pedesaan).
- 3) Angka putus sekolah masih terjadi pada keluarga kurang mampu.
- 4) Kekurangan guru pada sekolah tertentu.
- 5) Ketimpangan distribusi guru antar kecamatan.
- 6) Masih ada guru belum tersertifikasi.
- 7) Kompetensi pedagogik belum merata.
- 8) Keterbatasan laboratorium dan perpustakaan.
- 9) Akses internet belum merata.



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

- 10) Standar sanitasi sekolah belum seluruhnya memenuhi standar.
- 11) Nilai literasi dan numerasi belum merata.
- 12) Minimnya budaya baca.
- 13) Rendahnya partisipasi orang tua dalam pendidikan.
- 14) Masih belum meratanya akses pada Pendidikan Kesetaraan sehingga belum dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat.

b. Solusi

Upaya pemecahan atas permasalahan yang dihadapi dalam rangka penerapan dan pemenuhan SPM Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan data eksternal lintas sektor melalui Tim Pokja SPM Kabupaten dengan melibatkan berbagai instansi/unsur yang terkait dalam proses verifikasi dan validasi data.
- 2) Pemetaan kebutuhan sekolah berbasis desa
- 3) Integrasi data dengan Dukcapil untuk memastikan anak usia sekolah terdata.
- 4) Redistribusi guru berbasis analisis kebutuhan.
- 5) Pelatihan berkelanjutan (In House Training & komunitas belajar).
- 6) Pemanfaatan platform digital pembelajaran.
- 7) Optimalisasi Dana DAK Fisik Pendidikan.
- 8) Kerja sama CSR perusahaan sekitar.
- 9) Program sekolah ramah anak dan sanitasi layak.
- 10) Program peningkatan literasi dan numerasi berbasis sekolah.
- 11) Pendampingan implementasi Kurikulum Merdeka.
- 12) Memperluas akses dan meningkatkan kualitas Pendidikan Kesetaraan serta pemberian bantuan/beasiswa Paket A, B, dan C.



4.2 BIDANG URUSAN KESEHATAN

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar
4. Pelayanan kesehatan balita sesuai standar
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar
9. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus sesuai standar
10. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar
11. Pelayanan kesehatan orang terduga TBC sesuai standar
12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)

4.2.2 Target Capaian SPM oleh Daerah Urusan Kesehatan

1) Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar

Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar adalah Pelayanan antenatal yang diberikan kepada ibu hamil dengan standar kuantitas kunjungan 6 kali selama periode kehamilan yakni satu kali trimester pertama, dua kali trimester kedua dan tiga kali trimester ketiga dengan standar kualitas yang memenuhi kriteria 10T dan pelayanan ultrasonografi. Tahun 2024 jumlah sasaran ibu hamil 2370 dengan capaian 2292 (70%), pada tahun 2025 jumlah sasaran ibu hamil 3259 dengan capaian 2041 (63%) . Indikator ini turun jika dibandingkan tahun 2024. Cakupan pelayanan kesehatan dalam pemeriksaan ibu hamil K6 (kunjungan 6 kali 1,2,3) sesuai standar belum mencapai target disebabkan



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

karena sasaran pusdatin terlalu tinggi, pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (K4) dipengaruhi oleh jumlah K1 murni yang rendah yaitu 1669 (51,21%), kesalahan pengelola dalam menentukan jumlah sasaran, ada ibu hamil yang merupakan pendatang, hamil diluar nikah, ibu hamil sibuk serta malu karena jumlah kehamilan yang dekat dan jumlah anak yang banyak serta masih ada wilayah yang sulit di akses seperti daerah pegunungan.

Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan ibu hamil adalah:

- Orientasi dan Edukasi Petugas untuk Pelayanan Catin di Puskesmas
- Pertemuan Pengkajian Audit Maternal BOK Kabupaten
- Pengadaan Stiker P4K
- Pelaksanaan Kelas ibu hamil
- Workshop Penguatan Jejaring & Pendamping Ibu Hamil Resiko Tinggi bagi Kader
- Pemantauan Bumil Resti
- Pemantauan Ibu Hamil Trimester III
- Pemantauan Ibu Hamil Yang Tidak Rutin Periksa Kehamilan
- Pemberian Suplement Zink penderita diare bagi bumil
- Sweeping Ibu Hamil Baru & Bumil Resti
- Kunjungan Rumah Bumil K4
- Pelacakan Bumil K1
- Pelayanan ANC di Posyandu
- Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil di Posyandu
- Pendampingan calon pendonor darah dalam rangka mendukung P4K
- Skreening golongan darah, protein urine dan HB pada Ibu Hamil
- Sweeping Suntikan TT pada Ibu Hamil
- Pelacakan Pada Bumil Menjelang Persalinan
- Deteksi dini kehamilan pada pengantin baru



- Screening Hepatitis pada Ibu Hamil
- Pemeriksaan HIV dan shypilis pada ibu hamil

2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar

Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar adalah pelayanan persalinan yang meliputi persalinan normal dan persalinan komplikasi dengan persalinan dilakukan difasilitas pelayanan kesehatan dan ditolong oleh tim paling sedikit satu orang tenaga medis dan dua orang tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dengan mengacu pada acuan persalinan normal sesuai standar dan buku saku pelayanan kesehatan ibu di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan untuk standar persalinan komplikasi. Tahun 2024 jumlah sasaran ibu bersalin 3251 dengan capaian 2379 (73%), tahun 2025 jumlah sasaran ibu bersalin 3239 dengan capaian 2195 (68%). Permasalahan dikarenakan ada ibu bersalin mendapatkan pelayanan bukan oleh tenaga kesehatan dan diluar faskes, ada ibu yang bersalin ke daerah lain, kendala biaya dan sosial budaya.

Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan ibu bersalin adalah:

- Peningkatan Kapasitas SDM Antenatal Care (ANC)
- Penguatan Manajemen Aktif Kala III kaitannya dengan pendarahan dalam proses persalinan
- Rumah tunggu kelahiran
- Pemantauan Ibu Nifas
- Sweeping ibu nifas dan neunatus
- Kegiatan rujukan persalinan

3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan kesehatan neonatal esensial dengan standar kuantitas kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal yakni kunjungan neonatal 1 (KN1), Kunjungan neonatal 2 (KN2), kunjungan neonatal 3



(KN3) dengan standar kualitas perawatan neonatal esensial saat lahir dan setelah lahir. Pada tahun 2024 jumlah sasaran bayi baru lahir 3091 dengan capaian 2342 (76%). Tahun 2025 jumlah sasaran Bayi Baru Lahir 3080 dengan capaian 2154 (70%) . Indikator ini menurun capaiannya dibanding tahun sebelumnya ini di sebabkan karena sebagian ibu yang datang melahirkan kemudian kembali ke daerah dimana suami bekerja, kurangnya informasi mengenai pelayanan bayi baru lahir, akses ke fasyankes sulit serta sosial budaya.

Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan bayi baru lahir adalah:

- Pemeriksaan neonatus atau pelayanan kesehatan bayi baru lahir/neonatal
- Pemantauan kesehatan neonatus termasuk neonatus risiko tinggi
- Orientasi Konselor ASI bagi Petugas Tkt. Kabupaten
- Orientasi Pemberian Makanan Bayi dan Anak Tkt. Kabupaten
- Pelacakan kasus kematian ibu dan bayi
- Pemantauan bayi 9-15 bulan ibu reaktif hepatitis
- Pemantauan neonatus & neonatus resti
- Pelacakan audit maternal/perinatal bayi/balita
- Pemantauan bayi resti

4) Pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan meliputi pelayanan kesehatan balita sehat dan balita sakit yang dimaksudkan untuk pemantauan tumbuh kembang anak balita. Tahun 2024 jumlah sasaran balita 15177 dengan capaian 12506 (82%), tahun 2025 jumlah sasaran balita 14866 dengan capaian 10824 (73%). Capaian Indikator mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan balita adalah:



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

- Pelaksanaan SDIDTK pada balita
- Pelaksanaan kelas ibu balita
- Penimbangan Rutin Bayi Balita di Posyandu
- Sweeping kegiatan SDIDTKA di Posyandu
- Pemeriksaan gigi dan Mulut di TK/PAUD
- Pelacakan Balita Yang tidak datang ke Posyandu dan yang tidak terdeteksi pertumbuhannya
- Pemberian PMT penyuluhan
- Sweping Vitamin A
- Pelaksanaan pelayanan Imunisasi dasar di posyandu

5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar

Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar adalah pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai dengan standar meliputi skrining kesehatan, tindak lanjut hasil skrining kesehatan dan pemberian imunisasi campak rubella, DT, td pada BIAS sesuai jadwal dan tingkat pendidikan siswa atau usia yang setara. Pada tahun 2024 jumlah sasaran usia pendidikan dasar 26779 dengan capaian 26400 (99%), tahun 2025 jumlah sasaran usia pendidikan dasar 28338 dengan capaian 27415 (97%). Indikator ini sudah sedikit menurun dari tahun sebelumnya karena jadwal pemeriksaan yang sulit disesuaikan dengan aktivitas belajar di sekolah, komunikasi yang kurang efektif antara pihak sekolah, penyelenggara kesehatan dan orang tua siswa menyebabkan kurangnya pemahaman dan dukungan terhadap program, beberapa siswa tidak berminat atau takut melakukan pemeriksaan kesehatan, tidak ada informasi dari sekolah jika ada siswa yang sudah tidak aktif lagi dan kerang efektifnya sweping bagi siswa yang tidak hadir di sekolah.

Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar adalah:

- Pelatihan dokter kecil



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

- Demonstrasi CTPS dan sikat gigi bersama di sekolah
- Pengukuran Kebugaran Jasmani anak sekolah
- Sosialisasi kesehatan reproduksi remaja
- Penyuluhan Kespro Remaja
- Pertemuan Tekhnis Penjaringan Anak Sekolah
- Pembinaan UKS dan kader kesehatan anak sekolah
- Pengukuran Kebugaran Jasmani anak sekolah
- Pemberian tablet Fe pada remaja putri
- Pemeriksaan berkala peserta didik
- Penyuluhan PHBS dan CTPS pada anak Sekolah Dasar
- Sweping pemberian tablet Fe pada remaja putri
- Pembinaan Kantin Sehat
- Pembinaan PKPR di sekolah
- Pemberian imunisasi BIAS

6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar

Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar adalah pelayanan kesehatan usia 15-59 tahun sesuai standar meliputi edukasi kesehatan tentang penyakit menular, kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, skrining faktor risiko penyakit menular dan tidak menular serta calon pengantin, skrining status imunisasi tetanus bagi WUS usia 15-39 tahun dan pemberian imunisasi td dan pelayanan KB. Tahun 2024 jumlah sasaran 122436 dengan capaian 114365 (93%), pada tahun 2025 jumlah sasaran 123600 dengan capaian 112774 (91%). Capaian Indikator mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan pemanfaatan pelayanan skrining kesehatan oleh penduduk usia produktif belum optimal dan belum merata di seluruh wilayah, masih kurang dalam pemantauan pengobatan, tindak lanjut hasil skrining belum optimal.



Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan usia produktif adalah:

- Pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut
- Skrining PPOK untuk usia ≥ 40 tahun.
- Pengukuran tekanan darah
- Pemeriksaan gula darah
- Pengukuran LILA
- Pemeriksaan Hb
- Pemeriksaan HIV dan Sifilis bagi calon pengantin jika berdasarkan hasil skrining memerlukan pemeriksaan lebih lanjut
- Pemeriksaan SADANIS dan IVA
- Pemeriksaan skrining kesehatan jiwa
- Status imunisasi TT bagi calon pengantin
- Pelayanan KB pada usia produktif adalah pelayanan KB yang dilakukan untuk PUS dengan 4T

7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar

Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar adalah pelayanan kesehatan usia 60 tahun ke atas sesuai standar meliputi edukasi perilaku hidup bersih dan sehat dan skrining faktor resiko pada usia lanjut. Tahun 2024 jumlah sasaran 22199 dengan capaian 15474 (70%), tahun 2025 jumlah sasaran 38863 dengan capaian 22226 (57%). Capaian Indikator sangat menurun dari tahun sebelumnya karena terbatasnya petugas dalam memberikan pelayanan dan belum optimalnya sosialisasi terkait pelayanan kesehatan lansia dan masih terbatasnya sarana pemeriksaan kesehatan lansia di semua sarana pelayanan kesehatan.

Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan lanjut usia adalah:

- Penguatan Pelayanan Posyandu Lansia



- Penguatan Petugas tentang Puskesmas Santun Lansia
- Pelayanan Kesehatan Lansia di Posyandu
- Kunjungan pelayanan homecare lansia resti
- Screening IVA
- Penimbangan BB, Pengukuran TB dan pemeriksaan TD pada lansia
- Screaning Penyakit Akibat Gangguan Kognitif, Degeneratif dan Mental Emosional
- Kunjungan kader posyandu lansia
- pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut
- anamnesis perilaku berisiko

8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar adalah pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi pengukuran tekanan darah, Pelayanan edukasi non farmakologi, Pelayanan farmakologi dan Konseling kepatuhan terapi non farmakologi dan farmakologi. Pada tahun 2024 jumlah sasaran 49979 dengan capaian 44431 (89%), tahun 2025 jumlah sasaran 48812 dengan capaian 36100 (74%). Indikator mengalami penurunan dari tahun sebelumnya hal ini dikarenakan rendahnya kunjungan penderita laki-laki usia produktif ke fasilitas kesehatan karena keterbatasan waktu dan mobilitas kerja, masih ada penderita yang tidak rajin datang untuk kontrol, keterbatasan SDM dan waktu pelayanan di beberapa puskesmas dengan beban sasaran yang tinggi.

Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan hipertensi adalah:

- Pemantauan Kegiatan Pelayanan Hipertensi di Posbindu
- Pendampingan Penderita Hipertensi melalui kunjungan rumah
- Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Hipertensi berbasis Web
- Workshop Program Informasi Posbindu PTM bagi petugas Puskesmas



- Pengukuran tekanan darah
- Pelayanan edukasi non farmakologi
- Pelayanan farmakologi
- Konseling kepatuhan terapi non farmakologi dan farmakologi

9) Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus sesuai standar

Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga penderita diabetes mellitus sesuai standar meliputi pemeriksaan klinis, pemeriksaan penunjang, terapi non farmakologi (edukasi gaya hidup sehat) dan terapi farmakologi. Pada tahun 2024 jumlah sasaran 3134 dengan capaian 3510 (112%), pada tahun 2025 jumlah sasaran 3020 dengan capaian 4531 (150%). Indikator pelayanan kesehatan penderita diabetes militus telah melebihi target. Hal ini dikarenakan sudah ada kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri ke FKTP secara berkala dan ketersediaan alat.

Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan penderita Diabetes Militus adalah:

- Pelatihan Tekhnis Faktor resiko DM Secara Mandiri dan Berkelanjutan bagi petugas Puskesmas
- Pendampingan Penderita PTM (Diabetes Melitus) melalui kunjungan rumah
- Pemeriksaan klinis
- Pemeriksaan penunjang
- Terapi non farmakologi (edukasi gaya hidup sehat)
- Terapi farmakologi

10) Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar

Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada ODJG berat sesuai standar bagi psikotik akut dan skizofrenia meliputi pemeriksaan



kesehatan jiwa, edukasi dan tata laksana. Pada tahun 2024 jumlah sasaran 439 dengan capaian 446 (102%), tahun 2025 jumlah sasaran 441 dengan capaian 440 (100%). Indikator pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa sudah melampaui target ini dikarenakan kegiatan pelacakan atau skrining kasus ODGJ berat sudah terlaksana dengan baik namun masih ada permasalahan yang dihadapi diantaranya sulitnya system rujukan dan masih kurangnya koordinasi lintas sektor.

Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan penderita Diabetes Militus adalah:

- Pemeriksaan kesehatan jiwa
- Edukasi
- Tata laksana

11) Pelayanan kesehatan orang terduga TBC sesuai standar

Pelayanan kesehatan orang terduga TBC sesuai standar adalah pelayanan kesehatan pada orang terduga TBC sesuai standar meliputi pemeriksaan klinis berdasarkan gejala dan tanda, pemeriksaan penunjang dan edukasi. Pada tahun 2024 jumlah sasaran 5103 dengan capaian 3669 (72%), pada tahun 2025 jumlah sasaran 4584 dengan capaian 4698 (102%) . Indikator pelayanan kesehatan orang terduga TBC mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya karena adanya sweeping bagi penderita TB, peran aktif dari petugas kesehatan dan masyarakat serta alat catridge TCM yang tersedia. Adapun permasalahan yang masih ditemui belum optimalnya penerapan kebijakan/regulasi tingkat daerah (RAD dan SK TP2TB), ketersediaan logistik catridge yang belum sesuai dengan target, keterbatasan sarana dan prasarana alat penunjang pemeriksaan (mikroskop dan mobile xray), masih ada tiga puskesmas yang masih kurang dalam pencatatan dan pelaporan (puskesmas lisu, puskesmas doi-doi, puskesmas pujananting), masih kurangnya dalam pemantauan pengobatan (pemeriksaan Follow Up untuk pasien bulan ke



dua, bulan ke lima dan AP).

Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan orang terduga TBC adalah:

- Mapping Up dan Validasi Kasus TB
- Workshop Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB)
- Ketuk Pintu TB Day
- Penjaringan Suspek TB
- Pelacakan Tb Kusta Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- Gerakan Serentak Penemuan Kasus Atau Deteksi Dini Penderita TB/Suspec TB
- Pengambilan Specimen Pada Penderita Suspec TB
- Pemeriksaan Kontak Serumah Penderita TB
- pemantauan kepatuhan minum obat pasien TB Paru

12) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)

Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi edukasi perilaku berisiko dan skrining. Pada tahun 2024 jumlah sasaran 3743 dengan capaian 2650 (71%), pada tahun 2025 jumlah sasaran 3259 dengan capaian 2862 (88%). Capaian indikator meningkat dari tahun sebelumnya. Indikator ini belum mencapai target dikarenakan stigma masyarakat untuk di skrining masih rendah, koordinasi lintas program yang masih kurang, pengetahuan dan edukasi dini masih kurang dan ketersediaan anggaran operasional yang rendah.

Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV adalah :

- Sosialisasi HIV Pada Populasi Kunci



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

- Pemantauan Triple Eliminasi HIV, Shipilis dan Hepatitis
- Pelacakan dan deteksi dini HIV/AIDS pada Ibu hamil di posyandu
- Screening HIV pada penderita TB
- Deteksi dini dan penemuan kasus HIV / AIDS
- Pemantauan dan tatalaksana kasus HIV

4.2.3 Hasil Capaian Urusan Kesehatan

Realisasi kegiatan penyelenggara urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sebagai berikut :

TABEL 4.6

CAPAIAN, TARGET DAN PEMBIAYAAN SPM DINAS KESEHATAN KAB. BARRU TAHUN 2025

NO	CAPAIAN 2025 (%)				CAPAIAN , TARGET DAN RENCANA PEMBIAYAAN SPM		
	JENIS PELAYANAN DASAR/ INDIKATOR	TARGET NASIONAL (%)	BATAS WAKTU		TARGET	PROGRAM KEGIATAN	TARGET NASIONAL (%)
1	Pelayanan kesehatan bagi ibu hamil	100	2025	63 %	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT /Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100
2	Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Bersalin	100	2025	68 %	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

3	Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi Baru Lahir	100	2025	70 %	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100
4	Pelayanan Kesehatan Bagi Balita	100	2025	73 %	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100
5	Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Pendidikan dasar	100	2025	97 %	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100
6	Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Produktif	100	2025	91 %	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

7	Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Lanjut	100	2025	57 %	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100
8	Pelayanan Kesehatan Penderita hipertensi	100	2025	74 %	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100
9	Pelayanan Kesehatan Bagi Diabetes Mellitus	100	2025	150 %	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100
10	Pelayanan Kesehatan Bagi ODGJ Berat	100	2025	100 %	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

11	Pelayanan Kesehatan Bagi orang terduga TBC	100	2025	102 %	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100
12	Pelayanan Kesehatan Bagi Penderita HIV	100	2025	88 %	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2025



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal untuk urusan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barru Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 4.7
CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN KESEHATAN
KAB. BARRU TAHUN 2025

Provinsi		: SULAWESI SELATAN		
Kabupaten/Kota		: BARRU		
Periode		: Januari s/d Desember		
NO	JENIS PELAYANAN DASAR	Sasaran	Realisasi	%
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3259	2041	63
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3239	2195	68
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3080	2154	70
4	Pelayanan Kesehatan Balita	14866	10824	73
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	28338	27415	97
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	123600	112774	91
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	38863	22226	57
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	48812	36100	74
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	3020	4531	150
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa berat	441	440	100



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

11	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan	4584	4698	102
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3259	2862	88

4.2.4 Anggaran Urusan Kesehatan

Realisasi urusan kesehatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah tahun 2025 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barru adalah 5 (Lima) program dan 18 (Empat Belas) kegiatan 56 sub kegiatan. Di Dinas Kesehatan Anggaran yang direncanakan pada perjanjian kinerja tahun 2025 untuk pencapaian sasaran peningkatan kualitas pelayanan kesehatan adalah sebesar **Rp. 131.333.944.312,-** dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar **Rp. 125.057.365.334,-**

4.2.5 Dukungan Personil Urusan Kesehatan

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan Kesehatan Kabupaten Barru sebanyak 1.081 orang dengan Ketersediaan tenaga sebagai berikut :

TABEL 4.8

KETERSEDIAAN TENAGA AHLI KESEHATAN

No	Ketersediaan Tenaga	Jumlah
1.	Dokter Ahli	20
2.	Dokter Umum	40
3.	Dokter Gigi	17
4.	Perawat	455
5.	Bidan	355
6.	Nutrisisionis	47
7.	Kefarmasian	55



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

SINGGAH
di BARRU!

8.	Sanitarian	41
9.	PKIP	23
10.	ATLM	28
Jumlah		1081

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

4.2.6 Kendala, Permasalahan dan Solusi Urusan Kesehatan

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah minimnya sumber daya, anggaran dan logistik. Sumber daya manusia pelayanan masih belum memenuhi kompetensi pelayanan sehingga masih terdapat kendala khususnya dalam pemberian pelayanan, masih adanya tugas rangkap pegawai, perlunya dukungan anggaran dalam pelaksanaan penerapan SPM serta pemenuhan logistik.

Solusi yang bisa dilakukan yakni mengikut sertakan personil pada bimbingan teknis, serta pelatihan-pelatihan/diklat standarisasi pelayanan dalam pekerjaan, perlu pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan dukungan sumber daya logistik.

4.3 BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

SPM Pekerjaan Umum merupakan penjabaran dari target yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Umum RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Umum di Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- Progam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten/Kota
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Kabupaten/Kota



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

4.3.2 Target Capaian SPM Oleh Daerah Urusan Pekerjaan Umum

Target dan realisasi pencapaian SPM bidang urusan Pekerjaan Umum pada kabupaten Barru sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten/Kota;
 - Jumlah penduduk di Kabupaten Barru yang memperoleh akses air minum layak pada tahun 2025 adalah 97,52 %
- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Kabupaten/Kota;
 - Jumlah penduduk di Kabupaten Barru yang memperoleh akses sanitasi layak pada tahun 2025 adalah 66,64%.

4.3.3 Hasil Capaian Urusan Pekerjaan Umum

Realisasi urusan Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

TABEL 4.9
TINGKAT CAPAIAN SPM URUSAN PEKERJAAN UMUM 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI 2025
1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase warga negara yang memperoleh akses air minum	83%	97,52%



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

SINGGAH
di BARRU!

2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	66,9%	66,46%

Sumber : Dinas PUTR-PERKIM Kab. Barru Tahun 2025

4.3.4 Alokasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum

TABEL 4.10

ALOKASI ANGGARAN URUSAN PEKERJAAN UMUM 2025

NO	SUMBER DANA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	TARGET FASILITASI	REALISASI FASILITASI
1.	APBD SANITASI	Rp. 474.815.170	Rp 399.793.923	50 Rumah Tangga	50 Rumah Tangga
2.	APBD AIR MINUM	Rp 400.059.200	Rp 392.303.207	2 Dokumen	2 Dokumen

Sumber : Dinas PUTR-PERKIM Kab. Barru Tahun 2025

4.3.5 Dukungan Personil Urusan Pekerjaan Umum

Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum tidak terlepas dari Dukungan Personil sebagai pelaksana program/ kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial. Dukungan Personil dalam proses penerapan dan pencapaian SPM terdiri dari PNS dan Non PNS yang rinciannya adalah sebagai berikut :



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

a. Berdasarkan kualifikasi pendidikan

SMU = 10 orang

D.3 = 2 orang

S.1 = 30 orang

S.2 = 13 orang

Total = 55 orang

b. Berdasarkan pangkat dan golongan

Golongan IV = 9 orang

Golongan III = 37 orang

Golongan II = 9 orang

Total = 55 orang

c. Berdasarkan Jabatan Struktural

Eselon II = 1 orang

Eselon III = 6 orang

Eselon IV = 2 orang

Total = 9 orang

4.3.6 Kendala, Permasalahan dan Solusi Urusan Pekerjaan Umum

Adapun permasalahan dan solusi terhadap setiap jenis pelayanan dasar bidang pekerjaan umum yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah sebagai berikut :

a) Kendala dan Permasalahan

- Pendataan, sinkronisasi dan validasi data terkait jumlah rumah akses sanitasi dan Air Minum tidak terkoordinasikan dengan baik.
- Kerjasama atau koordinasi dengan pihak desa/kelurahan tentang gambaran sanitasi atau Air Minum atau data BNBA/NIK
- SDM yang masih minim terkait pelaksanaan SPM Pekerjaan Umum (Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pelaporan)



b) Solusi

- Melaksanakan survey sanitasi dan Air Minum secara detail (BNBA/NIK)
- Penganggaran untuk kegiatan pendataan, verifikasi, fasilitasi dan koordinasi terkait SPM Pekerjaan Umum
- Untuk memenuhi kebutuhan data, maka perlu dibentuk tim kordinasi atau Tim Satgas yang difasilitasi oleh Kabupaten dalam melakukan sinkronisasi dan validasi data.
- Forum POKJA PKP dilaksanakan secara rutin.
- Perlu dilaksanakan bimbingan teknis SPM Pekerjaan Umum (Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pelaporan)

4.4 BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

SPM Perumahan Rakyat merupakan penjabaran dari target yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Daerah Kabupaten/ Kota terdiri atas:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

4.4.2 Target Capaian SPM Oleh Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

Target dan realisasi pencapaian SPM bidang urusan Perumahan Rakyat pada kabupaten Barru sebagai berikut :



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

- a) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana
 - Jumlah penduduk di Kabupaten Barru yang memperoleh rumah layak huni bagi korban bencana pada tahun 2025 adalah 100 %.
- b) Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah.
 - Jumlah penduduk di Kabupaten Barru yang memperoleh rumah layak huni bagi yang terkena relokasi program Pemerintah daerah 0 %.

4.4.3 Hasil Capaian Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

Realisasi urusan perumahan rakyat yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah sebagai berikut :

TABEL 4.11
TINGKAT CAPAIAN SPM URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN
PERMUKIMAN

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET 2023	REALISASI 2023
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	Persentase jumlah penduduk yang mendapatkan rumah layak huni bagi korban bencana	100%	100%
2.	Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi	Persentase jumlah penduduk yang mendapatkan rumah layak huni bagi	100%	(100%)*



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

SINGGAH
di BARRU!

	program pemerintah daerah	masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah		

**Layanan ini ditutup karena belum di anggarakan di tahun 2025*

4.4.4 Anggaran Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

TABEL 4.12

ALOKASI ANGGARAN URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

NO	PENDANAAN	PAGU
1	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH (DINAS PERUMAHAN RAKYAT)	65,984,833,284
2	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PERANGKAT DAERAH	1.328.349.900
	APBD	1.328.349.900
	A. APBD MURNI	0
	B. APBD DAU	1.328.349.900
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0

Sumber : Dinas PUTR-PERKIM Kab. Barru Tahun 2025

4.4.5 Dukungan Personil Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman tidak terlepas dari Dukungan Personil sebagai pelaksana program/ kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial. Dukungan Personil dalam proses penerapan dan pencapaian SPM terdiri dari PNS dan Non PNS



Dari Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Dinas PUTR-PERKIM yang perinciannya adalah sebagai berikut :

- a) PNS : 4 Orang
- b) CPNS : 1 Orang
- Staf Honorer : 3 Orang

Dalam mendukung Pelaksanaan Kegiatan di dukung Oleh Tim Satgas Rumah Bencana 8 Orang dan 2 orang Tenaga Fasilitator Lapangan.

4.4.6 Kendala, Permasalahan dan Solusi Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

Adapun permasalahan dan solusi terhadap setiap jenis pelayanan dasar bidang perumahan rakyat yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah sebagai berikut :

a. Kendala dan Permasalahan

- Keterbatasan jumlah SDM untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
- Penganggaran belum mengcover seluruh kegiatan dalam program urusan SPM Perumahan rakyat;
- Pendataan, sinkronisasi, dan validasi data terkait jumlah rumah yang terkena dampak bencana tidak terkoordinasikan dengan baik
- Pemerintah kabupaten Barru tidak memiliki program yang untuk memfasilitasi relokasi rumah

b. Solusi

- Perlu dilakukan langkah percepatan dan tepat untuk mendorong percepatan realisasi kegiatan.
- Penganggaran untuk kegiatan pendataan, verifikasi, fasilitasi dan koordinasi terkait SPM Perumahan Rakyat.



- Untuk memenuhi kebutuhan data, maka perlu dibentuk tim kordinasi atau Tim Satgas yang difasilitasi oleh Kabupaten dalam melakukan sinkronisasi dan validasi data.
- Forum komunikasi dan koordinasi dalam penyediaan dan fasilitasi relokasi rumah terdampak atau rawan bencana.

4.5 BIDANG URUSAN TRANTIBUMLINMAS

4.5.1 URUSAN SATPOL PP DAN DAMKAR

4.5.1.1 Jenis Pelayanan Dasar Urusan Satpol PP dan Damkar

Jenis urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari :

- a. Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- b. Pelayanan Penegakan Perda/Perkada.
- c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

4.5.1.2 Target Capaian SPM Oleh Daerah Urusan Satpol PP dan Damkar

Penerapan Standar Pelayanan minimal di Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 4.13
TARGET CAPAIAN SPM SATPOL PP DAMKAR DAN
PENYELAMATAN

NO	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Target
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penyelesaian Pelanggaran perda dan peraturan bupati/walikota	100%
3	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Dan Pengendalian Penanggulangan Bahaya Kebakaran	100 %

4.5.1.3 Hasil Capaian Urusan Satpol PP dan Damkar

Dalam realisasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah sebagai berikut :

- Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota mencapai 100 %
- Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota mencapai 100 %
- Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota mencapai 100 %.



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

Adapun realisasi / capaian Sub kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 4.14
REALISASI SUB KEGIATAN SATPOL PP – DAMKAR DAN
PENYELAMATAN

NO	JENIS PELAYANAN	INDOKATOR CAPAIAN	CAPAIAN	REALISASI	%
1.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	- Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	365 Kasus 6 Kasus 900 Laporan 48 dokumen	100% 100% 100 % 100 %



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
DI BARRU!*

2.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penyelesaian Pelanggaran perda dan peraturan bupati/walikota	- Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	7 Laporan 12 Laporan	100 % 100%
3	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Dan Pengendalian Penanggulangan Bahaya Kebakaran	- Respon Time - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota - - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	9,6 Menit 150 Laporan 6 Unit 1 Dokumen	100 % 100% 100 % 100%

Sumber : Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Tahun 2025



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

4.5.1.4 Anggaran Urusan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang terdiri dari belanja langsung sebanyak 3 Program 8 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan dengan Alokasi anggaran sebesar **Rp. 7.467.172.292,-** dan dapat terealisasi pada triwulan IV sebesar **Rp. 6.863.316.801,-** atau 91,91% persen.

4.5.1.5 Dukungan Personil Urusan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan

1. Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

➤ Pegawai Struktural

SD	=	1 Orang
SMU	=	34 Orang
Diploma	=	2 Orang
S1	=	27 Orang
S2	=	5 Orang
Jumlah	=	69 Orang

2. Berdasarkan Pangkat dan Golongan

➤ Pegawai Struktural

Golongan IV	=	5 Orang
Golongan III	=	27 Orang
Golongan II	=	36 Orang
Golongan I	=	1 Orang
Jumlah	=	69 Orang

3. Berdasarkan Jabatan Struktural

Eselon II	=	0 Orang
Eselon III	=	4 Orang
Eselon IV	=	8 Orang
Jumlah	=	12 Orang



4. Jabatan Fungsional

Fungsional pp pertama = 6 Orang

4.5.1.6 Kendala, Permasalahan dan Solusi Urusan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan

a. Permasalahan

1. Dukungan sarana dan prasarana perkantoran serta operasional yang belum memadai;
2. Kualitas Sumber Daya Manusia yang belum memadai dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan
3. Pelaksanaan program dan kegiatan belum sepenuhnya mengacu pada rencana matriks kegiatan dan masih bertumpuk pada akhir anggaran
4. Belum seimbangnya antara jumlah aparat dengan volume kerja
5. Belum terukurnya dengan jelas tingkat capaian kinerja yang dicapai (output/outcome kegiatan tidak jelas/tidak terukur) dalam penyusunan anggaran dan masih monoton.

b. Solusi

1. Seluruh program dan kegiatan harus mengacu pada rencana operasional kegiatan
2. Perlunya penempatan personil sesuai dengan beban kerja
3. Perlunya mengenali, memahami uraian tugas pokok dan fungsi
4. Mengedepankan fungsi koordinasi dalam menyusun rencana kerja
5. Meningkatkan kreatifitas dan inovasi dalam menyusun rencana kerja
6. Perlunya penambahan sarana dan prasarana operasional trantibum penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan
7. Perlunya penambahan personil Satpol PP, Damkar Dan Penyelamatan yang profesional.



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

4.5.2 URUSAN BPBD

4.5.2.1 Jenis Pelayanan Dasar Urusan BPBD

Jenis urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :

1. Pelayanan informasi rawan bencana.
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

4.5.2.2 Target Capaian SPM Oleh Daerah Urusan BPBD

Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 101 tahun 2018 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 4.15
TARGET CAPAIAN SPM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH

NO	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Target
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Persentase warga Negara yang memperoleh informasi rawan bencana	100 %
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Barru 2025



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

4.5.2.3 Hasil Capaian Urusan BPBD

Capaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan informasi rawan bencana mencapai 100%.
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana mencapai 100%.
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana mencapai 96.49%.

Adapun realisasi / capaian Sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 4.16
CAPAIAN PENERAPAN SPM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH

No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Capaian / realisasi		
1	Pelayanan informasi rawan Bencana	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	125 orang	100 %
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	1 Kawasan	100%
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1 Laporan	100%
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1 kawasan	100%
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	4 orang	100%
			Penyusunan Rencana Kontijensi	1 Dokumen	100%



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

SINGGAH
di BARRU!

			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	30 ORANG	100%
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	100%
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	355 Orang	58.31 %
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evaluasi korban Bencana Kabupaten/ Kota	150 Orang	132.67 %
			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	100%

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Barru 2025

4.5.2.4 Alokasi Anggaran Urusan BPBD

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan 2 (dua) program, 10 (sepuluh) kegiatan, 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan dengan pagu anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 3.006.400.049.-** (Tiga Milyar Enam Juta Empat Ratus Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah) direalisasikan sebesar **Rp. 2.754.553.156.-** (Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah), dipersentasikan sebesar 91,62%.

4.5.2.5 Dukungan Personil Urusan BPBD

Sumber daya BPBD Kabupaten Barru dapat dilihat dari jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sarana dan prasarana yang ada. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPBD Kabupaten Barru sampai Desember 2025 berjumlah 20 orang. Tim Reaksi Cepat (TRC) 24 orang dan Tenaga Sukarela 5 orang.

TABEL 4.17

SUMBER DAYA MANUSIA BPBD KAB. BARRU TAHUN 2025

No .	Eselon /Non Eselon	Pendidikan				Golongan					NO N AS N	Jenis Kelami n	
		S 2	S1	D 3	SL TA	I V	III	I I	I I	I X		P	L
1	II	1				1							1
2	III	1	3			3	1						4
3	IV	1	2				3					2	1
4	NON ESELON		2		3		3	2				3	2
5	JABATAN FUNGSION AL		4				4					1	3
6	PPPK		2							2		1	1
7	TRC		9	1	14						24	6	18
8	TENAGA SUKARELA		2	2	1						5	3	2
	Jumlah	3	22	3	20	4	11	2	0	2	29	16	32

Sumber : BPBD Kab. Barru Tahun 2025

4.5.2.6 Kendala, Permasalahan dan Solusi Urusan BPBD

Kendala Pengambilan data Form. SPM yang membutuhkan waktu yang lama karena memulai persuratan dan juga berita acara.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barru dalam penerapan SPM urusan bencana sebagai berikut :

1. Sulitnya memperoleh data penduduk, Data kependudukan tidak akurat atau tidak mutakhir, Akses terbatas, Mobilitas penduduk tinggi
2. SDM terbatas, kurang tenaga ahli kebencanaan dan pelatihan aparatur.
3. Pendanaan minim, penanggulangan bencana sering tidak menjadi prioritas dalam APBD.



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

4. Sarana prasarana kurang, posko, gudang logistik, sistem peringatan dini, dan peralatan evakuasi masih terbatas.
5. Koordinasi lemah, sinergi antar instansi belum optimal
6. Kesadaran masyarakat rendah, minim pemahaman risiko bencana, partisipasi dalam simulasi dan pelatihan masih kurang.

Berdasarkan masalah yang disebutkan terdapat beberapa solusi yang dilakukan yaitu:

1. Integrasi data antar instansi (Dukcapil, BPBD, desa/kelurahan).
2. Pelatihan rutin aparatur daerah tentang manajemen bencana.
3. Mengalokasikan dana cadangan khusus bencana dalam APBD.
4. Memanfaatkan CSR perusahaan lokal untuk mendukung kesiapsiagaan.
5. Pemeliharaan rutin peralatan evakuasi dan penyelamatan. Kerja sama dengan swasta untuk penyediaan sarana darurat.
6. Membentuk forum koordinasi lintas instansi (BPBD, TNI/Polri, Dinas Sosial, PMI). Menetapkan SOP bersama untuk penanganan bencana. Menggunakan sistem komunikasi terpadu saat darurat.
7. Sosialisasi rutin tentang risiko bencana di sekolah, desa, dan komunitas. Mengaktifkan relawan desa sebagai agen kesiapsiagaan.

4.6 URUSAN SOSIAL

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar Urusan Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diukur dalam 5 (lima) indikator pelayanan dasar yang akan dicapai secara



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

bertahap. Strategi dan arah kebijakan yang dituangkan Kabupaten Barru memiliki korelasi yang sangat jelas dengan 5 (lima) indikator SPM daerah provinsi yang akan dicapai secara bertahap, yang meliputi:

- 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti
- 2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti
- 3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti
- 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti
- 5) Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota

4.6.2 Target Capaian SPM Oleh Daerah Urusan Sosial

TABEL 4.18
TARGET SPM URUSAN SOSIAL

No.	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
	Indikator	Nilai (%)		
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	100	2025	Dinas/ Instansi Sosial
2	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	100	2025	Dinas/ Instansi Sosial
3	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	100	2025	Dinas/ Instansi Sosial
4	Persentase (%) gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	100	2025	Dinas/ Instansi Sosial
5	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten / Kota	100	2025	Dinas/ Instansi Sosial



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

4.6.3 Hasil Capaian SPM Urusan Sosial

TABEL 4.19

HASIL CAPAIAN PENERAPAN SPM URUSAN SOSIAL

NO	JENIS PELAYANAN DASAR DAN SUB KEGIATAN DASAR	CARA PERHITUNGAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		SATUAN KERJA/ LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	NILAI (%)	
1.	Program Rehabilitasi Sosial :				
	a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti	$\frac{10}{10} \times 100\%$	1. Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti.	100	
	b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	$\frac{10}{10} \times 100\%$	2. Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti.	100	
	c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	$\frac{10}{10} \times 100\%$	3. Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	100	
	d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	$\frac{10}{10} \times 100\%$	4. Persentase (%) Gelandangan dan Pegemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	100	
2.	Program Perlindungan dan Jaminan sosial : a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	$\frac{10}{10} \times 100\%$	5. Presentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Prov.	100	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

SINGGAH
di BARRU!

4.6.4 Anggaran Urusan Sosial

Alokasi Anggaran untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Barru di rinci sebagai berikut :

NO.	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2025
1	ALOKASI ANGGARAN URUSAN SOSIAL	Rp 272.358.500,-
2	TOTAL BELANJA LANGSUNG	Rp 1.536.762.230,-
3	PRESENTASI ALOKASI	17,72 %

Sumber : Dinas Sosial Kab. Barru Tahun 2025

Berikut merupakan alokasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian SPM pada Tahun 2025 di Dinas Sosial Kabupaten Barru :

1	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	Rp 93.920.300
2	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	Rp 23.068.600
3	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	Rp 14.047.750
4	Persentase (%) Gelandangan dan Pegemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	Rp 19.716.000
5	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Rp 94.921.000

Sumber : Dinas Sosial Kab. Barru Tahun 2025



4.6.5 Dukungan Personil Urusan Sosial

Capaian SPM Bidang Urusan Sosial tidak terlepas dari Dukungan Personil sebagai pelaksana program/ kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial. Dukungan Personil dalam proses penerapan dan pencapaian SPM terdiri dari PNS dan Non PNS yang perinciannya adalah sebagai berikut :

- a. PNS : 24 Orang
- b. Non PNS ;
 - Staf Honorer : 7 Orang
 - TKSK : 7 Orang
 - Tagana Aktif : 10 Orang
 - Pendamping Anak : 1 Orang

4.6.6 Kendala, Permasalahan dan Solusi Urusan Sosial

Mencermati pencapaian penerapan SPM Bidang Sosial pada Tahun 2025 yang ada pada tabel data realisasi kinerja SPM Dinas Sosial Kabupaten Barru, hal yang dapat disimpulkan secara umum bahwa dilihat dari aspek kuantitas capaian target sangat memuaskan, namun secara kualitas masih perlu ditingkatkan. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa indikator mutu layanan yang masih perlu dipenuhi agar kualitas pelayanan sosial melampaui standar pelayanan minimal.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Barru dalam tahapan penerapan SPM bidang sosial yaitu :

1. Sulitnya berkoordinasi dengan beberapa pihak yang terkait dengan data yang dibutuhkan dalam penerapan SPM
2. Masih terdapat beberapa indikator layanan dasar yang sulit dilaksanakan secara maksimal karena kurangnya pemahaman mengenai indikator mutu layanan yang terdapat pada Permendagri No. 59 Tahun 2021
3. Masih terdapat refocusing anggaran pada Tahun 2025 sehingga daerah



mengalami keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak semua indikator mutu layanan dasar dapat terpenuhi

4. Permasalahan teknis pada pengisian laporan SPM dalam aplikasi e SPM belum dapat mengakomodir laporan secara faktual di lapangan.

Berdasarkan masalah yang disebutkan di atas, terdapat beberapa solusi yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPM di daerah yaitu :

1. Melaksanakan pendataan 1 kali dalam 3 tahun dan pemutakhiran data setiap tahun terkait data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Mengusulkan penambahan anggaran pada program dan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung dan memudahkan pelayanan bidang kesejahteraan sosial;
4. Peningkatan SDM melalui bimbingan dan pelatihan teknis dalam rangka pemenuhan kompetensi minimal dalam rangka pelayanan penanganan PMKS sesuai SOP yang ditetapkan.
5. Dengan dibentuknya Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk memudahkan PMKS mengakses berbagai layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dikelola pemerintah sesuai dengan kebutuhan mereka.

4.7 PROGRAM DAN KEGIATAN

4.7.1 PROGRAM KEGIATAN URUSAN PENDIDIKAN

Dalam pelaksanaan peningkatan penerapan Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dilaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan wajib yang



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

merupakan pendukung program kegiatan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pemenuhan SPM urusan Pendidikan Tahun 2025, sebagai berikut :

TABEL 4.20
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PENDIDIKAN
TAHUN 2025

N O	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERS ENTA SE
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			48,958,792,417	44,732,923,678	91.37
1.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			23,167,666,539	20,746,171,589	89.55
	1	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah		53,377,200	34,155,000	63.99
	2	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS)		61,819,447	12,230,023	19.78
	3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan utilitas Sekolah		1,285,991,287	569,463,140	44.28
	4	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		204,827,975	48,576,865	23.72
	5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		1,288,633,130	1,054,595,702	81.84
	6	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		27,478,000	27,450,000	99.90
	7	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		208,000,000	0	0.00
	8	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik		173,652,300	70,517,020	40.61
	9	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		304,772,600	212,089,739	69.59
	10	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		186,747,700	168,000,000	89.96
	11	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		312,989,700	198,652,000	63.47
	12	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		2,528,645,700	2,486,710,500	98.34



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

	13	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		62,239,300	1,600,000	2.57
	14	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		16,443,330,000	15,862,131,600	96.47
	15	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		25,162,200	0	0.00
1.2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			13,133,700,928	12,086,942,183	92.03
	1	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		19,067,800	0	0.00
	2	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS)		20,367,698	9,762,349	47.93
	3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan utilitas Sekolah		454,226,079	342,412,930	75.38
	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		1,088,975,051	898,875,213	82.54
	5	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		8,228,120,000	7,730,409,500	93.95
	6	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		96,843,200	45,880,510	47.38
	7	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		21,878,800	0	0.00
	8	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		458,866,400	412,160,560	89.82
	9	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		22,796,500	18,000,000	78.96
	10	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		205,962,800	144,557,721	70.19
	11	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		2,498,306,400	2,484,883,400	99.46
	12	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		18,290,200	0	0.00
1.3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			10,111,936,350	9,508,935,528	94.04



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

	1	Pembangunan Ruang Kelas Baru	255,034,936	188,061,050	73.74
	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	358,785,114	247,501,612	68.98
	3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	3,732,022,800	3,695,829,616	99.03
	4	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	5,561,601,300	5,207,100,000	93.63
	5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan PAUD	123,334,100	106,832,000	86.62
	6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	81,158,100	63,611,250	78.38
1.4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		2,545,488,600	2,390,874,378	93.93
	1	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	2,545,488,600	2,390,874,378	93.93

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2025

4.7.2 PROGRAM KEGIATAN URUSAN KESEHATAN

Program dan Kegiatan wajib yang merupakan pendukung program kegiatan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan dalam pemenuhan SPM urusan kesehatan, antara lain :

TABEL 4.21
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN KESEHATAN
TAHUN 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERS ENTA SE
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	184.165.400	182.333.636	99%



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

			Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATA N PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	4.813.070	4.403.444	91%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	10.398.000	5.200.000	50%



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	13.312.672	10.793.516	81%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	69.265.600	68.451.616	99%
6	Pelayanan Kesehatan Pada usia produktif	Persentase usia 15 thn - 59 tahun mendapatkan skrening kesehatan sesuai standar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	111.672.000	105.054.500	94%
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Persentase usia 60 thn keatas mendapatkan skrening kesehatan sesuai	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	82.581.700	12.185.000	15%



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

		standar	MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Cakupan penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	165.076.250	150.807.900	91%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita Diabetes Militus (DM)] mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	12.497.250	9.734.700	78%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa berat	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat sesuai standar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	10.599.730	8.547.816	81%



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

SINGGAH
di BARRU!

11	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis ; dan	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita penyakit TBC BTA	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	202.338.700	192.681.500	95%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Pelayanan dan Penanganan Kelompok Resiko Tinggi (high risk group)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	124.503.750	114.840.850	92%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

4.7.3 PROGRAM KEGIATAN URUSAN PEKERJAAN UMUM

Program dan kegiatan yang terkait dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dapat dilihat pada tabel berikut :



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

SINGGAH
di BARRU!

TABEL 4.22
REALISASI PROGRAM KEGIATAN URUSAN PEKERJAAN UMUM
TAHUN 2025

No.	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR MINUM	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	400.059.200	392.303.207
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK	Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	87.601.460	78.407.805
		Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	134.595.500	128.387.000

Sumber : Dinas PUTR-PERKIM Kab. Barru Tahun 2025

4.7.4 PROGRAM KEGIATAN URUSAN PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN RAKYAT

Program dan kegiatan yang terkait dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut :

TABEL 4.23
REALISASI PROGRAM KEGIATAN URUSAN PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2025

NO	PROG RAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGARAN	REALISASI	PERSENTA SE
1		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		1.328.349.900	1.276494916	96,10 %
	1	Sub Kegiatan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani		3.682.200	2.825.600	76,74 %
	2	Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana		9.686.900	6.573.250	67,86 %
	3	Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi		15.500.000	9.704.800	62,61 %



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

SINGGAH
di BARRU!

		Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana			
	4	Sub Kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	21.980.200	12.665.600	57,62 %
	5	Sub Kegiatan Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	6.398.800	6.398.800	100 %
	6	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	921.145.800	910.524.266	98,85 %
	7	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	349.956.000	327.802.600	93,67 %

Sumber : Dinas PUTR-PERKIM Kab. Barru Tahun 2025

4.7.5 PROGRAM KEGIATAN URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. SATPOL PP DAN DAMKAR

Pelaksanaan suatu kebijakan yang ditentukan untuk diterapkan di daerah dalam tata penyelenggaraan pemerintah daerah saat ini, tidak terlepas dari program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM. Prinsip pengembangan dan penyelenggaraan program tersebut adalah untuk memperkuat kapasitas instansi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan. Hal ini merupakan program strategis bagi pemerintah dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah. Adapun program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2025 yaitu :



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
DI BARRU!*

TABEL 4.24
REALISASI PROGRAM KEGIATAN SATPOL PP, DAMKAR DAN
PENYELAMATAN

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN TASE
1	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		763.550.000	657.783.900	86,00%
			Pencegahan Gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini , Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	758.150.000	652.383.900	86,05%
2	Program Pencegahan Penanggulang an	Pencegahan Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan		1.252.612.000	1.232.423.900	98,39%



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

	Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Penanggulangan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota				
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.218.150.000	1.202.276.300	99 %
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	34.462.000	30.147.600	87 %

Sumber : Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Barru 2025

2. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Pelaksanaan suatu kebijakan yang ditentukan untuk diterapkan di daerah dalam tata penyelenggaraan pemerintah daerah saat ini, tidak terlepas dari program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM. Prinsip pengembangan dan penyelenggaraan program tersebut adalah untuk memperkuat kapasitas instansi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan. Hal ini merupakan program strategis bagi pemerintah dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah. adapun program dan kegiatan BPBD tahun 2025 yaitu :



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

SINGGAH
di BARRU!

Program dan kegiatan wajib yang merupakan pendukung program kegiatan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan pemenuhan SPM urusan ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, antara lain :

TABEL 4.25
REALISASI PROGRAM KEGIATAN BPBD TAHUN 2025

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	VOLUME	JUMLAH DANA DALAM DPA/DIPA (Rp.)	REALISASI		
				KEUANGAN (Rp.)	%	FISIK %
1	(2)	(3)	(5)	(10)	11 = 10/5 * 100	(12)
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	100%	752.746.060,00	716.946.005	95,24	99,12
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		37.739.000,00	35.223.567	93,33	100,00
	Sosialisasi, Komunikasi , Informasi dan Edukasi (IKIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Perje nis Kegiatan)	12 orang 5	37.739.000,00	35.223.567	93,33	100,00
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	242.067.700,00	233.795.635	96,58	100,00
	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana kab/kota	5 unit	4.994.000,00	4.994.000	100,00	100,00
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	30 orang	17.867.810,00	15.647.470	87,57	100,00
	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	2 Kawasa n	121.046.340,00	118.983.988	98,30	100,00
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	4 orang	2.083.800,00	1.802.000	86,48	100,00
	Penyusunan Rencana Kontijensi	1 Dokum en	8.084.170,00	7.932.495	98,12	100,00



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

	Pengendalian Operasi dan Penyediaan sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1	Laporan	5.456.180,00	4.393.877	80,53	100,00
	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	1	Kawasa n	82.535.400,00	80.041.805	96,98	100,00
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			439.400.690,00	415.067.480,0 0	94,46	96,49
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1	Dokum en	346.431.650,00	327.459.260,0 0	94,52	95,00
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	35 5	Orang	18.888.500,00	18.832.000	99,70	58,31
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evaluasi korban Bencana Kabupaten/Kota	15 0	Orang	29.922.100,00	26.157.093	87,42	132,67
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1	Laporan	44.158.440,00	42.619.127	96,51	100,00
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			33.538.670,00	32.859.323,00	97,97	100,00
	Pengelolaan dan Pemamfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1	dokume n	4.549.530,00	4.423.757	97,24	100,00
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1	Laporan	4.288.200,00	4.173.160	97,32	100,00
	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPSNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	1	dokume n	24.700.940,00	24.262.406	98,22	100,00

Sumber : BPBD Kab. Barru Tahun 2025



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

SINGGAH
di BARRU!

4.7.6 PROGRAM KEGIATAN URUSAN SOSIAL

Program kerja Dinas Sosial Kabupaten Barru Tahun 2025 tidak terlepas dari tujuan, sasaran dan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Strategis. Untuk merealisasikan tujuan, sasaran dan kebijakan tersebut perlu disusun program dan kegiatan. Adapun sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan berasal dari APBD Kabupaten Barru. Berikut rincian anggaran APBD Dinas Sosial Kabupaten Barru :

TABEL 4.26

REALISASI PROGRAM KEGIATAN BIDANG SOSIAL TAHUN 2025

NO	PRO G RAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	ANGARAN	REALISASI	PERSENTA SE
1		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		177.437.500	168.161.235	94,77 %
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		177.437.500	168.161.235	94,77 %
2		PROGRAM PENANGANAN BENCANA		234.098.300	173.284.733	74,02 %
	1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		94.921.000	59.539.673	62,73 %

Sumber : Dinas Sosial Kab. Barru Tahun 2025



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) pada dasarnya merupakan laporan atas pelaksanaan program kerja Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan (desentralisasi), Tugas Umum Pemerintahan, maupun Tugas Pembantuan, serta Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, setiap tahun Pemerintah Daerah di samping menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, juga berkewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai dasar evaluasi Pemerintah Pusat untuk menilai kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja guna mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, serta sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan ini merupakan hasil koordinasi, kerja sama, dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan pembangunan, mulai dari Pemerintah Daerah, DPRD, para pelaku perekonomian, hingga masyarakat luas sesuai dengan bidang, fungsi, dan tugas masing-masing, yang didukung oleh APBD serta sumber pendanaan lainnya yang sah.

Melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Barru Tahun 2025 ini, diharapkan dapat tergambar secara komprehensif capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah selama Tahun Anggaran 2025.

Dalam pelaksanaan pemerintahan hingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 ini tentu tidak luput



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

*SINGGAH
di BARRU!*

dari berbagai kekurangan maupun kekeliruan, baik yang mencakup substansi pemerintahan maupun redaksional laporan. Untuk itu, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Barru pada tahun-tahun mendatang.

Demikian Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa meridai segala langkah dan upaya kita dalam memajukan serta mensejahterakan masyarakat Kabupaten Barru. Amin.

Barru, 11 Maret 2026

BUPATI BARRU,


INA KARTIKA SARI